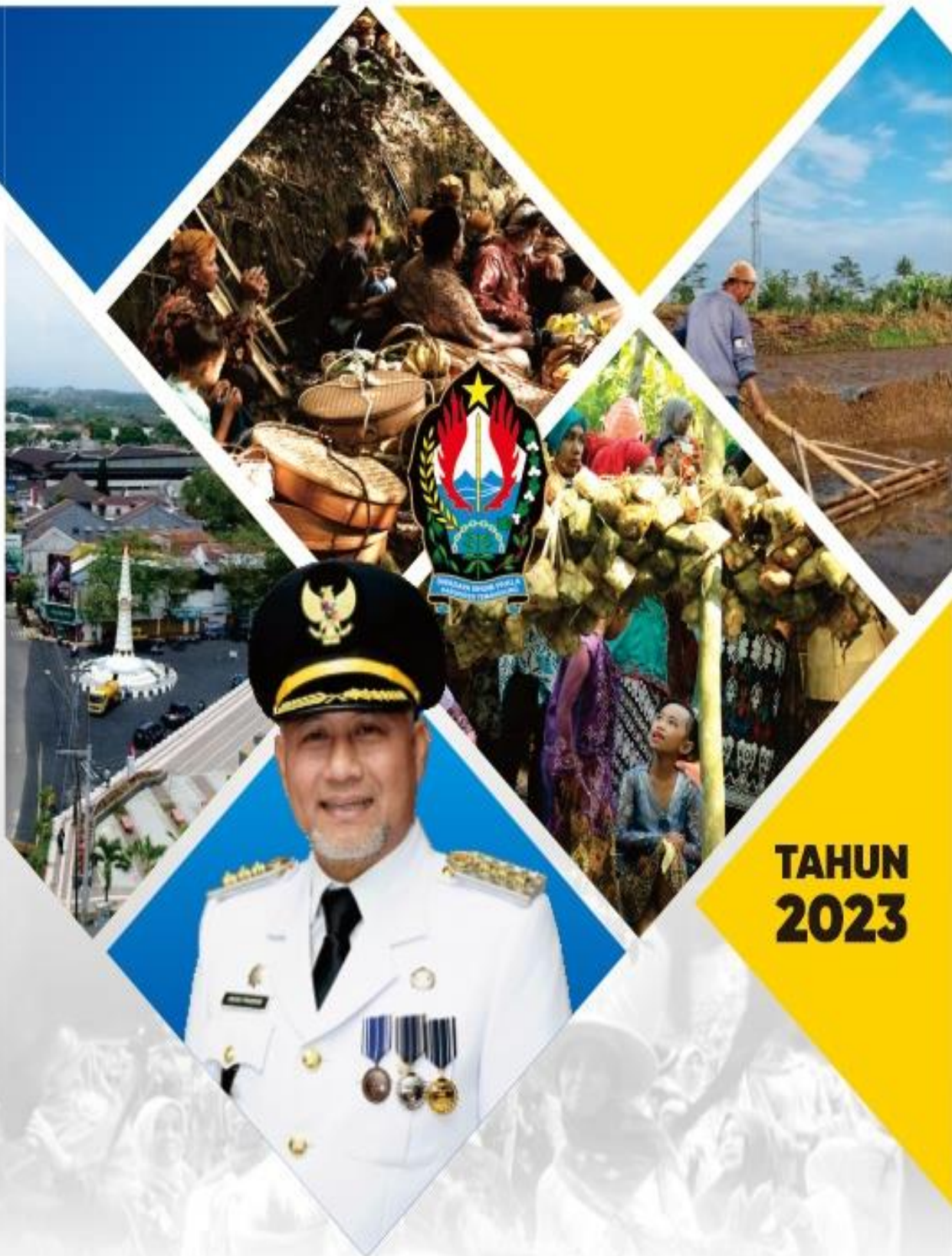




**LKPI KAB TEMANGGUNG TAHUN 2023**



**TAHUN  
2023**

**LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pj. Bupati Temanggung Tahun 2023 telah selesai disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung dalam Rapat Paripurna secara tepat waktu.

Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sesuai dengan regulasi tersebut, LKPJ dimaknai sebagai laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung serta memuat pertanggungjawaban kinerja yang secara langsung mengarah pada pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023, kebijakan strategis yang ditetapkan serta tindak lanjut Rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya. Selain itu, LKPJ ini memuat hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Laporan ini merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan koreksi melalui evaluasi secara menyeluruh terhadap berjalannya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta sebagai bentuk kepatuhan terhadap amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan LKPJ ini juga merujuk pada dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Kebijakan perencanaan dan penganggaran tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Keberhasilan dan kemajuan yang dicapai pada Tahun 2023 merupakan upaya bersama dari seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di Kabupaten Temanggung. Hal ini merupakan wujud implementasi inovasi dan kolaborasi yang terdiri dari Pemerintah Daerah, DPRD Kabupaten Temanggung, dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Temanggung secara luas. Patut disadari bahwa masih terdapat hal-hal yang memerlukan upaya peningkatan pada masa mendatang. Oleh karena itu, catatan-catatan strategis, saran dan masukan dari DPRD Kabupaten Temanggung merupakan rekomendasi penting bagi penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Temanggung. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2023 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Temanggung pada masa yang akan datang.

Demikian LKPJ Pj. Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2023 disampaikan, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan semua pihak yang telah membantu

dalam penyusunan LKPJ ini. Semoga dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Temanggung pada masa yang akan datang dan dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Temanggung. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi kita semua. Aamiin.

Temanggung, | Maret 2024

The official stamp of Kabupaten Temanggung is circular, featuring the Garuda Pancasila in the center. The text 'BUPATI' is at the top and 'TEMANGGUNG' is at the bottom, with two stars on either side of the Garuda.  
**Pj. Bupati Temanggung,**  
  
**Hary Agung Prabowo**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I - 1</b>
1.1 DASAR HUKUM .....	I - 1
1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH .....	I - 5
1.3 DATA UMUM DAERAH .....	I - 12
a. Data Geografis Wilayah .....	I - 12
b. Data Demografi .....	I - 16
c. Pertumbuhan Penduduk .....	I - 22
d. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintah .....	I - 26
e. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan .....	I - 31
f. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja .....	I - 32
g. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan .....	I - 33
<b>BAB II PERUBAHAN PENJABARAN APBD .....</b>	<b>II - 1</b>
2.1 Latar Belakang.....	II - 1
2.2 Tujuan Perubahan .....	II - 2
2.3 Dasar Perubahan .....	II - 2
2.4 Perubahan Penjabaran .....	II - 5
<b>BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG     MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....</b>	<b>III - 1</b>
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	III - 1
3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar .....	III - 4
3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	III - 87
3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan .....	III - 169
3.1.4 Pelaksanaan Urusan Penunjang .....	III - 204
3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan .....	III - 249
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2022 .....	III - 256
<b>BAB IV CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN...</b>	<b>IV - 1</b>
4.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah .....	IV - 1
4.1.1 Dasar Hukum .....	IV - 1

4.1.2 Gambaran Umum .....	IV - 2
4.1.3 Target Kinerja .....	IV - 2
4.1.4 Realisasi .....	IV - 3
4.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah .....	IV – 8
4.2.1 Dasar Hukum .....	IV - 8
4.2.2 Gambaran Umum .....	IV - 8
4.2.3 Target Kinerja .....	IV - 8
4.2.4 Realisasi .....	IV - 8
4.3 Permasalahan dan Kendala .....	IV - 13
4.4 Saran dan Tindak Lanjut .....	IV - 13
BAB V PENUTUP .....	V - 1

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023 .....	I - 8
Tabel 1.2	Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung .....	I - 12
Tabel 1.3	Pembagian Wilayah Kabupaten Temanggung Berdasarkan Ketinggian .....	I - 15
Tabel 1.4	Data Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023.....	I - 17
Tabel 1.5	Kabupaten / Kota Kawasan Purwomanggung Tahun 2023 ....	I - 19
Tabel 1.6	Jumlah dan Komposisi Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023.....	I - 22
Tabel 1.7	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung Dan Kawasan Purwomanggung Tahun 2019 - 2023 .....	I - 23
Tabel 1.8	Sebaran Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT Per Kecamatan Di Kabupaten Temanggung Tahun 2023.....	I - 25
Tabel 1.9	Jumlah Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah.	I - 27
Tabel 1.10	Profil Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023 .....	I - 29
Tabel 1.11	Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 .....	I - 31
Tabel 1.12	Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Kabupaten Temanggung Tahun 2023 .....	I - 32
Tabel 1.13	Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 .....	I - 33
Tabel 2.1	Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023.....	II - 6
Tabel 2.2	Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 .....	II - 8
Tabel 2.3	Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 .....	II -11
Tabel 3.1	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	III - 4
Tabel 3.2	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	III - 87
Tabel 3.3	Pelaksanaan Urusan Pilihan .....	III - 169
Tabel 3.4	Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	III - 204
Tabel 3.5	Kebijakan Strategis Daerah dalam rangka Penyelesaian Masalah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 .....	III - 249
Tabel 3.6	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Temanggung Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2020 .....	III - 256
Tabel 4.1	Capaian Kinerja Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 .....	IV – 5
Tabel 4.2	Capaian Kinerja Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 .....	IV - 10

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Posisi Kabupaten Temanggung terhadap Provinsi Jawa Tengah .....	I – 14
Gambar 1.2	Peta Geologi Kabupaten Temanggung.....	I – 16
Gambar 1.3	Kepadatan Penduduk di Wilayah Kawasan Purwomanggung Tahun 2023 .....	I – 20
Gambar 1.4	Jumlah Sebaran Penduduk Kabupaten Temanggung .....	I – 21
Gambar 1.5	Laju Pertumbuhan Penduduk Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 .....	I – 23
Gambar 1.6	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan Purwomanggung .....	I - 24
Gambar 1.7	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2023 .....	I - 31



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Dasar Hukum**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah), LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban), RLPPD (Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah), EPPD (Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Dimana LKPJ meliputi: a). hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah; b). Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 telah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor: 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Dengan seiring telah berakhirnya pelaksanaan pembangunan tahun 2023 tersebut dan sesuai dengan regulasi Pemerintahan Kabupaten Temanggung sehingga perlu menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran

2023 yang merupakan laporan kinerja pembangunan selama satu tahun berupa hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Temanggung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, disusun berdasarkan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan daerah kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan Indikator Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Temanggung;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## 1.2. Visi Dan Misi Kepala Daerah

### 1. Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**.

Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah:

Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling

menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

## 2. Misi Pembangunan Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

### 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

### 2) Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang

dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

### **3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;**

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas.

Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Masing-masing sasaran pada setiap misi diukur dengan indikator sasaran yang secara rinci dijabarkan tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023

<b>VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM DAN GANDEM</b>				
<b>MISI 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya</b>				
<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>URUSAN</b>
<b>Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya.</b>	1. Indek Pembangunan Manusia (IPM) 2. Angka kemiskinan	1. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	<b>Pendidikan</b>
			2. Harapan Lama Sekolah (HLS)	
		2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan	3. Angka Harapan Hidup (AHH)	<b>Kesehatan</b>
			4. Indeks Kinerja RSUD	
		3. Meningkatnya budaya literasi masyarakat	5. Persentase peminjam di perpustakaan	<b>Perpustakaan</b>
		4. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	6. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	<b>Pemuda dan Olah Raga</b>
			7. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	
		5. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	8. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IKP)	<b>Kebudayaan</b>
		6. Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	9. Indek Gotong Royong	<b>Pemerintahan Umum</b>
			10. Indek Toleransi	
		7. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	11. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	<b>Pengendalian Penduduk</b>
		8. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta	12. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan</b>



<b>VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM DAN GANDEM</b>				
<b>MISI 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya</b>				
<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>URUSAN</b>
		perlindungan terhadap perempuan dan anak	13. Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	<b>Anak</b>
		9. Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	14. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	<b>Sosial</b>

<b>MISI 2 : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan</b>				
<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>URUSAN</b>
<b>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan</b>	3. Pertumbuhan Ekonomi 4. Pendapatan per Kapita 5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 6. Ketimpangan Pendapatan	1. Meningkatnya kesejahteraan petani	15. Tingkat ketersediaan energi perkapita 16. Tingkat ketersediaan protein perkapita 17. Tingkat ketersediaan lemak perkapita	<b>Pertanian</b>
		2. Meningkatnya kedaulatan pangan	18. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	<b>Ketahanan Pangan</b>
			19. Tingkat Konsumsi Ikan	<b>Kelautan dan Perikanan</b>
		3. Meningkatnya pariwisata daerah	20. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	<b>Pariwisata</b>
		4. Meningkatnya investasi sektor riil	21. Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	<b>Perindustrian</b>
			22. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	<b>Perdagangan</b>
			23. Persentase Koperasi sehat	<b>Koperasi dan UKM</b>
			24. Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	
			25. Indek Kemudahan Berusaha	<b>Penanaman Modal</b>

**MISI 2 : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN
			26. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	<b>Tenaga Kerja</b>
		5. Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	27. Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
			28. Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	
			29. Persentase perumahan dan Permukiman layak huni	<b>Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>
			30. Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	<b>Perhubungan</b>
		6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	31. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	<b>Lingkungan Hidup</b>

**MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN
<b>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.</b>	7. Indek Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintahan	32. Indek Perencanaan Pembangunan Daerah	<b>Perencanaan Pembangunan</b>
			33. Persentase Ketercapaian Kinerja pembangunan daerah	
	34. Manajemen Risiko Indek (MRI)			
	8. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)		35. Indeks Inovasi Daerah	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>
			36. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	<b>Keuangan</b>
			37. Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	

**MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN
			38. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	<b>Administrasi Pemerintahan</b>
			39. Indek Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	
			40. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	
			41. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	<b>Pengawasan</b>
			42. Indeks Profesionalitas ASN	<b>Kepegawaian dan Diklat</b>
			43. Indeks <i>Merit System</i>	
			44. Indeks Manajemen Kearsipan	<b>Kearsipan</b>
			45. Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	<b>Sekretariat Dewan</b>
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	46. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	<b>Komunikasi dan Informatika</b>
			47. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	
			48. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	<b>Adminduk</b>
			49. Rata-Rata IKM di Kecamatan	<b>Kewilayahan</b>
		3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	50. Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>
			51. Persentase desa yang berpredikat mandiri	
		4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	52. Indeks Rasa Aman	<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>

MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas				
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN
		5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	53. Indeks Resiko Bencana	Ketentraman dan Ketertiban Umum_ Kebencanaan

### 1.3. Data Umum Daerah

#### a. Data Geografis Wilayah

##### 1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah ± 87.065 Ha dan berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1  
Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung

No	Batas Wilayah	Kabupaten Lain	Kecamatanyang berbatadsan	Desa yang berbatasan
	Sebelah Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Kendal</li> <li>Kabupaten Semarang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kecamatan Bejen</li> <li>Kecamatan Candiroto</li> <li>Kecamatan Gemawang</li> <li>Kecamatan Kandangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desa Bejen, Desa Selosabrang, Desa Petung, Desa Duren, dn Desa Ngaliyan di Kecamatan Candiroto.</li> <li>Desa Canggal di Kecamatan Candiroto</li> <li>Desa Muncar dan Desa Karangseneng di Kecamatan Gemawang.</li> <li>Desa Margolelo dan Desa Kedawung di Kecamatan Kandangan</li> </ul>
	Sebelah Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Magelang</li> <li>Kabupaten Semarang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kecamatan Kandangan</li> <li>Kecamatan Kaloran</li> <li>Kecamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desa Tlogopucang dan Desa Getas di Kecamatan Kaloran</li> <li>Desa wonokerso,</li> </ul>

			Pringsurat	Desa Kedawung di Kecamatan Kandangan <ul style="list-style-type: none"> <li>Desa Kaloran, Desa Kalimanggis dan Desa Getas di Kecamatan Kaloran</li> <li>Desa wonokerso, Desa Soborejo dan Desa Klepu di Kecamatan Pringsurat</li> </ul>
	Sebelah Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Magelang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kecamatan Pringsurat</li> <li>Kecamatan Kranggan</li> <li>Kecamatan Selopampang</li> <li>Kecamatan Tlogomulyo</li> <li>Kecamatan Bulu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desa Soropadan, Desa Kupan, Desa Kebumen, Desa Pringsurat, dan Desa Rejosari di Kecamatan Pringsurat.</li> <li>Desa Nguwet, Desa Pare, dan Desa Bengkal di Kecamatan Kranggan.</li> <li>Desa Bagus, Desa Kebonagung, Desa Gambasan, Desa Salamrejo, Desa Selopampang, dan Desa Tanggulanom di Kecamatan Selopampang.</li> <li>Desa Losari dan Desa Pagersari di Kecamatan Tlogomulyo</li> </ul>
	Sebelah Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Wonosobo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kecamatan Kledung</li> <li>Kecamatan Candirot</li> <li>Kecamatan Wonoboyo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desa Batusari dan Desa Kledung di Kecamatan Kledung.</li> <li>Desa Canggal di Kecamatan Candirot.</li> <li>Desa Cemoro di Kecamatan Wonoboyo.</li> </ul>

Sumber: Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

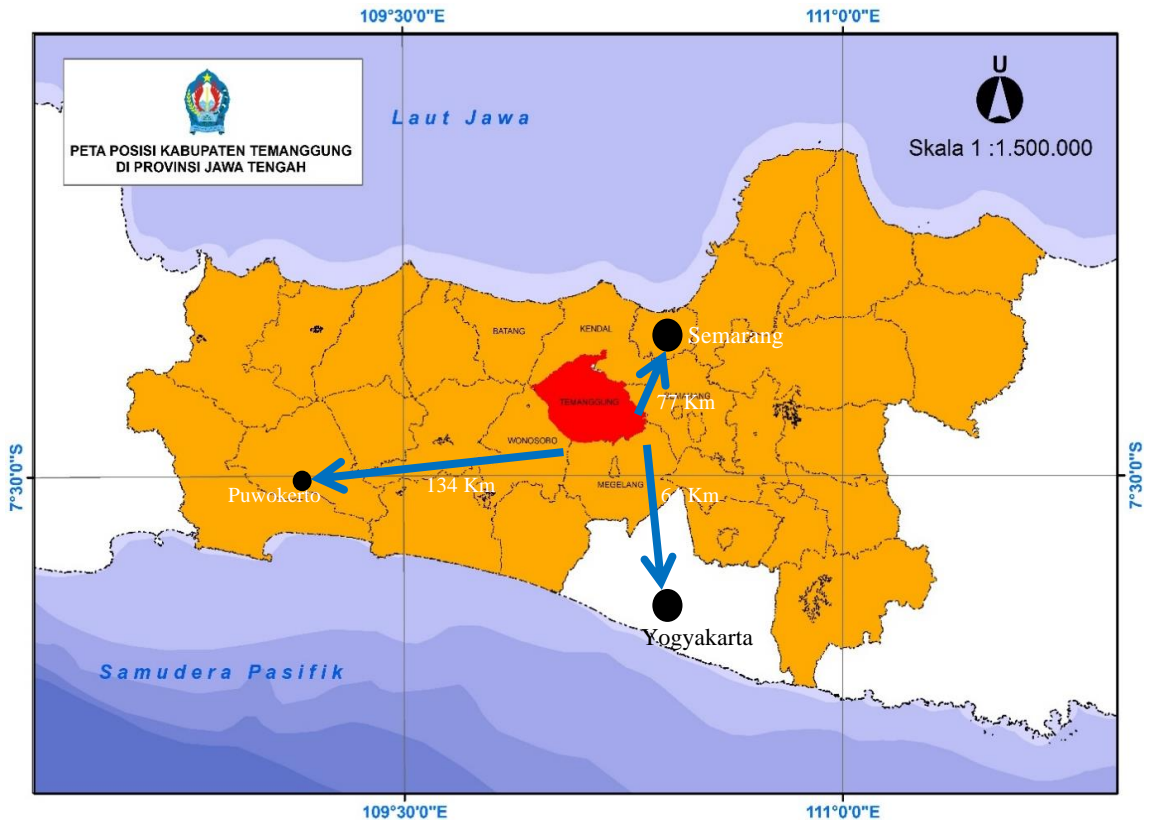
## 2) Letak dan Kondisi Geografis

### a) Posisi Astronomis

Secara astronomis, Kabupaten Temanggung berada pada koordinat 110°23'–110°46'30" Bujur Timur dan 7°14'–7°32'35" Lintang Selatan.

## b) Posisi Geografis

Kabupaten Temanggung berada di tengah-tengah tiga pusat kegiatan ekonomi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Semarang (77 Km), Yogyakarta (64 Km), dan Purwokerto (134 Km).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, Tahun 2023

Gambar 1.1  
Peta Posisi Kabupaten Temanggung terhadap Provinsi Jawa Tengah

## c) Kemiringan Lahan

Topografi Wilayah Kabupaten Temanggung kompleks dan beragam, meliputi: dataran, perbukitan, pegunungan, lembah, dan gunung dengan kemiringan antara 0% - 70%. Pola topografi wilayah mirip sebuah cekungan raksasa yang terbuka di bagian Tenggara, sedangkan di bagian Selatan dan Barat dibatasi oleh Gunung Sumbing (3.340 m dpl) dan Gunung Sindoro (3.115 m dpl) dan di bagian Utara dibatasi oleh Gunung Jurang Grawah (2.565 m dpl) dan pegunungan kecil lainnya yang membujur dari Timur Laut ke arah Tenggara. Berdasarkan klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten Temanggung meliputi: datar seluas 968 Ha (1,17%), bergelombang seluas 32.492 Ha (39,31%), curam seluas 31.232

Ha (37,88%), dan sangat curam seluas 17.983 Ha (21,64%).

#### d) Ketinggian Lahan

Wilayah Kabupaten Temanggung berada pada ketinggian 400 - > 1.500 m dpl. Wilayah tersebut merupakan daerah lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang terhampar dari sisi Selatan, Barat sampai dengan Utara. Apabila ditinjau berdasarkan klasifikasi ketinggian Kabupaten Temanggung terbagi dalam 5 (lima) wilayah ketinggian sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3  
Pembagian Wilayah Kab. Temanggung Berdasarkan Ketinggian

No	Wilayah Ketinggian (meter) (dpl)	Luas (Ha)	Luas (%)	Kecamatan
1	0 – 500	8.538	9,77	Bejen, Candiroto, Gemawang, Kandangan, Kranggan, Temanggung, Tembarak, Selopampang, Pringsurat, Kaloran
2	500 – 750	38.421	43,99	Bejen, Candiroto, Gemawang, Jumo, Kedu, Kandangan, Parakan, Bulu, Temanggung, Kaloran, Kranggan, Pringsurat, Tembarak, Tlogomulyo, Selopampang, Tretep, Wonobojo
3	750 – 1.000	20.106	23,02	Bejen, Tretep, Wonobojo, Ngadirejo, Candiroto, Jumo, Gemawang, Kandangan, Selopampang, Kedu, Parakan, Kledung, Bulu, Kaloran, Pringsurat, Kandangan, Selopampang, Tembarak, Tlogomulyo
4	1.000 – 1.250	7.834	8,97	Tretep, Wonobojo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang, Bejen, Kandangan, Kaloran
5	1.250 – 3550	12.167	14,25	Tretep, Wonobojo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang
Jumlah		87.065	100	

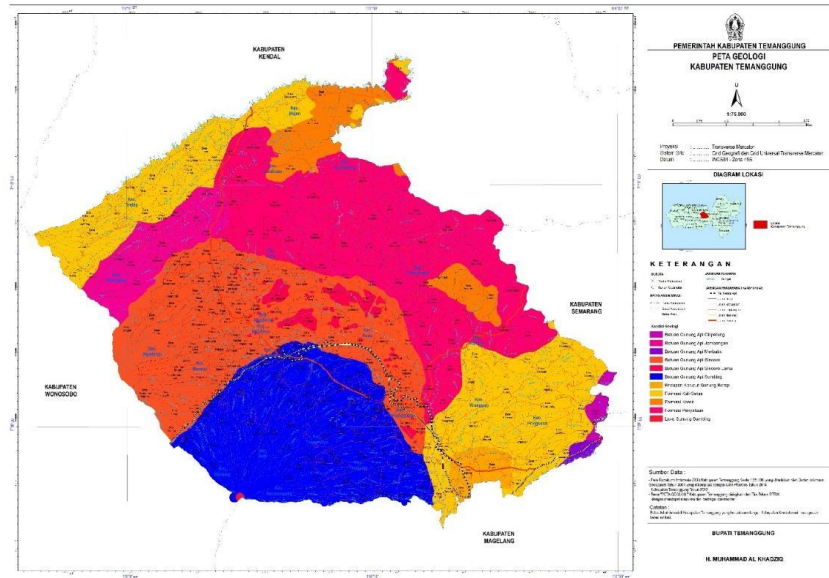
Sumber: Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2023, data diolah

#### e) Geologi

Dilihat dari sisi geologi, lahan seluas 82.675 Ha jenis tanah di Kabupaten Temanggung meliputi: Latosol coklat (32,13%), Latosol coklat kemerahan (9,53%), Latosol merah kekuningan (35,33%), Regosol (20,14%), dan Andosol (2,60%).

Selanjutnya apabila dilihat dari jenis batuan dan mineral yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung dapat dikelompokan

menjadi: 1). Batuan Andesit, 2). Batu gamping, 3). Batu kali, 4). Batu tras, 5). Bentonit, 6). Diatomae, 7). Kerikil, dan 8). Pasir. Apabila dilihat luas wilayah secara administrasi, kemiringan dan ketinggian disebabkan karena metoda dan pendekatan penghitungan.



Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2031

Gambar 1.2  
Peta Geologi Kabupaten Temanggung

## b. Data Demografi

### 1. Jumlah Sebaran Penduduk Perkecamatan

Jumlah penduduk Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 Semester I adalah sebanyak 811.798 jiwa dengan rincian sebaran jumlah penduduk Tahun 2019-2023 perkecamatan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



**Tabel 1.4**  
Data Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	2019			2020			2021			2022			2023			Sebaran Penduduk
			Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	
1	BULU	43,04	24.946	23.839	48.785	24.844	23.996	48.840	25.013	24.559	49.215	25.320	24.559	49.879	25.465	24.659	50.124	1.165
2	TEMBARAK	26,84	15.841	15.266	31.107	15.931	15.343	31.274	16.059	15.598	31.501	16.223	15.598	31.821	16.324	15.685	32.009	1.193
3	TEMANGGUNG	33,39	41.187	41.970	83.157	41.213	41.925	83.138	41.409	42.231	83.404	41.680	42.231	83.911	41.886	42.418	84.304	2.525
4	PRINGSURAT	57,27	26.132	25.990	52.122	26.252	26.206	52.458	26.423	26.473	52.746	26.605	26.473	53.078	26.777	26.655	53.432	933
5	KALORAN	63,92	22.897	22.734	45.631	23.050	23.015	46.065	23.200	23.334	46.295	23.373	23.334	46.707	23.482	23.432	46.914	734
6	KANDANGAN	78,36	26.340	25.820	52.160	26.586	26.062	52.648	26.824	26.562	53.030	27.154	26.562	53.716	27.322	26.610	53.932	688
7	KEDU	34,96	29.811	29.078	58.889	29.802	29.133	58.935	29.943	29.720	59.264	30.315	29.720	60.035	30.467	29.881	60.348	1.726
8	PARAKAN	22,23	26.929	26.659	53.588	27.094	26.803	53.897	27.260	26.930	54.130	27.244	26.930	54.174	27.410	27.069	54.479	2.451
9	NGADIREJO	53,31	28.384	27.849	56.233	28.706	28.215	56.921	28.940	28.636	57.355	29.198	28.636	57.834	29.431	28.796	58.227	1.092
10	JUMO	29,32	15.103	14.899	30.002	15.142	15.030	30.172	15.268	15.227	30.389	15.355	15.227	30.582	15.508	15.386	30.894	1.054
11	TRETEP	33,65	10.840	10.273	21.113	10.853	10.385	21.238	10.915	10.567	21.362	11.020	10.567	21.587	11.079	10.609	21.688	645
12	CANDIROTO	59,94	16.534	16.422	32.956	16.505	16.352	32.857	16.670	16.640	33.116	16.828	16.640	33.468	16.877	16.742	33.619	561
13	KRANGGAN	57,61	24.354	24.667	49.021	24.439	24.815	49.254	24.615	25.299	49.578	24.935	25.299	50.234	25.070	25.401	50.471	876

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	2019			2020			2021			2022			2023			Sebaran Penduduk
			Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	
14	TLOGOMULYO	24,84	11.695	11.137	22.832	11.784	11.303	23.087	11.833	11.473	23.207	11.964	11.473	23.437	12.013	11.509	23.522	947
15	SELOPAMPANG	17,29	9.916	10.259	20.175	10.138	10.327	20.465	10.235	10.320	20.614	10.388	10.320	20.708	10.474	10.324	20.798	1.203
16	BANSARI	22,54	12.287	11.916	24.203	12.311	11.987	24.298	12.384	12.112	24.416	12.467	12.112	24.579	12.613	12.165	24.778	1.099
17	KLEDUNG	32,21	14.219	13.683	27.902	14.224	13.785	28.009	14.300	14.050	28.208	14.444	14.050	28.494	14.522	14.113	28.635	889
18	BEJEN	68,84	10.824	10.658	21.482	10.896	10.797	21.693	10.933	10.788	21.748	10.946	10.788	21.734	11.047	10.833	21.880	318
19	WONOBOYO	43,98	13.361	12.933	26.294	13.463	13.077	26.540	13.577	13.335	26.767	13.772	13.335	27.107	13.853	13.405	27.258	620
20	GEMAWANG	67,11	17.087	16.525	33.612	17.087	16.680	33.767	17.156	17.041	33.931	17.314	17.041	34.355	17.366	17.120	34.486	514
<b>Jumlah Total</b>		<b>870.65</b>	<b>398.687</b>	<b>392.577</b>	<b>791.264</b>	<b>400.320</b>	<b>395.256</b>	<b>795.556</b>	<b>402.957</b>	<b>397.319</b>	<b>800.276</b>	<b>406.545</b>	<b>400.895</b>	<b>807.440</b>	<b>408.986</b>	<b>402.812</b>	<b>811.798</b>	<b>932</b>

Sumber : Dindikcapil, Bappeda, Kabupaten Temanggung Tahun 2023 semester I, data diolah

Pada tabel diatas dapat dilihat jumlah penduduk pada Tahun 2019 adalah 791.264 jiwa/km<sup>2</sup> dan pada tahun 2023 sebanyak 811.798 jiwa/km<sup>2</sup>, sehingga naik sebanyak 20.534 jiwa/km<sup>2</sup>, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 408.986 jiwa (50,38%) dan penduduk perempuan sebanyak 402.812 jiwa (49,62%). Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan dengan rasio 101,53.

Dari jumlah rumah tangga sebanyak 272.29, jumlah rumah tangga dengan rata-rata penduduk per rumah tangga sebanyak 2,98 jiwa/km<sup>2</sup> per rumah tangga. Dari jumlah penduduk tersebut, jumlah penduduk paling padat adalah kecamatan Temanggung dengan kepadatan 2.525 jiwa/km<sup>2</sup> diikuti Kecamatan Parakan dengan kepadatan 2.451 jiwa/km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Kedu dengan kepadatan 1.726 jiwa/km<sup>2</sup>.

Sedangkan kepadatan penduduk di Kawasan Purwomanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini

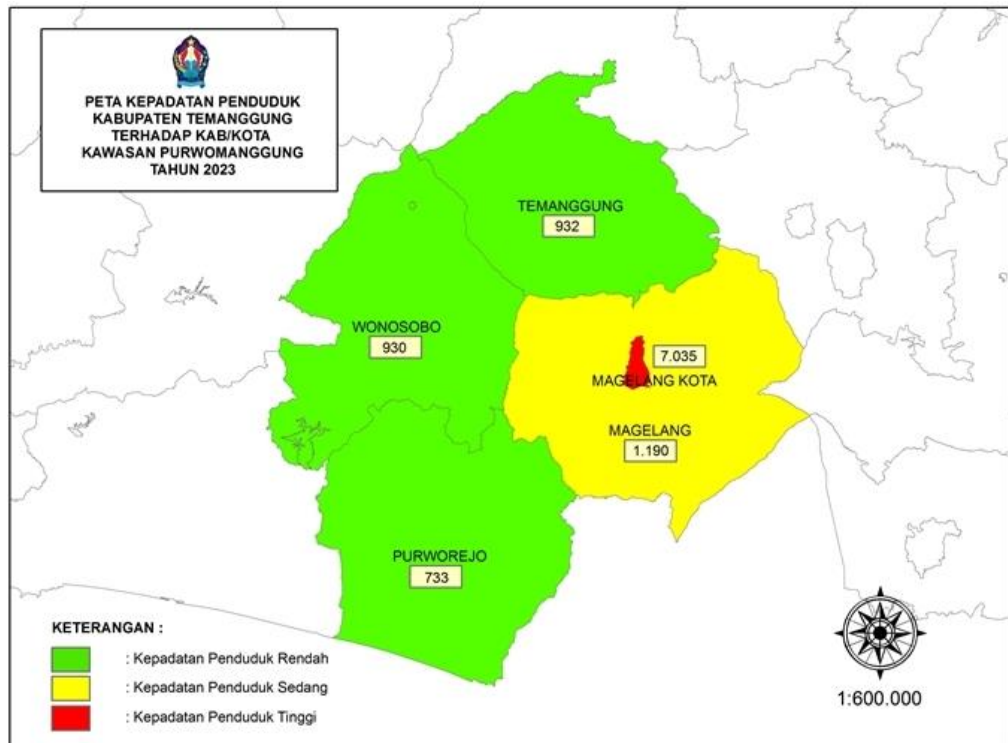
Tabel 1.5  
Kabupaten/Kota Kawasan Purwomanggung Tahun 2023

Kab/Kota	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk Tahun 2023	Kepadatan Penduduk Tahun 2023 (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
Kab. Purworejo	1.091,49	800.275	733
Kab. Wonosobo	984,68	915.653	930
<b>Kab. Temanggung</b>	<b>870,65</b>	<b>811.798</b>	<b>932</b>
Kab. Magelang	1.102,93	1.312.175	1.190
Kota Magelang	18,12	127.466	7.035
<b>Rata-rata</b>			<b>2.164</b>

Sumber Data: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, Dindukcapil Semester I Tahun 2023, data diolah

Rata-rata kepadatan penduduk di wilayah Kawasan Purwomanggung adalah 2.164 jiwa/km<sup>2</sup>. Daerah dengan jumlah penduduk paling padat adalah Kota Magelang dengan kepadatan mencapai 7.035 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk Kabupaten Temanggung berada di bawah rata-rata kepadatan penduduk di wilayah Kawasan Purwomanggung dengan

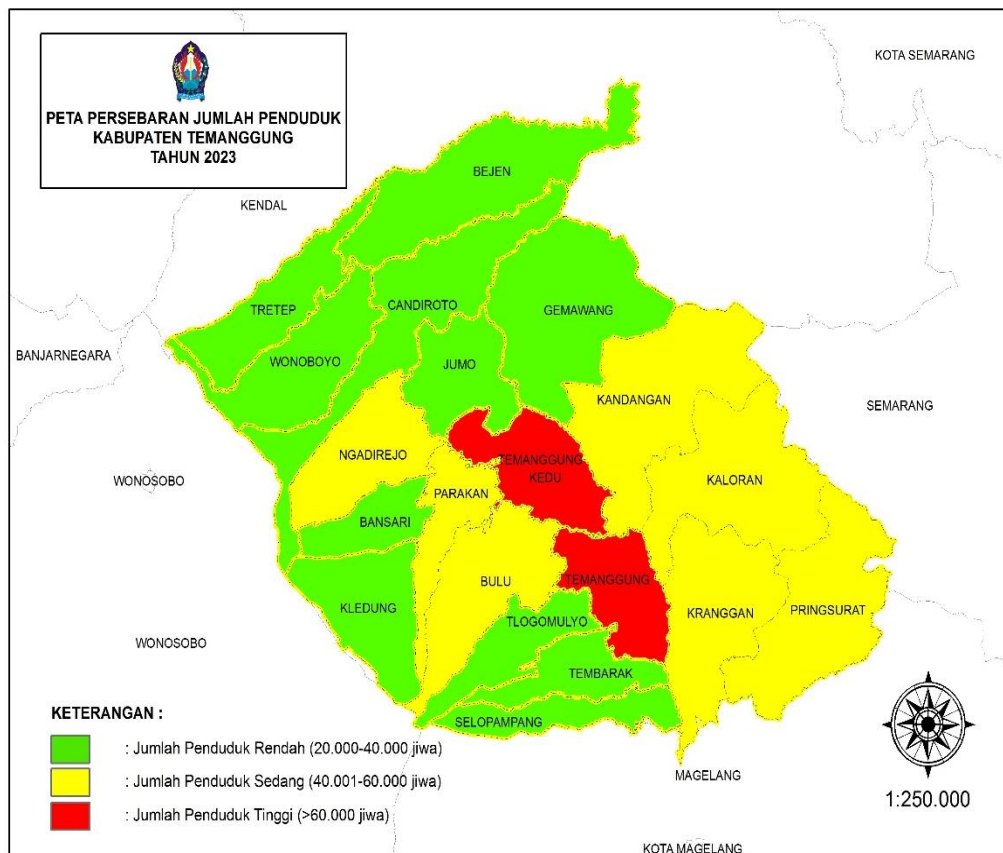
kepadatan 932 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di wilayah Kawasan Purwomanggung dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber Data: BPS Jateng, dan Dindukcapil Kabupaten Temanggung Semester I Tahun 2023, data diolah

Gambar 1.3  
Kepadatan Penduduk di wilayah Kawasan Purwomanggung Tahun 2023

Kepadatan penduduk Temanggung relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purworejo. Sebaran Jumlah Penduduk Kabupaten Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber data: Dindikcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2023 semester I, data diolah

**Gambar 1.4**  
**Jumlah Sebaran Penduduk Kabupaten Temanggung**

Jumlah penduduk terbesar pada akhir tahun 2023 adalah di Kecamatan Temanggung. Hal tersebut dikarenakan pusat perekonomian Kabupaten Temanggung berada di Kecamatan Temanggung, sehingga menarik minat penduduk untuk tinggal dan beraktivitas di Kecamatan Temanggung.

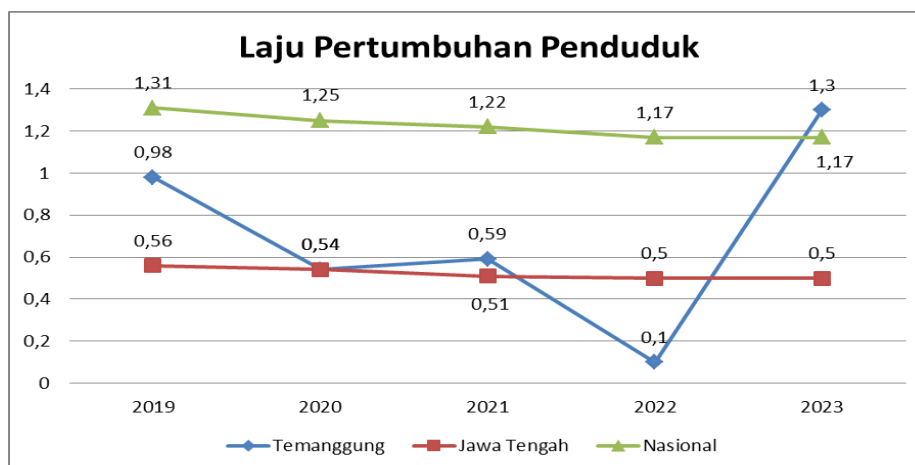
## 2. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan jumlah penduduk dengan faktor penambah jumlah kelahiran dan migrasi masuk serta faktor pengurang jumlah kematian dan migrasi keluar pada suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) periode sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.6  
Jumlah dan Komposisi Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk (jiwa)	<b>791.264</b>	<b>794.055</b>	<b>800.276</b>	<b>801.276</b>	<b>811.798</b>
Rata-rata kepadatan penduduk	909	912	919	920	932
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,98	0,35	0,78	0,12	1,31
Rasio Jenis Kelamin					
a. Pria	50	50	50	50,34	50,38
b. Wanita	50	49,62	50	49,66	49,62
Komposisi Penduduk Menurut					
a. Jenis Kelamin					
- Pria (orang)	398.687	400.070	402.957	403.324	408.986
- Wanita (orang)	392.577	393.985	397.319	397.943	402.812
b. Tingkat Pendidikan					
- Tidak/Belum Sekolah	234.279	233.507	23.936	241.096	246.987
- Belum tamat SD/Sederajat	154.933	154.933	149.962	143.587	142.244
- Tamat SD/Sederajat	180.409	180.650	178.196	176.343	176.194
- SLTP Sederajat	110.103	111.578	114.588	116.423	118.300
- SLTA Sederajat	82.747	84.447	85.577	90.922	94.711
- Diploma 1/II	3.812	3.764	3.635	3.500	3.448
- Akademi/Diploma III/S. Muda	6.355	6.486	6.648	6.900	7.113
- Diploma 4 Strata I	17.718	18.322	19.314	20.461	21.692
- Stara II	838	861	919	969	1.042
- Strata III	70	71	70	66	67

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Temanggung periode 2019-2023 mencapai 0,58%. Apabila mengacu kepada klasifikasi pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2022 maka Kabupaten Temanggung termasuk lambat karena pertumbuhannya antara 0% – 1%., akan tetapi pada tahun 2023 laju pertumbuhan penduduk naik mencapai 1,31%. Laju Petumbuhan penduduk Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut:



Gambar 1.5  
Laju Pertumbuhan Penduduk Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 cenderung fluktuatif dan pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 lebih rendah dari Propinsi Jawa Tengah dan Nasional

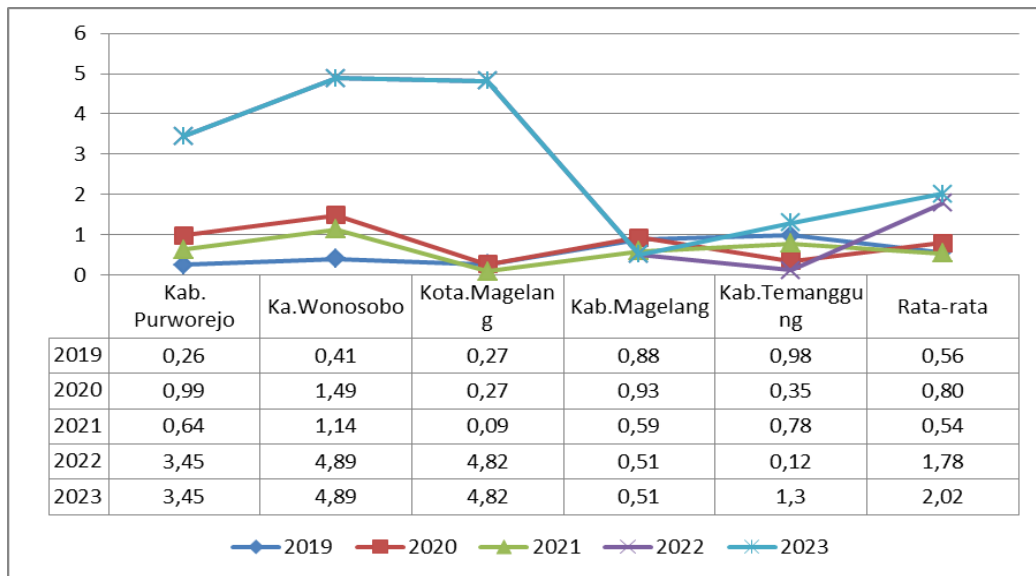
Tabel 1.7  
**Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan Purwomanggung Tahun 2019-2023**

Kab/Kota	Jumlah Penduduk					Laju Pertumbuhan Penduduk (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Kab.Purworejo	718.316	769.880	773.588	800.275	800.275	0,26	0,99	0,64	3,45	3,45
Kab.Wonosobo	790.504	879.124	886.613	930.000	930.000	0,41	1,49	1,14	4,89	4,89
Kota. Magelang	122.111	121.526	121.610	127.466	127.466	0,27	0,27	0,09	4,82	4,82
Kab.Magelang	1.290.591	1.299.859	1.305.512	1.312.175	1.312.175	0,88	0,93	0,59	0,51	0,51
<b>Kab. Temanggung</b>	791.264	<b>794.055</b>	<b>800.276</b>	<b>801.276</b>	811.798	0,98	0,35	0,78	0,12	1,3
<b>Rata-rata</b>	818.461	869.397	776.345	794.641	796.343	0,56	0,80	0,54	1,78	2,02
<b>Rata-rata 5 tahun</b>						<b>1,14</b>				

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2022 Dindukcapil Kabupaten Temanggung 2023 Semester I

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Wilayah Pengembangan Purwomanggung Tahun 2019-2023 adalah 1,14%, kepadatan penduduk Kabupaten Temanggung lebih baik dari rata-rata kepadatan penduduk Wilayah Pengembangan Purwomanggung.

Laju pertumbuhan penduduk di Wilayah Pengembangan Purwomanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut:



Gambar 1.6  
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan Purwomanggung

**c. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan**

Secara Administratif Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 Kecamatan, 266 Desa, 23 Kelurahan, 5.965 RT dan 1.442 RW dengan pusat pemerintahan berada di Kota Temanggung. Sebaran jumlah desa, kelurahan, RW dan RT menurut kecamatan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 1.8  
Sebaran Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT Per Kecamatan  
di Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Desa		Kelurahan		Total	
					RW	RT	RW	RT	RW	RT
1	BULU	4.304	19	0	84	304	0	0	0	302
2	TEMBARAK	2.683	13	0	67	224	0	0	67	224
3	TEMANGGUNG	3.339	6	19	20	87	119	533	139	672
4	PRINGSURAT	5.728	14	0	113	364	0	0	113	364
5	KALORAN	6.392	14	0	111	416	0	0	111	416
6	KANDANGAN	7.836	16	0	101	378	0	0	101	378
7	KEDU	3.496	14	0	108	424	0	0	108	424
8	PARAKAN	2.223	14	2	50	239	27	120	77	359
9	NGADIREJO	5.331	19	1	97	396	3	30	100	426
10	JUMO	2.932	13	0	60	273	0	0	60	273
11	TRETEP	3.365	11	0	25	141	0	0	25	141
12	CANDIROTO	5.994	14	0	74	275	0	0	74	275
13	KRANGGAN	5.761	12	1	97	358	7	29	104	387
14	TLOGOMULYO	2.484	12	0	47	156	0	0	47	156
15	SELOPAMPANG	1.729	12	0	46	128	0	0	46	128
16	BANSARI	2.254	13	0	46	189	0	0	46	189
17	KLEDUNG	3.221	13	0	38	160	0	0	38	160
18	BEJEN	6.884	14	0	51	170	0	0	51	170
19	WONOBOYO	4.398	13	0	53	209	0	0	53	209
20	GEMAWANG	6.711	10	0	62	312	0	0	62	312
<b>Jumlah</b>		<b>87.065</b>	<b>266</b>	<b>23</b>	<b>1.350</b>	<b>5.203</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>1.422</b>	<b>5.965</b>

Sumber Data: Bagian Pemerintahan Umum, Dinpermades Kab. Temanggung Tahun 2023, data diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kecamatan paling luas di Kabupaten Temanggung adalah Kecamatan Kandangan dengan luas 7.836 Ha atau setara dengan 9,01% dari total luas wilayah Kabupaten Temanggung, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Selopampang dengan luas 1.729 Ha (1,98%). Kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling banyak adalah Kecamatan Temanggung dengan 6 (enam)

desa dan 19 (Sembilan belas) kelurahan, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Gemawang dengan jumlah 10 (sepuluh) desa.

**d. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah**

Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Temanggung mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sebagai tindaklanjut dari kedua peraturan tersebut maka Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu penataan kelembagaan organisasi pemerintahan secara keseluruhan pada akhir tahun 2020 dan berlaku efektif sejak awal tahun 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dengan hal tersebut maka jumlah Perangkat Daerah dan Unit Kerja Daerah di Kabupaten Temanggung ada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Satuan Pamong Praja, 5. Badan, 16 Dinas, 20 Kecamatan dan 1 RSUD dengan total PNS sebanyak 5.929 orang, dengan rincian tabel berikut:

Tabel 1.9  
Jumlah Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah

NO	NAMA PD/UNIT KERJA	JUMLAH STRUKTURAL	JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL	PELAKSANA	JUMLAH SELURUH	TIPE UNIT KERJA
1	2	3	4	5	7	8
1	Sekretariat Daerah	1			1	B
	Asisten Pemerintahan dan Kesra	1			1	
	1. Bagian Hukum	1	2	3	6	
	2. Bagian Kesra	1	2	4	7	
	3. Bagian Pemerintahan	1	1	4	6	
	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1			1	
	1. Bagian Perekonomian	1	2	5	8	
	2. Bagian Pengadaan Barang/Jasa	3	8	1	12	
	3. Bagian Pembangunan	1	1	4	6	
	Asisten Administrasi Umum	1			1	
	1. Bagian Organisasi dan Tata Lakasana	1	1	6	8	
	2. Bagian Umum	4	1	33	38	
	3. Bagian Prokompim	3	1	15	19	
	Staf Ahli Bupati	3			3	
	Sub Jumlah Setda					
2	Sekretariat DPRD	6	1	14	21	B
3	Inspektorat	10	30	11	51	A
4	BKPSDM	7	11	15	33	B
5	BAPPEDA	7	24	12	43	A
6	BPKPAD	22	6	33	61	A
7	Badan Kesatuam Bangsa dan Politik	5	5	12	22	-
8	BPBD	5	2	5	12	-
9	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	17	2396	222	2635	A
10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6	9	15	30	C

11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	21	9	37	B
12	Dinas Kesehatan	35	1078	57	1170	A
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	19	7	33	B
14	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	16	15	62	93	B
15	DPRKPLH	13	16	102	131	A
16	DKPPP	16	136	16	168	B
17	DPUPR	18	27	70	115	A
18	DPPPAPPKB	7	7	15	29	A
19	Dinas Penanaman Modal	3	7	8	18	-
20	Dinperinaker	8	27	8	43	B
21	Dinas Perhubungan	9	11	30	50	C
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	17	6	28	C
23	Dinas Sosisl	8	25	7	40	B
24	Satpol PP dan Damkar	11	1	34	46	C
25	RSUD	21	385	55	461	A
26	DINPERMADES	7	8	7	22	B
27	Kecamatan					A
	1. Temanggung	44	2	65	111	
	2. Tretep	7	1	6	14	
	3. Bansari	7	2	7	16	
	4. Kledung	7	1	6	14	
	5. Candiroto	7	2	6	15	
	6. Bejen	7	1	6	14	
	7. Ngadirejo	9	0	15	24	
	8. Parakan	11	2	13	26	
	9. Bulu	6	1	7	14	
	10. Kedu	6	2	7	15	
	11. Jumo	7	1	9	17	
	12. Kandangan	7	1	6	14	
	13. Tembarak	7	1	5	13	
	14. Selopampang	7	2	7	16	
	15. Kranggan	10	2	11	23	
	16. Kaloran	6	0	9	15	
	17. Pringsurat	7	2	8	17	
	18. Tlogomulyo	7	1	9	17	
	19. Gemawang	7	2	2	11	
	20. Wonobojo	7	1	6	14	
	Jumlah	482	4.330	1.117	5.929	

Berdasar pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa Dinas Penanaman Modal tidak terdapat tipe, karena atas dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas tersebut merupakan dinas yang tidak merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga tidak terdapat tipe karena badan tersebut intensitas kecil melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta atas dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

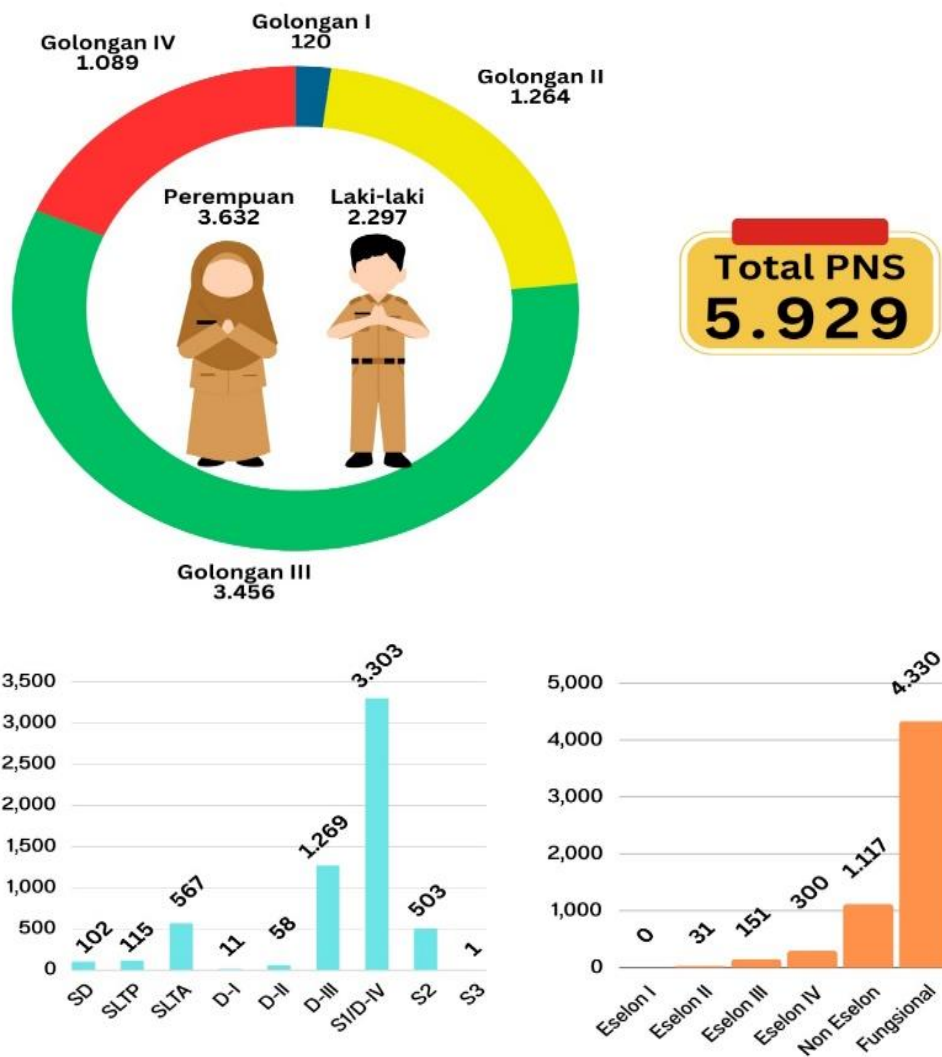
Profil Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN di Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.10  
Profil Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

NO	JENIS DATA	2019	2020	2021	2022	2023
	<b>JUMLAH PEGAWAI</b>					9.662
1	Jumlah ASN	6.670	6.280	6.132	8.029	8.111
a.	PNS	6.670	6.280	5.910	6.347	5.929
	<b>Berdasarkan Golongan</b>	<b>6.670</b>	<b>6.280</b>	<b>5.910</b>	<b>6.347</b>	<b>5.929</b>
	Golongan I	315	292	269	208	120
	Golongan II	1.082	903	862	1.312	1.264
	Golongan III	3.395	3.394	3.281	3.543	3.456
	Golongan IV	1.878	1.691	1.498	1.284	1.089
	<b>Berdasarkan Pendidikan</b>	<b>6.670</b>	<b>6.280</b>	<b>5.910</b>	<b>6.347</b>	<b>5.929</b>
	S3	na	na	na	na	1
	S2	na	na	na	na	503
	S1/D-IV	na	na	na	na	3.303
	D-III	na	na	na	na	1.269
	D-II	na	na	na	na	58
	D-I	na	na	na	na	11
	SLTA	na	na	na	na	567

NO	JENIS DATA	2019	2020	2021	2022	2023
	SLTP	na	na	na	na	115
	SD	na	na	na	na	102
	<b>Berdasarkan Esselon/Non Esselon/ Fungsional</b>	<b>6.670</b>	<b>6.280</b>	<b>5.910</b>	<b>6.347</b>	<b>5.929</b>
	Eselon I	-	-	-	-	-
	Eselon II (Pimpinan Tinggi Pratama)	22	29	27	31	31
	Eselon III (Administrator)	134	151	156	152	151
	Eselon IV (Pengawas)	477	444	289	284	300
	Non Esselon	6.037	5.656	1.387	2.098	1.117
	Fungsional:	-	-	4.051	3.782	4.330
	<b>Berdasarkan Jenis Kelamin</b>	<b>6.670</b>	<b>6.280</b>	<b>5.910</b>	<b>6.347</b>	<b>5.929</b>
	Laki-Laki	2.959	2.743	2.542	2.525	2.297
	Perempuan	3.711	3.537	3.368	3.822	3.632
b	PPPK	-	-	222	1.682	2.182
	<b>Berdasarkan Jenis Kelamin</b>					
	Laki-Laki	-	-	na	na	513
	Perempuan	-	-	na	na	1.669
2	Jumlah Non ASN	-	-	2.091	2.123	1.851
	Non PNS (Blud)	Na	na	650	650	442
	Nom PNS ( Suporting Staf)	Na	na	1.441	1.473	1.409

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2023 sejumlah 8.111 orang terdiri dari PNS dengan jumlah 5.929 orang dan PPKK sejumlah 2.182 orang. Sedangkan jumlah pegawai non PNS sejumlah 1.851 yang terdiri dari pegawai blud dan pegawai supporting staff. Jadi jumlah keseluruhan pegawai di Kabupaten Temanggung adalah 9.962 orang. Jumlah PNS Kabupaten Temanggung Tahun 2023 berdasarkan kelompok golongan, jabatan, jenis kelamin dan pendidikan dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1.7  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2023

#### e. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.003.678.248.892,00 atau sebesar 101,39 persen dari target sebesar Rp1.976.304.536.195,00. Secara lengkap, ringkasan realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.11  
Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan  
Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.976.304.536.195</b>	<b>2.003.678.248.892</b>	<b>101,39</b>
<b>41</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>311.430.965.163</b>	<b>350.090.930.665</b>	<b>112,41</b>
4101	Pajak Daerah	74.947.290.400	79.677.967.921	106,31
4102	Retribusi Daerah	10.849.288.000	11.496.076.544	105,96
4103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	21.311.076.903	21.311.076.903	100,00

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Dipisahkan			
4104	Lain-lain PAD yang Sah	204.323.309.860	237.605.809.297	116,29
<b>42</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.664.873.571.032</b>	<b>1.653.587.318.227</b>	<b>99,32</b>
4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.512.888.443.550	1.517.163.835.087	100,28
4202	Pendapatan Transfer Antar Daerah	151.985.127.482	136.423.483.140	89,76

Sumber : BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 (unaudited)

#### f. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.042.295.812.083,00 atau sebesar 94,71 persen dari target belanja sebesar Rp2.156.455.999.239,00. Secara lengkap, ringkasan realisasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.12  
Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja  
Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>2.156.455.999.239</b>	<b>2.042.295.812.083</b>	<b>94,71</b>
<b>51</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.545.029.674.070</b>	<b>1.460.421.030.081</b>	<b>94,52</b>
5101	Belanja Pegawai	803.840.649.421	761.950.684.571	94,79
5102	Belanja Barang dan Jasa	584.018.730.999	544.239.216.268	93,19
5105	Belanja Hibah	152.954.275.650	150.022.411.242	98,08
5106	Belanja Bantuan Sosial	4.216.018.000	4.208.718.000	99,83
<b>52</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>202.902.736.362</b>	<b>174.714.127.567</b>	<b>86,11</b>
5201	Belanja Modal Tanah	1.028.850.000	1.021.743.000	99,31
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.726.992.797	54.881.348.668	88,91
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.577.028.997	40.149.532.995	73,56
5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	77.837.411.000	70.891.983.537	91,08
5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.691.853.568	7.737.547.867	100,59
5206	Belanja Modal Aset Lainnya	40.600.000	31.971.500	78,75
<b>53</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>800.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5301	Belanja Tidak Terduga	800.000.000	0	0,00
<b>54</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>407.723.588.807</b>	<b>407.160.654.435</b>	<b>99,86</b>
5401	Belanja Bagi Hasil	7.997.804.000	7.985.769.628	99,85
5402	Belanja Bantuan Keuangan	399.725.784.807	399.174.884.807	99,86
	Total Surplus/(Defisit)	(180.151.463.044)	(38.617.563.191)	21,44

Sumber : BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 (unaudited)



### g. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan terdiri penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Secara lengkap, ringkasan realisasi pembiayaan daerah menurut jenis pembiayaan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.13  
Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan  
Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>183.766.291.044</b>	<b>183.818.544.352</b>	<b>100,03</b>
<b>61</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>181.958.877.044</b>	<b>182.011.130.352</b>	<b>100,03</b>
6101	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	180.406.907.044	180.406.907.044	100,00
6102	Pencairan Dana Cadangan	1.544.970.000	1.544.970.000	100,00
6105	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.000.000	59.253.308	846,48
<b>62</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>1.807.414.000</b>	<b>1.807.414.000</b>	<b>100,00</b>
6201	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0,00
6202	Penyertaan Modal Daerah	1.807.414.000	1.807.414.000	100,00
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>180.151.463.044</b>	<b>180.203.716.352</b>	<b>100,03</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	<b>0</b>	<b>141.586.153.161</b>	

Sumber : BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 (unaudited)

## **BAB II**

# **PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

### **2.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan daerah diatur oleh pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Keuangan daerah disusun setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah dengan berdasarkan pada program (*money follow program*), penyelesaian isu strategis dan permasalahan di daerah, serta mendukung pencapaian target RPJMD. APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah, dimana kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan mendasarkan pada laporan realisasi semester I APBD berjalan. Perubahan APBD tersebut dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran;

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA tersebut dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Sedangkan keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

## **2.2. Tujuan Perubahan**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan tujuan:

1. Menyesuaikan perubahan penerimaan pendapatan asli daerah, dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah;
2. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun Anggaran 2022;
3. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dengan dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang memerlukan penanganan secara cepat dengan memerhatikan prioritas nasional, regional dan daerah.

## **2.3. Dasar Perubahan**

Perubahan APBD juga dilakukan seiring dengan adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan. Kebijakan atau

peraturan-peraturan tersebut antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Basil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal;
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan

- Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2023 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu disesuaikan; dan
  13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 41).
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023, dan DAK TA 2023;
  15. Keputusan Menteri Agama Nomor 352 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi dan Penggunaan Nilai Manfaat;
  16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 336 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk Kelompok Kategori Kinerja Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah pada Tahun Anggaran 2023 Periode Kedua menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
  17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
  18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
  19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

## **2.4. Perubahan Penjabaran**

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan akhir Semester I, yang di dasarkan pada perubahan penjabaran APBD, terdapat beberapa perubahan pada struktur APBD. Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 menjadi sebesar Rp2.158.263.413.239,00, bertambah sebesar Rp116.503.184.682,00 dari anggaran awal sebesar Rp2.041.760.228.557,00. Perubahan dimaksud menyangkut pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah.

### **2.4.1 Pendapatan Daerah**

Mempertimbangkan perubahan kebijakan-kebijakan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan perkembangan kondisi perekonomian saat ini, maka kebijakan perubahan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui upaya-upaya peningkatan PAD dan penyesuaian target PAD sesuai dengan kondisi riil serta potensi yang dapat di capai, melakukan kebijakan evaluasi atas penggunaan dana transfer dan dana desa ke daerah. Perubahan kebijakan Pendapatan Daerah pada Tahun 2023 disebabkan karena:

1. Penyesuaian proyeksi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan target APBD Tahun Anggaran 2023;
2. Penyesuaian proyeksi pendapatan transfer Tahun Anggaran 2023 dari pemerintah;
3. Penyesuaian proyeksi pendapatan transfer dan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

Perubahan pendapatan daerah Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp1.976.304.536.195,00

yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp311.430.965.163,00, dan Pendapatan Transfer sebesar Rp1.664.873.571.032,00 secara rinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1  
Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	APBD	P-APBD	Selisih	%
1	2	3	4	5	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.882.005.615.122</b>	<b>1.976.304.536.195</b>	<b>94.298.921.073</b>	<b>5,01</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>303.730.612.722</b>	<b>311.430.965.163</b>	<b>7.700.352.441</b>	<b>2,54</b>
4.1.01	Pajak Daerah	69.510.000.000	74.947.290.400	5.437.290.400	7,82
4.1.02	Retribusi Daerah	10.468.040.000	10.849.288.000	381.248.000	3,64
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.922.771.777	21.311.076.903	388.305.126	1,86
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	202.829.800.945	204.323.309.860	1.493.508.915	0,74
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.578.275.002.400</b>	<b>1.664.873.571.032</b>	<b>86.598.568.632</b>	<b>5,49</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.456.496.609.400	1.512.888.443.550	56.391.834.150	3,87
4.2.02	Pendapatan Transfer antar Daerah	121.778.393.000	151.985.127.482	30.206.734.482	24,80

Sumber: APBD Kabupaten Temanggung TA 2023

Pendapatan daerah pada Perubahan APBD TA 2023 dari tabel tersebut bertambah sebesar 5,01% yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik sebesar 2,54% dan pendapatan transfer naik sebesar 5,49%. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,54% terdiri dari pajak daerah sebesar 7,82%, retribusi daerah sebesar 3,64%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 1,86% dan Lain-lain PAD yang sah sebesar 0,74%.

Pajak daerah naik sebesar 7,82% disokong dari kenaikan pajak hotel sebesar 10,00%, pajak restoran sebesar 62,15%, pajak hiburan sebesar 25,00%, pajak penerangan jalan sebesar 2,44%, pajak parkir sebesar 15,38%, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) sebesar 20,00%, serta penurunan pajak reklame sebesar 6,25%. Kenaikan retribusi daerah sebesar 3,64% disokong dari kenaikan retribusi jasa umum sebesar 1,38%, dan retribusi jasa usaha sebesar 22,81%.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik sebesar 1,86% merupakan kenaikan dari bagian laba yang dibagikan kepada

pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD saja, sedangkan kenaikan Lain-lain PAD yang sah sebesar 0,74% merupakan kenaikan dari pendapatan denda retribusi daerah sebesar 240,00% dan pendapatan BLUD sebesar 0,81%.

Kenaikan dan penurunan PAD tersebut berdasarkan potensi yang bisa dicapai sampai akhir tahun anggaran setelah dilakukan evaluasi atas capaian masing-masing objek pajak daerah selama semester I.

Pendapatan transfer naik sebesar 5,49% yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 3,87% dan pendapatan transfer antar daerah sebesar 24,80%. Kenaikan pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 3,87% disokong dari kenaikan dana perimbangan-dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 62,34%, dana desa sebesar 3,03%, dan Dana Insentif Daerah (DID) naik sebesar Rp29.383.259.000,00 dimana dalam penetapan APBD belum teranggarkan serta penurunan dana perimbangan-dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik sebesar 3,79%.

Kenaikan pendapatan transfer antar daerah (dari Provinsi Jawa Tengah) sebesar 24,80% terdiri dari kenaikan pendapatan bagi hasil sebesar 13,96% dan bantuan keuangan naik sebesar Rp13.205.000.000,00 dimana dalam penetapan APBD belum teranggarkan.

Kenaikan dan penurunan pendapatan transfer baik dari pemerintah maupun dari pendapatan transfer antar daerah merupakan kebijakan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikeluarkan setelah APBD TA 2023 ditetapkan.

#### **2.4.2 Belanja Daerah**

Belanja daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah daerah sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, disamping pendapatan daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah. Belanja daerah juga mengalami koreksi sejalan dengan pendapatan daerah yang mengalami perubahan agar nilai defisit wajar. Perubahan belanja daerah tersebut disebabkan karena:



1. Menyesuaikan belanja daerah karena amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan harus dilakukan penyesuaian belanja daerah karena kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun kebijakan daerah;
2. Melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
3. Memenuhi kebutuhan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah.
5. Percepatan pelaksanaan program/kegiatan.

Perubahan belanja daerah Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.156.455.999.2395,00 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp1.545.029.674.070,00, belanja modal sebesar Rp202.902.736.362,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp800.000.000,00 dan belanja transfer sebesar Rp407.723.588.807,00. Perubahan belanja daerah secara rinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2  
Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	APBD	P-APBD	Selisih	%
1	2	3	4	5	6
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>2.024.952.814.557</b>	<b>2.156.455.999.239</b>	<b>131.503.184.682</b>	<b>6,49</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.420.897.444.742</b>	<b>1.545.029.674.070</b>	<b>124.132.229.328</b>	<b>8,74</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	809.534.613.597	803.840.649.421	(5.693.964.176)	-0,70
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	501.779.039.695	584.018.730.999	82.239.691.304	16,39
5.1.05	Belanja Hibah	102.042.419.450	152.954.275.650	50.911.856.200	49,89
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.541.372.000	4.216.018.000	(3.325.354.000)	-44,09
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>204.358.523.008</b>	<b>202.902.736.362</b>	<b>(1.455.786.646)</b>	<b>-0,71</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000	1.028.850.000	28.850.000	2,89
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.933.428.983	61.726.992.797	(12.206.436.186)	-16,51
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62.818.402.525	54.577.028.997	(8.241.373.528)	-13,12
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	60.385.691.000	77.837.411.000	17.451.720.000	28,90
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.136.623.000	7.691.853.568	1.555.230.568	25,34
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	84.377.500	40.600.000	(43.777.500)	-51,88
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>800.000.000</b>	<b>(1.700.000.000)</b>	<b>-68,00</b>

Kode	Uraian	APBD	P-APBD	Selisih	%
1	2	3	4	5	6
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000	800.000.000	(1.700.000.000)	-68,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>397.196.846.807</b>	<b>407.723.588.807</b>	<b>10.526.742.000</b>	<b>2,65</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.997.804.000	7.997.804.000	-	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	389.199.042.807	399.725.784.807	10.526.742.000	2,70
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>		<b>(142.947.199.435)</b>	<b>(180.151.463.044)</b>	<b>(37.204.263.609)</b>	<b>26,03</b>

Sumber: APBD Kabupaten Temanggung TA 2023

Perubahan belanja daerah dari tabel tersebut, terdapat kenaikan belanja daerah sebesar 6,49% yang terdiri dari kenaikan belanja operasi sebesar 8,74% dan belanja transfer sebesar 2,65%, serta penurunan belanja modal sebesar 0,71% dan belanja tidak terduga sebesar 68,00%. Sehingga dari perhitungan perubahan pendapatan dan perubahan belanja terdapat kenaikan defisit sebesar 26,03%.

Kenaikan belanja operasi sebesar 8,74% terdiri dari kenaikan belanja barang dan jasa sebesar 16,39% dan belanja hibah sebesar 49,89%, serta penurunan belanja pegawai sebesar 0,70% dan belanja bantuan sosial sebesar 44,09%. Penurunan belanja pegawai sebesar 0,70% merupakan penghitungan sampai dengan akhir tahun anggaran berdasarkan realisasi sampai dengan semester I dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki masa pensiun sampai akhir tahun anggaran. Sedangkan penurunan belanja bantuan sosial sebesar 44,09% merupakan penyesuaian belanja di SKPD dan perubahan nomenklatur dari belanja bantuan sosial yang pindah menjadi belanja hibah.

Kenaikan belanja barang dan jasa sebesar 16,39% merupakan penyesuaian belanja yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dalam Perubahan APBD. Sedangkan kenaikan belanja hibah sebesar 49,89% merupakan penyesuaian belanja di SKPD dan perubahan nomenklatur dari belanja bantuan sosial yang pindah menjadi belanja hibah.

Penurunan belanja modal sebesar 0,71% terdiri dari penurunan belanja modal peralatan dan mesin sebesar 16,51%, belanja modal gedung dan bangunan sebesar 13,12%, dan belanja modal aset lainnya sebesar 51,88%, serta kenaikan belanja modal tanah sebesar 2,89%, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar 28,90, dan belanja

modal aset tetap lainnya sebesar 25,34%. Perubahan-perubahan belanja modal tersebut merupakan penyesuaian belanja di SKPD-SKPD.

Penurunan belanja tidak terduga sebesar 68,00% digunakan untuk tambahan penyelenggaraan ibadah haji Kabupaten Temanggung dikarenakan biaya BPIH bertambah sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Selai itu digunakan untuk penyediaan tambahan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pengadaan peralatan SAR dalam kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana, biaya operasional respon cepat darurat bencana dan biaya operasional pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular.

Kenaikan belanja transfer sebesar 2,65% merupakan kenaikan Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung setelah APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, sehingga harus diakomodir dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

### **2.4.3 Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Anggaran defisit adalah anggaran belanja lebih besar daripada anggaran pendapatan dan sebaliknya anggaran surplus terjadi manakala anggaran belanja lebih kecil daripada anggaran pendapatan. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 keuangan daerah masih mengalami anggaran defisit, sehingga pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran. Perubahan pembiayaan daerah tersebut disebabkan karena:

1. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2022 yang disesuaikan dengan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2022;
2. Pencairan dana cadangan untuk membiayai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung tahun 2024 sesuai kebijakan pemerintah;
3. Pembentukan Dana Cadangan yang tidak jadi dilaksanakan karena anggaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung tahun 2024 sudah harus dicairkan pada Tahun Anggaran 2023;

Perubahan pembiayaan daerah Kabupaten Temanggung pada

Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp180.151.463.044,00 yang terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp181.958.877.044,00, dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.807.414.000,00. Perubahan pembiayaan daerah Secara rinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3

Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	APBD	P-APBD	Selisih	%
1	2	3	4	5	6
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>142.947.199.435</b>	<b>180.151.463.044</b>	<b>37.204.263.609</b>	<b>26,03</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>159.754.613.435</b>	<b>181.958.877.044</b>	<b>22.204.263.609</b>	<b>13,90</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	159.747.613.435	180.406.907.044	20.659.293.609	12,93
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0	1.544.970.000	1.544.970.000	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.000.000	7.000.000	0	0,00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>16.807.414.000</b>	<b>1.807.414.000</b>	<b>(15.000.000.000)</b>	<b>-89,25</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000	0	(15.000.000.000)	-100,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.807.414.000	1.807.414.000	0	0,00
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>142.947.199.435</b>	<b>180.151.463.044</b>	<b>37.204.263.609</b>	<b>26,03</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkeaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Sumber: APBD Kabupaten Temanggung TA 2023

Perubahan pembiayaan daerah dari tabel tersebut, terdapat kenaikan pembiayaan daerah sebesar 26,03% yang terdiri dari penerimaan pembiayaan naik sebesar 13,90% dan pengeluaran pembiayaan turun sebesar 89,25%. Kenaikan penerimaan pembiayaan sebesar 13,90% terdiri dari kenaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar 12,93% dan pencairan dana cadangan sebesar Rp1.544.970.000,00. Kenaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya tersebut merupakan penyesuaian atas hasil audit BPK-RI atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan pencairan dana cadangan pada perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp1.544.970.000,00 dimana dalam Penetapan APBD tidak dianggarkan, merupakan dana cadangan yang digunakan untuk pelaksanaan Pilkada 2024 yang telah dibentuk pada Tahun Anggaran 2022.

Pengeluaran pembiayaan turun sebesar 89,25% sebagai akibat dari pengurangan pembentukan dana cadangan yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pilkada 2024 sebesar Rp15.000.000.000,00. Pembentukan dana cadangan tersebut tidak jadi dianggarkan karena pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dana cadangan tersebut pada awalnya akan digunakan untuk penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2024. Namun berdasarkan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.9.1//435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023 dan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.9.1//5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 tanggal 29 September 2023, maka dilakukan realokasi dari dana cadangan ke belanja Hibah, khususnya hibah kepada KPU dan Panwaslu Kabupaten Temanggung.

## **BAB III**

### **HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

#### **3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 terdiri dari:

a. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar:

1. Pendidikan, dilaksanakan dalam 1 program, 4 kegiatan, dan 56 sub kegiatan;
2. Kesehatan, dilaksanakan dalam 4 program, 11 kegiatan, dan 45 sub kegiatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dilaksanakan dalam 8 program, 9 kegiatan, dan 24 sub kegiatan;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dilaksanakan dalam 1 program, 1 kegiatan, dan 2 sub kegiatan;
5. Ketertarikan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dilaksanakan dalam 1 program, 1 kegiatan, dan 3 sub kegiatan;
6. Sosial, dilaksanakan dalam 6 program, 9 kegiatan, dan 25 sub kegiatan.

b. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar :

1. Tenaga Kerja, dilaksanakan dalam 5 program, 5 kegiatan, dan 5 sub kegiatan;
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dilaksanakan dalam 6 program, 7 kegiatan, dan 7 sub kegiatan;
3. Pangan, dilaksanakan dalam 4 program, 2 kegiatan, dan 2 sub kegiatan;
4. Pertanian, dilaksanakan dalam 1 program, 0 kegiatan, dan 0 sub kegiatan;
5. Lingkungan Hidup, dilaksanakan dalam 8 program, 9 kegiatan, dan 11 sub kegiatan;

6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, dilaksanakan dalam 3 program, 3 kegiatan, dan 3 sub kegiatan;
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa, dilaksanakan dalam 8 program, 8 kegiatan, dan 22 sub kegiatan;
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dilaksanakan dalam 3 program, 10 kegiatan, dan 22 sub kegiatan;
9. Perhubungan, dilaksanakan dalam 1 program, 6 kegiatan, dan 10 sub kegiatan;
10. Komunikasi dan Informatika, dilaksanakan dalam 2 program, 3 kegiatan, dan 9 sub kegiatan;
11. Koperasi dan UKM, dilaksanakan dalam 2 program, 3 kegiatan, dan 3 sub kegiatan;
12. Penanaman Modal, dilaksanakan dalam 4 program, 5 kegiatan, dan 8 sub kegiatan;
13. Kepemudaan dan Olah raga, dilaksanakan dalam 3 program, 8 kegiatan, dan 11 sub kegiatan;
14. Statistik, dilaksanakan dalam 1 program, 1 kegiatan, dan 1 sub kegiatan;
15. Persandian, dilaksanakan dalam 1 program, 1 kegiatan, dan 1 sub kegiatan;
16. Kebudayaan, dilaksanakan dalam 3 program, 3 kegiatan, dan 5 sub kegiatan;
17. Perpustakaan, dilaksanakan dalam 2 program, 2 kegiatan, dan 6 sub kegiatan;
18. Kearsipan, dilaksanakan dalam 2 program, 2 kegiatan, dan 3 sub kegiatan.

c. Pelaksanaan Urusan Pilihan

1. Kelautandan Perikanan, dilaksanakan dalam 4 program, 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan;
2. Pertanian, dilaksanakan dalam 5 program, 5 kegiatan, dan 13 sub kegiatan;
3. Pariwisata, dilaksanakan dalam 3 program, 3 kegiatan, dan 6 sub kegiatan;

4. Perdagangan, dilaksanakan dalam 4 program, 5 kegiatan, dan 5 sub kegiatan;
5. Perindustrian, dilaksanakan dalam 2 program, 2 kegiatan, dan 2 sub kegiatan.
6. Transmigrasi, dilaksanakan dalam 0 program, 0 kegiatan, dan 0 sub kegiatan.

d. Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan dilaksanakan dalam 2 program, 6 kegiatan, dan 12 Sub kegiatan
2. Penelitian dilaksanakan dalam 1 program, 3 kegiatan, dan 4 Sub kegiatan
3. Pengawasan dilaksanakan dalam 2 program, 4 kegiatan, 10 sub kegiatan
4. Kepegawaian dilaksanakan dalam 2 program, 10 kegiatan, 28 sub kegiatan
5. Keuangan dilaksanakan dalam 3 program, 5 kegiatan, 14 sub kegiatan
6. Pengadaan, dilaksanakan dalam 1 program, 1 kegiatan, 3 sub kegiatan

Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan secara terinci sebagaimana dalam tabel 3.1.1, 3.1.2 , 3.1.3, dan 3.1.4 sebagai berikut:



### 3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1  
Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Pendidikan	Dinas Pendidikan		1. Program Pengelolaan Pendidikan	100%				
				Angka Rata – Rata Lama Sekolah	7,80 tahun	7,50 tahun			
				Angka Harapan Lama Sekolah	12,49 tahun	12,61 tahun			
				a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	22 sub kegiatan				Pemenuhan SPM melalui Peningkatan pemerataan layanan pendidikan dan - Pemenuhan partisipasi dan pemerataan peserta didik
				1) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	13 Ruang	Terlaksananya Pembangunan 13 Ruang Uks Di Sekolah Meliputi	Lokasi Bangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan	Memindahkan Lokasi bangunan ke tempat baru yang lebih memadai	
1. Sd Negeri Karangtejo,	Lokasi Bangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan	Memindahkan Lokasi bangunan ke tempat baru yang lebih memadai							
2. Sd Negeri Karangseneg	Tidak ada	Tidak ada							
3. Sd Negeri 1 Ketitang,	Tidak ada	Tidak ada							
4. Sd Negeri 3 Gemawang,	Tidak ada	Tidak ada							

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						5. Sd Negeri 2 Gentan,	Lokasi Bangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan	Memindahkan Lokasi bangunan ke tempat baru yang lebih memadahi	
						6. Sd Negeri 4 Getas,	Tidak ada	Tidak ada	
						7. Sd Negeri Nampirejo,	Lokasi Bangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan	Memindahkan Lokasi bangunan ke tempat baru yang lebih memadahi	
						8. Sd Negeri Ngabeyan,	Tidak ada	Tidak ada	
						9. Sd Negeri Tlogo	Tidak ada	Tidak ada	
				2) Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1 Ruang	SD NEGERI 2 KALIMANGGIS	Lokasi Bangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan	Memindahkan Lokasi bangunan ke tempat baru yang lebih memadahi	
				3) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	12 Unit	1. SD NEGERI KANDANGAN	Tidak ada	Tidak ada	
						2. SD NEGERI JOMBOR	Lokasi Bangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan	Memindahkan Lokasi bangunan ke tempat baru yang lebih memadahi	
						3. SD NEGERI 1 KALIMANGGIS	Tidak ada	Tidak ada	
						3. SD NEGERI 2 KALIMANGGIS	Tidak ada	Tidak ada	
						4. SD NEGERI MOROBONGO	Tidak ada	Tidak ada	
						5. SD NEGERI MUNTUNG	Tidak ada	Tidak ada	
						6. SD NEGERI BULAN	Lokasi Bangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan	Memindahkan Lokasi bangunan ke tempat baru yang lebih memadahi	
						7. SD NEGERI DRONO	Tidak ada	Tidak ada	
						8. SD NEGERI 2 KEDU	Tidak ada	Tidak ada	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						9. SD NEGERI 1 CANDIROTO	Tidak ada	Tidak ada	
						10. SD NEGERI 1 TEMANGGUNG II	Lokasi Bangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan	Memindahkan Lokasi bangunan ke tempat baru yang lebih memadai	
						11. SD NEGERI TLILIR	Tidak ada	Tidak ada	
				4) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	37 Ruang	SD NEGERI 1 JLEGONG	Luasan Ruang Kelas yang direhabilitasi tidak sesuai dengan perencanaan	Menyesuaikan luasan Ruang Kelas yang sudah terbangun	
						SD NEGERI LOSARI	Tidak ada	Tidak ada	
						SD NEGERI MOROBONGO	Tidak ada	Tidak ada	
						SD NEGERI DRONO	Luasan Ruang Kelas yang direhabilitasi tidak sesuai dengan perencanaan	Menyesuaikan luasan Ruang Kelas yang sudah terbangun	
						SD NEGERI BLIMBING	Tidak ada	Tidak ada	
						SD NEGERI 2 GONDANGWAYAN G	Tidak ada	Tidak ada	
						SD NEGERI MUNTUNG	Tidak ada	Tidak ada	
						SD NEGERI 2 PENDOWO	Luasan Ruang Kelas yang direhabilitasi tidak sesuai dengan perencanaan	Menyesuaikan luasan Ruang Kelas yang sudah terbangun	
						SD NEGERI 1 TEMANGGUNG II	Tidak ada	Tidak ada	
						SD NEGERI PURBOREJO	Luasan Ruang Kelas yang direhabilitasi tidak sesuai dengan perencanaan	Menyesuaikan luasan Ruang Kelas yang sudah terbangun	
						SD NEGERI 1 SANGGRAHAN	Tidak ada	Tidak ada	
						SD NEGERI GUNUNGSARI	Tidak ada	Tidak ada	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						SD NEGERI TEMPURAN	Tidak ada	Tidak ada	
						SD NEGERI 1 BADRAN	Tidak ada	Tidak ada	
						SD NEGERI TLILIR	Tidak ada	Tidak ada	
				5) Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/ Kepala	2 Ruang	SD NEGERI DRONO	Tidak ada	Tidak ada	
						SD NEGERI PURBOREJO	Tidak ada	Tidak ada	
				6) Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2 Ruang	SD NEGERI MOROBONGO	Luasan Ruang yang direhabilitasi tidak sesuai dengan perencanaan	Menyesuaikan luasan Ruang Kelas yang sudah terbangun	
						SD NEGERI MUNTUNG	Tidak ada	Tidak ada	
				7) Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	1 Ruang	SD NEGERI KANDANGAN	Tidak ada	Tidak ada	
				8) Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana	7 Unit	SD NEGERI 1 JLEGONG	Luasan Ruang yang direhabilitasi tidak sesuai dengan perencanaan	Menyesuaikan luasan Ruang Kelas yang sudah terbangun	
						SD NEGERI LOSARI	Luasan Ruang yang direhabilitasi tidak sesuai dengan perencanaan	Menyesuaikan luasan Ruang Kelas yang sudah terbangun	
						SD NEGERI MOROBONGO	Tidak ada	Tidak ada	
						SD NEGERI 1 GENTAN	Tidak ada	Tidak ada	
						SD NEGERI PRANGKOKAN	Tidak ada	Tidak ada	
						SD NEGERI PURBOREJO	Luasan Ruang yang direhabilitasi tidak sesuai dengan perencanaan	Menyesuaikan luasan Ruang Kelas yang sudah terbangun	
						SD NEGERI 1 SANGGRAHAN	Tidak ada	Tidak ada	
				9) Pengadaan Mebeluer Sekolah	79 Paket	18 Sekolah Dasar	Jumlah dan Jenis Meubelair belum mencukupi	Menyesuaikan dengan anggaran yang ada	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				10) Pengadaan Perlengkapan	4.830 Unit	122 Sekolah Dasar	Jumlah pengadaan belum sesuai dengan jumlah Sekolah Dasar Kabupaten Temanggung	Memaksimalkan anggaran yang ada	
				11) Siswa			Jumlah pengadaan belum sesuai dengan jumlah Sekolah Dasar Kabupaten Temanggung	Memaksimalkan anggaran yang ada	
				12) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.600 Peserta Didik	Tersedianya biaya personil sebanyak 1.594 Siswa	Adanya data siswa yang double PIP dan pindah ke luar kota/jawa	Siswa yang pindah tetap di berikan dan yang double PIP diganti dengan siswa lain	
				13) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	Terlaksananya penagdaan 122 Paket TIK untuk 122 SD (1830 unit)	Jumlah pengadaan belum sesuai dengan jumlah Sekolah Dasar Kabupaten Temanggung	Memaksimalkan anggaran yang ada	
				14) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	434 Satuan Pendidikan	Terlaksananya Asesmen Nasional SD 434 sd	Perangkat yang belum memadai	pengusulan bantuan TIK, mengupayakan terpenuhinya perangkat (meminjam laptop pribadi guru atau kepsek)	
				15) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	Anggaran terbatas sehingga pembinaan ke tingkat provinsi belum maksimal	Bekerjasama dengan phak lain terutama orang tua anak yang maju ketingkat provinsi	
				16) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.818 Orang	1826 Orang pada semester I dan 746 Orang pada semester II	besaran bantuan kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan belum sesuai UMK	pengusulan tambahan anggaran	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				17) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.261 Orang	2261 orang	proses penilaian angka kredit guru(konversi) sudah selesai ,pelaksanaan gelar karya P5,pelaksanaan BinteK IKM,Lokakarya PSP,Fasilitasi program sekolah penggerak sudah selesai	agar ada penambahan anggaran untuk pelaksanaan gelar karya P5 dan untuk pelaksanaan BinteK	
				18) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.178 Satuan Pendidikan	Terlaksananya pendampingan pengelolaan Dapodik di 1.178 satuan pendidikan dan pelaksanaan PPDB secara online	Sering terjadi pergantian SDM Operator Dapodik dikarenakan bukan pegawai ASN sehingga pemahaman tentang pengelolaan Dapodik tidak optimal	Pendampingan dan fasilitasi pengelolaan Dapodik semua satuan pendidikan	
				19) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	434 Satuan Pendidikan	434 satpend teralurkan dananya	penyesuaian aplikasi arkas yang butuh pendampingan	pendampingan intens	
				20) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	434 Orang	4 kegiatan (sosialisasi, monitoring, bimtek dan rekonsiliasi) 1302 orang	bendahara BOS masih dirangkap guru (belum ada tenaga TU)	ada petugas administrasi bos (meskipun dari guru, administrasi bos dikerjakan 2 orang bisa mengurangi beban)	
				21) Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	30 Ruang	SD NEGERI 1 JLEGONG	Lokasi Bangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan	Memindahkan Lokasi bangunan ke tempat baru yang lebih memadai	
						SD NEGERI KANDANGAN	Lokasi Bangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan	Memindahkan Lokasi bangunan ke tempat baru yang lebih memadai	
						SD NEGERI 2 KARANGWUNI	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah	
						SD NEGERI KEBONDALEM	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						SD NEGERI JOMBOR	Lokasi Bangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan	Memindahkan Lokasi bangunan ke tempat baru yang lebih memadai	
						SD NEGERI 1 KALIMANGGIS	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah	
						SD NEGERI 2 KALIMANGGIS	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah	
						SD NEGERI 4 KEMLOKO	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah	
						SD NEGERI MOROBONGO	Lokasi Bangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan	Memindahkan Lokasi bangunan ke tempat baru yang lebih memadai	
						SD NEGERI 01 BANYUURIP	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah	
						SD NEGERI TEMBARAK	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah	
						SD NEGERI 1 GENTAN	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah	
						SD NEGERI 2 GONDANGWAYAN G	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah	
						SD NEGERI MUNTUNG	Lokasi Bangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan	Memindahkan Lokasi bangunan ke tempat baru yang lebih memadai	
						SD NEGERI DANUPAYAN	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah	
						SD NEGERI NGALIYAN	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah	
						SD NEGERI 2 PENDOWO	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah	
						SD NEGERI PRANGKOKAN	Lokasi Bangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan	Memindahkan Lokasi bangunan ke tempat baru yang lebih memadai	
						SD NEGERI 1 CANDIROTO			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						SD NEGERI 1 SANGGRAHAN	Lokasi Bangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan	Memindahkan Lokasi bangunan ke tempat baru yang lebih memadahi	
						SD NEGERI I KATEKAN	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah	
						SD NEGERI 2 KEDU	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah	
						SD NEGERI DRONO	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah	
						SD NEGERI I GOWAK	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah	
						SD NEGERI 1 TEMANGGUNG II	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah	
						SD NEGERI BULAN	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah	
						SD NEGERI TEMPURAN	Lokasi Bangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan	Memindahkan Lokasi bangunan ke tempat baru yang lebih memadahi	
						SD NEGERI CARUBAN	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah	
						SD NEGERI LANGGENG	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah	
						SD NEGERI TLILIR	Lokasi Bangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan	Memindahkan Lokasi bangunan ke tempat baru yang lebih memadahi	
				22) Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium Sekolah Dasar	1 Ruang	SD NEGERI 1 KEMIRI	Luasan Ruang yang direhabilitasi tidak sesuai dengan perencanaan	Menyesuaikan luasan Ruang Kelas yang sudah terbangun	
				<b>b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	17 sub kegiatan				Pemenuhan SPM melalui Peningkatan pemerataan layanan pendidikan dan -Pemenuhan partisipasi dan pemerataan peserta didik



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				1) Penambahan Ruang Kelas Baru	2 Ruang	Terlaksananya pembangunan 2 ruang kelas baru di: SMPN 3 Temanggung, SMPN 2 Wonobojo Satap	Ketidaksesuaian antara usulan dan hasil desk RK	Mengusulkan kembali di tahun berikutnya	
				2) Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	1 Ruang	Terlaksananya pembangunan 1 ruang TU, SMPN 2 Tlogomulyo	Ketidaksesuaian antara usulan dan hasil desk RK	Mengusulkan kembali di tahun berikutnya	
				3) Pembangunan Laboratorium	1 Ruang	Terlaksananya pembangunan 1 ruang TIK, SMPN 2 Tlogomulyo	Ketidaksesuaian antara usulan dan hasil desk RK	Mengusulkan kembali di tahun berikutnya	
				4) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5 Unit	Terlaksananya pembangunan senderan SMPN 2 Wonobojo satap, pembangunan pagar keliling SMPN 2 Bulu dan 2 ruang pembangunan toilet SMPN 1 Ngadirejo, 1 ruang SMPN 2 Kledung, 1 ruang SMPN 2 Tlogomulyo, 1 ruang SMP Muh ngadirejo	Ketidaksesuaian antara usulan dan hasil desk RK	Mengusulkan kembali di tahun berikutnya	
				5) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	10 Ruang	Terlaksananya rehabilitasi sedang /berat ruang kelas 7 ruang SMPN 1 Ngadirejo dan 2 ruang SMPN 2 Kledung, 1 ruang SMPN 2 Bulu	Ketidaksesuaian antara usulan dan hasil desk RK	Mengusulkan kembali di tahun berikutnya	
				6) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	1 Ruang	Terlaksananya rehabilitasi sedang /berat ruang guru 1 ruang SMPN 2 Kledung	Ketidaksesuaian antara usulan dan hasil desk RK	Mengusulkan kembali di tahun berikutnya	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				7) Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1 Ruang	Terlaksananya rehabilitasi sedang /berat ruang UKS 1 ruang SMPN 2 Kledung	Ketidaksesuaian antara usulan dan hasil desk RK	Mengusulkan kembali di tahun berikutnya	
				8) Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1 Unit	Terlaksananya rehabilitasi sedang /berat 1 ruang toilet SMPN 2 Kledung, 2 ruang SMPN 2 Tlogomulyo	Ketidaksesuaian antara usulan dan hasil desk RK	Mengusulkan kembali di tahun berikutnya	
				9) Pengadaan Mebeluer Sekolah	1 Paket	Terlaksananya pengadaan mebel untuk SMPN 2 Tlogo, SMPN 2 Kledung, SMPN 1 Ngadirejo	Pelaksanaan kegiatan terlambat karena Pagu mebel masih menyatu dengan fisik	Pemetaan berdasarkan permendagri	
				10) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.079 Peserta Didik	Terlaksananya penyediaan biaya personil untuk 957 Siswa penerima BSM dan 50 Siswa Penerima Bantuan masuk SMA sederajat	Proses verifikasi by name by address belum optimal	Proses verifikasi data dari calon penerima BSM lebih ketat agar tidak terjadi tumpang tindih data	
				11) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3 Paket	Terlaksananya pengadaan croombok SMPN 2 Candirot Satap, SMPN 1 Bejen, dan SMPIT Greges Tembarak sebanyak 39 unit	Ketidaksesuaian antara usulan dan hasil desk RK	Mengusulkan kembali di tahun berikutnya	
				12) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	10.950 Peserta Didik	Terlaksananya penyelenggaraan Assesment Akhir Tahun untuk siswa kelas VII, dan VIII serta Assesment Akhir Jenjang untuk siswa kelas IX sejumlah 28.000	SDM pada sekolah belum semua terbimtek terkait Implementasi Kurikulum Merdeka,	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Kurikulum Merdeka untuk semua Pendidik dan Tenaga Kependidikan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				13) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	11 Peserta Didik	Terlaksananya kegiatan lomba-lomba akademik dan non akademik jenjang SMP sejumlah 10 kegiatan Lomba, peserta sebanyak 15.456 siswa	Juknis Lomba dari Pusat Prestasi Nasional di tahun 2023 terlambat rilis	mengacu jukni di tahun 2022, karena tidak ada perbedaan Juknis	
				14) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2781 Orang	Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan pendidikan SMP sejumlah 2724 orang	Keterlambatan usulan dari sekolah sehingga menghambat usulan pencairan	Berkomunikasi dengan sekolah	
				15) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	800 Orang	Proses Penilaian Angka Kredit sejumlah 800 orang sudah selesai			
				16) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	84 Satuan Pendidikan	Tersalurnya Dana BOSP untuk SMP N/S sejumlah 84 sekolah sebesar Rp. 31.186.361.293	Waktu update aplikasi ARKAS diakhir tahun yang mengakibatkan banyak laporan sekolah yang hilang , adanya pergantian Bendahara ditengah tahun berjalan yang mengakibatkan laporan dari sekolah tertunda, penyaluran dana BOSP yang terlambat sehingga penyerapan pada semester 1 belum maksimal	pendampingan ke sekolah secara intens dan sosialisasi pembukuan serta bimtek aplikasi ARKAS	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				17) Peningkatan Kapasitas	84 Orang	Terlaksananya Bimtek IKM bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP Tahun 2023 sejumlah 420 orang (setiap sekolah 5 orang dari 84 sekolah), Terlaksananya Bimtek Guru Berkarakter sejumlah 42 Guru SMP Negeri,	Peserta Bimtek IKM belum menyasar semua Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan, Peserta Bimtek Guru Berkarakter perwakilan sekolah 1 orang dan untuk tahun N+1 bergili/bergantian guru lain	dilaksanakan oleh pihak sekolah melalui kegiatan Kombel dan IHT (Bimtek IKM), peserta Bimtek Guru Berkarakter dilaksanakan secara bergilir/bergantian	
				<b>c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	11 sub kegiatan				Pemenuhan SPM melalui Peningkatan pemerataan layanan pendidikan dan - Pemenuhan partisipasi dan pemerataan peserta didik
				1) Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	3 Unit	Terlaksananya pembangunan TK Cut Nyak Din Canggal (2 volume ) dan TK TD 2 Jragan Tembarak ( 1 Volume )	TK DW 2 jragan berkurang 1 volume karena refocusing	disediakan anggaran kembali	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				2) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	6 Unit	Terlaksananya pembangunan Area Bermain pada TK Al Hasanah, TK PKK Mojosari, TK Kartini Purborejo, TK Sedya Maju Danupayan, TK Dharma Wanita Tilir, TK Siwi Dadi Kebumen, TK Siwisari II Campursari, pembangunan UKS dan Toliet pada TK Al Hasanah	Tidak Ada	Tidak Ada	
				3) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2 Unit	Terlaksananya Rehab ruang kelas pada TK PDK 1 Ngadirejo, TK Pertiwi Mangunsari Ngadirejo dan TK Dharma Wanita Pendowo	Tidak terlaksana Rehab kelas pada TK DW Rowo Kandangan karena revocusing	disediakan anggaran kembali	
				4) Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2 Paket	Terlaksananya rehab Toilet pada TK Ade Irma Suryani Campursari Parakan	Tidak Ada	Tidak Ada	
				5) Pengadaan mebel PAUD	2 Paket	Terlaksananya pengadaan mebel pada TK DW Pendowo ( 2 Paket )	Tidak Ada	Tidak Ada	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				6) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	5 Paket	Terlaksananya pengadaan APE Luar pada TK Al Hasanah, TK PKK Mojosari, TK Kartini Purborejo, TK Sedyo Maju Danupayan, TK Dharma Wanita Tilir, TK Siwi Dadi Kebumen, TK Siwisari II Campursari	Tidak Ada	Tidak Ada	
				7) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	6620 Peserta Didik	Terlaksananya bimtek penyusunan KOSP diikuti 50 orang guru	Tidak Ada	Tidak Ada	
				8) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1867 Orang	Tersedianaya 20 Orang PTK di TK Negeri dan SKB, dan 1787 Orang PTK penerima Hibah bosda	Sebanyak 3 org PTK diterima PPPK	Validasi data	
				9) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	25 Orang	Terlaksananya bimtek IKM diikuti 50 orang guru , sosialisasi sulingjar diikuti 75 guru , diklat berjenjang diikuti 50 orang guru , dan sosialisasi pembentukan TPPK diikuti 75 guru , proses penilaian PAK 125 orang	Tidak Ada	Tidak Ada	
				10) Pengelolaan Dana BOP PAUD	629 Satuan Pendidikan	Terlaksananya realisasi dari satuan pendidikan jenjang PAUD penerima BOP PAUD Reguler dan Kinerja sebanyak 629 satuan	1 Satuan Pendidikan (KB Harapan Pertiwi Bejen) Mengembalikan Dana BOP Reguler Karena Berhenti Beroperasi	Melakukan proses pengembalian sesuai regulasi	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				11) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	626 Orang	Terselenggaranya sosialisasi Juknis BOP dan pendampingan alur manajemen BOP PAUD kepada 626 Bendahara Satuan	Tidak Ada	Tidak Ada	
				<b>d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	6 sub kegiatan				Pemenuhan SPM melalui Peningkatan pemerataan layanan pendidikan dan - Pemenuhan partisipasi dan pemerataan peserta didik
				1) Penyelenggaraan Proses Belajar nonformal/Kesetaraan	3608 Peserta Didik	3608 peserta didik meliputi kegiatan yaitu uji kesetaraan, ANBK, ATS dan Pendidikan kecakapan hidup ,Peningkatan ketrampilan SKB	Dalam 1 program kegiatan meliputi berbagai unsur kegiatan sehingga kurang optimal	masing2 kegiatan mempunyai 1 program kegiatan	
				2) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	Tersedianya 4594 Orang	6 orang pindah tidak diketahui alamatnya atau sudah tidak melakukan aktifitas di lokasi	Mengoptimalkan pendataan calon penerima	
				3) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	246 Orang	adanya bimtek peningkatan kapastas kelembagaan dengan peserta dari 26 lembaga dengan jumlah peserta 80 orang	Kekurangan tenaga tutor yang linier dengan mapel yang diampu di pendidikan kesetaraan	tersedianya tutor yang linier	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				4) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	6 Satuan Pendidikan	adanya bimtek pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah sebanyak 24 orang yang menghasilkan rancangan perbup pendidikan	Belum adanya Perbup SPM Pendidikan Kesetaraan	adanya kegiatan penyusunan SPM Pendidikan Kesetaraan	
				5) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	25 Satuan Pendidikan	tersalurnya dana BOP ke 25 lembaga	Kurangnya Pengawasan secara intensif dari Pusat, akibatnya pelaporan dari lembaga sering terlambat	Pendampingan Secara intensif	
				6) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	25 Orang	terdapat 3 kegiatan yaitu sosialisasi, koordinasi dan evaluasi	Kurangnya tenaga di lembaga sehingga sering banyak keterlambatan di pelaporan	Mengangkat tenaga Administrasi	



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.	Kesehatan	Dinas Kesehatan		1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					
				Angka Kematian Ibu (AKI)	67,5 Per 100.000 KH	44,96 per 100.000 KH			
				Angka Kematian Bayi (AKB)	12 per 1.000 KH	13,04 Per 1.000 KH			
				Prevalensi balita gizi buruk	0,5%	0,22%			
				Prosentase rumah tangga yang memiliki jamban	83,84%	90,22%			
				Persentase Puskesmas yang sarprasnya sesuai standar	100%	100%			
				Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	98,00%	99,02%			
				Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan antenatal sesuai standar	100%	100%			
				Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	100%			
				Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100%	100%			
				Persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	100%	100%			
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100%	100%			
				Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	72%	100%			
				Angka Kematian Neonatal	7 per 1.000 KH	9,22 per 1.000 KH			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Cakupan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	100%	100%			
				Angka Kematian balita	13,6 per 1.000 KH	16,1 per 1.000 KH			
				Persentase anak pada usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100%	100%			
				Persentase Warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	100%	100%			
				Cakupan Warga Negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	100%	100%			
				Persentase kunjungan baru di pelayanan Kesehatan dasar	43,5%	45,45%			
				Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah terakreditasi utama	53,85%	100%			
				Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100%	100%			
				Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100%	100%			
				Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%			
				Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%			
				Persentase penanganan KLB 1x24 jam	100%	100%			
				Angka penemuan kasus Malaria (API)	<1 per 1.000 penduduk	0,0002			
				Incident rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	<20 per 100.000 penduduk	2,09 per 100.000 penduduk			
				Angka penemuan kasus baru Kusta	<1 per 100.000 penduduk	0,0004 per 100.000 penduduk			
				Persentase desa/ kelurahan UCI	100%	100%			
				Persentase anak umur 1 tahun diimunisasi Campak	95%	99,85%			
				Prevalensi gizi kurang (underweight) pada anak balita (0-60 bulan)	15,5%	4,03%			
				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-23 bulan)	27%	11,59%			
				Persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	80%	87,42%			
				Prevalensi anemia pada ibu hamil	20%	11,41%			
				Persentase desa bebas rawan gizi	100%	100%			
				Persentase rumah sehat	82%	85,99%			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9 sub kegiatan	9 sub kegiatan			
				1) Pembangunan Puskesmas	1 Puskesmas	0 Puskesmas	Gagal tender	Dianggarkan Kembali di tahun 2024	
				2) Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya	1 gedung PSC	1 gedung PSC			
				3) Pengembangan Puskesmas	5 Puskesmas	5 Puskesmas (Kaloran, Tretep, Bansari, Selopampang, dan Gemawang)			
				4) Pengembangan Fasilitas Kesehatan lainnya	1 Pustu	1 Pustu Larangan Luwok kecamatan Bejen			
				5) Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	2 paket (sarpras posyandu Kel Kranggan dan sarpras Posbindu Kel Manggong) dan 3 unit IPAL Puskesmas	2 paket (sarpras posyandu Kel Kranggan dan sarpras Posbindu Kel Manggong) dan 3 unit IPAL Puskesmas			
				6) Pengadaan alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan Kesehatan	76 unit	76 unit (7 paket IVA kit (Pkm Tlogomulyo (2), Dharmarini, Pringsurat, Kaloran, Tretep, Banjarsari), 1 unit USG 2D digital (Pkm Temanggung), 26 unit electrical stimulation rlttrasound/TENS, 26 unit bed periksa fisioterapi, 3 paket sanitarian kit (Pkm Temanggung, Tlogomulyo, Kandangan), 1 unit			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						vaccine refrigerator (Pkm Ngadirejo), 3 unit alat kimia darah (Pkm Traji, Tlogomulyo, Kaloran), 9 unit Hematology analyzer (Pkm Traji, Bansari, Tlogomulyo, Kranggan, Kaloran, Kandangan, Jumo, Tretep, Banjarsari)			
				7) Pengadaan obat, vaksin	83 paket	83 paket			
				8) Pengadaan Bahan Habis Pakai	35 paket	35 paket			
				9) Distribusi alat Kesehatan, obat, vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan minuman ke Puskesmas serta fasilitas Kesehatan lainnya	12 kegiatan (12 bln)	12 kegiatan (12 bln)			
				b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26 sub kegiatan	26 sub kegiatan			
				1) Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu hamil	9.095 ibu hamil	9.095 ibu hamil			
				2) Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu bersalin	8.914 ibu bersalin	8.914 ibu bersalin			
				3) Pengelolaan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	8.786 bayi baru lahir	8.786 bayi baru lahir			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				4) Pengelolaan pelayanan Kesehatan balita	43.520 balita	43.520 balita			
				5) Pengelolaan pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	109.836 anak	109.836 anak			
				6) Pengelolaan pelayanan Kesehatan pada usia produktif	516.364 orang	516.364 orang			
				7) Pengelolaan pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	117.293 orang	117.293 orang			
				8) Pengelolaan pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	209.511 penderita	209.511 penderita			
				9) Pengelolaan pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	13.469 penderita	13.469 penderita			
				10) Pengelolaan pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat	2.102 orang	2.102 orang			
				11) Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis	8.577 orang	8.577 orang			
				12) Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	11.230 orang	11.230 orang			
				13) Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	11 Dokumen	11 Dokumen (kejadian KLB) Tembarak, Bejen (3), Pringsurat, Bansari, Kaloran, Parakan, Jumo,			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Kedu, Temanggung			
				14) Pengelolaan pelayanan Kesehatan gizi masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen (laporan bulanan)			
				15) Pengelolaan pelayanan Kesehatan kerja dan olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen (laporan bulanan)			
				16) Pengelolaan pelayanan Kesehatan lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen (laporan bulanan)			
				17) Pengelolaan pelayanan promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen (laporan bulanan)			
				18) Pengelolaan surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen (laporan bulanan)			
				19) Pengelolaan pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.102 orang	2.102 orang			
				20) Pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis Kesehatan dan pasca krisis kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen (laporan bulanan)			
				21) Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12 Dokumen	12 Dokumen (laporan bulanan)			
				22) Pengelolaan jaminan Kesehatan masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen			
				23) Operasional pelayanan fasilitas Kesehatan lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen (laporan bulanan)			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				24) Pelaksanaan akreditasi fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	27 unit	27 unit (26 Puskesmas dan 1 Labkesda)			
				25) Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	1 unit (PSC 119)			
				26) Pengelolaan pelayanan Kesehatan Malaria	1 paket	1 paket (pengadaan bahan RDT Malaria)			
				c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	1 sub kegiatan	1 sub kegiatan			
				1) Pengelolaan Sistem informasi kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen (pengadaan peralatan SIK)			
				d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
				1) Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya	51 unit (4 RS, 26 Puskesmas, 1 Labkesda, 20 Klinik)	51 unit (4 RS, 26 Puskesmas, 1 Labkesda, 20 Klinik)			
				2) Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	51 unit (4 RS, 26 Puskesmas, 1 Labkesda, 20 Klinik)	51 unit (4 RS, 26 Puskesmas, 1 Labkesda, 20 Klinik)			
				<b>2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>					
				<b>Persentase tenaga Kesehatan yang memenuhi standar kompetensi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				a. Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	1 sub kegiatan	1 sub kegiatan			
				1) Pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen (laporan bulanan)			
				b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 sub kegiatan	1 sub kegiatan			
				1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	649 orang	649 orang			
				<b>3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</b>					
				<b>Cakupan Puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar</b>	<b>62%</b>	<b>100%</b>			
				<b>Cakupan Penggunaan Obat Rasional (POR) di Puskesmas</b>	<b>77%</b>	<b>100%</b>			
				<b>Pengawasan makanan minuman di pasar tradisional</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				<b>Persentase sarana pelayanan mendapatkan ijin kesehatan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				<b>Cakupan produksi industry rumah tangga (PIRT) yang mendapat SPP-IRT</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 sub kegiatan	1 sub kegiatan			
				1) Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 sub kegiatan	1 sub kegiatan			
				1) Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industry rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industry rumah tangga	12 Dokumen	12 Dokumen			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				c. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	1 sub kegiatan	1 sub kegiatan			
				1) Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	106 unit	114 unit			
				<b>4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan</b>					
				<b>Persentase Rumah Tangga Sehat (PHBS Rumah Tangga) strata utama dan paripurna</b>	<b>83,09%</b>				
				a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 sub kegiatan	1 sub kegiatan			
				1) Peningkatan upaya promosi Kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen			
				b. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1 sub kegiatan	1 sub kegiatan			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				1) Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen			
3.	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR		1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
				Persentase jaringan irigasi kondisi baik	59,32%	59,36%	Curah hujan yang tinggi	Membuat jadwal yang tersusun dengan baik, serta manajemen konstruksi yang baik.	
				Cakupan area layanan daerah irigasi	97%	98,32%	Masih adanya alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang	Peningkatan pengendalian alih fungsi lahan sesuai tata ruang	
				a. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
				1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Penyusunan DED Bendung, Irigasi dan Drainase	1 dokumen perencanaan bendung, irigasi dan drainase	Pelaksanaan di anggaran perubahan	Mengoptimalkan waktu yang ada	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				2) Sub Kegiatan Pembangunan Bendung Irigasi	<p>Terlaksananya 8 paket pekerjaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Bendung Irigasi Doyo Makmur</li> <li>2. Pembangunan Jaringan Irigasi Teguru (M)</li> <li>3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Karangtejo, Kecamatan Jumo Kab. Temanggung (Bankeu Prov)</li> <li>4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Mergowati Kab. Temanggung (Bankeu Prov)</li> <li>5. Jasa Konsultansi Perencanaan</li> <li>6. Jasa Konsultansi Perencanaan</li> <li>7. Jasa Konsultansi Perencanaan (Bankeu Prov)</li> <li>8. Jasa Konsultansi Pengawasan (Bankeu Prov)</li> </ol>	<p>Terlaksananya 8 paket pekerjaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rehabilitasi Bendung DI Doyo Makmur dengan realisasi Mercu 1 buah dan Groundshil 1 buah.</li> <li>2. Pembangunan Jaringan Irigasi Teguru (M) realisasi saluran panjang 520 m.</li> <li>3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Karangtejo, Kecamatan Jumo Kab. Temanggung (Bankeu Prov) realisasi bendung 1 unit, kantong lumpur panjang 10 m dan pengaman talang panjang 20 m</li> <li>4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Mergowati Kab. Temanggung (Bankeu Prov) dengan realisasi bendung 1 unit dan kantong lumpur panjang 20 m</li> </ol>	<p>Beberapa lokasi pekerjaan terkendala pengeringan saluran untuk kebutuhan air petani.</p>	<p>Mengoptimalkan waktu yang ada dan Koordinasi dengan Petani Pemakai Air dengan kesepakatan penjadwalan pengaliran air</p>	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						5. 1 dokumen Perencanaan DAU 6. 1 dokumen Perencanaan Bankeu Prov 7. 1 dokumen Pengawasan DAU 8. 1 dokumen Pengawasan Bankeu Prov			
				3) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya 28 paket pekerjaan yaitu 1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aji Barang (DAK) 2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aji Kawah (DAK) 3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jonggolan (DAK) 4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Progo II (DAK) 5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Setro (DAK) 6. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Silumut (DAK) 7. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sipengkol (DAK) 8. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Trocoh (DAK) 9. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Walangkerek (DAK)	Terlaksananya 28 paket pekerjaan yaitu 1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aji Barang (DAK) dengan realisasi bendung 1 buah, saluran primer 27 m, saluran sekunder 1.079 m, bangunan terjun 4 buah dan bangunan bagi 6 buah 2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aji Kawah (DAK) dengan realisasi bendung 1 buah, saluran primer 889 m, dan bangunan bagi 8 buah 3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Beberapa lokasi pekerjaan terkendala pengeringan saluran untuk kebutuhan air petani	Mengoptimalkan waktu yang ada dan Koordinasi dengan Petani Pemakai Air dengan kesepakatan penjadwalan pengaliran air	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					10. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bangkong Mangunsari 11. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mundingharjo 12. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Nirboyo 13. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sidoharjo 14. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Siklopo 15. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sikuwok 16. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Silarut 17. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sirebut 18. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wadas 19. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sidawe 20. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Singabeang 21. Pembangunan Sodetan Kali Cingkru 22. Jasa Konsultansi Pengawasan (DAK Irigasi) 23. Jasa Konsultansi Perencanaan DAK 2025 24. Jasa Konsultansi Survey E-Paksi Dak 2025 25. Jasa Konsultansi Perencanaan 26. Jasa Konsultansi Pengawasan 27. Jasa Konsultansi Perencanaan DAK Irigasi 28. Jasa Konsultan Perencanaan E-Paksi	D.I. Jonggolan (DAK) dengan realisasi saluran primer 2.374 m, saluran sekunder 248 m, bangunan terjun 4 buah, bangunan tanggul 65 m dan bangunan bagi 4 buah 4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Progo II (DAK) dengan realisasi saluran primer 1.426 m, bangunan terjun 4 buah dan bangunan bagi 2 buah 5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Setro (DAK) dengan realisasi bendung 1 buah, saluran primer 2.246 m,, bangunan terjun 3 buah dan bangunan bagi 3 buah 6. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sipengkol (DAK) dengan realisasi bendung 1 buah, saluran primer 1.158			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						<p>m,, bangunan terjun 2 buah dan bangunan bagi 2 buah</p> <p>7. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Trocoh (DAK) dengan realisasi bendung 1 buah, saluran primer 1.464 m, bangunan terjun 2 buah</p> <p>8. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Walangkerek (DAK) dengan realisasi saluran primer 2.345 m , bangunan tanggul 51 m, bangunan terjun 4 buah dan bangunan bagi 3 buah</p> <p>9. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Silumut (DAK) dengan realisasi bendung 1 buah, saluran sekunder 1.469 m, dan bangunan bagi 3 buah</p> <p>10. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bangkong Mangunsari dengan</p>			



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						<p>realisasi bangunan terjunan 1 buah dan saluran panjang 50 m</p> <p>11. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mundingharjo dengan realisasi mercu 1 buah</p> <p>12. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Nirboyo dengan realisasi saluran panjang 210 m</p> <p>13. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sidoharjo dengan realisasi sayap panjang 30 m</p> <p>14. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Siklopo dengan realisasi mercu 1 unit</p> <p>15. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sikuwok dengan realisasi sayap panjang 120 m</p> <p>16. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Silarut dengan realisasi sayap panjang 40 m</p>			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						17. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sirebut dengan panjang saluran 320 m 18. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wadas dengan panjang saluran 520 m 19. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sidawe dengan realisasi talang panjang 50 m 20. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Singabeen dengan realisasi mercu 1 unit 21. Pembangunan Sodetan Kali Cingkru dengan realisasi pembangunan sodetan sepanjang 160 m 22. 1 Dokumen Pengawasan (DAK Irigasi) 23. 1 dokumen Perencanaan DAK 2025 24. 1 dokumen Survey E-Paksi Dak 2025 25. 1 dokumen Perencanaan			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						26. 1 dokumen Pengawasan 27. 1 dokumen Perencanaan DAK Irigasi 28. 1 dokumen Perencanaan E-Paksi			
				4) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya 6 paket pekerjaan yaitu 1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Aji Jaya 2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kedung Jambu 3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Depok 4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sigenjik 5. Rehabilitasi Talud Pengaman Irigasi DI. Ngingkil 6. Rehabilitasi Bendung Sigoleng DI.	Terlaksananya 6 paket pekerjaan yaitu 1. Rehabilitasi Jaringan irigasi DI. Aji jaya, dengan realisasi saluran panjang 56 m. 2. Rehabilitasi Jaringan irigasi DI. Kedung Jambu, dengan realisasi saluran panjang 75 m. 3. Rehabilitasi Jaringan irigasi DI. Depok, dengan realisasi saluran panjang 40 m. 4. Rehabilitasi Jaringan irigasi DI. Sigenjik, dengan realisasi saluran panjang 40 m. 5. Rehabilitasi Talud pengaman Ngingkil, dengan realisasi	Penyusunan dokumen Perencanaan di tahun yang sama dengan pelaksanaan pekerjaan Konstruksi	Mengoptimalkan waktu yang ada dan Koordinasi dengan Petani Pemakai Air dengan kesepakatan penjadwalan pengaliran air	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						talud panjang 26 m. b. Rehabilitasi Bendung Sigoleng, dengan realisasi kolam olak panjang 13 m.			
				2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
				Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	90%	95,95%	1. Tata kelola SPAM yang belum optimal di tingkat masyarakat. 2. Adanya ego masing-masing desa / dusun dalam pemanfaatan sumber air minum	1. Pembentukan unit BUMDes bidang SPAM dan peningkatan kapasitas KPSPAM 2. Peningkatan kualitas SDM pengelola SPAM dengan sosialisasi dan pelatihan.	
				a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					
				1) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terlaksananya kegiatan peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan di 8 lokasi yaitu	Terlaksananya kegiatan peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan di 8	1. Kondisi topografi wilayah Kabupaten Temanggung dengan tingkat kemiringan yang	1. Menggunakan sarana dan prasarana yang lebih canggih 2. Sebelum penanaman pipa	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					1. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bejen Kecamatan Bejen 2. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bonjor Kecamatan Tretep 3. Peningkatan SPAM jaringan Perpipaan Desa Glapansari Kecamatan Parakan 4. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Morobongo Kecamatan Jumo 5. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Nglondong Kecamatan Parakan 6. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pitrosari Kecamatan Wonobojo 7. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Purwosari Kecamatan Kranggan 8. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tegallurung Kecamatan Bulu 9. Jasa Konsultansi Pengawasan Wilayah I 10. Jasa Konsultansi Pengawasan Wilayah II	lokasi yaitu 1. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bejen Kecamatan Bejen sebanyak 196 SR 2. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bonjor Kecamatan Tretep sebanyak 161 SR 3. Peningkatan SPAM jaringan Perpipaan Desa Glapansari Kecamatan Parakan sebanyak 138 SR 4. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Morobongo Kecamatan Jumo sebanyak 250 SR 5. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Nglondong Kecamatan Parakan sebanyak 250 SR 6. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pitrosari Kecamatan	tinggi dan berbeda-beda Jalur pipa melewati lahan warga	berkomunikasi dengan pemilik lahan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						<p>Wonobojo sebanyak 337 SR</p> <p>7. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Purwosari Kecamatan Kranggan sebanyak 170 SR</p> <p>8. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tegallurung Kecamatan Bulu sebanyak 60 SR</p> <p>9. 1 dokumen Jasa Konsultansi Pengawasan Wilayah I</p> <p>10. 1 dokumen Jasa Konsultansi Pengawasan Wilayah II</p>			
				2) Sub Kegiatan Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	<p>Terlaksananya 3 paket pekerjaan perbaikan SPAM jaringan perpipaan yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengamanan Sumber Mata Air Sidandang</li> <li>2. Jasa Konsultansi Perencanaan</li> <li>3. Jasa Konsultansi Pengawasan</li> </ol>	<p>Terlaksananya 3 paket pekerjaan perbaikan SPAM jaringan perpipaan yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengamanan Sumber Mata Air Sidandang sebanyak 1 unit</li> <li>2. 1 dokumen Jasa Konsultansi Perencanaan</li> <li>3. 1 dokumen Jasa Konsultansi Pengawasan</li> </ol>	Kondisi lokasi pembangunan yang sulit dijangkau menggunakan alat berat	Menggunakan tenaga manual untuk mengangkut material menuju lokas	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				3) Sub Kegiatan Fasilitas Penyiapan Kerja Sama SPAM	Terlaksananya Perencanaan DED DAK Air Minum Tahun 2024	Terlaksananya Perencanaan DED DAK Air Minum Tahun 2024	Terdapat desa yang kekurangan air tetapi tidak mempunyai sumber mata air	Mendorong peningkatan kerjasama antar desa	
				4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
				Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	50%	69,21%	Kondisi lingkungan/ kawasan rawan terjadi genangan	1. Terpenuhinya pembangunan drainase kawasan perkotaan 2. Prioritas Penganggaran 2023 di beberapa titik lokasi drainase	
				a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					
				1) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Terlaksananya 3 paket pekerjaan penyediaan sarana sistem drainase perkotaan yaitu 1. Pembangunan Drainase Ruas Jalan Sudikampir-Delok (M) 2. Jasa Konsultansi Perencanaan 3. Jasa Konsultansi Pengawasan	Terlaksananya 3 paket pekerjaan penyediaan sarana sistem drainase perkotaan yaitu 1. Pembangunan Drainase Jalan Sudikampir - Delok (M), dengan realisasi saluran uditch panjang 152 m. 2. 1 dokumen perencanaan Drainase Sudikampir - Delok (M)	Dokumen Perencanaan di tahun yang sama dengan Konstruksi dan ketersediaan barang fabrikasi.	Mengoptimalkan waktu yang ada	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						3. 1 dokumen pengawasan Pembangunan Drainase Jalan Sudikampir - Delok (M)			
				2) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	<p>Terlaksananya kegiatan operasional dan pemeliharaan sistem drainase 6 UPTD yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional I Temanggung</li> <li>2. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional II Parakan</li> <li>3. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional III Ngadirejo</li> <li>4. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional IV Kranggan</li> <li>5. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional V Kandangan</li> <li>6. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional VI Tembarak</li> </ol>	<p>Terlaksananya kegiatan operasional dan pemeliharaan sistem drainase 6 UPTD yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembelian peralatan dan perlengkapan kerja operasi dan pemeliharaan drainase sebanyak 1 paket.</li> <li>2. Belanja bahan material untuk pemeliharaan drainase sebanyak 1 paket.</li> <li>3. Pembayaran upah tenaga pemeliharaan drainase di 6 UPTD PJP 1-6 sejumlah 12 orang selama 8 bulan.</li> </ol>	<p>Kondisi eksisting infrastruktur saluran drainase gorong-gorong tingkat kerusakan lebih tinggi dari pada kemampuan anggaran tahun ini untuk pemeliharannya</p>	Skala prioritas dalam penangannya	



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				4. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					
				Persentase Desa terfasilitasi kegiatan Bankeu/Hibah	100%	100%	1. Proposal baru dikirimkan tahun berjalan. 2. Lokasi dan jenis pekerjaan yang tercantum dalam penetapan APBD dan Proposal berbeda	Sosialisasi kepada Desa terkait proposal dan usulan kegiatan sebelum pelaksanaan ( N-1)	
				a. Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					
				1) Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya kegiatan Bankeudes di 20 Kecamatan	Terfasilitasinya kegiatan Bankeudes di 20 Kecamatan ( terdapat 359 kegiatan dari 147 desa). Dari 147 desa terdapat 1 desa tidak mencairkan (Desa Kutoanyar)			
				5. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
				Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	80%	86,82%	Belum tersedia anggaran untuk pendataan	Berkoordinasi dengan BPKPAD selaku pengelola asset dan PD terkait	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				a. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					
				1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Terlaksananya fasilitasi permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)	Terlaksananya fasilitasi permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sejumlah 202 PGB dan 99 SLF pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)	Keterbatasan pemohon dalam mengakses SIMBG	Membantu pemohon untuk upload dokumen di SIMBG	
				2) Sub Kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya 5 paket konstruksi yaitu: 1. Pembangunan Gedung Arsip BPN 2. Pembangunan Gedung Kantor Koramil 16/Gemawang 3. Pembangunan Gedung Sabhara Polres Temanggung 4. Pembangunan Gedung Sarpras Polres Temanggung 5. Pembangunan Rumah Dinas Jaksa 6. Jasa Konsultansi Perencanaan 7. Jasa Konsultansi Pengawasan	Terlaksananya 5 paket konstruksi yaitu: 1. Pembangunan Gedung Arsip BPN 2. Pembangunan Gedung Kantor Koramil 16/Gemawang 3. Pembangunan Gedung Sabhara Polres Temanggung 4. Pembangunan Gedung Sarpras Polres 5. Pembangunan Rumah Dinas Jaksa	Progres fisik yang lambat	Melakukan rapat percepatan pelaksanaan konstruksi dan memberikan surat teguran kepada penyedia yang deviasinya > 10%	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						6. 1 dokumen Jasa Konsultansi Perencanaan 7. 1 dokumen Jasa Konsultansi Pengawasan			
				6. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
				Persentase Trotoar Kondisi Baik	62%	66,66%	Trotoar sering digunakan untuk PKL	Koordinasi penataan PKL bersama PD terkait	
				a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota					
				1) Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya kegiatan operasional dan pemeliharaan trotoar 6 UPTD yaitu : 1. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional I Temanggung 2. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional II Parakan 3. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional III Ngadirejo 4. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional IV Kranggan 5. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional V Kandangan 6. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan	Terlaksananya kegiatan operasional dan pemeliharaan trotoar 6 UPTD yaitu : 1. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional I Temanggung 2. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional II Parakan 3. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional III	Kondisi eksisting infrastruktur trotoar tingkat kerusakan lebih tinggi dari pada kemampuan anggaran tahun ini untuk pemeliharaannya	Menggunakan skala prioritas untuk penanganan perbaikan trotoar	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Regional Tembarak VI	4. Ngadirejo UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional IV Kranggan 5. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional V Kandangan 6. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional VI Tembarak			
				7. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
				Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	85%	89,16%	Terjadinya kenaikan harga material	1. Percepatan dalam penentuan atau penyesuaian harga 2. Perencanaan dilaksanakan pada tahun N-1	
				Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	93,73%	94,36%	Jumlah anggaran yang tersedia belum bisa mencukupi kebutuhan untuk pemeliharaan jembatan sebanyak 337 unit.	Menggunakan skala prioritas untuk pemeliharaan jembatan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				a. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					
				1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	<p>Terlaksananya 6 paket pekerjaan jasa konsultasi yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa Konsultasi Perencanaan Jalan DAK dan Bankeu Tahun Anggaran 2024</li> <li>2. Jasa Konsultasi Perencanaan Jembatan</li> <li>3. Jasa Konsultasi Perencanaan DED Jalan Usulan Inpres Paket 1</li> <li>4. Jasa Konsultasi Perencanaan DED Jalan Usulan Inpres Paket 2</li> <li>5. Jasa Konsultasi Perencanaan DED Pelebaran Jembatan Tahun 2024</li> <li>6. Jasa Konsultasi Perencanaan DED Rehabilitasi Jembatan Tahun 2024</li> </ol>	<p>Terlaksananya 6 paket pekerjaan jasa konsultasi yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 dokumen Jasa Konsultasi Perencanaan Jalan DAK dan Bankeu Tahun Anggaran 2024</li> <li>2. 1 dokumen Jasa Konsultasi Perencanaan Jembatan</li> <li>3. 1 dokumen Jasa Konsultasi Perencanaan DED Jalan Usulan Inpres Paket 1</li> <li>4. 1 dokumen Jasa Konsultasi Perencanaan DED Jalan Usulan Inpres Paket 2</li> <li>5. 1 dokumen Jasa Konsultasi Perencanaan DED Pelebaran Jembatan Tahun 2024</li> <li>6. 1 dokumen Jasa Konsultasi Perencanaan DED Rehabilitasi Jembatan Tahun 2024</li> </ol>	Kegiatan dilaksanakan di anggaran perubahan	Mengoptimalkan waktu yang tersedia	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				2) Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan dan jembatan	Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan dan jembatan seluas 3.578 m2	Adanya perbedaan nama pada KTP dan Sertifikat pada beberapa pemilik laha	Membuat Surat Keterangan Beda Nama dari Kecamatan	
				3) Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar	<p>Terlaksananya 11 pekerjaan konstruksi yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelebaran Jalan Menuju Standar Madureso - Tembarak (M) + (P)</li> <li>2. Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Bengkal - Gambasan (M)</li> <li>3. Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Gilingsari - Langgeng (M)</li> <li>4. Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Jalan Campuranom - Watukumpul (M)</li> <li>5. Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Jalan Wonoboyo - Pringlegi (M)</li> <li>6. Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Muntung - Jumprit (M)</li> <li>7. Peningkatan Jalan Mudal - Tembarak - Gambasan KAB. TEMANGGUNG Bankeu Prov)</li> <li>8. Penanganan Long</li> </ol>	<p>Terlaksananya 11 pekerjaan konstruksi yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelebaran Jalan Menuju Standar Madureso - Tembarak (M) + (P) dengan realisasi panjang 0,550 km</li> <li>2. Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Bengkal - Gambasan (M) dengan realisasi panjang 0,265 km</li> <li>3. Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Gilingsari - Langgeng (M) dengan realisasi panjang 0,650 km</li> <li>4. Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Jalan Campuranom - Watukumpul (M) dengan realisasi panjang 0,200 km</li> <li>5. Pelebaran Jalan Menuju Standar</li> </ol>	Adanya Tender Ulang pada Pekerjaan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Mengoptimalkan waktu yang tersedia.	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Segment Jalan Caturanom - Campuranom (DAK) 9. Penanganan Long Segment Jalan Manden - Gondangan (DAK) 10. Penanganan Long Segment Jalan Parakan - Wonosroyo (DAK) 11. Penanganan Long Segment Jalan Plimbungan - Bansari (DAK) 12. Jasa Konsultansi Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar APBD Tahun Anggaran 2023 13. Jasa Konsultansi Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2023 14. Jasa Konsultansi Perencanaan Pelebaran Jalan Menuju Standar APBD Tahun Anggaran 2023 15. Jasa Konsultansi Perencanaan Pelebaran Jalan Menuju Standar Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2023 16. Jasa Konsultansi Pengawasan DAK	Ruas Jalan Wonoboyo - Pringlegi (M) dengan realisasi panjang 0,200 km 6. Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Muntung - Jumprit (M) dengan realisasi panjang 0,600 km 7. Peningkatan Jalan Mudal - Tembarak - Gambasan KAB. TEMANGGUNG Bankeu Prov) dengan realisasi panjang 4,113 km 8. Penanganan Long Segment Jalan Caturanom - Campuranom (DAK) dengan realisasi panjang 1,300 km 9. Penanganan Long Segment Jalan Manden - Gondangan (DAK) dengan realisasi panjang 3,470 km 10. Penanganan Long Segment Jalan Parakan - Wonosroyo (DAK) dengan			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Paket 1 17. Jasa Konsultansi Pengawasan DAK Paket 2 18. Jasa Konsultansi Pengawasan DAK Paket 3 19. Jasa Konsultansi Pengawasan DAK Paket 4 20. Penyusunan DED Penanganan Jalan (Bankeu Provinsi JawaTengah + CSR Bank Jateng) Tahun 2024	realisasi panjang 5,725 km 11. Penanganan Long Segment Jalan Plimbungan - Bansari (DAK) dengan realisasi panjang 3,200 km 12. 1 dokumen Jasa Konsultansi Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar APBD Tahun Anggaran 2023 13. 1 dokumen Jasa Konsultansi Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2023 14. 1 dokumen Jasa Konsultansi Perencanaan Pelebaran Jalan Menuju Standar APBD Tahun Anggaran 2023 15. 1 dokumen Jasa Konsultansi Perencanaan Pelebaran Jalan Menuju Standar Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2023 16. 1 dokumen Jasa			



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Konsultasi Pengawasan DAK Paket 1 17. 1 dokumen Jasa Konsultasi Pengawasan DAK Paket 2 18. 1 dokumen Jasa Konsultasi Pengawasan DAK Paket 3 19. 1 dokumen Jasa Konsultasi Pengawasan DAK Paket 4 20. 1 dokumen Penyusunan DED Penanganan Jalan (Bankeu Provinsi JawaTengah + CSR Bank Jateng) Tahun 2024			
				4) Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya 8 paket pekerjaan konstruksi yaitu: 1. Rekonstruksi Jalan Janggleng - Porot 2. Rekonstruksi Jalan Jumo - Ketitang (M) 3. Rekonstruksi Jalan Ngaliyan - Kali Lutut 4. Rekonstruksi Jalan Ngipik - Karangwuni (M) 5. Rekonstruksi Jalan Pagergunung - Kwarakan 6. Rekonstruksi Jalan Rowoseneng - Tlogopucang	Terlaksananya 8 paket pekerjaan konstruksi yaitu: 1. Rekonstruksi Jalan Janggleng – Porot dengan realisasi panjang 0,930 km 2. Rekonstruksi Jalan Jumo - Ketitang (M) dengan realisasi panjang 0,350 km 3. Rekonstruksi	Adanya Tender Ulang pada Pekerjaan Rekonstruksi Jalan sehingga waktu pelaksanaan terbatas.	Mengoptimalkan waktu yang tersedia.	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					7. Rekonstruksi Jalan Tleter - Wonokerso 8. Rekonstruksi Jalan Tlogo - Plososari 9. Jasa Konsultansi Pengawasan Rekonstruksi Jalan Tahun Anggaran 2023 APBD (Paket 1) 10. Jasa Konsultansi Pengawasan Rekonstruksi Jalan Tahun Anggaran 2023 APBD (Paket 2) 11. Jasa Konsultansi Perencanaan Rekonstruksi Jalan Tahun Anggaran 2023 APBD	Jalan Ngaliyan - Kali Lutut dengan realisasi panjang 0,400 km 4. Rekonstruksi Jalan Ngipik - Karangwuni (M) dengan realisasi panjang 0,300 km 5. Rekonstruksi Jalan Pagergunung - Kwarakan dengan realisasi panjang 0,100 km 6. Rekonstruksi Jalan Rowoseneng - Tlogopucang dengan realisasi panjang 0,700 km 7. Rekonstruksi Jalan Tleter - Wonokerso dengan realisasi panjang 0,315 km 8. Rekonstruksi Jalan Tlogo - Plososari dengan realisasi panjang 0,900 km 9. 1 dokumen			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						<p>Jasa Konsultasi Pengawasan Rekonstruksi Jalan Tahun Anggaran 2023 APBD (Paket 1)</p> <p>10. 1 dokumen Jasa Konsultasi Pengawasan Rekonstruksi Jalan Tahun Anggaran 2023 APBD (Paket 2)</p> <p>11. 1 dokumen Jasa Konsultasi Perencanaan Rekonstruksi Jalan Tahun Anggaran 2023 APBD</p>			
				5) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	<p>Terlaksananya 8 paket pekerjaan konstruksi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rehabilitasi Jalan Dalangan - Bagus</li> <li>2. Rehabilitasi Jalan Geblok - Gentan</li> <li>3. Rehabilitasi Jalan Kandangan - Dakaran</li> <li>4. Rehabilitasi Jalan Kebraman - Gemawang (M)</li> <li>5. Rehabilitasi Jalan Kranggan - Kaloran</li> <li>6. Rehabilitasi Jalan Margoyoso -</li> </ol>	<p>Terlaksananya 8 paket pekerjaan konstruksi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rehabilitasi Jalan Dalangan - Bagus dengan realisasi panjang 1,070 km</li> <li>2. Rehabilitasi Jalan Geblok - Gentan dengan realisasi panjang 0,843 km</li> <li>3. Rehabilitasi Jalan Kandangan -</li> </ol>	Adanya Tender Ulang pada Pekerjaan Rehabilitasi sehingga waktu pelaksanaan terbatas.	Mengoptimalkan waktu yang tersedia.	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Krawitan 7. Rehabilitasi Jalan Ngadisepi - Wonotopo 8. Rehabilitasi Jalan Ploso- Kejiwan 9. Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Jalan APBD Tahun Anggaran 2023 (Paket 1) 10. Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Jalan APBD Tahun Anggaran 2023 (Paket 2) 11. Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Jalan APBD Tahun Anggaran 2023	Dakaran dengan realisasi panjang 0,450 km 4. Rehabilitasi Jalan Kebraman - Gemawang (M) dengan realisasi panjang talud 104,00 m 5. Rehabilitasi Jalan Kranggan – Kaloran dengan realisasi panjang 0,500 km 6. Rehabilitasi Jalan Margoyoso – Krawitan dengan realisasi panjang 0,600 km 7. Rehabilitasi Jalan Ngadisepi – Wonotopo dengan realisasi panjang 0,880 km 8. Rehabilitasi Jalan Ploso-Kejiwan dengan realisasi panjang 0,850 km 9. 1 dokumen Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Jalan APBD Tahun Anggaran 2023 (Paket 1) 10. 1 dokumen Jasa			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						<p>Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Jalan APBD Tahun Anggaran 2023 (Paket 2)</p> <p>11. 1 dokumen Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Jalan APBD Tahun Anggaran 2023</p>			
				6) Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	<p>Terlaksananya 10 paket pekerjaan konstruksi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan Berkala Jalan Dr. Wahidin</li> <li>2. Pemeliharaan Berkala Jalan Kandangan - Rowoseneng (M)</li> <li>3. Pemeliharaan Berkala Jalan Kranggan - Klepu</li> <li>4. Pemeliharaan Berkala Jalan Kundisari - Mergowati (M)</li> <li>5. Pemeliharaan Berkala Jalan Laranganluwok - Tretep</li> <li>6. Pemeliharaan Berkala Jalan Petirejo - Katekan</li> <li>7. Pemeliharaan Berkala Jalan Sengonpandak - Banaran</li> <li>8. Pemeliharaan Berkala Jalan Tegowanuh -</li> </ol>	<p>Terlaksananya 10 paket pekerjaan konstruksi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan Berkala Jalan Dr. Wahidin dengan realisasi panjang 0,800 km</li> <li>2. Pemeliharaan Berkala Jalan Kandangan - Rowoseneng (M) dengan realisasi panjang 0,600 km</li> <li>3. Pemeliharaan Berkala Jalan Kranggan - Klepu dengan realisasi panjang 0,800 km</li> <li>4. Pemeliharaan Berkala Jalan Kundisari - Mergowati (M) dengan</li> </ol>	Adanya Tender Ulang pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan sehingga waktu pelaksanaan terbatas.	Mengoptimalkan waktu yang tersedia.	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Tepusen 9. Pemeliharaan Berkala Jalan Tegowanuh - Termas 10. Pemeliharaan Berkala Jalan Wanutengah - Wonotirto 11. Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan APBD Tahun Anggaran 2023 (Paket 1) 12. Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan APBD Tahun Anggaran 2023 (Paket 2) 13. Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Tahun Anggaran 2023 APBD	realisasi panjang 0,668 km 5. Pemeliharaan Berkala Jalan Laranganluwo k – Tretep dengan realisasi panjang 0,705 km 6. Pemeliharaan Berkala Jalan Petirejo – Katekan dengan realisasi panjang 0,325 km 7. Pemeliharaan Berkala Jalan Sengonpanda k – Banaran dengan realisasi panjang 0,420 km 8. Pemeliharaan Berkala Jalan Tegowanuh – Tepusen dengan realisasi panjang 0,320 km 9. Pemeliharaan Berkala Jalan Tegowanuh – Termas dengan realisasi panjang 0,300 km 10. Pemeliharaan			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						<p>Berkala Jalan Wanutengah – Wonotirto dengan realisasi panjang 0,400 km</p> <p>11. 1 dokumen Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan APBD Tahun Anggaran 2023 (Paket 1)</p> <p>12. 1 dokumen Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan APBD Tahun Anggaran 2023 (Paket 2)</p> <p>13. 1 dokumen Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Tahun Anggaran 2023 APBD</p>			
				7) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	<p>Terlaksananya 20 paket pekerjaan untuk pemeliharaan rutin jalan yaitu :</p> <p>1. Aspal Buton CPHMA</p> <p>2. Aspal Hot Mixed AC-WC</p> <p>3. Aspal Keras</p>	<p>Terlaksananya 20 paket pekerjaan untuk pemeliharaan rutin jalan yaitu :</p> <p>1. Aspal Buton CPHMA 1 paket</p> <p>2. Aspal Hot Mixed AC-WC</p>	<p>Waktu pelaksanaan pada saat curah hujan dengan intensitas tinggi</p>	<p>Membuat jadwal yang tersusun dengan baik, serta manajemen konstruksi yang baik.</p>	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Penetrasi 60/70 kemas drum (nett 155 kg) 4. Semen (PC/PPC/PCC) 50 Kg 5. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Regional III Ngadirejo 6. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Regional II Parakan 7. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Regional I Temanggung 8. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Regional IV Kranggan 9. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Regional VI Tembarak 10. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Regional V Kandangan 11. Semen (PC/PPC/PCC) 50 Kg 12. Preservasi Upt Regional III Ngadirejo 13. Preservasi Upt Regional II Parakan 14. Preservasi Upt	1 paket 3. Aspal Keras Penetrasi 60/70 kemas drum (nett 155 kg) 1 paket 4. Semen (PC/PPC/PCC) 50 Kg 1 paket 5. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Regional III Ngadirejo 1 paket 6. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Regional II Parakan 1 paket 7. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Regional I Temanggung 1 paket 8. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Regional IV Kranggan 1 paket 9. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Regional VI Tembarak 1 paket			



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Regional I Temanggung 15. Preservasi Upt Regional IV Kranggan 16. Preservasi Upt Regional VI Tembarak 17. Preservasi Upt Regional V Kandangan 18. Jasa Konsultansi Perencanaan Survey Kondisi Jalan Paket 1 19. Jasa Konsultansi Perencanaan Survey Kondisi Jalan Paket 2 20. Jasa Konsultansi Perencanaan Survey Kondisi Jalan Paket 3	1 paket 10. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Regional V Kandangan 1 paket 11. Semen (PC/PPC/PCC ) 50 Kg 1 paket 12. Preservasi Upt Regional III Ngadirejo dengan realisasi talud sepanjang 8 m 13. Preservasi Upt Regional II Parakan realisasi talud sepanjang 40,5 m 14. Preservasi Upt Regional I Temanggung realisasi talud sepanjang 74,2 m 15. Preservasi Upt Regional IV Kranggan realisasi talud sepanjang 33 m 16. Preservasi Upt Regional VI Tembarak realisasi talud sepanjang 8 m 17. Preservasi Upt Regional V			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						<p>Kandangan realisasi talud sepanjang 48,5 m</p> <p>18. 1 dokumen Jasa Konsultansi Perencanaan Survey Kondisi Jalan Paket 1</p> <p>19. 1 dokumen Jasa Konsultansi Perencanaan Survey Kondisi Jalan Paket 2</p> <p>20. 1 dokumen Jasa Konsultansi Perencanaan Survey Kondisi Jalan Paket 3</p>			
				8) Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	<p>Terlaksananya 2 paket pekerjaan pembangunan jembatan yaitu :</p> <p>1. Pembangunan Jembatan Kali Sisih Ruas Jalan Dalangan - Gemawang</p> <p>2. Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Jembatan APBD Tahun Anggaran 2023</p>	<p>Terlaksananya 2 paket pekerjaan pembangunan jembatan yaitu :</p> <p>1. Pembangunan Jembatan Kali Sisih Ruas Jalan Dalangan - Gemawang dengan realisasi panjang 12,000 m</p> <p>2. 1 dokumen Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Jembatan APBD Tahun Anggaran 2023</p>	Debit aliran sungai dan curah hujan yang tinggi	Membuat jadwal yang tersusun dengan baik, serta manajemen konstruksi yang baik.	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				9) Sub Kegiatan Penggantian Jembatan	<p>Terlaksananya 3 paket pekerjaan penggantian jembatan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggantian Jembatan Kali Betik/Kayen (Ruas Jalan Sanggrahan - Kemloko) (M)</li> <li>2. Jasa Konsultansi Perencanaan Penggantian Jembatan APBD Tahun Anggaran 2023</li> <li>3. Jasa Konsultansi Pengawasan Individu Penggantian Jembatan APBD Tahun Anggaran 2023</li> </ol>	<p>Terlaksananya 3 paket pekerjaan penggantian jembatan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggantian Jembatan Kali Betik/Kayen (Ruas Jalan Sanggrahan - Kemloko) (M) dengan realisasi panjang 4,200 m</li> <li>2. 1 dokumen Jasa Konsultansi Perencanaan Penggantian Jembatan APBD Tahun Anggaran 2023</li> <li>3. 1 dokumen Jasa Konsultansi Pengawasan Individu Penggantian Jembatan APBD Tahun Anggaran 2023</li> </ol>	Debit aliran sungai dan curah hujan yang tinggi	Membuat jadwal yang tersusun dengan baik, serta manajemen konstruksi yang baik.	
				10) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	<p>Terlaksananya 2 paket pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan Groundsill Jembatan Kali Progo Jumo</li> <li>2. Pembangunan Pengaman Jalan/Jembatan Ruas Jalan Tepusen - Kejiwan</li> </ol>	<p>Terlaksananya 2 paket pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan Groundsill Jembatan Kali Progo Jumo dengan realisasi panjang 10,000 m</li> <li>2. Pembangunan Pengaman Jalan/Jembata</li> </ol>	Debit aliran sungai dan curah hujan yang tinggi	Membuat jadwal yang tersusun dengan baik, serta manajemen konstruksi yang baik.	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						n Ruas Jalan Tepusen – Kejiwan dengan realisasi panjang 10,000 m			
				8. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
				Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	88,10%	89,56%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tata ruang</li> <li>Belum lengkapnya instrumen dasar atau aturan dalam kegiatan pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang</li> <li>belum terstrukturnya lembaga pengawasan dan pengendalian tata ruang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi tentang perda RTRW</li> <li>Adanya informasi yang bisa diakses tentang tata ruang kepada masyarakat</li> </ol>	
				a. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota					
				1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang 88,10%	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan revisi RTRW dengan menyesuaikan peraturan</li> </ol>	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota		89,56%	masyarakat tentang tata ruang 2. Belum lengkapnya instrumen dasar atau aturan dalam kegiatan pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang 3. Belum terstrukturnya lembaga pengawasan dan	perundang-undangan terbaru 2. Sosialisasi tentang perda RTRW 3. Adanya informasi yang bisa diakses tentang tata ruang kepada masyarakat	
				b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					
				1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang 88,10%	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang 89,56%	1. Masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tata ruang 2. Belum lengkapnya instrumen dasar atau aturan dalam kegiatan pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang 3. Belum terstrukturnya lembaga pengawasan dan	1. Penyusunan revisi RTRW dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan terbaru 2. Sosialisasi tentang perda RTRW 3. Adanya informasi yang bisa diakses tentang tata ruang kepada masyarakat	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							pengendalian tata ruang		
4.	Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	DPRKPLH		<b>1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>					
				Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	5,00 %	4,50 %			
				Cakupan Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Sanitasi	86,80 %	94,39 %			
				a. Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus					
				Sub Kegiatan : 1) Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus					
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	72 Dokumen	72 Dokumen			
					Rusunawa Kranggan I 12 Dokumen	Rusunawa Kranggan I 12 Dokumen			
					Rusunawa Kranggan II 12 Dokumen	Rusunawa Kranggan II 12 Dokumen			
					Rusunawa Kertosari 12 Dokumen	Rusunawa Kertosari 12 Dokumen			
					Rusunawa Parakan Wetan 12 Dokumen	Rusunawa Parakan Wetan 12 Dokumen			
					Rusunawa Parakan Kauman 12 Dokumen	Rusunawa Parakan Kauman 12 Dokumen			
					Rusunawa Manggong 12 Dokumen	Rusunawa Manggong 12 Dokumen			
				<b>2. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>					

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Persentase Rumah Layak Huni	89,42 %	95,50 %			
				Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan	18,25 %	4,86 %			
				Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	100 %			
				Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100 %	100 %			
				a. Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha					
				Sub Kegiatan : a) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni					
				1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	80 Unit	80 Unit			
				• Kecamatan Bejen	12 Unit	12 Unit			
				• Kecamatan Kaloran	43 Unit	43 Unit			
				• Kecamatan Pringsurat	14 Unit	14 Unit			
				• Kecamatan Temanggung	2 Unit	2 Unit			
				• Kecamatan Kedu	2 Unit	2 Unit			
				• Kecamatan Kandangan	1 Unit	1 Unit			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				• Kecamatan Jumo	4 Unit	4 Unit			
				• Kecamatan Bansari	2 Unit	2 Unit			
				2. Jumlah Jamban yang dibangun	33 unit di Kecamatan Bulu	33 unit di Kecamatan Bulu			
				3. Luasan rumah yang diplester lantai	17.692 M2	17.692 M2			
				❖ Penerima Bantuan Pekerjaan Plester Lantai	361 rumah	361 rumah			
				• Kecamatan Bejen	26 Unit	26 Unit			
				• Kecamatan Kaloran	16 Unit	16 Unit			
				• Kecamatan Pringsurat	17 Unit	17 Unit			
				• Kecamatan Kedu	6 Unit	6 Unit			
				• Kecamatan Kandangan	69 Unit	69 Unit			
				• Kecamatan Jumo	11 Unit	11 Unit			
				• Kecamatan Bansari	12 Unit	12 Unit			
				• Kecamatan Ngadirejo	47 Unit	47 Unit			
				• Kecamatan selopampang	1 Unit	1 Unit			
				• Kecamatan Tembarak	7 Unit	7 Unit			
				• Kecamatan Bulu	8 Unit	8 Unit			
				• Kecamatan Tretep	35 Unit	35 Unit			
				• Kecamatan Wonoboyo	4 Unit	4 Unit			
				• Kecamatan Candirotro	17 Unit	17 Unit			



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				• Kecamatan Parakan	8 Unit	8 Unit			
				• Kecamatan Kledung	4 Unit	4 Unit			
				• Kecamatan Kranggan	28 Unit	28 Unit			
				• Kecamatan Gemawang	42 Unit	42 Unit			
				• Kecamatan Tlogomulyo	3 Unit	3 Unit			
				4. Jumlah rumah yang dipasang listrik	121 Unit	121 Unit			
				• Kecamatan Bansari	1 Unit	1 Unit			
				• Kecamatan Bejen	4 Unit	4 Unit			
				• Kecamatan Bulu	12 Unit	12 Unit			
				• Kecamatan Candiroto	10 Unit	10 Unit			
				• Kecamatan Gemawang	4 Unit	4 Unit			
				• Kecamatan Jumo	2 Unit	2 Unit			
				• Kecamatan Kaloran	1 Unit	1 Unit			
				• Kecamatan Kandangan	6 Unit	6 Unit			
				• Kecamatan Kedu	3 Unit	3 Unit			
				• Kecamatan Kranggan	9 Unit	9 Unit			
				• Kecamatan Ngadirejo	14 Unit	14 Unit			
				• Kecamatan Parakan	7 Unit	7 Unit			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Kecamatan Pringsurat</li> </ul>	14 Unit	14 Unit			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Kecamatan Selompang</li> </ul>	1 Unit	1 Unit			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Kecamatan Temanggung</li> </ul>	20 Unit	20 Unit			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Kecamatan Tembarak</li> </ul>	2 Unit	2 Unit			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Kecamatan Tlogomulyo</li> </ul>	2 Unit	2 Unit			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Kecamatan Tretep</li> </ul>	4 Unit	4 Unit			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Kecamatan Wonobojo</li> </ul>	5 Unit	5 Unit			
				Sub Kegiatan : 2) Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU					
				Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen	1 Dokumen			
5.	Trantibumlinmas	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		<b>1. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum</b>	100	100			
				<b>Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		1. Secara rutin melaksanakan sosialisasi dan mengintensifkan patroli 2. mengikutsertakan personil untuk mengikuti diklat atau bimbingan teknis 3. kurangnya kesadaran masyarakat untuk patuh dan tertib	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
								Perda/Perbup/produk hukum lainnya 4. Kurangnya dukungan sarpras dalam pelaksanaan tugas.	
				<b>Rasio Linmas per RT</b>	<b>1,62</b>	<b>1,62</b>		1. mengadakan pembinaan linmas ke desa/kelurahan	
				<b>Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		1) Sosialisasi pada masyarakat tentang penegakan Perda dan Perbup 2) Peningkatan kapasitas PPNS 3) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang penegakan Perda dan Perbup 4) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung penegakan Perda dan Perbup	
				a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	2			
				1) pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, pelaksanaan, Patroli, pengamanan, dan Pengawasan	240	240			
				2) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta	12	12			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota					
				b. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	1	1			
				1) Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12	12			
				<b>2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
				<b>Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten</b>	61	60,64		1. Peningkatan sarpras 2. Peningkatan kompetensi pegawai 3. Pemberdayaan masyarakat	
				<b>Tingkat waktu tanggap (respon time rate)</b>	69,8	49		memberikan sosialisasi kepada warga agar cepat memberikan laporan bila terjadi kebakaran	
				<b>Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten</b>	44	545		1. Pemenuhan sarpras dan APD minimal yang siap dipergunakan di pos induk untuk mengcover seluruh wilayah Temanggung, idealnya di setiap pos tersedia sarpras dan APD untuk penanganan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia 2. Mengadakan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
								kegiatan peningkatan kompetensi dan pengetahuan anggota damkar baik PNS maupun non-PNS	
				Presentase aparatur yang memenuhi standar kualifikasi	44	96		1. Mengikuti kegiatan2 yang bersifat pengembangan kapasitas aparatur Damkar ( baik pelatihan maupun lomba ) 2. Biaya pelatihan peningkatan kompetensi damkar yang mahal. 3. informasi terkait pelatihan terbatas. 4. alokasi anggaran untuk peningkatan kompetensi damkar dari pemerintah masih terbatas dan kecil	
				Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	39		1) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran 2) Pemenuhan sarana sumber air (groundtank) di Pos Damkar	
				a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	12			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				1) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	12			
				2) Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	480	480			
				3) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran					
6.	Sosial	Dinas Sosial	Perda No. 6 Tahun 2019 tentang Penanganan Kemiskinan Perda No. 6 Tahun 2019 tentang Penanganan Kemiskinan	<b>1. Program Pemberdayaan Sosial</b>					
				<b>Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>Kurangnya fasilitasi dan pendampingan bagi peningkatan kemampuan dan peran serta Sumber Daya Manusia PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial</b>	<b>fasilitasi dan pembinaan lebih insentif kegiatan PSKS. Pemberian tali asih sebagai penghargaan terhadap kinerja PSKS.</b>	<b>Koordinasi dan pendampingan intensif kegiatan PSKS.</b>
				<b>a. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				1) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lembaga : 1. Karang Taruna Kabupaten. 2. LKKS (kabupaten) 3. LKS (PA Betlehem, PA Darul Falach, PA Darul Hadlonah Putra, PA Darul Hadlonah Putri, PAY Muhammadiyah Putra, PAY Muhammadiyah Putri, PA Al Hidayatul Islamiyah Munawiri, PA Al Ihsan Temanggung dan PA Disabilitas Rungu ABATA) 4. IPSM Kabupaten.	5 Lembaga : 1. Karang Taruna Kabupaten. 2. LKKS (kabupaten) 3. LKS (PA Betlehem, PA Darul Falach, PA Darul Hadlonah Putra, PA Darul Hadlonah Putri, PAY Muhammadiyah Putra, PAY Muhammadiyah Putri, PA Al Hidayatul	Tidak optimalnya pembinaan pada pilar-pilar kesejahteraan sosial dikarenakan kurangnya koordinasi dan pembinaan yang tidak berkelanjutan serta kurangnya fasilitasi pendukung pelaksanaan Usaha Kesejahteraan	1) Memanfaatkan media sosial dan melaksanakan pertemuan secara daring melalui zoom meeting. 2) Mengikuti peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh Dinsos Provinsi Jateng maupun webinar yang diselenggarakan oleh pihak lain untuk peningkatan	Mengoptimalkan pembinaan pada pilar-pilar sosial dengan cara memfasilitasi sarpras untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					5. SLRT. Dharma Parahita 6. Forum TAGANA	Islamiyah Munawiri, PA Al Ihsan Temanggung dan PA Disabilitas Rungu ABATA)  4. IPSM Kabupaten. 5. SLRT. Dharma Parahita 6. Forum TAGANA	Sosial.	kemampuan mengatasi permasalahan sosial. 3) Memberdayakan pilar-pilar sosial di kecamatan masing-masing penerima hibah bansos 4) Membuat Surat Edaran Kepala Dinas Sosial kepada yang dilampiri materi sosialisasi kepada camat untuk melaksanakan sosialisasi pembentukan Puskesmas Desa	
				<b>2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>					
				Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100 %	100 %	Adanya rasionalisasi anggaran , sehingga kegiatan bimbingan sosial tidak dapat dilaksanakan secara maksimal	Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi ke propinsi untuk memfasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/K

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									ota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
				<b>a. Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi ke daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke desa Kelurahan asal</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				1) Sub kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	10 orang ( 2 orang sudah mendapatkan fasilitasi pendampingan dan diakses dengan bantuan sosial dari sistem sumber lain dan 8 orang masih dalam proses assesment)	10 orang ( 2 orang sudah mendapatkan fasilitasi pendampingan dan diakses dengan bantuan sosial dari sistem sumber lain dan 8 orang masih dalam proses assesment)	Kurang optimalnya pendampingan sosial	Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait	Mengoptimalkan pendampingan sosial
				<b>3. Program Rehabilitasi Sosial</b>					
				Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat respon kasus	Melaksanakan koordinasi dengan lembaga/ UPT kementerian Sosial yang menangani terkait permasalahan anak.	Meningkatkan koordinasi dengan petugas lapangan dan pemerintah desa
				Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	Masih kurangnya dukungan anggaran untuk kegiatan bimbingan bagi disabilitas di Kabupaten Temanggung	Melaksanakan koordinasi dengan UPT Kementerian sosial (Centra Terpadu Kartini) dalam penanganan disabilitas di Kabupaten Temanggung	Meningkatkan koordinasi dengan petugas lapangan dan pemerintah desa



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	100 %	Masih banyaknya lanjut usia yang tidak dapat diterima di panti pelayanan lansia dikarenakan kondisi lansia yang sudah bedrest	Koordinasi dengan pihak yang terkait dengan penanganan lansia terlantar, terus melakukan koordinasi dengan pemprov terkait pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar yang mengalami kedisabilitas.	Meningkatkan koordinasi dengan petugas lapangan dan pemerintah desa
				Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100 %	100 %	Kurangnya anggaran untuk operasional Rumah Singgah	Perlu adanya dukungan anggaran untuk operasional rumah	Meningkatkan koordinasi dengan petugas lapangan, pemerintah desa dan panti terkait untuk rujukan.
				Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial	1,22 %	11,58 %	Kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi PPKS di luar panti merupakan kegiatan respon kasus, dan terdapat kondisi masih kurangnya dukungan anggaran untuk kegiatan bimbingan bagi disabilitas, terdapatnya lansia yg tidak dapat dilayani di panti dikarenakan kondisi bedrest, dan kurangnya anggaran untuk operasional Rumsing.	Koordinasi dengan Dinas instansi terkait, perlu dukungan anggaran untuk bimbingan dan pembinaan lanjut. Selalu memanfaatkan sistem sumber yang ada.	Meningkatkan koordinasi dengan petugas lapangan, pemerintah desa dan panti terkait untuk rujukan.

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				<b>a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				1) Sub kegiatan: Penyediaan Permakanan	11 orang Kebutuhan Makanan bagi Klien: 1. Disabilitas Terlantar 3 orang, 2. Tunas Sosial 2 orang, 3. Anak Terlantar 1 orang, Lanjut Usia Terlantar 5 orang	11 orang Kebutuhan Makanan bagi Klien: 1. Disabilitas Terlantar 3 orang, 2. Tunas Sosial 2 orang, 3. Anak Terlantar 1 orang, 4. Lanjut Usia Terlantar 5 orang	Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat respon kasus ( <i>unpredictable</i> )	Melakukan koordinasi dengan petugas lapangan (TKSK dan TKSPD) untuk melakukan asesmen dan penjangkauan.	Meningkatkan koordinasi dengan petugas lapangan dan pemerintah desa
				2) Sub kegiatan Penyediaan Sandang	60 orang (Jumlah Orang yang Menerima Pakaian 60 orang disabilitas)	60 orang (Jumlah Orang yang Menerima Pakaian 60 orang disabilitas)	Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat respon kasus ( <i>unpredictable</i> )	Melakukan koordinasi dengan petugas lapangan (TKSK dan TKSPD) untuk melakukan asesmen dan penjangkauan.	Meningkatkan koordinasi dengan petugas lapangan dan meningkatkan pendampingan sosial.
				3) Sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu	49 orang Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu sebanyak 49 orang : 29 orang penerima kursi roda (10 orang dari anggaran 2022 dan 19 orang dari anggaran 2023), 3 orang penerima	49 orang Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu sebanyak 49 orang : 29 orang penerima kursi roda (10 orang dari anggaran 2022 dan 19 orang dari anggaran 2023), 3 orang penerima walker (dari anggaran 2021), 8 orang penerima alat bantu kaki tiga (3	Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat respon kasus ( <i>unpredictable</i> )	Melakukan koordinasi dengan petugas lapangan (TKSK dan TKSPD) untuk melakukan asesmen dan penjangkauan serta Desa/Kelurahan untuk mengajukan proposal permohonan..	Meningkatkan koordinasi dengan petugas lapangan dan meningkatkan pendampingan sosial.

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					walker (dari anggaran 2021), 8 orang penerima alat bantu kaki tiga (3 orang dari anggaran 2021 dan 5 orang dari anggaran 2022), 9 alat bantu tongkat (5 orang dari anggaran 2021 dan 4 orang dari anggaran 2022)	orang dari anggaran 2021 dan 5 orang dari anggaran 2022), 9 alat bantu tongkat (5 orang dari anggaran 2021 dan 4 orang dari anggaran 2022)			
				4) Sub kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1 Orang (1 Orang Lanjut Usia dari Kabupaten Wonogiri, Jawa tengah)	1 Orang (1 Orang Lanjut Usia dari Kabupaten Wonogiri, Jawa tengah)	Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat respon kasus ( <i>unpredictable</i> )	Melakukan koordinasi dengan petugas lapangan (TKSK dan TKSPD) untuk melakukan asesmen dan penjangkauan serta Desa/Kelurahan untuk mengajukan proposal permohonan..	Meningkatkan koordinasi dengan petugas lapangan dan meningkatkan pendampingan sosial.
				5) Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	25 orang (25 orang Penyandang Disabilitas)	25 orang (25 orang Penyandang Disabilitas)	Kegiatan ini perlu disesuaikan anggaran	Berkoordinasi dengan lembaga lain seperti Sentra Terpadu Kartini, PPSDSN Penganthi, dan Kemenag untuk menjadi narasumber.	Meningkatkan koordinasi dengan lembaga lain dan meningkatkan pendampingan sosial.
				6) Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	81 orang (Gepeng 13 orang, LUT 14 orang dan Disabilitas terlantar 54 orang)	81 orang (Gepeng 13 orang, LUT 14 orang dan Disabilitas terlantar 54 orang)	Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat respon kasus ( <i>unpredictable</i> )	Melakukan koordinasi dengan petugas lapangan (TKSK), pemerintah Desa/Kelurahan dan Dinas Sosial terkait untuk melakukan asesmen dan	Meningkatkan koordinasi dengan petugas lapangan dan meningkatkan pendampingan sosial.

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pengemis dan Masyarakat				penelusuran keluarga..	n sosial.
				7) Sub kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2 orang (2 anak ke PPSA Taruna Yodha Sukoharjo)	2 orang (2 anak ke PPSA Taruna Yodha Sukoharjo)	Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat respon kasus ( <i>unpredictable</i> )	Melakukan koordinasi dengan petugas lapangan (TKSK dan TKSPD) untuk melakukan asesmen dan penjangkauan serta Desa/Kelurahan untuk mengajukan proposal permohonan..	Meningkatkan koordinasi dengan petugas lapangan dan meningkatkan pendampingan sosial.
				8) Sub kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	2.426 orang Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan: 1. 843 orang disabilitas terlantar 2. 940 orang lanjut usia terlantar 643 anak terlantar	2.426 orang Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan: 1. 843 orang disabilitas terlantar 2. 940 orang lanjut usia terlantar 3. 643 anak terlantar	Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat respon kasus ( <i>unpredictable</i> )	Melakukan koordinasi dengan petugas lapangan (TKSK dan TKSPD) untuk melakukan asesmen dan penjangkauan serta Desa/Kelurahan untuk mengajukan proposal permohonan..	Meningkatkan koordinasi dengan petugas lapangan dan meningkatkan pendampingan sosial.
				9) Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	220 orang Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota sebanyak 220 orang: 1. 96 orang untuk alat bantu 2. 21 orang kehabisan bekal 3. 51 orang untuk modal usaha 4. 1 orang untuk biaya pendidikan 5. 35 orang untuk biaya kesehatan 6. 16 orang untuk sembako	220 orang Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota sebanyak 220 orang: 1. 96 orang untuk alat bantu 2. 21 orang kehabisan bekal 3. 51 orang untuk modal usaha 4. 1 orang untuk biaya	Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat respon kasus ( <i>unpredictable</i> )	Melakukan koordinasi dengan petugas lapangan (TKSK dan TKSPD) untuk melakukan asesmen dan penjangkauan serta Desa/Kelurahan untuk mengajukan proposal permohonan..	Meningkatkan koordinasi dengan petugas lapangan dan meningkatkan pendampingan sosial.

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						pendidikan 5. 35 orang untuk biaya kesehatan 6. 16 orang untuk sembako			
				10) Sub kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	7 orang Jumlah orang yang mendapat layanan penelusuran keluarga: 1. 2 orang dari Kecamatan Temanggung 2. 1 orang dari Kecamatan Candiroto 3. 3 orang dari Kecamatan Pringsurat 4. 1 orang dari Kecamatan Tembarak	7 orang Jumlah orang yang mendapat layanan penelusuran keluarga: 1. 2 orang dari Kecamatan Temanggung 2. 1 orang dari Kecamatan Candiroto 3. 3 orang dari Kecamatan Pringsurat 4. 1 orang dari Kecamatan Tembarak	Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat respon kasus ( <i>unpredictable</i> )	Melakukan koordinasi dengan petugas lapangan (TKSK dan TKSPD) untuk melakukan asesmen dan penjangkauan serta Desa/Kelurahan untuk mengajukan proposal permohonan..	Meningkatkan koordinasi dengan petugas lapangan dan meningkatkan pendampingan sosial.
				11) Sub kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	83 orang Jumlah orang yang mmendapatkan layanan rujukan: 1. 2 anak terlantar 2. 4 orang lansis terlantar, dan 3. 77 orang penyandang disabilitas	83 orang Jumlah orang yang mmendapatkan layanan rujukan: 1. 2 anak terlantar 2. 4 orang lansis terlantar, dan 3. 77 orang penyandang disabilitas	Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat respon kasus ( <i>unpredictable</i> )	1. Melakukan koordinasi dengan petugas lapangan (TKSK dan TKSPD) untuk melakukan asesmen dan penjangkauan serta Desa/Kelurahan untuk mengajukan proposal permohonan. 2. Melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial provinsi dan UPT Kemensos (Sentra Terpadu Kartini)	Meningkatkan koordinasi dengan petugas lapangan dan lembaga lain yang terkait serta meningkatkan pendampingan sosial.

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				<b>b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				1) Sub kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	21 orang Jumlah orang yang mendapatkan perbekalan 1. 9 anak terlantar 2. 7 orang lansia terlantar 3. 5 orang disabilitas terlantar	21 orang Jumlah orang yang mendapatkan perbekalan 1. 9 anak terlantar 2. 7 orang lansia terlantar 3. 5 orang disabilitas terlantar	Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat respon kasus ( <i>unpredictable</i> )	Melakukan koordinasi dengan petugas lapangan (TKSK dan TKSPD) untuk melakukan asesmen dan penjangkauan serta Desa/Kelurahan untuk mengajukan proposal permohonan.	Meningkatkan koordinasi dengan petugas lapangan dan meningkatkan pendampingan sosial.
				2) Sub kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	297 orang Jumlah anak yang mendapat layanan penasehatan dispensasi kawin sejumlah 297 anak dibawah umur	297 orang Jumlah anak yang mendapat layanan penasehatan dispensasi kawin sejumlah 297 anak dibawah umur	Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat respon kasus ( <i>unpredictable</i> )	Melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi lain seperti Pengadilan Agama, Disdukcapil, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.	Meningkatkan koordinasi dengan lembaga lain yang terkait.
				<b>4. Program Perlindungan dan jaminan Sosial</b>					
				Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	Adanya Perubahan penerima menyebabkan Perubahan di Anggaran Perubahan dan SK Bupati	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	Meningkatkan koordinasi dengan LKSA terkait.
				Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	<b>80%</b>	<b>100 %</b>	Untuk Kelurahan belum memiliki fasilitas untuk pendataan Fakir Miskin	Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	Pengalokasian anggaran untuk untuk pendataan Fakir Miskin
				Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	<b>90%</b>	<b>91,11 %</b>	Masih ada penerima bantuan yang belum mempunyai KTP	Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin	Meningkatkan koordinasi dengan

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							elektronik	cakupan daerah kab/kota	Dindukcapil
				Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	10,1 %	100 %	Adanya rekomendasi dari inpektorat bahwa untuk Pengusulan bantuan UEP harus N-1	Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	Mempersiapkan syarat administrasi calon penerima bantuan UEP/KUBE (proposal) tahun 2024
				Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48 %	65,29 %	Masih ada penerima bantuan yang tidak tepat sasaran disebabkan karena data penerima bantuan berasal dari pusat dan tidak diadakan verval oleh daerah.	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Mengoptimalkan verval data
				a. Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	321 orang Terfasilitasinya bantuan Permakanan Anak Panti Asuhan di 9 Panti (321 anak x 365 hr x Rp 9200 dan Fasilitasi Rp 47.372.850) terdiri dari ; PA Betlehem, PA Darul Falach, PA Darul Hadlonah Putra, PA Darul Hadlonah Putri, PAY Muhamadiyah Putra, PAY Muhamadiyah Putri, PA Al Hidayatul Islamiyah Munawiri, PA Al Ihsan Temanggung dan PA Disabilitas Rungu ABATA	321 orang Terfasilitasinya bantuan Permakanan Anak Panti Asuhan di 9 Panti (321 anak x 365 hr x Rp 9200 dan Fasilitasi Rp 47.372.850) terdiri dari ; PA Betlehem, PA Darul Falach, PA Darul Hadlonah Putra, PA Darul Hadlonah Putri, PAY Muhamadiyah Putra, PAY Muhamadiyah Putri, PA Al Hidayatul Islamiyah Munawiri,	Dari 11 panti penerima awal, terdapat 2 panti yg tidak memenuhi syarat administratif (Surat Izin Operasional/ SIOP) panti sudah kadaluarsa	Sudah dilaksanakan koordinasi dan klarifikasi Kepada 2 pengurus panti dimaksud, dan hasilnya adalah kedua panti tersebut tidak lagi mengakses bansos Permakanan Panti	Pengurus yayasan tidak mau melengkapi perlengkapan administrasi sehinggapihak dinsos mengeluarkan panti tersebut dari daftar panti yang ada di Kab. Temanggung

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						PA Al Ihsan Temanggung dan PA Disabilitas Rungu ABATA			
				<b>b. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				1) Sub kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	399.832 orang (tersebar di 20 kecamatan)	399.832 orang (tersebar di 20 kecamatan)	Desa/ Kelurahan tidak maksimal dalam pemutakhiran data	Melakukan bimtek dan sosialisasi bagi pendata desa, mengusulkan adanya anggaran untuk pendataan kemiskinan di tingkat desa	Memaksimalkan keaktifan petugas pendata desa/kelurahan
				2) Sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	78080 keluarga (jumlah jiwa dalam DKD Tahun 2023)	78080 keluarga (jumlah jiwa dalam DKD Tahun 2023)	Bansos gagal salur dikarenakan data tidak dengan Dukcapil	Melakukan pemadanan data dengan dukcapil melalui aplikasi dan mengupayakan pengusulan kembali	Meningkatkan akurasi data melalui pemadanan data
				3) Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	59.124 keluarga ( PKH 40761 keluarga, KJS 169 keluarga dan DBHCHT 18.194 keluarga)	59.124 keluarga ( PKH 40761 keluarga, KJS 169 keluarga dan DBHCHT 18.194 keluarga)	Data KJS dinamis berubah-ubah karena data meninggal, double bansos dan sembuh, untuk BLT DBHCHT tahap 1 sebanyak 230 orang tidak mengambil dan tahap 2 sebanyak 266 orang tidak mengambil bantuan	Selalu koordinasi dengan pendamping kec dan pendamping desa, agar bantuan tepat sasaran.	Aktif melakukan verval kelayakan penerima bansos
				4) Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	5.460 orang (tersebar di 20 kecamatan)	5.460 orang (tersebar di 20 kecamatan)	Pada tahun 2023 tidak ada pemberian bantuan UEP/KUBE karena menindaklanjuti rekomendasi dari inpektorat bahwa untuk Pengusulan	Rintisan kelompok diberikan pelatihan usaha dan mempersiapkan usulan proposal di tahun 2023 sebagai acuan penerima bantuan stimulan	Mempersiapkan syarat administrasi calon penerima bantuan UEP/KUBE (proposal)



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							bantuan UEP harus N-1	tahun 2024	sehingga tidak terulang seperti di tahun 2023
				<b>5. Program Penanganan Bencana</b>					
				Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	100 %	100 %	Belum optimalnya sarana dan prasarana, bantuan khusus untuk korban bencana sosial seperti kebakaran (seragam sekolah) sehingga kita tidak bisa melakukan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang penanganan bencana	Pembangunan gudang penyimpanan barang bantuan bencana dan penganggaran bantuan khusus untuk bantuan sandang korban kebakaran (seragam sekolah)	Mengusulkan pembangunan gudang logistik
				<b>a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Penyediaan Makanan	738 orang (kebutuhan pangan bagi Korban Bencana di Kab Temanggung)	738 orang (kebutuhan pangan bagi Korban Bencana di Kab Temanggung)	Sarana dan prasarana penyimpanan makanan untuk bantuan bencana terbatas	Pembangunan gudang penyimpanan barang bantuan bencana yang lebih terstruktur	Mengusulkan pembangunan gudang logistik dan Penambahan klasifikasi pesediaan sandang
				2) Sub kegiatan Penyediaan Sandang	738 orang (kebutuhan Sandang bagi Korban Bencana di Kab Temanggung)	738 orang (kebutuhan Sandang bagi Korban Bencana di Kab Temanggung)	Kurang optimalnya bantuan khusus untuk korban bencana sosial seperti	Penganggaran bantuan khusus untuk bantuan sandang korban kebakaran (seragam sekolah)	Penambahan klasifikasi pesediaan sandang

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							kebakaran (seragam sekolah)		
				3) Sub kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	2.736 orang (tersebar di 20 kecamatan)	2.736 orang (tersebar di 20 kecamatan)	SDM desa dan Kel yg kesulitan mengikuti pengajuan secara elektronik (E-Sanka) dan angka kematian menurun	Diperbanyak untuk sosialisasi ke Desa dan Kelurahan mengenai E-Sanka	Meningkatkan kapasitas petugas pengelola data SANKA
				<b>b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				1) Sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	60 orang (kesiapsiagaan dan respon cepat dalam rangka penanggulangan bencana sebanyak 365 hari)	60 orang (kesiapsiagaan dan respon cepat dalam rangka penanggulangan bencana sebanyak 365 hari)	Penyebaran anggota TAGANA yang belum merata utamanya di daerah rawan bencana	Perekrutan anggota Tagana yang baru dari di daerah rawan bencana	Melaksanakan perekrutan TAGANA baru dan meningkatkan kapasitas anggota TAGANA yang sudah ada
				<b>6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>					
				Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	Belum optimalnya fasilitas untuk perbaikan sarana dan prasarana makam	Pengalokasian anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana taman makam pahlawan.	Mengusulkan pengalokasian anggaran untuk fasilitas untuk perbaikan sarana dan prasaran makam
				<b>a. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				<b>Nasional Kabupaten/Kota</b>					
				1) Sub kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 makam yaitu: 1. TMP Prayudha Mudal dan 2. MP Bambang Sugeng Kranggan	2 makam yaitu: 1. TMP Prayudha Mudal dan 2. MP Bambang Sugeng Kranggan	Kurang optimalnya pelaksanaan pemeliharaan TMP dikarenakan kurang personil yang mengampu kebersihan sehingga pelaksanaan pemeliharaan hanya dilakukan 2 hari seminggu	Memberdayakan petugas yang ada dalam pemeliharaan TMP semaksimal mungkin	Mengusulkan penambahan hari kerja bagi petugas kebersihan TMP

### 3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan Urusan wajib yang Tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2  
Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Tenaga Kerja dan Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	100%	100%			
				Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang	45%	67,86%	Kendala pengembangan usaha adalah dalam hal pemasaran produk	Perlu adanya pendampingan dan monitoring dari stakeholder terkait untuk mendukung perkembangan usaha, contohnya melibatkan produk wirausaha baru dalam even pameran di Pemerintah Daerah, pelatihan dalam pengemasan produk dll.	
				Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	65%	72,39%			
				Persentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru	45%	64,29%	Kendala modal usaha untuk memulai usaha baru	Mengarahkan peserta wirausaha baru untuk membentuk kelompok usaha dan mengajukan proposal program Tenaga Kerja Mandiri di Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperoleh pendampingan dan dukungan modal usaha.	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				a. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi					
				1) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	288 orang -Jurusan pembuatan roti dan kue (1Keg) 16 orang -Jurusan Bahasa Inggris (Tour Guide) (1Keg) 16 orang -Jurusan perhotelan (1 Keg) 16 orang -Jurusan tata kecantikan kulit dan rambut (1Keg) 16 orang -Jurusan menjahit pakaian dewasa (2Keg) 32 orang -Jurusan operator komputer (1Keg) 16 orang -Jurusan desain grafis muda (1Keg) 16 orang -Jurusan konten kreator (1Keg) 16 orang -Jurusan Service sepeda motor injeksi (2Keg) 32 orang -Jurusan barista (1Keg) 16 orang -Jurusan barber shop (1Keg) 16 orang -Jurusan digital marketing (1Keg) 16 orang -Jurusan finishing meuble (1Keg) 16 orang -Jurusan teknisi audio video (1Keg) 16 orang -Jurusan mekanik mobil (1Keg) 16 orang	288 orang -Jurusan pembuatan roti dan kue (1Keg) 16 orang -Jurusan Bahasa Inggris (Tour Guide) (1Keg) 16 orang -Jurusan perhotelan (1 Keg) 16 orang -Jurusan tata kecantikan kulit dan rambut (1Keg) 16 orang -Jurusan menjahit pakaian dewasa (2Keg) 32 orang -Jurusan operator komputer (1Keg) 16 orang -Jurusan desain grafis muda (1Keg) 16 orang -Jurusan konten kreator (1Keg) 16 orang -Jurusan Service sepeda motor injeksi (2Keg) 32 orang -Jurusan barista (1Keg) 16 orang -Jurusan barber shop (1Keg) 16 orang -Jurusan digital marketing (1Keg) 16 orang -Jurusan finishing meuble (1Keg) 16 orang	Kurangnya pemahaman masyarakat petani tembakau dalam pencarian nformasi tentang pelatihan yg ada d BLK Temanggung	Pelaksanaan sosialisasi langsung ke desa-desa	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Jurusan las listrik SMAW 5G (1Keg) 16 orang	orang -Jurusan teknisi audio video (1Keg) 16 orang -Jurusan mekanik mobil (1Keg) 16 orang Jurusan las listrik SMAW 5G (1Keg) 16 orang			
				<b>2. Program Penempatan Tenaga kerja</b>	<b>100%</b>	100%			
				<b>Presentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan</b>	<b>65%</b>	85,17%	Pencari kerja sebagian besar belum memiliki ketrampilan khusus sebagai pendukung di dunia kerja	- Memberikan penawaran program pelatihan berbasis kompetensi untuk pencari kerja - Memberikan informasi lowongan kerja yang ada di luar daerah	
				<b>Tingkat setengah pengangguran</b>	<b>5,7%</b>	<b>4,40%</b>	Pencari kerja masih mencari pekerjaan yang diinginkan sembari bekerja paruh waktu	Menyebarkan informasi lowongan kerja secara online dan offline serta memfasilitasi proses rekrutmen (untuk pemberi kerja dan pencari kerja) di Kantor Dinperinaker.	
				<b>Presentase tenaga kerja formal</b>	<b>31%</b>	<b>24,81%</b>			
				a. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota					
				1) Perluasan Kesempatan Kerja	140 orang -Jurusan Makanan Kekinian (2 Keg) 40 orang	140 orang -Jurusan Makanan Kekinian (2 Keg) 40 orang	Alokasi anggaran untuk Program perluasan kesempatan kerja	Diperlukan penambahan alokasi anggaran untuk program perluasan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					-Jurusan pembuatan kerajinan (1Keg) 20 orang -Jurusan Minuman Kekinian (Barista) (1Keg) 20 Orang -Jurusan Minuman Kekinian (1Keg) 20 Orang Jurusan Kuliner Kreatif (2Keg) 40 Orang)	-Jurusan pembuatan kerajinan (1Keg) 20 orang -Jurusan Minuman Kekinian (Barista) (1Keg) 20 Orang -Jurusan Minuman Kekinian (1Keg) 20 Orang Jurusan Kuliner Kreatif (2Keg) 40 Orang)	sangat terbatas	kesempatan kerja agar semakin banyak masyarakat yang dapat mengikuti program ini.	
				<b>3. Program Hubungan Industrial</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				<b>Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan</b>	<b>79%</b>	<b>90,83%</b>	Sudah adanya kesadaran dari Pengusaha untuk mengikutsertakan program BPJS Ketenagakerjaan	Terus meningkatkan pembinaan kepada Pengusaha, pentingnya mengikutsertakan Pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan	
				<b>Persentase perusahaan yang membayar upah sesuai UMK</b>	<b>58%</b>	<b>81,58%</b>	Sudah adanya kesadaran dari Pengusaha untuk mensejahterakan Pekerja dengan membayar upah Pekerja sesuai ketentuan	Terus meningkatkan pembinaan kepada Pengusaha agar terus mensejahterakan Pekerja	
				<b>Persentase perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial</b>	<b>45%</b>	<b>71,05%</b>	Pengusaha makin menyadari akan pentingnya sarana Hubungan Industrial sebagai bagian dari kesejahteraan Pekerja	Dengan meningkatnya kesejahteraan Pekerja, akan mempengaruhi produktifitas kerjanya.	
				<b>Persentase perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan yang diselesaikan dengan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	Para pihak sadar bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Mediator	Memberikan pemahaman kepada para pihak agar menyelesaikan perselisihan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				<b>perjanjian bersama</b>			dengan Perjanjian Bersama lebih baik daripada harus ke Pengadilan Hubungan Industrial	hubungan industrial melalui Mediator dengan Perjanjian Bersama.	
				a. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					
				1) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	1 Lembaga Kerjasama Tripartit yang dibina	1 Lembaga Kerjasama Tripartit yang dibina	Pembentukan LKS Tripartit sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan	Berfungsi untuk meningkatkan koordinasi penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan	
				<b>4. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				<b>Persentase IKM Industri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah</b>	<b>35%</b>	<b>70,46%</b>			
				<b>Presentase Pembinaan Industri Penghasil Cukai</b>	<b>5,3%</b>	<b>12,29%</b>			
				a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten//Kota					
				1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran	1 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta	1 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran	Monitoring pasca pelatihan belum maksimal	Perencanaan evaluasi kegiatan pada tahun n+1	



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Serta Masyarakat	Masyarakat	Serta Masyarakat			
				<b>5. Program Pengendalian Izin Usaha Industri</b>	<b>100%</b>	100%			
				a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota					
				1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Pelaksanaan pendampingan pemenuhan komitmen persyaratan ijin sektor industri terutama untuk IKM kurang maksimal	Melakukan pelatihan dan pembinaan IKM produk unggulan Kabupaten Temanggung: 1. Pelatihan Diversifikasi Produk Unggulan tembakau 11 Pelatihan x 40 orang x 3 hari (DBHCHT) 2. Pembinaan perizinan IKM melalui Akun SIINAS 60 orang x 2 kali (DAU) 3. Pendampingan pendaftaran TKDN kepada IKM 40 orang (DAU) 4. Bintek dan Seminar Peluang Usaha Industri Produk Berbahan baku limbah 100 IKM (APBN) 5. Bintek dan Seminar Pemasaran Digital	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
								Wirausaha Kopi 50 orang (APBN) 6. Bintek Wirausaha Baru 9 Pelatihan x 5 hari ; Barista, batik, perbengkelan roda 2, olahan roti, pembuatan <i>pastry</i> , konveksi, servis alat rumah tangga, pupuk organik, pengelasan 180 orang (APBN)	
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPPPAPKB		<b>1. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	60 Orang	40 Orang			
				a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	60 Orang	40 Orang			
				1) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	60 Orang	40 Orang	Anggaran dibebaskan akhir tahun anggaran dan dalam jangka waktu sebentar karena Dana Insentif Daerah	Koordinasi lintas sektor dan memaksimalkan SDM yang ada	
				<b>2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>					
				Persentase keterwakilan perempuan di lembaga Pemerintah	2,34%	2,42%	Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah dipengaruhi peluang seleksi	Perlu dilakukan review terhadap definisi operasional indikator program	Penguatan advokasi dan edukasi keterlibatan perempuan dalam lembaga pemerintahan
				Rasio perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender	45,71%	100%	Masih kurangnya pemahaman petugas dalam penyusunan	Penguatan dan pendampingan dalam penyusunan ARG	Penguatan Advokasi dan pendampingan

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				dalam penyusunan dokumen perencanaan			ARG		dalam penyusunan ARG
				a. Kegiatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan			
				1) Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	46 PD	Terlaksannnya sosialisasi tentang PUG dan ARG untuk organisasi Perempuan di 46 PD	Masih kurangnya pemahaman tentang PUG pada lembaga Pemerintah	Sosialisasi dan advokasi tentang PUG, mengoptimalkan pokja PUG tingkat Kabupaten dan peningkatan kapasitas pokja PUG	Rapat koordinasi Pokja PUG. monev penyusunan ARG Memaksimalkan kerja Tim Driver dalam penyusunan ARG
				b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan			
				1) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Orang	Penguatan orhanisasi perempuan / GOW dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan pada 48 Orang	Masih kurangnya komiitmen sumberdaya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Meningkatan komitmen sumberdaya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Penguatan komitmen sumberdaya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				<b>3. Program Perlindungan Perempuan</b>					
				Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak Perempuan	0,011%	0,005%	Keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas	Pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas dan pendamping	Penguatan kemampuan petugas pendamping dan usulan Pembentukan UPT PPA
				Persentase Perempuan korban kekerasan	0,011%	0,0017%	Keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas	Penguatan dalam melakukan pendampingan kelana dan dekela	Penguatan dalam melakukan pendampingan kelana dan dekela
				<b>4. Program Peningkatan Kualitas keluarga</b>					
				Persentase desa sayang ibu dan bayi	62,28%	100%	Masih adanya budaya masyarakat bahwa kehamilan, dan melahirkan menjadi urusan perempuan	Penguatan dan advokasi dan sosialisasi tentang GSI bersama mitra kerja terhadap semua pemangku kepentingan untuk melakukan Penggerakan DESA Sayang IBU secara daring Desa Sayang Ibu	Rapat koordinasi lintas sektoral dan integrasi kegiatan desa siaga dan Satgas GSI
				Persentase rumah sakit sayang ibu dan bayi	100%	100%	Masih adanya budaya masyarakat bahwa kehamilan, dan melahirkan menjadi urusan perempuan	Penguatan dan advokasi dan sosialisasi tentang GSI bersama mitra kerja	
				a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Kabupaten/Kota					
				1) Sub kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen (5 Laporan SPJ)	Terlaksannnya Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak 5 Laporan SPJ	Masih adanya budaya masyarakat bahwa kehamilan, dan melahirkan menjadi urusan perempuan	Peningkatan komitmen pemerintah dalam Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	Penguatan, advokasi dan sosialisasi tentang GSI bersama mitra kerja
				b. Kegiatan Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan			
				1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas sumber daya lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas Keluarga tingkat daerah Kabupaten/Kota	55 Kegiatan	55 Kegiatan	Masih kurangnya komiitmen sumberdaya lembaga penyedia layanan	Meningkatan komitmen sumberdaya lembaga penyedia layanan	
				<b>5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</b>					
				Persentase terbentuknya kota layak anak	60%	80%	Masih rendahnya pendampingan dalam pelaksanaan Kelana	Penguatan dalam melakukan pendampingan kelana dan dekela	
				a. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Kabupaten/Kota					
				1) Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota KB	33 Anak	33 Anak	Kurangnya fasilitasi dari pemkab tentang pemenuhan hak anak	Advokasi serta sosialisasi tentang KHA di lembaga penyedia layanan	
				<b>6. Program Perlindungan Khusus Anak</b>					
				Persentase anak korban kekerasan	0,011%	0,0035%	Keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas	Pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas dan pendamping	
				a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan			
				1) Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15 PD	15 PD	Masih kurannya koordinasi lintas sektoral dalam pencegahan kekerasan terhadap Anak	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap anak dan koordinasi lintas sektoral	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap anak dan sosialisasi tentang Aplikasi SIPESAN PERAK kepada masyarakat dan lintas sektoral
3	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP)		1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan kemandirian Pangan			Perubahan iklim kemarau panjang (El Nino) menjadi kendala dalam proses budidaya pertanian sehingga berpengaruh pada jumlah produksi komoditas pertanian, masih	Peningkatan produksi pangan, peningkatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat sejalan dengan perbaikan pengelolaannya untuk menjamin kualitas bahan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							kurangnya sarana prasarana pendukung pengelolaan cadangan pangan di tingkat masyarakat	pangan sesuai standar	
				<b>Rasio ketersediaan pangan</b>	<b>100%</b>	<b>133,42%</b>			
				a. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
				1) Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Terlaksananya pembangunan bangunan RMU, bangunan dryer dan lumbung pangan masyarakat	Kegiatan Tidak dapat terlaksana,	Karena calon penerima bantuan calon lokasi tidak dapat memenuhi ketentuan yang ada dalam juknis kegiatan terkait dengan luasan lahan yang harus disediakan		
				<b>2. Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan Masyarakat</b>			tidak semua wilayah dapat memproduksi kebutuhan pangan yang beragam sesuai dengan pola pangan ideal	Pemberdayaan kelompok masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan dengan optimalisasi lahan pekarangan sebagai sumber gizi dan sumber pendapatan bagi masyarakat melalui kegiatan pekarangan pangan lestari	
				<b>Persentase desa pelaksana program ketahanan pangan</b>	<b>27,68%</b>	<b>27,68%</b>			
				<b>3. Program Penanganan Kerawanan Pangan</b>			Berkurangnya jumlah lumbung pangan aktif sejalan	Pembangunan dan pengaktifan Lumbung pangan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							dengan dinamika pembangunan	sebagai upaya menjaga ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat	
				Rasio lumbung pangan masyarakat	56%	58%			
				4. Program Pengawasan Keamanan Pangan			Masih terdapat petani dengan pola yang terbalik, yaitu rusaknya lahan harus diimbangi dengan pemakaian pupuk kimia di luar ambang batas dan untuk menjamin hasil panen bebas hama, termasuk ulat, pestisida juga digunakan secara tidak bertanggung jawab, sarana uji tes yang kurang	Peningkatan edukasi dan alih teknologi tentang penggunaan dan pembuatan pestisida non kimiawai untuk pelaku budidaya pertanian khususnya PSAT.	
				Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	90%	100%			
				a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota					
				1) Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya sarana dan Prasarana pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan Daerah kabupaten untuk peningkatan mutu dan Keamanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya sarana dan Prasarana pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan Daerah kabupaten untuk peningkatan mutu dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>anggaran terbatas sehingga : parameter uji terbatas hanya di pestisida dan formalin (belum mencakup semua</li> </ul>	uji dilakukan untuk PSAT tertentu (bhan pangan strategis)	



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Pangan • 1 kegiatan	Keamanan Pangan • Pengadaan rapid tes residu pestisida sejumlah 85 unit • pelaksanaan uji cepat sampel PSAT sejumlah 85 sampel (1 sample terdeteksi mengandung formalin) 1 kegiatan	parameter), jumlah sample masih terbatas, uji belum dilaksanakan secara berkala koordinasi dengan OPD yang lain		
4	Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH)		1. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					
				Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanian	100 %	100 %			
5	Linkungan Hidup	DPRKPLH		1. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	62,73 %	100 %			
				Persentase Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup	100 %	100 %			
				Kegiatan : a. Penyelenggaraan Kajian					

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota					
				Sub Kegiatan : 1) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota					
				Jumlah Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten/ Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen			
				<b>2. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>					
				Indeks Kualitas Air	46,00	64,07			
				Indeks Kualitas Udara	86,00	85,10			
				a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota					
				1) Sub Kegiatan : Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota					
				Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	96 Dokumen	320 Dokumen			
				b. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					
				1) Sub Kegiatan:					

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi					
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Terlaksananya konservasi dan rehabilitasi lahan di Kabupaten Temanggung	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
				<b>3. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>					
				<b>Indeks Kualitas Tutupan Lahan</b>	<b>74,33 %</b>	<b>74,33 %</b>			
				<b>Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung</b>	<b>0,067 %</b>	<b>2,46 %</b>			
				<b>Cakupan RTH Publik</b>	<b>0,07 %</b>	<b>1,10 %</b>			
				a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					
				1) Sub Kegiatan : Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan					
				Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5,07 Ha	5,07 Ha			
				Terpeliharanya Kebun Ngipik milik Pemda	12 Bulan	12 Bulan			
				2) Sub Kegiatan : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
				Luas RTH yang Dikelola Lingkup Keenangan Kabupaten/Kota	7,96 Ha	7,96 Ha			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Terpeliharanya Taman Kota	12 Bulan	12 Bulan			
				<b>4. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>					
				Persentase usaha yang memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3	100 %	100 %			
				<b>5 . PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>					
				<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				a. Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
				1) Sub Kegiatan: Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
				Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh	50 Laporan	50 Laporan			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				<b>Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan</b>	<b>26,88 %</b>	<b>27,87 %</b>			
				<b>6. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>					
				<b>Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup</b>	<b>66,67 %</b>	<b>100 %</b>			
				a. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
				1) Penilaian Kinerja Masyarakat /Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					
				Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	9 Entitas	16 Entitas			
				<b>7. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>					
				<b>Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				<b>8. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>					
				Persentase sampah yang tertangani	38,20 %	61,30 %			
				Cakupan layanan persampahan	55,00 %	68,51 %			
				a. Pengelolaan Sampah					
				1) Penanganan Sampah dengan melakukan, Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/ Kota					
				1. Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/Kota	55.792 Ton	90.336 Ton			
				2. Terlaksananya Pemeliharaan Kebersihan Kota	12 Bulan	12 Bulan			
				3. Terlaksananya peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	12 Bulan	12 Bulan			
				4. Terlaksananya peningkatan operasi dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	12 Bulan	12 Bulan			
				b. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					
				1) Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan	5 Kelompok	5 Kelompok			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Sampah Berbasis Masyarakat					
				C. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/ Kota					
				1) Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir	5 Unit	5 Unit			
				2) Terlaksananya operasional UPT TPA-IPLT Sanggrahan 12 bulan	12 Bulan	12 Bulan			
6	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.	1. Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk					
				Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	97.40%	99.93%	♦ kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib Adminduk	♦ sosialisasi manfaat tertib adminduk dan kemudhaman mengurus dokumen kependudukan melalui medsos, Zoom dan rakor ♦ sosialisasi pentingnya update data kependudukan melalui media sosial ♦ mendekati pelayanan kepada masyarakat sampai tingkat desa (pelayanan Adminduk pada Loker Desa Permata)	
				Persentase Kepemilikan KTP el	99	99.82	♦ belum semua wajib perekaman KTP el dikarenakan Wajib KTP tidak bisa hadir untuk perekaman ktp karena jam sekolah, usia lanjut/ jompo, sakit, OGDJ,	♦ Jemput Bola perekaman KTP-el ke sekolah, kecamatan dan Desa ♦ membuka pelayanan perekaman KTP-el Diluar jam Kerja (car freday, Dinas & Kematan) ♦ tersedianya anggaran	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							karena di luar daerah ♦ kerusakan alat perekaman KTP-el sehingga menghambat pelayanan	pemeliharaan dan berejemaan alat perekaman KTP-el	
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	72	84.21	♦ kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib Adminduk	♦ Sosialisasi kemudahan menadapatkan pelayanan adminduk ♦ Jemput Bola Pelayanan KIA tingkat TK dan SD ke korwil Dindikpora ♦ Mendekatan pelayanan kepada masyarakat sampai tingkat desa (pelayanan Adminduk pada Loker Desa Permata) ♦ Inovasi pelayanan BUNDAKU	
				Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu	100	100	♦ kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib Adminduk	♦ sosialisasi manfaat tertib adminduk dan kemudahaman mengurus dokumen kependudukan melalui medsos, Zoom dan rakor ♦ mendekati pelayanan kepada masyarakat sampai tingkat desa (pelayanan Adminduk pada Loker Desa Permata)	
				a. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	persentase terlasanya kegiatan 100 %				
				1) Sub kegiatan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	24 Dokumen (12 laporan bulanan pelaksanaan cetak KIA dan 12 laporan bulanan pelaksanaan cetak KTP)	24 Dokumen (12 laporan bulanan pelaksanaan cetak KIA dan 12 laporan bulanan pelaksanaan cetak KTP)	* ketika stok blangko KTP el tidak mencukupi untuk melakukan cetak KTP sesuai permohonan layanan * ketika stok blangko KIA tidak mencukupi dalam rangka pemenuhan pelayan kepada masyarakat	* koordinasi dengan dirjen adminduk permohonan permintaan blangko KTP-el * koordinasi dengan Dispermadesdukcapil Prov untuk permohonan permintaan blangko KTP-el apabila tersedia * volume pengadaan blangko KIA disesuaikan kebutuhan	
				<b>2. Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil</b>					
				Persentase kepemilikan Akta Kelahiran	75%	77.90%	♦ kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib Adminduk	1. sosialisasi dan jemput bola (pendekatan pelayanan) pelayanan akta kelahiran ke Desa - desa di	



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
								7 Kecamatan 2. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sampai ke tingkat desa (Loket Desa PERMATA) melalui Inovasi-inovasi pelayanan 3, melakukan koordinasi dengan dirjen adminduk pusat terkait dengan sinkronisasi data pelayanan akta kelahiran (melalui surat dan koordinasi secara langsung)	
				Persentase penerbitan akte kematian	99	100	♦ kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib Adminduk	♦ Sosialisasi Adminduk sampai ke tingkat Desa dan melalui Medsos ♦ mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sampai ke tingkat desa (Loket Desa PERMATA) ♦ fasilitasi penerapan buku pokok pemakaman di tiap desa	
				Cakupan pelayanan akta perkawinan tepat waktu	100	100	Pemohon belum bisa memenuhi persyaratan administrasi	♦ Sosialisasi Adminduk lewat Medsos ♦ memastikan persyaratan yang masuk untuk pencatatan sudah lengkap	
				Cakupan pelayanan akta perceraian tepat waktu	100	100	Pemohon belum bisa memenuhi persyaratan administrasi	♦ Sosialisasi perceraian non muslim dengan pemuka agama ♦ memastikan persyaratan yang masuk untuk pencatatan sudah lengkap ♦ Kerjasama dengan dengan OPD, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Polres, Kodim melalui inovasi BERKIBAR	
				a. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	persentase terlaksana kegiatan 100%				
				1) Sub kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	4 layanan	4 layanan	♦ kurangnya kesadaran penduduk untuk datang langsung dan mengurus akta pencatatan sipil	1. Jemput bola pelayanan pencatatan sipil (Pencatatan Akta Kelahiran dan Pencatatan Akta Kematian) ke Desa 2. Mendekatkan pelayanan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
								kepada masyarakat sampai ke tingkat desa (Loket Desa PERMATA) melalui Inovasi-novasi pelayanan 3. Kerjasama dengan dengan OPD, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Polres, Kodim melalui inovasi BERKIBAR	
				<b>3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>					
				Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	60	86.57	* ijin akses dan pemanfaatan data sampai pusat (Dirjen Admiduk) * Penggunaan webservice dan webportal yang belum memenuhi kebutuhan OPD/BHI	♦ Sosialisasi perceraian non muslim dengan pemuka agama ♦ memastikan persyaratan yang masuk untuk pencatatan sudah lengkap ♦ Kerjasama dengan dengan OPD, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Polres, Kodim melalui inovasi BERKIBAR	
				Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	80	95.83	Kurangnya pemahaman masyarakat akan IT	♦ Sosialisasi dan FGD dengan OPD/BHI tentang pemanfaatan data kependudukan ♦ Segera menindak lanjuti permohonan pemanfaatan data dari OPD/BHI ke Dirjen Admiduk ♦ Evaluasi dan monitoring pemanfaatan data kependudukan ♦ meminta ijin hak akses dan pemanfaatan data ke Dirjen Admiduk	
				a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	persentase terlaksana kegiatan 100%				
				1) Sub kegiatan Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	36 Laporan (12 Laporan bulanan perbaikan seting jaringan SIAK dan 24 laporan SIPOLAHTA (sistem informasi	36 Laporan (12 Laporan bulanan perbaikan seting jaringan SIAK dan 24 laporan SIPOLAHTA	* permasalahan jaringan dari pusat sehingga menghambat pelayanan * kerusakan peralatan yang tidak dapat	* berkoordinasi dengan pusat dan menyiapkan tenaga IT * penyedia anggaran untuk service,, penggantian suku	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					pengolahan data))	(sistem informasi pengolahan data))	diperbaiki atau harus dihanti	padang dan pembelian beralatan yag baru	
7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DINPERMADES)		<b>1. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	100%	100%	-	-	-
				a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 sub kegiatan	1 sub kegiatan			
				<b>1) Sub kegiatan</b> Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	6 desa/kel : Desa Campuranom Kec. Bansari, Kelurahan Parakan Kauman Kec. Parakan, Desa Campursalan Kec. Parakan, Desa Gandulan Kec. Kaloran, Desa Tegalurung, Kec Bulu, Desa Caruban Kec. Kandangan 4 Sekolah : SMP N 2 Kranggan, MTSn 2 Temanggung, SMP N 2 Kedu, SMP N 2 Ngadirejo	6 desa/kel : Desa Campuranom Kec. Bansari, Kelurahan Parakan Kauman Kec. Parakan, Desa Campursalan Kec. Parakan, Desa Gandulan Kec. Kaloran, Desa Tegalurung, Kec Bulu, Desa Caruban Kec. Kandangan 4 Sekolah : SMP N 2 Kranggan, MTSn 2 Temanggung, SMP N 2 Kedu, SMP N 2 Ngadirejo			
				<b>2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	100%	100%			
				<b>Indikator program</b> Presentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan			
				Presentase ketersediaan dokumen administrasi umum dan kepegawaian	12 bulan	12 bulan			
				a. <b>Kegiatan :</b> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 sub kegiatan	2 sub kegiatan			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				1) <b>Sub kegiatan</b> Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan			
				2) <b>Sub kegiatan</b> Belanja Tambahan Penghasilan ASN	12 bulan	12 bulan			
				b. <b>Kegiatan :</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 sub kegiatan	6 sub kegiatan			
				1) <b>Sub kegiatan</b> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan			
				2) <b>Sub kegiatan</b> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan			
				3) <b>Sub kegiatan</b> Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan			
				4) <b>Sub kegiatan</b> Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan			
				5) <b>Sub kegiatan</b> Fasilitas Kunjungan Tamu	12 bulan	12 bulan			
				6) <b>Sub kegiatan</b> Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan			
				c. <b>Kegiatan :</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 sub kegiatan	4 sub kegiatan			
				1) <b>Sub kegiatan</b> Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan			
				2) <b>Sub kegiatan</b> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 bulan	12 bulan			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Daya Air dan Listrik					
				<b>3) Sub kegiatan</b> Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan			
				<b>4) Sub kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan			
				<b>d. Kegiatan :</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 sub kegiatan	2 sub kegiatan			
				<b>1) Sub kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	12 bulan			
				<b>2) Sub kegiatan</b> Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan			
				<b>3. PROGRAM PENATAAN DESA</b>	100%	100%			
				➤ <b>Indikator program</b> Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada	40%	41,73%			
				➤ <b>Indikator program</b> Persentase Desa/ Kelurahan yang Cepat Berkembang berdasarkan Indek Pembangunan Desa	37%	43,61%			
				➤ <b>Indikator program</b> Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	100%	100%			
				a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	1 sub kegiatan	1 sub kegiatan			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				1) Sub kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	5 desa yaitu : 3 desa Lokasi TMMD ( Desa Kembanghari Kec. Kandangan, Desa Pateken Kecamatan Wonobojo dan Desa Simpar Kecamatan Tretep) 2 desa lokasi Karya bhakti yaitu : Desa Kataan Kec. Ngadirejo dan Desa Kebondalem Kec. Bejen	5 desa yaitu : 3 desa Lokasi TMMD ( Desa Kembanghari Kec. Kandangan, Desa Pateken Kecamatan Wonobojo dan Desa Simpar Kecamatan Tretep) 2 desa lokasi Karya bhakti yaitu : Desa Kataan Kec. Ngadirejo dan Desa Kebondalem Kec. Bejen			
				<b>4. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	100%	100%			
				<b>Indikator program</b> Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	90%	100%			
				<b>Indikator program</b> Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	90%	99,6%			
				<b>Indikator program</b> Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	85%	100%			
				<b>Indikator program</b> Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu	100%	100%			
				<b>Indikator program</b> Persentase Pelanggaran disiplin kepala desa	10%	0,37%	-Terbit SK Disiplin Sedang Kepala Desa Danupayan (Desember 2023)		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							- Terbit SK Pemberhentian (Hukuman Berat) Kepala Desa Ngadimulyo		
				<b>Indikator program</b> Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu	85%	100%			
				<b>Indikator program</b> Persentase desa yang tertib pengelolaan aset	85%	100%			
				<b>a. Kegiatan</b> Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4 sub kegiatan	4 sub kegiatan			
				<b>1) Sub kegiatan</b> Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	266 desa	266 desa			
				<b>2) Sub kegiatan</b> Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	20 kecamatan	20 kecamatan			
				<b>3) Sub kegiatan</b> Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	266 desa	266 desa	Pemerintah desa dan Kecamatan tidak segera melaporkan dan mengirimkan SK baik pemberhentian maupun pengangkatan dan /atau mutasi perangkat desa sehingga terjadi selisih data di buku penjaminan pensiun dari aplikasi SIPEMDES 79 formasi dengan hasil	Komunikasi lewat HP dengan Kecamatan dan Pemerintah Desa, Laporan pengisian dan pengiriman softcopy SK lewa WA	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							pengisian perangkat di Tahun 2023 94 formasi		
				4) Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	266 desa	266 desa			
				5. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	100%	100%			
				➤ Indikator program Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif ➤ Indikator program Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif	32% 10%	96,62% 100%			
				a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 sub kegiatan	2 sub kegiatan			
				1) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas	20 kecamatan	20 kecamatan			



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					
				<b>2) Sub kegiatan</b> Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	20 kecamatan	20 kecamatan			
8.	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	<b>DPPPAPPKB</b>		<b>1. Program Pengendalian Penduduk</b>					
				persentase penyediaan data mikro keluarga di desa/kelurahan	100%	100%	Lemahnya sistem pelaporan ( RR ) dan administrasi di tingkat RT	Melakukan pendataan mikro keluarga Adanyan berda tentang pengendalian penduduk dan KB	Melakukan pendataan mikro keluarga Adanyan perda tentang pengendalian penduduk dan KB
				persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/unmetneed	9,17%	8,60%	1. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang pentingnya ikut KB 2. Rendahnya pemahaman batasan PUS	Adanya inovasi berupa aplikasi SIMATAPKON KB (Sistem Informasi Managemen Pencatatan dan Pelaporan Kontrasepsi Keluarga Bencana), Sehingga bisa mengetahui segementasi sasaran unmetneed	Adanya inovasi berupa aplikasi SIMATAPKON KB [Sistem Informasi Managemen

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							bisa hamil (merasa tua tidak perlu KB)		Pencatatan dan Pelaporan Kontrasepsi Keluarga Berencana], Sehingga bisa mengetahui segegmentas i sasaran unmetneed
				Persentase Pasangan Usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	2,04%	1,02%	1. Masih kurangnya SDM pengelola program KKBPBK dilapangan dalam memberika n advokasi dan KIE pada masyarakat dan remaja. 2. Aturan pemerintah yang berbeda antar OPD	Melakukan promisi, KIE melalui media cetak, Elektronik	
				Angka kelahiran Remaja Usia 15 - 19 tahun (ASFR 15-19 th)	26,3%	14,10%	Belum tersedianya data ASFR setiap tahun karena mulai tahunn 2015 pendataan dilaksanakan 5 tahun	Update data tercapai sebagai perhitungan ASFR	Updatting data sebagai perhitungan ASFR

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							sekali, untuk tahun 2020 belum bisa dilaksanakan karena pandemi covid 19		
				a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan			
				1) Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen GDPK	1 Dokumen GDPK			
				b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	Kemampuan dan pemahaman kader selaku pelaksana verval msh kurang (SDM kader) sehingga datanya masih ada yang kurang valid dan dperlukan konfermasi ke Desa.	Mengoptimalkan bendampingan kepada kader/Sub PPKBD	Usulan kegiatan peningkatan kapasitas Kader dan adanya honor bagi kader /IMP
				1) Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Laporan (12 Laporan SPJ)	12 Laporan (12 Laporan SPJ)	Kegiatan BOKB belum mencukupi Operasional di balai sebagai pelaksana langsung DAK Non Fisik	Mengoptimalkan kegiatan dan penunjang BOKB	
				2) Sub kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan (12 Laporan SPJ)	12 Laporan (12 Laporan SPJ)	Belum maksimalnya aplikasi SIGA sebagai Rujukan Laporan Bangga Kencana secara keseluruhan	Adanya inovasi berupa aplikasi SIMANTAPKON-KB [Sistem Informasi Managemen Pencatatan dan Pelaporan Kontrasepsi Keluarga Berencana],	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				3) Sub kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen (12 Laporan SPJ)	12 Dokumen (12 Laporan SPJ)	Pengiriman laporan, belum tepat waktu, sehingga berpengaruh pada kesediaan data di OPD. Hal ini dikarenakan jumlah SDM di tingkat Kecamatan masih kurang.	Mengoptimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi dari OPD ke tingkat Kecamatan dan Desa.	Adanya rapat koordinasi dalam meningkatkan kegiatan Program Bangga Kencana
				<b>3. Program Pembinaan Keluarga Berencana /KB</b>					
				presentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	76,21 %	80,14%	1. Tidak semua masyarakat dengan keyakinan tertentu menerima jenis alat kontrasepsi moderen 2. PUS muda yang menikah diusia dini belum terbekali dengan pengetahuan jenis alokon	Melakukan promisi, KIE melalui media cetak dan elektronik	Melakukan promisi, KIE melalui media cetak dan elektronik
				Persentase kepesertaan KB aktif	76,21 %	80,14%	1. Tidak semua masyarakat dengan keyakinan tertentu menerima jenis alat kontrasepsi moderen	Adanya inovasi berupa aplikasi SIMATAPKON KB [Sistem Informasi Manajemen Pencatatan dan Pelaporan Kontrasepsi Keluarga Berencana], Sehingga bisa mengetahui seegmentasi sasaran	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							2. PUS muda .yang menikah diusia dini belum terbekali dengan pengetahuan jenis alokon Adanya kebijakan yang berbeda antar pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan sasaran program	dalam pelayanan KB	
				Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	49,19%	45,77%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wilayah tertentu cenderung ke KB mandiri / non MKJP : Tretep. Wonobojo , kledung,bansari,t embarak</li> <li>2. Masih adanya bidan yang mempromosikan alat kontrasepsi Suntik dibandingkan dengan MKJP</li> <li>3. PUS yang menikah diusia dini belum siap untuk ber KB</li> <li>4. Masih adanya PUS yang trauma menggunakan alat kontrasepsi MKJP , karena efek dari Rumor penggunaannya</li> <li>5. Tidak semua masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya inovasi berupa aplikasi SIMATAPKON KB (Sistem Informasi Managemen Pencatatan dan Pelaporan Kontrasepsi Keluarga Berencana), Sehingga bisa mengetahui segmentasi sasaran dalam pelyanan KB MKJP</li> <li>2. semua balai KB (20 kecamatan) menjadi pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)</li> <li>3. memberikan advokasi dan komunikasi informasi edukasi (KIE) kepada calon akseptor maupun akseptor</li> </ol>	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							dengan keyakinan tertentu menerima jenis alat kontrasepsi MKJP 6. Karena pasangannya bekerja diluar daerah sehingga tidak mau ber KB	4. pelayanan rutin di 37 fasilitas kesehatan (26 puskesmas, 4 Rumah Sakit, 5 Bidan Praktek Mandiri, 2 Balai Pengobatan) 5. pelayanan dalam rangka momentum strategis (pendekatan pelayanan ) secara gratis 6. peningkatan pelayanan KB MKJP di PMB/Praktek Bidan Mandiri	
				Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM)	33,9%	52,71%	1. Potensi kader dalam mendukung Program 2. Partisipasi masyarakat dalam mendukung kampung KB	Peningkatan advokasi dan KIE dengan melibatkan LSOM melakukan jejaring dalam pelaksanaan program kampung KB	
				a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	5 Sub Kegiatan	5 Sub Kegiatan			
				1) Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan mitra kerja	15 Organisasi	15 Organisasi Terlaksananya rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka advokasi program bangga kencana	Dalam penganggaran kegiatan ini ada transport bagi peserta dikarenakan sasarannya tidak sesuai dengan perencanaan awal yang tadinya non PNS ternyata dalam pelaksanaannya banyak PNS	Mengoptimalkan kegiatan agar target tercapai	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							sehingga transport tidak diberikan		
				2) Sub Kegiatan Promosi dan KIE program KKBPK Melalui Media Masa Cetak dan Elektronik serta media Luar Ruang	12 Dokumen (12 Laporan SPJ)	10 Dokumen (10 Laporan SPJ)	Belum optimalnya kegiatan dalam moment strategis	Menoptimalkan kegiatan agar target tercapai	
				3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam),Rapat Koordinasi Desa (Rakordes),dan mini lokakarya (Minilok)	12 Laporan (12 Laporan SPJ)	9 Laporan (9 Laporan SPJ)	Dalam penganggaran kegiatan ini ada transport bagi peserta dikarenakan melebihi perencanaan awal	Mengoptimalkan kegiatan agar target tercapai	
				4) Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	12 Laporan (12 Laporan SPJ)	12 Laporan (12 Laporan SPJ)	Tidak adanya biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor dari DAK dan DAU dan operasional kegiatan perkantoran untuk balai {Bahan kebersihan , ATK, Foto copy, dll }	Usulan penganggaran ewat DAU	
				5) Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	12 Laporan	9 Laporan	Data awal tentang stunting yang masih bias	Verifikasi dan validasi data keluarga beresiko Stunting	
				b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	Tidak adanya biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor dari DAK dan DAU dan operasional kegiatan perkantoran untuk balai {Bahan kebersihan , ATK, Foto copy, dll }	Usulan penganggaran ewat DAU	
				1) Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini	23 Orang	23 Orang	Ditahun depan sudah tidak ada anggaran untuk mendukung	Mengusulkan kegiatan di DAU dan Mengoptimalkan kinerja	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Lapangan oleh PKB/PLKB			kegiatan ini	PKBD	
				2) Sub Kegiatan Penggerakan kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1644 Orang	Kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP) melaksanakan Penggerakan Program KKBPK 1644 Orang	Kualitas SDM Kader IMP masih rendah, Regulasi pembentukan IMP belum ada	Peningkatan kapasitas kader IMP	
				c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	4 Sub Kegiatan	4 Sub Kegiatan			
				1) Sub kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	36 Laporan (36 Laporan SPJ)	Tercapainya Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi 36 Laporan (36 Laporan SPJ)	Belum tersedianya tenaga yang kompeten sehingga dikelola tenaga staf umum	Mengusulkan pelatihan tenaga pengelola gudang alokon dari tenaga yang ada Mengusulkan tenaga yang kompeten	
				2) Sub kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5127 Orang	Tercapainya pelayanan penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang  6175 Orang	1. Wilayah tertentu cenderung ke KB mandiri / non MKJP : Tretep. Wonoboyo , kledung,bansari,tembarak 2. Masih adanya bidan yang mempromosikan alat kontrasepsi Suntik	1. Adanya inovasi berupa aplikasi SIMATAPKON KB (Sistem Informasi Manajemen Pencatatan dan Pelaporan Kontrasepsi Keluarga Berencana), Sehingga bisa mengetahui segmentasi	



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							<p>dibandingkan dengan MKJP</p> <p>3. PUS yang menikah diusia dini belum siap untuk ber KB</p> <p>4. Masih adanya PUS yang trauma menggunakan alat kontrasepsi MKJP , karena efek dari Rumor penggunaannya</p> <p>5. Tidak semua masyarakat dengan keyakinan tertentu menerima jenis alat kontrasepsi MKJP</p> <p>6. karena pasangannya bekerja diluar daerah sehingga tidak mau ber KB</p>	<p>sasaran dalam pelyanan KB MKJP</p> <p>2. Semua balai KB (20 kecamatan) menjadi pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)</p> <p>3. Memberikan advokasi dan komunikasi informasi edukasi (KIE) kepada calon akseptor maupun akseptor</p> <p>4. Pelayanan rutin di 37 fasilitas kesehatan (26 puskesmas, 4 Rumah Sakit, 5 Bidan Praktek Mandiri, 2 Balai Pengobatan)</p> <p>5. pelayanan dalam rangka momentum strategis (pendekatan pelayanan ) secara gratis</p> <p>6. peningkatan pelayanan KB MKJP di PMB/Praktek Bidan Mandiri</p>	
				3) Sub kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang	9 Unit	1. Tersedianya Rehab Balai	Perencanaan dilakukan pada tahun berjalan	Menoptimalkan kegiatan agar target tercapai	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pelayanan KB		KB di 7 Kecamatan (Candirotro, Bansari, Kranggan, Tlogomulyo, Wonobojo, Kledung, Ngadirejo)  2. Tersedianya sarana kelengkapan Balai KB di 7 Kecamatan (Candirotro, Bansari, Kranggan, Tlogomulyo, Wonobojo, Kledung, Ngadirejo)			
				4) Sub kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan (12 Laporan SPJ)	12 Laporan (12 Laporan SPJ)	Petugas KB di Faskes mengalami pergantian personil	Orientasi bagi petugas KB di Faskes	
				d. kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				1) Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	2 Dokumen (2 Laporan SPJ)	2 Dokumen (2 Laporan SPJ)	Belum semua lintas sektor memahami Kampung KB	Advokasi dan Koordinasi Kampung KB	
				2) Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	67 Kampung KB	67 Kampung KB	1. Tidak semua Poktan yang sudah terbentuk berjalan 2. Regenerasi Kader Poktan	Orientasi kader Poktan	
				<b>3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</b>					
				Indeks pembangunan Keluarga	50%	58,19%	Masihnya lemahnya pemahaman keluarga tentang indikator peningkatan kesejahteraan keluarga	perlu nya pemahaman tentang perhitungan IPK karena perhitungan bukan wewenang PD	
				a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan			
				1) Sub kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	30 Unit	Tersedianya BKB KIT di 30 Desa (Mungseng, Guntur, Joho, Banaran, Drono, Tlogopucang, Kandangan, Wadas, Kedawung, Campursalam, Mandisari, Traji, Glapansari, Caturanom, Dangkel, Bagusani,	Anggaran pengadaan BKB KIT pada marketplace tersisa banyak	Mengoptimalkan sisa anggaran BKB KIT	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Candisari, Bansari, Balesari, Campuranom, Mojosari, Gondang Winangun, Gandu Wetan, Manggong, Kalirejo, Pendowo, Kramat, Kemloko, Wonokerso, Ngipik)			
				2) Sub kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK -R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1827 Kader	1827 Kader	Perencanaan penganggaran kurang maksimal	-	
				3) Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	2165 Keluarga	2165 Keluarga	Kurangnya kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan	Advokasi Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
				4) Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				5) Sub Kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Laporan (12 Laporan SPJ)	9 Laporan (9 Laporan SPJ)	Kualitas SDM Kader masih rendah	Perbanyak pelatihan	
9	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Perda No. 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah TA. 2023; Perbup No. 60 tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah TA. 2023 Perbup No. 83 Tahun 2022 Tentang Pedoman pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun anggaran 2023	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)					
				Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana	38,65 %	41.55%			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai					
				Persentase potensi titik parkir yang tertangani	100%	100%	Manajemen Pengelolaan perparkiran belum efektif karena dalam rangka mencapai target Pendapatan Asli Daerah melalui sektor perparkiran	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber daya baik sumber daya Manusia maupun Sumber daya Anggaran Pengelolaan Perparkiran, dalam rangka optimalisasi manajemen perparkiran agar menjadi lebih baik	
				Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	99,50 %	99,63%	Kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk mengujikan kendaraannya secara berkala masih rendah.	Perlu adanya kegiatan sosialisasi dan informasi terkait dengan pentingnya pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan bagi keselamatan LLAJ, serta peningkatan pemeriksaan kelaikan kendaraan wajib uji di jalan guna memastikan operasional kendaraan di jalan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan	
				Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar	50,00% (Jumlah bengkel kelas 1 memenuhi standar = 2 unit)	50,00% (Jumlah bengkel kelas 1 memenuhi standar = 2 unit)	Untuk menjadi bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas baik disisi sarana, prasarana maupun SDM yang memadai	Perlu adanya kegiatan Pembinaan, Pelatihan, dan Penataan Perbengkelan guna meningkatkan kapasitas Bengkel Umum agar memenuhi standar	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar	62,50% (Jumlah bengkel kelas 2 memenuhi standar = 5 unit)	62,50% (Jumlah bengkel kelas 2 memenuhi standar = 5 unit)	Untuk menjadi bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas baik disisi sarana, prasarana maupun SDM yang memadai.	Perlu adanya kegiatan Pembinaan, Pelatihan, dan Penataan Perbengkelan guna meningkatkan kapasitas Bengkel Umum agar memenuhi standar	
				Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar	65,22% (Jumlah bengkel kelas 3 memenuhi standar = 30 unit)	65,22% (Jumlah bengkel kelas 3 memenuhi standar = 30 unit)	Untuk menjadi bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas baik disisi sarana, prasarana maupun SDM yang memadai.	Perlu adanya kegiatan Pembinaan, Pelatihan, dan Penataan Perbengkelan guna meningkatkan kapasitas Bengkel Umum agar memenuhi standar	
				Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	87,18%	100%	Minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum sebagai moda transportasi semakin turun yang kemudian beralih menggunakan kendaraan pribadi yang relatif lebih handal dan lebih fleksibel	Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum yang berdaya saing serta handal dalam penyediaan jasa layanan angkutan umum sebagaimana Standar Pelayanan Minimal yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif	100%	100%	Adanya kewajiban angkutan umum untuk masuk dan menggunakan fasilitas terminal sebagaimana amanat Undang undang no. 22 tahun 2019	Tingkat operasional angkutan umum yang semakin rendah akibat minat masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan umum mempengaruhi	
				Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	85,71%	85,71% Terminal Pingit, Terminal Kranggan, Terminal Plaza, Terminal Kerkop, Terminal Ngadirejo, Terminal Maron	Pemeliharaan terminal agar senantiasa dalam kondisi baik membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar	Penyediaan anggaran pemeliharaan yang memadai serta peningkatan kinerja petugas yang bertanggung jawab memastikan terminal senantiasa dalam kondisi prima dan siap untuk aktifitas pelayanan	
				Persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	14,26%	32,49% Jumlah PJU di jalan kabupaten sebanyak 4227 titik.	Terbatasnya penyediaan anggaran dalam pengadaan penerangan jalan umum	Usulan penambahan penyediaan anggaran dalam pengadaan penerangan jalan umum	
				<b>a. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				1) Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	54 Unit 1. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Listrik (54 unit) 2. Lokasi : Kec. Gemawang, Kec. Temanggung, Kec. Tembarak, Kec. Selopampang, Kec. Bulu, Kec. Jumo,	54 Unit 1. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Listrik (54 unit) 2. Lokasi : Kec. Gemawang, Kec. Temanggung, Kec. Tembarak, Kec. Selopampang,	Keterbatasan anggaran pengadaan penerangan jalan umum untuk memenuhi permohonan masyarakat	Mengusulkan penyediaan penambahan anggaran dari sumber DAU dan DAK.	



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Kec. Kledung, Kec. Pringsurat	Kec. Bulu, Kec. Jumo, Kec. Kledung, Kec. Pringsurat			
				2) Sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalandi Jalan Kabupaten/Kota	4 Paket 1. Pengadaan warning light; Lokasi : Tugu Pancasila Kec. Temanggung 2. Pengadaan Cermin tikungan : Lokasi Jalan Botoputih - Banaran Tembarak 3. Pengadaan Rambu lalu lintas (Standar); Lokasi : Ruas Jalan Greges - Banaran 4. Pengadaan Guardraill (Pagar pengaman jalan) Lokasi : Jalur Jumprit Kec. Ngadirejo	4 Paket 1. Pengadaan warning light; Lokasi : Tugu Pancasila Kec. Temanggung 2. Pengadaan Cermin tikungan ; Lokasi : Jalan Botoputih - Banaran Tembarak 3. Pengadaan Rambu lalu lintas (Standar); Lokasi : Ruas Jalan Greges - Banaran 4. Pengadaan Guardraill (Pagar pengaman jalan) Lokasi : Jalur Jumprit Kec. Ngadirejo	Keterbatasan personil yang mempunyai kompetensi dalam pengadaan barang dan jasa serta keterbatasan sarana dan prasarana.	Mengadakan diklat peningkatan kompetensi pegawai khususnya pengadaan barang dan jasa	
				3) Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	12 bln (Pemeliharaan dan penggantian lampu penerangan jalan umum di ruas jalan Kabupaten Temanggung)	12 bln (Pemeliharaan dan penggantian lampu penerangan jalan umum di ruas jalan Kabupaten Temanggung sebanyak 944 unit)	Keterbatasan personil dan sarpras untuk memenuhi permohonan dari masyarakat dalam pelayanan pemeliharaan penerangan jalan umum	Penambahan personil dan sarpras untuk memenuhi pelayanan pemeliharaan penerangan jalan umum	
				4) Sub kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan	12 bln 1. Pemeliharaan	12 bln 1. Pemeliharaan	Keterbatasan sarana prasarana penunjang	Pemenuhan sarpras pemeliharaan traffic dan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Perlengkapan Jalan	<p>traffic light; di lokasi : Simpang OBL; Simpang Prapanca; Traffic Simpang Ngadirejo</p> <p>2. Pemeliharaan rambu lalu lintas diruas jalan Kabupaten Temanggung</p>	<p>traffic light; di lokasi : Simpang OBL; Traffic Simpang Ngadirejo</p> <p>2. Pemeliharaan rambu lalu lintas diruas jalan Kabupaten Temanggung sebanyak 60 unit.</p>	dalam pelaksanaan pemeliharaan traffic dan perlengkapan jalan	perlengkapan jalan	
				<b>b. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				1) Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	12 bln Lokasi : Terminal Candiroti; Terminal Ngadirejo; Terminal Maron; Terminal Plaza; Terminal Kranggan; Terminal Pingit; Terminal Kerkop	12 bln Lokasi : Terminal Candiroti; Terminal Ngadirejo; Terminal Maron; Terminal Plaza; Terminal Kranggan; Terminal Pingit; Terminal Kerkop	Keterbatasan anggaran dalam pemeliharaan terminal	Mengusulkan penambahan anggaran untuk menunjang pemeliharaan	ersiapkan area pelataran Terminal Temanggung Permai, terutama pada akses masuk dan keluar agar mudah dilalui angkutan umum
				2) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal tipe C	12 bln	12 bln Tercapainya peningkatan pelayanan di terminal sebanyak 10 Orang yang tersebar di terminal tipe C Kab. Temanggung	Kurangnya kesadaran pengemudi angkutan umum dalam mengoptimalkan fungsi terminal	Menugaskan personil dan sosialisasi pengemudi untuk mengoptimalkan fungsi terminal	Mempersiapkan area untuk parkir (mangkal) angkutan umum di dalam Terminal Temanggung Permai

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				c. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Parkir	100 %	100 %			
				1) Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 bln	12 bln Tersedianya SDM pengelola parkir dan tercapainya optimalnya manajemen parkir dalam rangka pencapaian target pendapatan parkir	Manajemen Pengelolaan parkir belum efektif karena dalam rangka mencapai target Pendapatan Asli Daerah melalui sektor parkir	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber daya baik sumber daya Manusia maupun Sumberdaya Anggaran Pengelolaan Perparkiran, dalam rangka optimalisasi manajemen parkir agar menjadi lebih baik	-
				d. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100 %	100 %			
				Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5,000 set (Tanda Bukti Lulus Uji PNBPN)	5,000 set (Tanda Bukti Lulus Uji PNBPN)	-	-	
				1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 bulan (Operasional pengujian kendaraan bermotor, Servise Peralatan Pengujian Kendaraan bermotor, Servise Kalibrasi Kendaraan Bermotor)	12 bulan (Operasional pengujian kendaraan bermotor, Servise Peralatan Pengujian Kendaraan bermotor, Servise Kalibrasi Kendaraan Bermotor)	Kenaikan harga BBM sebagai penunjang kegiatan operasional sehingga membutuhkan anggaran yang cukup	Mengajukan tambahan dalam perubahan anggaran	
				e. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	100 %	100 %			
				1) Sub kegiatan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	100 kegiatan (Keg. Pengamanan Lebaran, Natal Tahun Baru, dan Pengamanan kegiatan lain)	100 kegiatan (Keg. Pengamanan Lebaran, Natal Tahun Baru, dan Pengamanan kegiatan lain)	Keterbatasan anggaran dan personil dalam melaksanakan pengamanan lalu lintas	Mengusulkan penambahan anggaran kegiatan pengamanan lalu lintas	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				f. Kegiatan Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
				1) Sub kegiatan Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 bln (Pelayanan mobilitas anak sekolah. Lokasi : Jalur terminal Madureso – SMP N5 TMG, Jalur Kranggan – Purwosari Pringsurat)	12 bln (Pelayanan mobilitas anak sekolah. Lokasi : Jalur terminal Madureso – SMP N5 TMG, Jalur Kranggan – Purwosari Pringsurat)	-	-	
10	Komunikasi dan Informatika	Dinkominfo	<ul style="list-style-type: none"> <li>•UU No. 40 Th 1999 tentang Pers</li> <li>•UU No. 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>•UU No. 25 Th 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>•PP No. 32 Th 2022 tentang Penyiaran</li> <li>•UU No. 1 Th 2024 tentang Informasi</li> </ul>	<b>1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik</b>	100%	100%			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Transaksi Elektronik</li> <li>• Perda No. 11 Th 2022 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV</li> <li>• Perda No. 12 Th 2022 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM</li> <li>• Perda No. 1 Th 2023 tentang Informasi Komunikasi Publik</li> <li>• Perbub No. 74 Th 2023 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) dilingkungan Pemkab Temanggung</li> </ul>						
				Persentase PPID badan publik yang aktif	20%	23,46%	Belum optimalnya kesadaran di tingkat PPID Pelaksana Badan	Penguatan kelembagaan dan SDM PPID Pelaksana,	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							Publik untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik	pendampingan, monev rutin, pengembangan website dan dashboard PPID serta peningkatan layanan dengan pemenuhan ketersediaan informasi publik kepada masyarakat	
				Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	30%	78,89%	Minimnya komunitas informasi masyarakat yang berperan aktif dalam penyebaran informasi	Meningkatkan peran aktif komunitas informasi masyarakat dalam mengakses dan menyampaikan informasi melalui kanal-kanal komunikasi yang dikelola	
				Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	100%	100%	Kepatuhan Lembaga Penyiaran di Kabupaten Temanggung terhadap Pedoman Program Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) masih perlu ditingkatkan.	Meningkatkan Kepatuhan Lembaga Penyiaran di Kabupaten Temanggung terhadap Pedoman Program Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)	
				a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 Sub Keg	4 Sub Keg			
				1) Sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 dok laporan realisasi hasil publikasi dan rilis media kominfo	12 dok laporan realisasi hasil publikasi dan rilis media kominfo	Belum optimalnya pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal terutama dalam inovasi program siaran	Optimalisasi dan variasi program siaran, baik program lama/eksisting maupun program baru	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				2) Sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik	12 dok laporan realisasi jumlah layanan informasi publik	12 dok laporan realisasi jumlah layanan informasi publik	Belum optimalnya penyajian dokumen/informasi publik oleh PPID Pelaksana Badan Publik kepada masyarakat	Monitoring dan evaluasi penyampaian dokumen oleh PPID Pelaksana Badan Publik secara berkala	
				3) Sub kegiatan Layanan Hubungan Media	1 dok laporan realisasi publikasi capaian kinerja Bupati dan wakil Bupati tahun 2018-2023	1 dok laporan realisasi publikasi capaian kinerja Bupati dan wakil Bupati tahun 2018-2023	Kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target dan rencana	Melakukan kerjasama dengan media masa cetak maupun elektronik terkait publikasi capaian dan prestasi selama 5 tahun periode Bupati dan Wakil Bupati 2018-2023	
				4) Sub kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	264 org	264 org	Belum optimalnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dalam melaksanakan desiminasi informasi dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penguasaan dan pemanfaatan TIK	Monitoring dan pembinaan kepada Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), FK Metra, Saka Milenial, Relawan TIK, dan Lembaga-lembaga pinaan Dinkominfo lainnya secara berkala	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Perbub No 22 Th 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik</li> <li>Perbub No 83 Th 2021 tentang</li> </ul>	<b>2. Program Aplikasi Informatika</b>	100%	100%			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			<p>Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p> <p>KepBup No 555/213 Th 2023 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2027.</p>						
				Persentase ketersediaan akses internet publik	100%	100%	Alat rusak, hilang, dan menjadi	Pengadaan alat yang rusak/hilang.	



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							sarang semut	Pembersihan alat dan penanggulangan.	
				Persentase ketersediaan jaringan intranet	100%	100%	Kestabilan sinyal kurang dikarenakan melebihi batas maksimal penggunaan alat yang terkoneksi, beberapa tempat terkait daya listrik yang melebihi batas maksimal penggunaan peralatan, kondisi alam seperti petir	Edukasi kepada pengguna jaringan. Pemasangan penangkal petir.	
				Persentase sistem informasi yang terintegrasi	50%	51,43%	Masih adanya pengembangan aplikasi oleh pihak ketiga sehingga proses penarikan data terkendala dalam proses penyusunan api-service. Kebijakan dari Pemerintah Pusat terkadang menjadi kendala proses integrasi	Pembangunan jaringan berbasis fiber optik untuk integrasi jaringan seluruh PD	
				Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	60%	78,10%	Belum adanya standar baku pengelolaan sistem informasi, serta terbatasnya SDM di bidang TIK	Diterbitkannya regulasi yang mengatur pengelolaan sistem informasi yang baku	
				a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 sub keg	1 sub keg	Terbatasnya SDM, kurangnya kebijakan keamanan dalam pengelolaan domain dan sub domain	Pelatihan SDM, Pengembangan Keterampilan Teknis, Penyusunan Pedoman dan Kebijakan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				1) Sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 unit Bandwidth (1.000 Mbps)	1 unit Bandwidth (1.000 Mbps)	Karena masih menggunakan jaringan radio sehingga masih banyak gangguan performansi jaringan	Memperbanyak titik-titik tripiter untuk memberikan jalur koneksi backup	
				b. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 sub keg	4 sub keb			
				1) Sub kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	12 unit server milik Pemda	12 unit server milik Pemda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batteray UPS untuk Data Center sudah aus (drop)</li> <li>- Kebutuhan online internet di tiap kantor pemerintahan temanggung untuk akses aplikasi baik pusat maupun local guna pemenuhan layanan masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilakukan penganggaran untuk pengadaan batteray UPS di T.A. 2024</li> <li>- Mencukupi kebutuhan bandwidth juga hardware jaringan dan IT di datacenter</li> </ul>	
				2) Sub kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	15 unit aplikasi	20 unit aplikasi	Dalam pelaksanaan pengembangan dan pembuatan aplikasi tidak sesuai alur prosedur yang sudah ditetapkan yaitu berdasarkan surat permintaan/permohonan pembuatan aplikasi OPD sehingga kesulitan untuk menentukan target, banyak Permintaan aplikasi mendadak dari	Mengembalikan prosedur sesuai dengan daftar permohonan pembuatan aplikasi dengan konsekuensi mengabaikan permintaan dari para pejabat yang tidak sesuai prosedur	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							pejabat		
				3) Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	12 dok Laporan kegiatan pengelolaan smartcity	12 dok Laporan kegiatan pengelolaan smartcity	- Dalam pengembangan dan pembuatan aplikasi terkendala pada proses integrasi dengan aplikasi pusat atau aplikasi yang dikembangkan oleh pihak ketiga Ancaman keamanan siber terhadap infrastruktur dan data dalam ekosistem cerdas	- Untuk aplikasi pusat terkendala dengan kebijakan sedangkan terkait pihak ketiga perlu dilakukan koordinasi dengan OPD dan Pengembang Implementasi langkah-langkah keamanan siber yang ketat, pelatihan keamanan untuk personel, dan pemantauan keamanan yang terus-menerus	
				4) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemereintah Daerah	12 dok (1 SK Hibah, 4 NPHD, 4 Dokumen Kontrak, 4 Dokumen Laporan Pertanggungjawaban)	12 dok (1 SK Hibah, 4 NPHD, 4 Dokumen Kontrak, 4 Dokumen Laporan Pertanggungjawaban)	- Integrasi yang sulit antara berbagai sistem TIK yang digunakan oleh berbagai OPD m - Keterbatasan keahlian teknis di antara personel TIK - Kurangnya standarisasi dalam penggunaan perangkat lunak dan sistem TIK Anggaran yang terbatas	- Membuat rencana strategis TIK yang jelas dan terintegrasi - Memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada personel TIK - Membuat SK dan SOP mengenai standarisasi dalam penggunaan perangkat lunak dan sistem TIK Menambah anggaran	
11.	Koperasi dan UMKM	DINKOPDAG		1. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
				Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan	75%	80,65%	- Pendidikan dan pelatihan perkoperasian	- Mendatangkan narasumber dalam pendidikan dan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				dan pemasaran usaha koperasi aktif			yang terselenggara selama ini belum memberikan arah yang jelas mengenai kurikulum, proses dan capaian pembelajarannya - Minat koperasi dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan masih rendah - Tema pendidikan dan pelatihan yang ditawarkan kurang bervariasi	pelatihan perkoperasian yang ahli, kompeten dan memiliki kurikulum, proses dan capaian pembelajaran yang jelas - Pelaksanaan Diklat serta tema dan materi yang dipilih lebih bervariasi, up to date dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan koperasi	
				<b>a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>1 Sub Kegiatan</b>	<b>1 Sub Kegiatan</b>			
				1) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	150 Orang	150 Orang			
				<b>b. Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1 Sub Kegiatan</b>	<b>1 Sub Kegiatan</b>			
				1) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	120 Orang	120 Orang			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				<b>2. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>					
				<b>Persentase usaha mikro aktif</b>	35%	100%	Keterbatasan kemampuan, ketrampilan dan permodalan sehingga berdampak pada kurang aktifnya usaha mikro	Mendatangkan narasumber dalam pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang ahli, kompeten dan memiliki kurikulum, proses dan capaian pembelajaran yang jelas Pelaksanaan Diklat serta tema dan materi yang dipilih lebih bervariasi, up to date dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan koperasi	
				<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>1 Sub Kegiatan</b>	<b>1 Sub Kegiatan</b>			
				a. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1 Unit Usaha UMKM Ngadirejeh	1 Unit Usaha UMKM Ngadirejeh			
				1) Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	5700 alat UTTP	5749 alat UTTP			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
12	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Program Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100%	100%	Kebijakan LSD (Lahan Sawah Dilindung) yang tidak sinkron dengan Perda RTRW Kabupaten Temanggung	Mendorong OPD teknis dan pemangku kebijakan untuk segera mengesahkan Perubahan RTRW	
				Indikator Program Nilai Realisasi Investasi 625 M 2046,25 M					
				Indikator Program Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	100 %	100 %			
				Indikator Program Persentase Ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih	100 %	100 %			
				a. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota					
				1) Sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Kegiatan	1 Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Pelaku UMK yang mengikuti kegiatan fasilitasi kemudahan berusaha (kemitraan) belum memenuhi standar yang ditentukan oleh perusahaan	Melakukan pendampingan bagi pelaku UMK agar dapat memenuhi standart yang ditentukan oleh perusahaan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				b. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	1 dokumen	1 Dokumen Tersedianya 1 Kajian Potensi Investasi	Tidak adanya anggaran untuk menyusun peta potensi dan peluang usaha	Melakukan koordinasi dengan OPD terkait yang dapat mengampu pembuatan peta potensi dan mengusulkan anggaran penyusunan prts potensi dan peluang usaha	
				<b>2. Program Promosi Penanaman Modal</b>	100%	100%			
				Indikator program Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	100 %	100 %			
				<b>a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab.Kota</b>					
				1) Sub kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	1 kegiatan	1 kegiatan	Tidak adanya anggaran untuk menyusun regulasi strategi promosi penanaman modal	Mengusulkan anggaran untuk menyusun regulasi strategi penanaman modal	
				2) Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan (terselenggaranya 1 kegiatan promosi penanaman modal dalam Temanggung Fest 2023)	Belum adanya Investment Project (iPro) yang siap ditawarkan kepada investor	Melakukan koordinasi dengan OPD terkait yang dapat mengampu pembuatan Investment Project (iPro) dan mengusulkan anggaran penyusunan Investment Project (iPro)	
				<b>3. Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	100%	100%			
				Indikator Program	100 %	100 %			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Persentase pelayanan perizinan online					
				Indikator Program Persentase perizinan yang bebas calo	100 %	100 %			
				Indikator Program Persentase perizinan yang diterbitkan tetap waktu	100 %	100 %			
				a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan			
				1) Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik	3000 Pelaku usaha	13.781 Pelaku Usaha	Masih banyak pemohon yang belum bisa menggunakan aplikasi perizinan berusaha secara elektronik	Melakukan pendampingan jemput bola sampai tingkat Kecamatan dan Kelurahan sekaligus sosialisasi tata cara permohonan perizinan berusaha secara elektronik	
				2) Sub kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	200 orang	244 orang yang menerima layanan konsultasi dan pengaduan	Sistem layanan konsultasi melalui aplikasi belum sempurna sehingga pemohon masih butuh asistensi	Melakukan asistensi oleh tenaga penamping OSS	
				<b>4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	100%	100%			
				Indikator Program Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan	100%	100%			



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				yang diterbitkan					
				Indikator Program Persentase Pengaduan masyarakat yang terselesaikan	100%	100%			
				Indikator Program Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	100%	100%			
				a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal			
				1) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	20 pelaku usaha	71 pelaku usaha yang mendapatkan pengawasan	Kesulitan menghubungi pelaku usaha, karena ketidaksesuaian data di OSS dan terbatasnya lingkup kewenangan pemerintah daerah, sehingga tidak bisa melakukan pengawasan di semua perusahaan yang ada di Temanggung	Melakukan penyesuaian atau update data pelaku usaha pada sistem OSS dan mengajukan usulan kepada Kementerian Investasi atau DPMPSTSP Provinsi untuk melakukan pengawasan perusahaan di Kabupaten Temanggung	
				2) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	197 Pelaku Usaha	470 orang yang mengikuti bimtek penanaman modal	Kurangnya kemampuan peserta bimtek/sosialisasi dalam memahami materi sosialisasi	Melakukan pendampingan perizinan kepada sebagian peserta bimtek di kantor DPMPSTSP	
13.	<b>Kepemudaan Dan Olahraga</b>	<b>Dinas Pendidikan,</b>		<b>1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing</b>					

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Pemuda, dan Olahraga		Kepemudaan					
				Persentase organisasi pemuda yang aktif	80.76%	93.10%			
				a. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	4 sub kegiatan				Pemenuhan SPM melalui Peningkatan pemerataan layanan pendidikan dan - Pemenuhan partisipasi dan pemerataan peserta didik
				1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Orang	Terlaksananya pengiriman peserta pada Jambore Pemuda Jawa Tengah sebanyak 8 orang yang kemudian meraih 1 perak dan 2 perunggu	1) PPAN dan PPAP tidak bisa mengirimkan pesertanya mengingat permintaan peserta sangat mendadak sehingga tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mencari peserta dan persiapan. 2) Jambore Pemuda tidak maksimal mengirimkan jumlah peserta (12 orang) mengingat pada 2 cabang lomba tidak ada peserta yang mendaftar dan terseleksi untuk mewakili Kabupaten Temanggung	Penyebarluasan informasi dan sosialisasi perlu ditingkatkan lagi agar seluruh masyarakat/warga Kabupaten Temanggung mengetahui adanya program ini sehingga jumlah pendaftar bisa lebih meningkat dan yang berminat bisa ikut berpartisipasi	
				2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	30 Orang	Terlaksananya pelatihan Wira Usaha Pemula Potong Rambut Khusus Pria untuk	Belum semua kecamatan mengirimkan pesertanya. Peserta berasal dari 12	Penyebarluasan informasi dan sosialisasi perlu ditingkatkan lagi agar seluruh	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						sejumlah 30 orang peserta yang berasal dari unsur pemuda (Laki-laki) di wilayah Kabupaten Temanggung	Kecamatan dari 20 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung	masyarakat/warga Kabupaten Temanggung mengetahui adanya program ini sehingga jumlah pendaftar bisa lebih meningkat dan merata dari seluruh wilayah Kabupaten Temanggung	
				3) Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	108 Orang	77 Orang. terealisasinya bantuan beasiswa untuk Mahasiswa tidak mampu dan berprestasi di Kabupaten Temanggung (sekolah Perguruan Tinggi) sebanyak 77 orang Berdasarkan SK Bupati Nomor 420/315 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Tidak Mampu Berprestasi Kabupaten Temanggung Tahun 2023	Dari pendaftar sejumlah 129 orang pemohon yang berkasnya lengkap, setelah diverifikasi dan validasi datanya hanya sebanyak 77 orang yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan beasiswa.	Penyebarluasan informasi dan sosialisasi perlu ditingkatkan lagi agar seluruh masyarakat/warga Kabupaten Temanggung mengetahui adanya program ini sehingga jumlah pendaftar bisa lebih meningkat dan yang lolos seleksi bisa mencapai target.	
				4) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/ RAD Tingkat Kabupaten/ Kota	Dokumen	Terselesaikannya pembuatan Aplikasi SIDAMUDA sebagai Media menginformasikan data kepemudaan di wilayah Kabupaten Temanggung	1) Aplikasi ini belum bisa digunakan untuk menghitung IPP mengingat ada beberapa data primer yang harus didapat dengan mekanisme survey 2) Pada saat pembuatan aplikasi, ada OPD yang tidak/belum	1) penghitungan IPP menggunakan data primer terdahulu dengan konsekuensi turunnya akurasi hasil penghitungannya 2) Koordinasi dan sinergitas antar OPD dan Lintas sektor perlu ditingkatkan lagi 3) Perlu dilakukan ujicoba penggunaan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							memberikan masukan dan data sehingga perlu penyempurnaan. 3) Aplikasi belum diujicoba	Aplikasi SIDAMUDA agar diketahui kekekurangan-kekurangannya sehingga bisa dilakukan penyempurnaan	
				b. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 sub kegiatan				
				1) Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1) Terelesainya pemberian Hibah untuk KNPI 2) Terlaksananya Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) Kepemudaan untuk sejumlah 55 orang pemuda dari Unsur KNPI, OKP dan Kepramukaan	Kriteria peserta kegiatan tidak seperti yang diharapkan, mengingat tujuan awal dilaksanakannya LDK ditujukan untuk pengurus KNPI setelah terbentuk kepengurusan baru. Namun sampai dengan LDK dilaksanakan, KNPI Temanggung belum melaksanakan reorganisasi	Peserta diambilkan kader2kader muda calon pemimpin berdasarkan usulan KNPI, OKP dan kepramukaan	
				<b>2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</b>					
				<b>Persentase pelatih olahraga bersertifikat</b>	35.40%	96.43%			
				<b>Persentase prestasi olahraga</b>	59.00%	70.00%			
				<b>Persentase atlet berprestasi</b>	21.00%	83.19%			
				a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1 Sub Kegiatan				
				1) Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/ Kota	40 Orang atlet dan 14 orang Pelatih yang menghasilkan juara	Pemberian Penghargaan kepada 40 Orang atlet dan 14 orang	Pemberian penghargaan Atlet dan pelatih bersertifikat yang	a. Menambah anggaran. b. Memprediksi cabor yang akan memperoleh	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Pelatih yang menghasilkan juara	menghasilkan juara nominalnya masih rendah dan belum bisa mengetahui jumlah yang akan diberikan penghargaan	mendali berdasarkan tahun sebelumnya	
				b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 sub kegiatan				
				1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota	5 Unit	5 Unit	Kurangnya sarana dan prasarana olahraga	a. Sarpras yang ada digunakan beberapa cabor olahraga. b. Mengoptimalkan sarpras yang sudah ada. c. Mengusulkan pengadaan sarpras olahraga yang belum ada.	
				c. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 sub kegiatan				
				1) Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	Pembinaan atlet pelajar yang belum maksimal dan kurangnya partisipasi orang tua dalam memberikan motivasi kepada anak yang akan bertanding, serta prestasi yang belum maksimal.	a. Kerjasama dengan Pengkab Cabang Olahraga. b. Komunikasi dengan orang tua atlet. c. TC atlet.	
				d. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1 sub kegiatan				
				1) Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2 Organisasi	2 Organisasi	Masih rendahnya budaya dan prestasi olahraga, Keberadaan sarana	a. Pemberian bonus atlet yang memperoleh medali kejuaraan. b. Mengusulkan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							dan prasarana olahraga yang representatif, dan Terbatasnya upaya pembibitan atlet, serta belum optimalnya pengembangan cabang olahraga	pembenahan dan pembuatan sarpras olahraga. c. Memetakan kantong-kantong atlet dalam satuan pendidikan. d. Membuat Desain besar olahraga kabupaten.	
				e. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1 sub kegiatan				
				1) Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	1 Dokumen	Kurangnya sosialisasi, kurangnya pengembangan olahraga rekreasi, Kurangnya kesadaran masyarakat dengan berolahraga rekreasi dapat menghilangkan kejenuhan dalam diri dan mengurangi stres serta ketidaktahuan masyarakat terhadap olahraga rekreasi.	a. Sosialisasi Jenis Olahraga Rekreasi. b. Mengadakan pelatihan wasit dan pelatih olahraga masyarakat. c. Mengadakan event kejuaraan olahraga masyarakat	
				<b>3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</b>					
				<b>Persentase gugus depan yang aktif</b>	92.89%	100%			
				a. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1 sub kegiatan				
				1) Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Organisasi	Tersalurkannya hibah kepada organisasi Pramuka (Kwarcab)	-	-	
14	Statistik	Dinkominfo	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU 16 Th 1997 tentang Statistik</li> <li>Perpres</li> </ul>	<b>1. Program Penyelenggaraan StatistikSektoral</b>	100%	100 %			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			39 Th 2019 tentang Satu Data Indonesia Perbup 80/2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung						
				Cakupan ketersediaan data makro daerah	100%	100 %	Data tersebut dihasilkan melalui kegiatan statistik dasar yang merupakan kewenangan BPS Kabupaten Temanggung, sehingga ketersediaannya menunggu rilis data dari instansi tersebut.	- Melakukan komunikasi secara masif dengan produsen data Pembenahan penjadwalan kegiatan pengumpulan data statistik.	
				a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten/Kota	2 sub keg	2 sub keg			
				1) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 dok (buku statistik, buku ASPM, dan meta data)	3 dok (buku statistik, buku ASPM, dan meta data)	- Belum optimalnya pengelolaan data statistik sektoral di tingkat produsen data. Ketersediaan data makro daerah masih terkait dengan pihak instansi vertikal selaku pengolah data	- Dibentuk forum data sebagai wadah komunikasi terkait permasalahan data antara Pembina Data, Wali Data dan Produsen Data, Koordinasi secara intensif dengan BPS terkait updating data statistik makro daerah	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							yang mempunyai kewenangan sesuai undang-undang.		
				2) Sub kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	1 dok SDI (Satu Data Indonesia)	1 dok SDI (Satu Data Indonesia)	Updating data ke aplikasi bank data pembangunan dari produsen data masih belum sesuai target waktu yang ditentukan	Dilaksanakannya rapat teknis terkait pengisian data ke aplikasi bank data pembangunan tiap semester	
15	Persandian	Dinkominfo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perbub No 22 Th 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik</li> <li>Per. BSSN No 4 Th 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> </ul>	<b>1.Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>					
				Tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan resiko	100%	100%	Belum optimalnya kualitas keamanan	Meningkatkan indeks keamanan informasi	



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				keamanan informasi			informasi Pemerintah Daerah dan belum optimalnya sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian resiko	sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga terwujud efektifitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Temanggung.	
				a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 sub keg	1 sub keg	Belum adanya sub kegiatan yang melaksanakan Pelayanan keamanan informasi	Menambah 1 sub kegiatan untuk pelayanan keamanan informasi yang melayani TTE dan kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Keamanan Informasi	
				1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan non Elektronik	12 Laporan kirim terima berita dari Sanapati	12 Laporan kirim terima berita dari Sanapati	Belum maksimalnya penilaian Indeks KAMI (keamanan Informasi) sesuai dengan standar keamanan informasi	Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka meningkatkan penilaian indeks KAMI	
16	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		<b>1. Program Pengembangan Kebudayaan</b>					
				Persentase kelompok Budaya yang produktif	80,64%	125,95%	Belum adanya register untuk kegiatan upacara adat,	Pembuatan register upacara adat	
				a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kab/kota					
				1) Kegiatan kunjungan dan monev kegiatan budaya di Desa	234 Kelompok	364 Kelompok	Belum adanya register untuk kegiatan upacara adat	Pembuatan register upacara adat dengan jemput bula ke Desa-Desa	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				2) Pelestarian kesenian tradisional yang masarakat pelakunya dalam daerah kab/kota	32,16%	47,14%	Kualitas SDM yang belum merata	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan berbagai pelatihan	
				3) Pendataan kelompok kesenian yang aktif melalui Register	724 Kelompok	2427 Kelompok	Kualitas SDM yang belum merata	Peningkatan Kualitas SDM dengan pelatihan dan membuat event yang sesuai dengan standar, agar supaya menjadi percontohan kelompok kesenian di kabupaten Temanggung	
				<b>2. Program Pembinaan Sejarah</b>					
				Persentase pelestarian Sejarah Lokal	6,73%	7,05%	1. belum tergali dan terdokumentasi nya sejarah lokal di Temanggung. 2. makin berkurangnya narasumber yang menggali sejarah lokal.	Penggalian dan pendokumentasian dengan didukung dana dari Pemerintah Daerah	
				a. Pelestarian sejarah lokal					
				1) Pengalian dan pendokumentasian sejarah lokal	16 Sejarah	16 Sejarah	1. belum tergali dan terdokumentasi nya sejarah lokal di Temanggung. 2. makin berkurangnya narasumber yang menggali sejarah lokal.	Penggalian dan pendokumentasian dengan didukung dana dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa	
				<b>3. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya</b>					
				Persentase Pelestarian Cagar Budaya	5,18%	5,18%	terkendala kemampuan pemda dalam pembiayaan	Penyusunan regulasi tentang pelestarian cagar budaya sehingga	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							cagar budaya disamping itu juga faktor regulasi yang belum ada dalam pembiayaan untuk cagar budaya yang bukan aset pemda	ada payung hukum dalam pelestarian cagar budaya terutama yang bukan aset pemda/pemerintah	
				a. Pelestarian Cagar Budaya					
				1) Pengamanan dan perawatan Cagar Budaya	10 Cagar Budaya	10 Cagar Budaya	terkendala kemampuan pemda dalam pembiayaan cagar budaya disamping itu juga faktor regulasi yang belum ada dalam pembiayaan untuk cagar budaya yang bukan aset pemda	Penyusunan regulasi tentang pelestarian cagar budaya sehingga ada payung hukum dalam pelestarian cagar budaya terutama yang bukan aset pemda/pemerintah	
17.	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	1. Program Pembinaan Perpustakaan					
			Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan						
			Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang						

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah						
			Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan						
			Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Temanggung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan						
				Persentase Peminjam di Perpustakaan	82 %	82,64%	Rendahnya keinginan meminjam buku di perpustakaan karena koleksi yang dimiliki tidak update sehingga kurang menari bagi pemustaka	Melakukan pengadaan bahan perpustakaan baik melalui pembelian, hibah/hadiah maupun mengadakan kerja sama antar perpustakaan dalam hal tukar pinjam koleksi	Turut serta mengupayakan tambahan pendanaan serta mendukung kegiatan peningkatan peminjam di perpustakaan
							Perpustakaan tidak	Perpustakaan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							memiliki jam buka layanan yang konsisten karena seringnya perubahan jam kerja atau tidak adanya pengelola khusus perpustakaan yang siap mengelola layanan perpustakaan	Kabupaten Mengoptimalkan kegiatan layanan Perpustakaan keliling dengan inovasi layanan pemustaka ke perpustakaan-perpustakaan di wilayah Kabupaten Temanggung	
							Kurangnya kegiatan untuk peningkatan minat baca	Membuat aturan jam buka layanan perpustakaan dan menempatkan informasi mengenai jam buka layanan perpustakaan di tempat yang dapat dilihat jelas oleh pemustaka	
								Menambah kegiatan untuk meningkatkan minat baca dan mengadakan bekerja sama dengan pihak lain untuk mengupayakan kegiatan tersebut, seperti pengadaan pojok buku oleh BI Corner dan Pojok Buku FIKT	
								Mempromosikan layanan perpustakaan digital/koleksi ebook agar pemanfaatannya lebih optimal oleh masyarakat.	
				Persentase Pertumbuhan Jumlah Pengunjung Perpustakaan	40%	41,79%	Perpustakaan tidak memiliki jam buka layanan yang konsisten karena seringnya perubahan jam kerja atau tidak adanya pengelola	Membuat aturan jam buka layanan perpustakaan dan menempatkan informasi mengenai jam buka layanan perpustakaan di tempat	Turut serta mengupayakan tambahan Pendanaan serta mendukung

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							khusus perpustakaan yang siap mengelola layanan perpustakaan	yang dapat dilihat jelas oleh pemustaka	kegiatan peningkatan pengunjung di perpustakaan
							Kurangnya kegiatan promosi perpustakaan yang melibatkan masyarakat/pengunjung secara langsung untuk datang ke perpustakaan	1. Menambah kegiatan promosi perpustakaan yang melibatkan masyarakat/pengunjung secara langsung untuk datang ke perpustakaan. Kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan sasaran pemustakanya, seperti kelas talikur, Tour de Library dan bazaar buku	
							Variasi layanan di perpustakaan kurang menarik	Menambah variasi layanan di perpustakaan yang menarik pengunjung untuk datang ke perpustakaan seperti, layanan wifi dan internet gratis, layanan story telling, layanan bermain anak	
				Persentase Perpustakaan Yang Aktif	35,62 %	56,68%	Perpustakaan tidak memiliki pengelola khusus untuk melakukan layanan di perpustakaan	1. Menempatkan petugas khusus di perpustakaan untuk melakukan kegiatan layanan perpustakaan	Turut serta berperan mengupayakan tambahan pendanaan serta aktif melakukan sosialisasi maupun penyuluhan kepada

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									Masyarakat tentang pentingnya keberadaan perpustakaan di wilayah kab. Temanggung Mendorong pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan di wilayah kab. Temanggung
							Pengelola perpustakaan yang ada tidak memiliki kompetensi di bidang kepustakawanan	Mengadakan pembinaan, pelatihan dan konsultasi kepustakawanan melalui inovasi KOPI (Konsultasi Kepustakawanan dan Literasi) untuk pengelola perpustakaan.	
							Rendahnya dukungan untuk kegiatan pengelolaan di perpustakaan dari stakeholder	Aktif melakukan advokasi kepada stakeholder terkait mengenai pentingnya perpustakaan	
							Penjaringan data melalui aplikasi Si Petak belum dilakukan secara optimal menyeluruh di perpustakaan yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung	Melakukan sosialisasi Si Petak	
								2. Melakukan monitoring dan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
								evaluasi melalui media online (WA)	
				<b>a. Kegiatan:</b> Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%			
				<b>1) Sub Kegiatan:</b> Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1 Layanan: Terbitan berkala	1 Layanan: Terbitan berkala	Rendahnya minat membaca koleksi terbitan berkala, kurangnya promosi perpustakaan	Promosi perpustakaan melalui media sosial	Turut serta mengupayakan tambahan Pendanaan serta berperan aktif dalam mempromosikan perpustakaan dan minat baca
				<b>2) Sub Kegiatan:</b> Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang: pengelola perpustakaan dari 13 desa se Kecamatan Kedu Bandunggede 2 orang Bojonegoro 1 orang Candimulyo 2 orang Danurejo 2 orang Gondangwayang 2 orang Karangtejo 1 orang Kedu 2 orang Kundisari 10 orang Kutoanyar 2 orang Mergowati 1 orang Mojotengah 2 orang Karangsari 2 orang Tegalsari 2 orang	30 Orang: pengelola perpustakaan dari 14 desa se Kecamatan Kedu	Tidak semua desa yang mengikuti pelatihan sudah memiliki perpustakaan desa	Monitoring dan pembinaan perpustakaan desa	Turut serta dalam mengupayakan tambahan Pendanaan dan memberikan penyuluhan akan pentingnya perpustakaan desa
				<b>3) Sub Kegiatan:</b> Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat	2 Layanan: perpustakaan keliling 711 titik Layanan pemustaka (diluar hari kerja)	2 Layanan: perpustakaan keliling 711 titik Layanan pemustaka (diluar hari kerja)	Koleksi perpustakaan anak kurang variatif, terbatasnya sarana dan prasarana serta petugas yang	Tetap melaksanakan kegiatan pelayanan perpustakaan keliling seoptimal mungkin	Turut serta dalam mengupayakan tambahan



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Kabupaten/ Kota			bertugas melayani perpustakaan keliling		Pendanaan serta memberikan penyuluhan akan pentingnya perpustakaan
				<b>4) Sub Kegiatan:</b> Pengembangan Bahan Pustaka	322 Eksemplar: Fiksi	322 Eksemplar: Fiksi	Terbatasnya jumlah bahan perpustakaan yang diadakan	Kerjasama dengan pihak lain terkait dengan pengadaan buku perpustakaan melalui hibah/hadiah buku	Turut serta dalam mengupayakan tambahan pendanaan untuk pengadaan bahan perpustakaan
				<b>5) Sub Kegiatan:</b> Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	1777 Eksemplar: Fiksi Non fiksi Pengolahan buku baik pengadaan/pembelian maupun hibah	1777 Eksemplar: Fiksi Non fiksi Pengolahan buku baik pengadaan/pembelian maupun hibah	Kurangnya bahan/kelengkapan yang diadakan untuk pengolahan bahan perpustakaan	Tetap mengolah bahan perpustakaan dengan kelengkapan yang ada	Turut serta dalam mengupayakan tambahan Pendanaan serta memberikan penyuluhan akan pentingnya perpustakaan
				<b>2. Program Pelestarian koleksi nasional dan Naskah Kuno</b>					
				Cakupan naskah kuno Kab. Temanggung dan koleksi nasional yang dilestarikan	100	100,01	Sulitnya menemukan naskah kuno di wilayah kabupaten temanggung, penambahan koleksi nasional masih sangat kurang	Mengadakan kegiatan penelusuran naskah kuno di wilayah Kabupaten Temanggung dan di luar wilayah Kabupaten Temanggung, Menambah buku	Turut serta memberikan sosialisasi dan penyuluhan akan kewajiban melaporkan informasi

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
								perpustakaan untuk koleksi nasional	keberadaan naskah kuno di wilayah kab. Temanggung kepada Dinpusip
				<b>a. Kegiatan:</b> Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%			
				<b>1) Sub Kegiatan:</b> Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	1 Orang: atas nama Fauzan Desa Kedu Kec Kedu	8 Orang: Pondok Pesantren Ta'limul Al Aulad Al Jalal 3 naskah 2. Pondok Pesantren Al Falah Krajan 1 naskah 3. Pondok Pesantren Takhfidzul Qur'an Nailul Huda 1 naskah 4. Pondok Pesantren Miftakhul Huda Kandangan 2 naskah 5. Pondok Pesantren Dalailul Khoirot 4 naskah 6. Pondok Pesantren Darul Ihsan Tening 1 naskah 7. Ponpes Dzikrus Sholikhin Jumo 1 naskah 8. Achmad fauzan Kedu 2 naskah	Tidak semua lokasi penelusuran memiliki naskah kuno	Koordinasi dengan stakeholder terkait	Turut serta memberikan sosialisasi dan penyuluhan akan kewajiban melaporkan informasi keberadaan naskah kuno di wilayah kab. Temanggung kepada Dinpusip
18.	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1. Peraturan Bupati Temanggung No.44 Tahun	<b>1. Program Pengelolaan Arsip</b>					

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			2022 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis (SKKAD) Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusutan Arsip						
				Indeks Manajemen Kearsipan	67	70,93	Rata-rata capaian hasil audit internal pada OPD belum dalam kategori baik	Terus berkoordinasi dengan OPD yang telah memiliki arsiparis agar pengelolaan kearsipan dapat mencapai kategori baik	Turut serta dalam menginformasikan kepada PD untuk menindaklanjuti hasil audit yang dilakukan oleh tim audit LKD
				Persentase Pengelolaan Arsip secara Baku	31,98	36,05	Pengelolaan Kearsipan pada unit kerja/desa masih belum sesuai standar kearsipan	Terus melakukan pembinaan dan pembenahan arsip pada unit kerja/desa yang belum memenuhi standar dalam pengelolaan arsipnya. Terus berkoordinasi kepada kecamatan yang telah memiliki arsiparis	Turut serta dalam menginformasikan kepada kepala desa untuk menindaklanjuti hasil bintek dan monitoring arsip desa
				<b>2. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip</b>					
				Persentase arsip vital konvensional yang	50	50,08	Data arsip vital masih tersebar di beberapa	Terus berkoordinasi dengan OPD untuk	Turut serta memberikan

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				dialihmediakan			OPD	mendapatkan data arsip vital agar dapat dialihmediakan	sosialisasi tentang data arsip vital agar dapat dialihmediakan
				a. Kegiatan: Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%			
				1) Sub Kegiatan: Pengawasan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan: Laporan audit kearsipan	24 Laporan: Terdiri laporan audit kearsipan internal 24 PD	Pejabat (esl II dan III) belum memiliki sertifikat pengawasan	Mendaftarkan personel pejabat tersebut ke ANRI untuk mengikuti diklat pengawasan kearsipan	Turut serta dalam mengupayakan tambahan pendanaan guna mengirim personil pejabat mengikuti diklat pengawasan kearsipan ke ANRI
				b. Kegiatan: Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%			
				1) Sub Kegiatan: Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	1 Arsip: Arsip 1 OPD yang dia ukuisisi	1 Arsip: Arsip Dinakan yang sekarang bergabung DKP3	Kondisi ruanan penyimpanan arsip statis tidak memungkinkan untuk menyimpan arsip dalam jumlah yang banyak	Melakukan perbaikan ruanan penyimpanan arsip pada bagian atapnya	Turut serta dalam mengupayakan tambahan pendanaan untuk rehabilitasi ruangan penyimpanan arsip
				c. Kegiatan: Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	100%	100%			
				1) Sub Kegiatan: Pemberdayaan	1 Laporan: Laporan hasil	1 Laporan: Laporan hasil	Kurangnya dukungan dari pimpinan PD	Terus berkoordinasi dengan PD terkait	Turut serta dalam

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	pembinaan dan monitoring kearsipan desa	pembinaan dan monitoring kearsipan desa	untuk menindaklanjuti hasil pembinaan dan monitoring pengelolaan arsip	tentang pengelolaan arsip	mensosialisasi kan pentingnya pengelolaan arsip kepada Kepala PD.

### 3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

Pelaksanaan urusan pilihan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3  
Pelaksanaan Fungsi Urusan Pilihan

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP)		1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap					
				Persentase nelayan perairan umum yang terbina	30	36,70	Tidak adanya anggaran khusus untuk sosialisasi dan pembinaan dilaksanakan bersamaan pada saat penebaran benih ikan di perairan umum sehingga tidak maksimal	Himbauan untuk pembuatan Perdes dan papan larangan penggunaan alat dan bahan berbahaya dalam penangkapan ikan serta sanksi yang diberikan	
				a) Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapatnya spesies ikan predator (ikan Hampala) di perairan umum sehingga produksi ikan perairan umum menurun</li> <li>Ketidakpastian datangnya musim hujan dan musim kemarau, sehingga produktivitas ikan menurun karena kebanyakan ikan memijah pada awal musim hujan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Himbauan kepada masyarakat untuk selektif dalam melakukan penebaran ikan di perairan umum (jensi ikan yang ditebar bukan ikan predator)</li> </ul>	
				1) Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil			Kurangnya pengetahuan nelayan dalam menggunakan peralatan penangkap ikan di perairan umum	Melakukan kegiatan pelatihan terkait cara penangkapan ikan yang baik	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				<b>2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>			a. harga pakan yang fluktuatif (cenderung naik) b. kualitas benih yang tidak stabil, c. kualitas air yang menurun d. tahapan persiapan kolam belum diterapkan dengan benar e. perubahan cuaca/iklim mempengaruhi tingkat kematian ikan (meningkatkan serangan penyakit, kenaikan tingkat kematian tinggi sehingga mengurangi jumlah panen/produksi akhir) f. perubahan trend pasar dari ikan mas ke ikan nila g. banyaknya predator alami (lingsang, biawak, blekok dll)	a. fasilitasi sarana produksi perikanan b. penerapan pola tanam dengan penjadwalan tebar benih dan kegiatan panen secara terukur, tidak melebihi kebutuhan pasar c. Penerapan 4 T ( Tepat mutu, Tepat Jumlah, Tepat harga, Tepat waktu ) d. pembinaan dan pendampingan cara budidaya ikan yang baik sesuai CPIB e. diversifikasi pakan untuk mengurangi ketergantungan pakan pabrik, f. memasang jaring pengaman predator, g. penyediaan benih yang bermutu	
				<b>Produktivitas ikan nila</b>	6,20 kg/m <sup>2</sup>	6,20 kg/m <sup>2</sup>			
				<b>Produktivitas ikan lele</b>	13,80 kg/m <sup>2</sup>	13,80 kg/m <sup>2</sup>			
				<b>Produktivitas ikan mas</b>	6,00 kg/m <sup>2</sup>	6,00 kg/m <sup>2</sup>			
				a) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten	1 dokumen - Tersedianya desain gambar untuk rehab Unit Pengolahan Ikan (UPI) - telaksananya bantuan sarpras budidaya perikanan untuk 20 pokdakan sosialissi 3 kgt dan	1 dokumen - Tersedianya desain gambar untuk rehab Unit Pengolahan Ikan (UPI) - telaksananya bantuan sarpras budidaya perikanan untuk	Barang yang tersedia di E katalog lokal terbatas, belum sesuai dengan yang di butuhkan	Pengadaan barang menggunakan katalog nasional, sektoral dan toko daring	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				/kota	bimtek 3 kegiatan	20 pokdakan • sosialisasi 3 kgt dan bimtek 3 kegiatan			
				2) Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Tersedianya sarana produksi budidaya ikan di BBI	Tersedianya sarana produksi budidaya ikan meliputi : • Calon induk • Benih ikan • Pakan • Kemasan/packing benih, • Tabung dan oksigen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keberadaan predator yang berpengaruh pada ketersediaan benih</li> <li>Cuaca ekstrem dan penurunan kualitas air yang mengakibatkan tingginya penyakit pada ikan</li> <li>Kurang optimalnya Serapan benih ikan dari masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemasangan alat untuk mengurangi predator</li> <li>Memaksimalkan fungsi bak filterisasi dan Monitoring kualitas air secara rutin untuk mengurangi penyakit pada ikan</li> <li>Menggalakkan promosi dan kemitraan</li> </ul>	
				<b>3. Program pengawasan sumber dayakelautan dan perikanan</b>					
				Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	33%	45%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tdk ada anggaran khusus untuk pembenihan uceng</li> <li>Jumlah permintaan sebar benih ikan tidak sebanding dengan hasil produksi benih ikan (uceng) belum sesuai dengan yang diharapkan karena umur induk sudah tidak produktif</li> <li>penurunan kualitas air sehingga ikan rentan terhadap serangan penyakit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memaksimalkan pembenihan ikan uceng dan Nilem melalui teknik penyuntikan dengan menggunakan hormon ovaprim guna meningkatkan hasil produksi</li> <li>Perbaiki majeman pakan dan kualitas air,</li> <li>melakukan domestifikasi induk uceng di perairan umum</li> </ul>	
				<b>4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil</b>					



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Perikanan Persentase tersedianya data dan informasi produksi olahan hasil perikanan	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingginya harga bahan baku olahan ikan dan turunya daya beli masyarakat</li> <li>Pendataan produk olahan hasil perikanan belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjalin kerjasama dengan warung/ toko dan sekolah berasrama /pondok pesantren untuk pemasaran produk. Bahan baku diambil langsung dari pembudidaya</li> <li>Peningkatkan Pendataan produksi olahan hasil perikanan melalui kelompok binaan DKPPP</li> </ul>	
				a) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kondisi rumahh produksi pada unit pengolahan ikan yang belum memenuhi standar kelayakan pengolahan, sehingga tidak memenuhi syarat untuk penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyaluran rehabilitasi bangunan unit pengolahan ikan dan peralatan pengolahan kepada kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan agar dapat memenuhi standar kelayakan pengolahan</li> </ul>	
				1. Sub kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 513.783.000	Target apa	Realisasi apa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kondisi rumahh produksi pada unit pengolahan ikan yang belum memenuhi standar kelayakan pengolahan, sehingga tidak memenuhi syarat untuk penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyaluran rehabilitasi bangunan unit pengolahan ikan dan peralatan pengolahan kepada kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan agar dapat memenuhi standar kelayakan pengolahan</li> </ul>	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata						•	
				1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1,65%	1,53%	Bergantung pada data dari BPS	•	
				Persentase obyek wisata yang berkembang	41,66%	42,00%	Kurangnya perencanaan pada saat pembangunan maupun pengembangan destinasi	• Pembinaan / pendampingan dari perencanaan & pengelolaan destinasi. Membuka peluang masuknya investor untuk ikut berinvestasi tapi tetap berpegang pada prinsip pariwisata yang berkelanjutan (memperhatikan kelestarian lingkungan)	
				a. Pengelolaan daya tarik wisata kab/kota				•	
				1) Obyek wisata yang berkembang	41,66 Obyek	42 Obyek 1. Gardu Pandang Bansari kec. Bansari 2. BCL Kec. Bansari 3. Bukit Kembang Arum Kec. Bejen 4. Bejen Forest Park Kec. Bejen 5. Desa Wisata Cepit Pagergunung kec. Bulu 6. Monumen Meteorit kec. Bulu 7. Pemandian Simpleng Kec. Bulu 8. Tuk Mulyo Kec. Bulu	Kurangnya perencanaan pada saat pembangunan maupun pengembangan destinasi	• Pembinaan / pendampingan dari perencanaan & pengelolaan destinasi. Membuka peluang masuknya investor untuk ikut berinvestasi tapi tetap berpegang pada prinsip pariwisata yang berkelanjutan (memperhatikan kelestarian lingkungan)	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASLAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						9. Sibajak Green Canyon kec. Candioto 10. Makam Ki Ageng Makukuhan Kec. Kedu 11. Pasar Papringan Kec. Kedu 12. Cahaya Langgeng kec. Kedu 13. Sedadap Kec. Kledung 14. Taman Posong Kec. Kledung 15. Embung Kledung kec. Kledung 16. Pendakian Gunung Sindoro Kec. Kledung 17. Rest Area kec. Kledung 18. Posong Kec. Kledung 19. Desa Wisata Ngropoh kec. Kranggan 20. Wapit Kec. Ngadirejo 21. Umbul Jumprit kec. Ngadirejo 22. Situs Liyangan 23. Candi pringapus 24. Sendang Sengon Kec. Ngadirejo 25. Curuk Krecek Getas kec. Kaloran 26. Hutan Walitis kec. Tembarak 27. Taman Kartini 28. Taman Kali			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASLAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Progo kec. Temanggung 29. Pikatan Water Park 30. Pasar Curuk Thitang kec. Temanggung 31. Pemandian Tirto Asri Kec. Temanggung 32. Masjid Menggoro Kec. Tembarak 33. Pesona Wagir Bawang kec. Tretep 34. Puncak Botorono 35. Sigandul View Kec. Kledung 36. Pengilon Edu Park kec. Bulu 37. Kledung Park 38. Kolam Renang Tuk Segaran kec. Tembarak 39. Rowo Gembongan 40. Gardu Pandang Bansari 41. Kolam Cinta Liyangan 42. Alam Sewu Kec. Ngadirejo			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				<b>2. Program Pemasaran Pariwisata</b>					
				Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	21,00%	26,78%	laporan jumlah wisatawan setiap destinasi sudah sampai bulan Desember tapi masih banyak yang belum melaporkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas sumber daya pengelola destinasi &amp; manajemen event. Penyediaan sarpras pendukung di destinasi. Promosi yang intens dilakukan terutama lewat media sosial.</li> </ul>	
				Lama Tinggal Wisatawan	1 Hari	1 Hari	Kurangnya fasilitas hotel yang mendukung untuk menerima tamu dalam jumlah besar seperti jumlah kamar, aula/ ruang pertemuan, & fasilitas pendukung acara lainnya. Promosi yang belum maksimal. Dinamika kebijakan seperti adanya pembatasan kegiatan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan sarana prasarana, Sumber Daya Manusia pengelola hotel, &amp; inovasi dalam promosi. Membuka peluang investor untuk berinvestasi di Temanggung.</li> </ul>	
				a. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kab/kota				<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	
				1) Jumlah kunjungan wisatawan	551.829 Orang	578.184 Orang	Pendataan belum dengan pendapatan yang diperoleh obyek wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memaksimalkan pendataan sampai dengan pendapatan yang diperoleh obyek wisata</li> </ul>	
				2) Pendataan Hotel dan lama menginap	1 Hari	1 Hari	Kurangnya fasilitas hotel yang mendukung untuk menerima tamu dalam jumlah besar seperti jumlah kamar, aula/ ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan sarana prasarana, Sumber Daya Manusia pengelola hotel, &amp;</li> </ul>	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							pertemuan, & fasilitas pendukung acara lainnya. Promosi yang belum maksimal. Dinamika kebijakan seperti adanya pembatasan kegiatan masyarakat.	inovasi dalam promosi. Membuka peluang investor untuk berinvestasi di Temanggung.	
				<b>3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>				•	
				Persentase Peningkatan Desa Wisata	11,76%	12,03%	Masih rendahnya ketertarikan & pemahaman desa untuk membentuk desa wisata	• Peningkatan intensitas pembinaan/ pendampingan desa wisata	
				Persentase desa wisata naik klasifikasi	5%	53,13%	Mekanisme assesment desa wisata dilakukan setiap 4 th sekali sesuai perundang undangan, yang mengakibatkan jml Deswita naik klasifikasi hanya 4 thn sekali	• Peningkatan intensitas pembinaan/ pendampingan desa wisata	
				Persentase Peningkatan pelaku Ekraft	2%	9,91%	Keterbatasan jumlah SDM dalam melakukan pendataan pelaku ekonomi Kreatif (ekraf) dan belum ada aturan secara detail yang menentukan pelaku ekraf	• Penambahan jumlah SDM pendata Ekonomi Kreatif (ekraf)	
				a. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar				•	
				1) Sosialisasi ke Desa-Desa tentang manfaat dari Desa	32 Desa Wisata	32 Desa Wisata 1. Deswita Liyangan	Masih rendahnya ketertarikan & pemahaman desa untuk membentuk	• Peningkatan intensitas	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Wisata		2. Deswita Banyu Suci Ds. Traji 3. Deswita Makukuhan Kedu 4. Deswita Cepag Kec. Bulu 5. Deswita Ngropoh Kranggan 6. Deswita Tlahap Kec. Kledung 7. Deswita Soropadan 8. Deswita Tegalsari Kec. Ngadirejo 9. Deswita Menggoro Kec. Tembarak 10. Deswita Tawang Sari Wonoboyo 11. Deswita Pluralisme kec. Kaloran 12. Deswita Rejosari Bansari 13. Deswita Tlogowero Bansari 14. Deswita Mrangen Kidul Bansari 15. Deswita Wager Bawang Tretep 16. Deswita Tlogo Wangi Tretep 17. Deswita Tuk Mulyo 18. Deswita Parangkokan Bejen 19. Deswita Ngadimulyo Kedu 20. Deswita Muncar	desa wisata	pembinaan/ pendampingan desa wisata	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Gemawang 21. Deswita Buni Makukuhan Bulu 22. Deswita Giripurno Ngadirejo 23. Deswita Petarangan Kledung 24. Deswita Kemabngsari 25. Deswita kaloran 26. Deswita Trilir Tlogo 27. Deswita Gedongsari Jumo 28. Deswita Bansari 29. Deswita Giyono 30. Deswita Gunung Gempol 31. Deswita Kledung Deswita Batusari Kledung			
				2) Asesmen Desa Wisata setiap 4 tahun sekali, sesuai dengan regulasi yang ada	17 Desa Wisata	17 Desa wisata 1. Deswita Liyangan 2. Deswita Banyu Suci Ds. Traji 3. Deswita Makukuhan Kedu 4. Deswita Cepag Kec. Bulu 5. Deswita Ngropoh Kranggan 6. Deswita Tlahap Kec. Kledung 7. Deswita Soropadan	Mekanisme assesment desa wisata dilakukan setiap 4 th sekali sesuai perundang undangan, yang mengakibatkan jml Deswita naik klasifikasi hanya 4 thn sekali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan intensitas pembinaan/ pendampingan desa wisata</li> </ul>	



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASLAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						8. Deswita Tegalsari Kec. Ngadirejo 9. Deswita Menggoro Kec. Tembarak 10. Deswita Tawangsari Wonobojo 11. Deswita Pluralisme kec. Kaloran 12. Deswita Rejosari Bansari 13. Deswita Tlogowero Bansari 14. Deswita Mrangen Kidul Bansari 15. Deswita Wager Bawang Tretep 16. Deswita Tlogo Wangi Tretep 17. Deswita Tuk Mulyo			
				3) Pendataan dan penggalian pelaku ekraf	121 Pelaku Ekraf	122 Pelaku Ekraf	Keterbatasan jumlah SDM dalam melakukan pendataan pelaku ekonomi Kreatif (ekraf) dan belum ada aturan secara detail yang menentukan pelaku ekraf	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan jumlah SDM pendata Ekonomi Kreatif (ekraf)</li> </ul>	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD	
3	Bidang Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP)								
				1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian						
				Peningkatan produktivitas padi	63,30 kuintal/ha	63,46 kuintal/ha	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurangnya ketersediaan air karena pengaruh El Nino</li> <li>b. Peralihan komoditas yang dibudidaya</li> <li>c. Perubahan regulasi tentang pupuk subsidi dan kenaikan harga pupuk non subsidi</li> <li>d. Prasarana dan sarana pertanian yang belum merata dan kurang memadai</li> <li>e. Cuaca ekstrem meningkatkan serangan hama</li> <li>f. Sebagian masyarakat masih belum menggunakan benih unggul bersertifikat</li> </ul> Masyarakat belum menerapkan GAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. System jadwal</li> <li>b. Peningkatan produksi melalui intensifikasi pertanian</li> <li>c. Peningkatan pelatihan pembuatan pupuk organic untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk subsidi</li> <li>d. Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana pertanian</li> <li>e. Pelatihann GAP, PPHT dan Gerdal OPT</li> <li>f. Penyelenggaraan sekolah lapang iklim</li> <li>• Penggunaan benih unggul bersertifikat</li> </ul>		
Peningkatan produktivitas jagung	46,00 kuintal/ha	46,00 kuintal/ha	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. El Nino berpengaruh pada proses budidaya</li> <li>b. Peralihan komoditas yang dibudidaya</li> <li>c. Perubahan regulasi tentang pupuk subsidi dan kenaikan harga pupuk non subsidi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan produksi melalui intensifikasi pertanian</li> <li>b. Peningkatan pelatihan pembuatan pupuk organic untuk</li> </ul>						

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Prasarana pertanian yang belum merata dan kurang memadai (irigasi tersier)</li> <li>e. Cuaca ekstrem meningkatkan serangan hama</li> <li>f. Benih yang digunakan bukan benih unggul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mengurangi ketergantungan pada pupuk subsidi</li> <li>c. Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana pertanian</li> <li>d. Penyelenggaraan sekolah lapang iklim</li> <li>e. Pelatihann GAP, PPHT dan Gerdal OPT</li> <li>g. Penggunaan benih unggul</li> </ul>	
				<b>Peningkatan produktivitas ubi kayu</b>	339,80 kuintal/ha	339,96 kuintal/ha	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Budidaya masih tumpang Sari sehingga belum adanya pemupukan secara intensif</li> <li>b. Masa panen relative lebih lama dan harga lebih rendah dari komoditas yang lain</li> <li>c. Peralihan komoditas yang dibudidaya</li> <li>d. Perubahan regulasi tentang pupuk subsidi dan kenaikan harga pupuk non subsidi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan intensifikasi pertanian</li> <li>b. Penggunaan bibit unggul</li> <li>f. pelatihan pembuatan pupuk organic guna antisipasi kelangkaan pupuk di pasaran</li> </ul>	
				<b>Produktivitas bawang putih</b>	79,60 kuintal/ha	71,41 kuintal/ha	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dampak el nino, kekeringan sehingga tanaman tidak optimal pertumbuhannya, sehingga berpengaruh pada produksi dan produktivitas</li> <li>b. Meningkatnya Serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)</li> <li>e. Mahalnya sarana produksi (pupuk,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan produksi melalui intensifikasi pertanian</li> <li>b. Peningkatan pelatihan pembuatan pupuk organic untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk subsidi</li> <li>a. Sinergi dengan Ditjen Hortikultura Kementerian</li> </ul>	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							pestisida dan benih)	<p>Pertanian untuk kegiatan pengembangan kawasan bawang putih seluas 180 ha, dengan adanya bantuan sarana produksi (Mula, pupuk, dan benih bawang putih).</p> <p>b. Pelatihan GAP, Gerakan pengendalian OPT bawang putih bersama petugas POPT dan kelompok tani</p> <p>c. Pengembangan bawang putih unggul lokal kerjasama dengan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)</p>	
				<b>Produktivitas bawang merah</b>	80,15 kuintal/ha	76,65 kuintal/ha	<p>a. El nino, berdampak tidak optimal pertumbuhan tanaman, sehingga berpengaruh pada produksi dan produktivitas</p> <p>b. Meningkatnya Serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)</p> <p>c. Mahalnya sarana produksi (pupuk, pestisida dan benih)</p>	<p>a. Peningkatan produksi melalui intensifikasi pertanian</p> <p>b. Peningkatan pelatihan pembuatan pupuk organik untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk subsidi</p> <p>c. Pelatihan GAP, PPHT Bawang merah dengan kegiatan pelatihan dan demplot</p> <p>d. Pengembangan kawasan bawang merah APBN dengan bantuan</p>	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
								saprodi, dan juga kegiatan champion bawang merah e. Gerakan pengendalian OPT bawang putih bersama petugas POPT dan kelompok tani c.	
				<b>Produktivitas cabai rawit</b>	55,00 kuintal/ha	79,81 kuintal/ha	a. El nino, berdampak tidak optimal pertumbuhan tanaman, sehingga berpengaruh pada produksi dan produktivitas b. Meningkatnya Serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) c. Mahalnya sarana produksi (pupuk, pestisida dan benih)	a. Peningkatan produksi melalui intensifikasi pertanian b. Peningkatan pelatihan pembuatan pupuk organik untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk subsidi c. Pelatihan GAP, PPHT cabai rawit untuk peningkatan SDM petani dan bantuan saprodi d. Pengembangan kawasan cabai kegiatan APBN dengan bantuan saprodi (mulsa, pupuk, POC dll) e. Gerakan pengendalian OPT cabai rawit bersama petugas POPT dan kelompok tani	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				<b>Produktivitas cabai besar</b>	69,50 kuintal/ha	78,77 kuintal/ha	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. El nino, berdampak tidak optimal pertumbuhan tanaman, sehingga berpengaruh pada produksi dan produktivitas</li> <li>b. Meningkatnya Serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)</li> <li>c. Mahalnya sarana produksi (pupuk, pestisida dan benih)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan produksi melalui intensifikasi pertanian</li> <li>b. Peningkatan pelatihan pembuatan pupuk organic untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk subsidi</li> <li>c. Pelatihan GAP, PPHT cabai untuk peningkatan SDM petani dan bantuan saprodi</li> <li>d. Pengembangan kawasan cabai kegiatan APBN dengan bantuan saprodi (mulsa, pupuk, POC dll)</li> <li>e. Gerakan pengendalian OPT cabai besar bersama petugas POPT dan kelompok tani</li> </ul>	
				<b>Produktivitas tembakau</b>	6,80 kuintal/ha	6,56 kuintal/ha	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. El nino, berdampak tidak optimal pertumbuhan tanaman (produksi daun tidak maksimal), sehingga berpengaruh pada produksi dan produktivitas</li> <li>b. Regulasi pupuk subsidi yang memberatkan petani (harga pupuk non subsidi 3x lipat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Informasi dari BMKG tentang cuaca dan iklim disampaikan pada para petani tembakau, untuk penentuan waktu tanam yang tepat.</li> <li>b. Bantuan pupuk NPK rendah Khlora dan ZA.</li> <li>f. Pelatihan GAP,</li> </ul>	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							<p>harga pupuk subsidi)</p> <p>c. Harga yang belum terstandart</p>	<p>PPHT dan pupuk organik dengan memanfaatkan cacing lumbricus, untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia</p>	
				<b>Produktivitas kopi robusta</b>	7,25 kuintal/ha	6,53 kuintal/ha	<p>a. Dampak perubahan iklim lanina dilanjut dengan el nino, berpengaruh pada proses vegetatif dan generatif (pembungaan) menjadi terganggu.</p> <p>b. Produktivitas kopi turun hampir 40 % - 50 %.</p> <p>c. Serangan hama penyakit, utamanya penggerek buah kopi (PBKo)</p> <p>d. Regulasi pupuk subsidi</p>	<p>a. Kegiatan pelatihan GAP dan PPHT kopi robusta di 10 kelompok tani untuk peningkatan SDM Petani, antuan entres kopi dengan klon unggul, untuk peningkatan produksi dan provitas, bantuan gunting pangkas, gergaji, pisau okulasi dan mesin pemotong rumput.</p> <p>c. Sinergi dengan pusat untuk kegiatan intensifikasi kopi (bantuan pupuk kopi, Pupuk organik cair, dll)</p>	
				<b>Produktivitas kopi arabika</b>	7,00 kuintal/ha	5,75 kuintal/ha	<p>a. Dampak perubahan iklim lanina dilanjut dengan el nino, proses vegetatif dan generatif (pembungaan) menjadi terganggu.</p> <p>b. Produktivitas kopi turun hampir 40 % - 50 %. Serangan hama penyakit, utamanya penggerek buah kopi (PBKo)</p>	<p>a. Kegiatan pembibitan kopi arabika di 20 kelompok tani untuk peningkatan SDM Petani, bantuan biji kopi untuk dijadikan bibit di kebun bibit kelompok.</p> <p>b. Sinergi dengan pusat untuk</p>	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							e. Regulasi pupuk subsidi	kegiatan kegiatan ekstensifikasi kopi (bantuan bibit kopi, pupuk NPK, pupuk kandang dll.)	
				<b>Produktifitas cengkeh</b>	2,45 kuintal/ha	2,83 kuintal/ha	c. Serangan Bakteri Pembuluh Kayu Cengkeh (BPKC) menyebabkan kematian tanaman cengkeh	a. Penggunaan agensia pengendali hayati untuk penanganan BPKC c. Penanaman kembali untuk tanaman cengkeh mengganti tanaman yang mati	
				<b>Produktivitas vanili</b>	2,95 kuintal/ha	2,96 kuintal/ha	Dampak perubahan iklim el nino dan la nina, serangan penyakit jamur dan bakteri d.	a. Pelatihan GAP dan PPHT Panili dengan kegiatan palatihan dan bantuan bibit panili Vania 1 dari kegiatan APBD II b. Kegiatan Panili dari APBN dengan bantuan bibit panili, pupuk organik dll	
				<b>Produktivitas ternak sapi</b>	177,60 kg/ekor	177,60 kg/ekor	Pemotongan ternak sapi sebagian besar berbobot dibawah 200 kg	b. Menyarankan dan memberikan himbauan kepada jagal untukmelakukan pemotongan diatas bobot 200 kg	
				<b>Produktivitas ternak domba</b>	13,71 kg/ekor	13,71 kg/ekor	Tingginya pemotongan usia domba dibawah 1 tahun	c. Menyarankan dan memberikan himbauan kepada jagal untukmelakukan pemotongan diatas umur 1 tahun	
				<b>Produktivitas ternak kambing</b>	13,71 kg/ekor	13,71 kg/ekor	Tingginya pemotongan usia kambing dibawah 1	d. Menyarankan dan memberikan	



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							tahun	himbauan kepada jagal untuk melakukan pemotongan diatas umur 1 tahun	
				<b>Produktivitas ternak ayam pedaging</b>	0,75 kg/ekor	0,75 kg/ekor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketimpangan antara harga sapi/naak dengan harga penjualan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat peran stakeholder dalam penstabilan harga e.</li> </ul>	
				<b>Produktivitas ternak ayam petelur</b>	10,88 kg/ekor	10,88 kg/ekor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketimpangan antara harga sapi/naak dengan harga penjualan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subsidi jagung</li> </ul>	
				<b>Produktivitas ternak ayam buras</b>	0,70 kg/ekor	0,70 kg/ekor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terkendalinya perkawinan silang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengupayakan bantuan ayam buras dengan ras yang jelas</li> </ul>	
				a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	
				1) Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan : 21 kali</li> <li>- Sosialisasi: 2 kali</li> <li>- Rakor: 1 kali</li> <li>- Pengadaan Pupuk: 311.390 kg</li> <li>- Pengadaan cacing vermikompos: 80 kg</li> <li>- Pengadaan Insektisida: 166 liter</li> <li>- Pengadaan Fungisida : 331 kg</li> <li>- Pengadaan Agen hayati: 27 paket</li> <li>- Pengadaan pohon vanili: 1.600 batang</li> <li>- Pengadaan paranet: 10 rol</li> <li>- Pengadaan Plastik uv: 6 rol +</li> <li>- Pengadaan plastik uv: 8 buah</li> <li>- Pengadaan Trichoderma : 290 kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan : 21 kali</li> <li>- Sosialisasi: 2 kali</li> <li>- Rakor: 1 kali</li> <li>- Pengadaan Pupuk: 311.390 kg</li> <li>- Pengadaan cacing vermikompos: 80 kg</li> <li>- Pengadaan Insektisida: 166 liter</li> <li>- Pengadaan Fungisida : 331 kg</li> <li>- Pengadaan Agen hayati: 27 paket</li> <li>- Pengadaan pohon vanili: 1.600 batang</li> <li>- Pengadaan paranet: 10 rol</li> <li>- Pengadaan plastik uv: 8 buah</li> <li>- Pengadaan Trichoderma : 290 kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. karena cuaca ekstrem (El Nino) berpengaruh pada produksi tembakau</li> <li>2. e katalog pupuk tayang terlambat</li> <li>3. Terbit SK penerima bantuan yang terlambat</li> <li>5. Perubahan regulasi tentang pupuk subsidi dan kenaikan harga pupuk non subsidi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penentuan CPCL T-1 dan SK pada bulan Februari</li> <li>2. Mendorong penyedia pupuk di E-catalog untuk tayang lebih awal</li> <li>3. pelatihan pembuatan pupuk organik gunaantisipasi kelangkaan pupuk di pasaran</li> </ul>	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan Handsprayer : 8 unit</li> <li>- Pengadaan bibit cengkeh: 2.000 batang</li> <li>- Pengadaan bibit kopi : 48.450 batang</li> <li>- Pengadaan gunting pangkas: 40 unit</li> <li>- Benih kopi arabika: 25.000 butir</li> <li>- Pengadaan polybag: 85 kg</li> <li>- Pengadaan polybag : 23 pack</li> <li>- Pengadaan bibit alpukat : 370 batang</li> <li>- Pengadaan bibit mimba : 4.860 batang</li> <li>- Pengadaan sungkup plastik: 4 rol</li> <li>- Pembuatan rumah pembibitan : 4 unit</li> <li>- Pengadaan kerodong : 3.000 buah</li> <li>- Bantuan tenaga kerja: 780 orang</li> <li>- Pengadaan soil tester: 27 buah</li> <li>- Pengembangan varietas tembakau: 1 paket</li> <li>- Pengadaan alat olah kemas benih: 4 unit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plastik uv: 6 rol +</li> <li>- Pengadaan plastik uv: 8 buah</li> <li>- Pengadaan Trichoderma : 290 kg</li> <li>- Pengadaan Handsprayer : 8 unit</li> <li>- Pengadaan bibit cengkeh: 2.000 batang</li> <li>- Pengadaan bibit kopi : 48.450 batang</li> <li>- Pengadaan gunting pangkas: 40 unit</li> <li>- Benih kopi arabika: 25.000 butir</li> <li>- Pengadaan polybag: 85 kg</li> <li>- Pengadaan polybag : 23 pack</li> <li>- Pengadaan bibit alpukat : 370 batang</li> <li>- Pengadaan bibit mimba : 4.860 batang</li> <li>- Pengadaan sungkup plastik: 4 rol</li> <li>- Pembuatan rumah pembibitan : 4 unit</li> <li>- Pengadaan kerodong : 3.000 buah</li> <li>- Bantuan tenaga kerja: 780 orang</li> <li>- Pengadaan soil tester: 27 buah</li> </ul>			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan varietas tembakau: 1 paket</li> <li>- Pengadaan alat olah kemas benih: 4 unit</li> </ul>			
				2) Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	- Terlaksananya Hibah Uang Pengadaan Sarana Pertanian sebanyak 32 Kelompok Tani	- Terlaksananya Hibah Uang Pengadaan Sarana Pertanian sebanyak 32 Kelompok Tani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• data kelompok (pokir) berubah-ubah sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan</li> <li>2. Pengelolaan alsintan di kelompok masih belum tertata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan prioritas CPCL didasarkan pada kriteria urgensi kebutuhan setiap kelompok tani</li> <li>4.2. Mewajibkan kelompok penerima hibah untuk mengelola alsintan dengan system UPJA</li> </ul>	
				3) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	- 100%	- 100%	•	•	
				4) Pemanfaatan SDG hewan/tanaman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksannya kegiatan berupa:</li> <li>2. Bantuan hibah uang kepada 155 kelompok</li> <li>3. Sosialisasi dan pembinaan kelompok penerima hibah 155 kelompok</li> <li>4. Pengadaan obat hewan 1 paket</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksannya kegiatan berupa:</li> <li>2. Bantuan hibah uang kepada 155 kelompok</li> <li>3. Sosialisasi dan pembinaan kelompok penerima hibah 155 kelompok</li> <li>4. Pengadaan obat hewan 1 paket</li> </ol>	Data kelompok berubah-ubah sehingga memperlambat pelaksanaan kegiatan	data kelompok harus fix di n-1	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian					
				Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	5.76,55 %	6.79,15%	Kemampuan Kelompok dalam mengelola dan Memelihara Bantuan Alsintan masih rendah serta Belum semua kelompok membentuk struktur pengelolaan Alsintan berupa Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)	perlu nya mengadakan pelatihan dan pendampingan bagi kelompok tani dalam pemanfaatan dan pengelolaan jasa Alsintan dengan mengganding institusi terkait maupun prosuden alat	
				a. Pembangunan Prasarana Pertanian	100%	100%	7.	8.	
				1) Pembangunan , rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier 12 Lokasi</li> <li>• terlaksananya pembangunan Irigasi Air Sumur Tanah Dalam 2 Lokasi</li> </ul>	1)terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier 12 Lokasi 2)terlaksananya pembangunan Irigasi Air Sumur Tanah Dalam 2 Lokasi	Kegiatan Irigasi Air Sumur Tanah Dalam: Pengeboran membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan lapisan tanah di lokasi kegiatan Irigasi Air Tanah Dalam di KT Tani Makmur, Desa Pagergunung, Kec. Bulu didominasi oleh batu.	1.Melakukan <i>logging test</i> untuk mengetahui lapisan-lapisan batuan yang ditembus lubang bor, sampai ditemukannya sumber air yang memadai. 2.Melakukan <i>test pump</i> selama 12 jam untuk mengetahui debit air tanah, mengetahui kelulusan lapisan pembawa air (akuifer) dan kontinuitas air yang keluar.	
				2) Pembangunan , rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian	terlaksananya pembangunan Embung Pertanian di 4 Lokasi	terlaksananya pembangunan Embung Pertanian di 4 Lokasi	3)Tidak ada permasalahan	3.Tidak ada permasalahan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				3) Pembangunan , rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	terlaksananya pembangunan Jalan Usaha Tani di 14 Lokasi	1) terlaksananya pembangunan Jalan Usaha Tani di 14 Lokasi 2)	Pelaksanaan Pembangunan Jalan Usaha Tani tidak mematuhi RAB dan Gambar Desain yang sudah direncanakan, sehingga volume bangunan belum mencapai volume yang direncanakan dari awal.	Kelompok diminta mencukupi volume bangunan yang belum terbangun dengan dilengkapi Surat Pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan 100% sebelum tanggal berakhirnya kontrak 29 Desember 2023.	
				4) Pembangunan , rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	Tersedianya RMU, dan alat-alat Kesehatan hewan	Terlaksananya 5)Pengadaan RMU dan alat-alat kesehatan hewan	Barang yang tersedia di ekatalog tidak lengkap, tidak sesuai dengan kebutuhan	Prioritas pada alat-alat yang urgent dibutuhkan	
				<b>3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>					
				<b>Persentase penanganan penyakit hewan</b>	90%	97,26%	a. Jumlah tenaga medik veteriner masih kurang b. Sarana prasarana Kesehatan hewan masih kurang c. Obat hewan dan alat kesehatan hewan masih minim	a. Mengusulkan tambah SDM medik veteriner b. Koordinasi dengan provinsi dan pusat untuk menambah prasarana penanganan kasus berupa obat hewan, bahan/alat diagnostik dan alat kesehatan hewan c. Mengoptimalkan peralatan keswan yang sudah ada	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASLAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				<b>Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat</b>	70%	82,10%	Kurangnya SDM lapangan sehingga jangkauan pengawasannya kurang luas	Memaksimalkan SDM yang ada, sehingga jangkauan pengawasan dapat diperluas	
				a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Pengendalian dan penanganan penyakit hewan dan zoonosis	<p>Terlaksananya</p> <p>1) Rapat koordinasi pengawas pemotongan hewan qurban 1 kegiatan</p> <p>2) Pengawasan pemotongan hewan qurban 1 kegiatan</p> <p>3) Pengadaan obat-obat hewan 1 paket</p> <p>4) Pengadaan sarpras 1 paket</p>	<p>Terlaksananya</p> <p>1)Rapat koordinasi pengawas pemotongan hewan qurban 1 kegiatan</p> <p>2) Pengawasan pemotongan hewan qurban 1 kegiatan</p> <p>3)Pengadaan obat-obat hewan 1 paket</p> <p>4) Pengadaan sarpras 1 paket</p>	Obat-obatan dan sarana pengendalian wabah PMK terbatas	Koordinasi dengan provinsi untuk penambahan bantuan obat-obatan dan sarana yang lain	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				2) Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				3) Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 kegiatan</li> </ul> Terlaksananya operasional Puskesmas, tersediaanya obat-obatan untuk Kesehatan hewan, terlaksannaya uji sampel	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 kegiatan</li> </ul> Terlaksananya operasional Puskesmas selama 12 bulan, tersediaanya obat-obatan untuk Kesehatan hewan 1 paket, terlaksannaya uji 3sampel	6) Penggunaan anggaran sudah ditentukan oleh pusat, yang belum tentu dibutuhkan oleh daerah	4. Memaksimalkan anggaran untuk pengadaan obat-obatan yang urgent dan dibutuhkan kelompok	
				<b>4. Program Pengendalian dan Penanggulang an Bencana Pertanian</b>					
				<b>Persentase pengendalian bencana pertanian</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>40,30%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>40,62%</li> </ul>	Terbatasnya pengetahuan petani tentang OPT dan cara pengendalian OPT	Pembinaan pengendalian OPT kepada kelompok tani dan pelatihan pembuatan persnab	
				a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> </ul>			
				1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya kegiatan OPT dan Gerdal meliputi :</li> <li>Sosialisasi dan Pelatihan POPT komoditas TP di 4 KT</li> <li>Gerakan Pengendalian</li> </ul>	1) Terlaksananya kegiatan OPT dan Gerdal meliputi : 2) Sosialisasi dan pelatihan pembuatan pesnab di 4 KT. 3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Petugas POPT terbatas, daerah yang terserang hama sangat luas</li> <li>Pengendalian hama dilakukan tidak serentak dan kontinyu sehingga hama terlanjur meluas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melibatkan kelompok untuk swadaya dalam pengendalian OPT, bekerjasama dengan lab hama provinsi untuk petugas POPT</li> <li>Pengendalian hama</li> </ul>	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					<p>OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 16 KT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan mitigasi OPT Gerdal 4 kali</li> <li>• Pengadaan obat pengendalian OPT Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terdiri dari: fungisida 290 kg, Insektisida 12 Liter, petrocum klerat RMB 310 bks, paket agensia hayati 7 paket, dithaine 49 kg, dorsban 50 ltr, PGPR 81 ltr, POC 50 ltr, furadan 45 kg, feromon 2.470 buah, likat kuning 2.160 buah, Bakterisida 259 kg, rodentisida Sulfur 50 -70 % 6.916 batang, fungisida 1.900 kg dan insektisida 122 liter, jaring burung pipit sebanyak 299 unit</li> </ul>	<p>4) Gerakan pengendalian OPTtanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di 50 KT kelompok:</p> <p>5) Pelatihan mitigasi OPT Gerdal di 4 Kali, :</p> <p>6) Pengadaan obat pengendali OPT Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terdiri dari: Fungisida 240 kg, Insektisida 6 ltr, petrocum klerat 600 kg, agensia hayati 7 paket, dithane 45 kg, dorsban 50 ltr, furadan 78 kg, PGPR 60 ltr, POC 60 liter, kresban 46 ltr, antracol 42 kg, curacron 16,5 ltr, sidatan XR 525 SL 52 liter, decoprima 35 kg, entomobac 15 kg , feromon 2.470 bh, likat kuning 2160 buah, bakterisida merk dagang Nordox 259 kg,</p>		<p>penyakit dilakukan terjadwal dan bersamaan</p>	



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						rodentisida sulfur 6.916 btg, fungisida (Topsin M 70 WP, Metazeb 80 WP) 235 kg dan insektisida (Matros 18 EC, Bassa 50 EC dan Starfidor 5 WP) 122 ltr. • jaring burung pipit 1.039 unit untuk 56 KT			
				5. Program Penyuluhan Pertanian	•	•	•	•	
				Persentase kelompok tani yang naik kelas	• 0,98%	• 1,48%	• ada sebagian kelompok tani yang tidak aktif	• Pembinaan secara kontinyu dan intensif kepada kelompok tani	
				a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	• 100%	• 100%	•	•	
				1) Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	• Terlaksananya kegiatan Pelatihan tematik 17 kali dan tersedianya biaya operasional 20 BPP	• Terlaksananya kegiatan Pelatihan tematik 17 kali dan tersedianya biaya operasional 20 BPP	• Banyaknya kebutuhan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM penyuluh	• Memilih pelatihan yang urgent	
				2) Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	• Terlaksananya kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa sebanyak 31 kegiatan •	• Terlaksananya kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa sebanyak 31 kegiatan •	• Kapasitas SDM yang kelompok yang belum merata	• Meningkatkan pendampingan kelompok	
				3) Penyediaan	100%	100%	Barang yang tayang di	• Surat peringatan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya rehab BPP, pembangunan greenhouse dan lab mini</li> <li>• Tersedianya sarana keinformasian penyuluhan pertanian di BPP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya rehab BPP, pembangunan greenhouse dan lab mini</li> <li>• Tersedianya sarana keinformasian penyuluhan pertanian di BPP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ekatalog tida sesuai yang di butuhkan</li> <li>• Penyelesaian pekerjaan fisik tidak sesuai jadwal</li> </ul>	kepada penyedia barang/jasa	
4	Bidang Kehutanan					NIHIL			
5	Bidang ESDM					NIHIL			
6	Bidang Perdagangan	DINKOPDAG		<b>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
				a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<b>1 Sub Kegiatan</b>	<b>1 Sub Kegiatan</b>			
				1) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	300 Orang (Peserta dari unsur Pemilik /pedagang warung rokok, PKL, dan Industri makanan/ kerajinan)			
				<b>Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik</b>	67%	83%	Kurangnya alokasi anggaran untuk melaksanakan perbaikan dan pembangunan sarpras di Pasar Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• percepatan pengadaan sarpras Pasar Daerah</li> <li>-Perbaikan kerusakan Pasar Daerah dan monitoring progress pekerjaan secara</li> </ul>	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
								berkelanjutan -mengusulkan penambahan anggaran untuk pemerataan pemeliharaan Pasar Daerah	
				<b>Persentase Kepatuhan Pedagang Pasar Sesuai Zonasi Peruntukan Pedagang</b>	70%	70%	Kurangnya kesadaran pedagang untuk berjualan sesuai zonasi Dagang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Penertiban Pedagang sesuai zonasi dagang</li> <li>-membuat peta zonasi dagang di Pasar Daerah yang belum terzonasi</li> </ul>	
				<b>Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Pasar</b>	90%	100%	-		
				<b>Persentase Pedagang Kaki Lima Yang Menempati Ruang Sesuai Peruntukan</b>	34%	60%	PKL lama tidak melakukan usaha/berjualan sehingga untuk memulai modal baru perlu	Adanya even CFD yang dibuka kembali Adanya even2 budaya pentas hiburan yang mendorong pelaku usaha PKL berkembang	
				b. Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	<b>1 Sub Kegiatan</b>	<b>1 Sub Kegiatan</b>			
				1) Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6 Unit	6 Unit (pasar pingit, pasar kranggan, pasar temanggung,			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						pasar parakan, pasar ngadirejo, pasar candiroto)			
				<b>2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting</b>					
				Persentase Ketersediaan Informasi Harga Bahan Pokok Dan Barang Penting	68,41%	100%	Koneksi internet yang tidak stabil baik di UPT maupun di Dinas	Perbaiki jaringan internet guna memperlancar informasi dan komunikasi antara pasar dengan Dinas	
				<b>a.</b> Pengendalian Harga, Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	<b>1 Sub Kegiatan</b>	<b>1 Sub Kegiatan</b>			
				1) Pemantauan Harga Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi	12 Laporan	12 Laporan (laporan Bulanan Harga bahan pokok dan kebutuhan penting setiap bulan)			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Perdagangan					
				<b>3. Program Pengembangan Ekspor</b>					
				Kontribusi Nilai Ekspor Terhadap PDRB Sektor Perdagangan	2,56%	86%	Belum semua Perusahaan mengirimkan laporannya,Dinkopdag tidak ada wewenang memberi sanksi bagi yg tidak menirinkan laporan	Akan dilakukan permintaan laporan melalui email ke Dinkopdag agar lebih mudah dan efisien	
				a. Penyelenggaraan Promosi Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<b>1 Sub Kegiatan</b>	<b>1 Sub Kegiatan</b>			
				1) Pameran Dagang Nasional	1 Pameran	1 Pameran (Pameran Bursa kopi, Tembakau, Dan umkm Di Gor Bambu Runcing Tanggal 16-19 Oktober 2023)			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				<b>4. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen</b>					
				Cakupan Alat Ukur Takar Timbang Dan Perlengkapannya Yang Ditera Ulang	95%	95%	Masih ada alat UTTP yang belum di TERA/TERA Ulang di pasar pasar Desa	Melakukan tera/tera ulang sampai dengan ke pasar desa	
				<b>a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Ulang, Dan Pengawasan</b>	<b>1 Sub Kegiatan</b>	<b>1 Sub Kegiatan</b>			
				1) Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	5700 alat UTTP	5749 alat UTTP			
7	<b>Bidang Perindustrian</b>	<b>Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja</b>							
				<b>1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				<b>Persentase IKM Industri Yang Berbasis Pada Komoditas Unggulan Daerah</b>	<b>35%</b>	<b>70,46%</b>			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				<b>Presentase Pembinaan Industri Penghasil Cukai</b>	<b>5,3%</b>	<b>12,29%</b>			
				a. Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten//Kota					
				1) Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Monitoring pelatihan pasca maksimal belum	• Perencanaan evaluasi kegiatan pada tahun n+1	
				<b>2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota					
				1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI Dan IPKI	1 Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam	1 Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha	Pelaksanaan pendampingan pemenuhan komitmen persyaratan ijin sektor industri terutama untuk IKM kurang maksimal	Melakukan pelatihan dan pembinaan IKM produk unggulan Kabupaten Temanggung: 7. Pelatihan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Informasi Industri Nasional (Siinas) Yang Terintegrasi Dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik	rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS		<p>Diversifikasi Produk Unggulan tembakau 11 Pelatihan x 40 orang x 3 hari (DBHCHT)</p> <p>8. Pembinaan perizinan IKM melalui Akun SIINAS 60 orang x 2 kali (DAU)</p> <p>9. Pendampingan pendaftaran TKDN kepada IKM 40 orang (DAU)</p> <p>10. BinteK dan Seminar Peluang Usaha Industri Produk Berbahan baku limbah 100 IKM (APBN)</p> <p>11. BinteK dan Seminar Pemasaran Digital Wirausaha Kopi 50 orang (APBN)</p> <p>12. BinteK Wirausaha Baru 9 Pelatihan x 5 hari ; Barista, batik, perbengkelan roda 2, olahan roti, pembuatan <i>pastry</i>, konveksi, servis alat rumah tangga, pupuk organik, pengelasan 180 orang (APBN)</p>	
8	Transmigrasi	NIHIL							



### 3.1.4 Pelaksanaan Urusan Penunjang

Pelaksanaan urusan penunjang yang berkaitan dengan pelayanan dasar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4  
Pelaksanaan Urusan Penunjang

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Perencanaan	Bappeda		1.Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	100%			
				Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	100%	100%	1. Kurangnya komitmen dari Perangkat Daerah 2. Kurangnya fasilitasi dan pendampingan secara intensif dari verifikator Bappeda	1. Mendorong Perangkat Daerah untuk menyiapkan data dukung sebelum penginputan 2. Fasilitasi dan pendampingan secara lebih insentif dari verifikator Bappeda	Koordinasi dan pendampingan intensif dengan Perang Daerah
				Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	95%	100%	1. Kurangnya komitmen dari Perangkat Daerah 2. Kurangnya fasilitasi dan pendampingan secara intensif dari verifikator Bappeda	1. Mendorong Perangkat Daerah untuk menyiapkan data dukung sebelum penginputan 2. Fasilitasi dan pendampingan secara lebih insentif dari verifikator Bappeda	Koordinasi dan komunikasi dengan Perangkat Daerah
				a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100%	100%			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				1) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	6 Dokumen: 1. Ranwal RKPD 2025 2. RKPd 2024 3. P-RKPD 2023 4. Ranwal RPJPD 2025-2045 5. Renstra 6. Renja PD	6 Dokumen yaitu: 1. Ranwal RKPD 2025 2. RKPd 2024 3. P-RKPD 2023 4. Ranwal RPJPD 2025-2045 5. Renstra 6. Renja PD	Inkonsisten program pada dokumen RPJMD dan Dokumen RKPd	Mencermati program untuk menampung usulan yang bersumber NON DAU	Perlu dilakukan koordinasi yang intens dengan Perangkat Daerah teknis terkait Perencanaan, Penganggaran, RTRW dan KLHS dalam dokumen perencanaan.
				b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%			
				1) Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	6 Buku 1. Dapok TW 1-TW 4 2. E- Database SM 1 3. E-Database SM 2	6 Buku 1. Dapok TW 1-TW 4 2. E- Database SM 1 3. E-Database SM 2	1. Rilis data makro pada N+1; 2. Masih ada data yang kurang valid	1. Meningkatkan koordinasi dengan BPS; 2. Mendorong Perangkat Daerah untuk meningkatkan kualitas data	Perlu berkoordinasi dengan PD pengampu indikator, Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan BPS untuk dapat meningkatkan validitas data .
				c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%			
				1) Monitoring Evaluasi	2 laporan 1. E-RKPD SM 1 2. E-RKPD SM 2	2 laporan 1. E-RKPD SM 1 2. E-RKPD SM 2	Monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara maksimal	Mendorong dan menekankan Perangkat Daerah untuk	Perlu berkoordinasi dan meningkatkan

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				si dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah				memksimalkan pelaksanaan monev	capaian kinerja PD untuk meminimalkan indikator kinerja yang tidak tercapai berdasarkan Evaluasi RKPD.
				<b>2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>					
				<b>Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat Daerah Sub Bidang Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia</b>	<b>90%</b>	<b>90,91%</b>	Ada rasionalisasi anggaran di sub bidang Pembangunan manusia	Mengusulkan anggaran kegiatan ke sumber lain: DAU, Bankeu DAK,APBN	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi ke pusat dan propinsi untuk menambah alokasi DAU, Bankeu DAK,APBN
				<b>Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat</b>	<b>90%</b>	<b>90,91%</b>	Ada rasionalisasi anggaran di sub bidang Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Mengusulkan anggaran kegiatan ke sumber lain: DAU, Bankeu DAK,APBN	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi ke pusat dan propinsi untuk menambah alokasi DAU, Bankeu DAK,APBN

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Daerah Sub Bidang Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					
				Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	90%	93,65%	Ada rasionalisasi anggaran di sub bidang perekonomian dan SDA	Mengusulkan anggaran kegiatan ke sumber lain: DAU, Bankeu DAK,APBN	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi ke pusat dan propinsi untuk menambah alokasi DAU, Bankeu DAK,APBN
				Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruktur	90%	95,83%	Ada rasionalisasi anggaran di sub bidang infrastruktur	Mengusulkan anggaran kegiatan ke sumber lain: DAU, Bankeu DAK,APBN	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi ke pusat dan propinsi untuk menambah alokasi DAU, Bankeu DAK,APBN
				a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				1) Koordina nasi Penyu sunan Dokum en Perenc anaan Pemba nguna n Daera h Bidang Pemer intahan (RPJP D,RPJ MD dan RKPD)	1 dokumen: 1. Dokumen LP2KD	1 Dokumen yaitu: 1. Dokumen LP2KD	Belum optimalnya fungsi peran TKPKD	Penguatan Kelembagaan TKPKD baik di tingkat Kabupaten, kecamatan hingga desa	Pengalokasian dana aspirasi pokok-pokok pikiran DPRD untuk penanganan kemiskinan
				2) Pelaks anaan Monito ring dan Evalu asi Penyu sunan Pemba nguna n Peran gkat Daera h Bidang Pemer intahan	3 Laporan: 1. laporan hasil monev pelaksanaan penanggulangan kemiskinan 2. laporan hasil monev pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan 3. laporan hasil monev pelaksanaan TMMD tahun 2023.	3 Laporan: 1. laporan hasil monev pelaksanaan penanggulan n kemiskinan 2. laporan hasil monev pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan 3. laporan hasil monev pelaksanaan TMMD tahun 2023.	1. Kelembagaan penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan belum berfungsi secara optimal karena seringnya berganti personil; masih ditemukan data kemiskinan yang tidak tepat.  2. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan belum berperan optimal; Kawasan perdesaan yg sudah ditetapkan belum berkembang optimal; dan Bumdesma belum	1. penguatan rapat koordinasi TKPKD, TKPK Kecamatan, dan TKPK Desa dan Kelurahan; optimalisasi verval data kemiskinan. 2. penguatan koordinasi Tim Pengembangan Kawasan Perdesaa; Pendampingan Bumdesma di Kawasan perdesaan untuk mendukung RPKP yang sudah ditetapkan.	Koordinasi dan komunikasi kepada Perangkat Daerah terkait dan stakeholder

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							berjalan optimal dalam mendukung pengembangan Kawasan.		
				3) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 dokumen: 1. Dokumen kabupaten Sehat 2. Dokumen Rencana Aksi Pangan dan Gizi tahun 2024 3. Dokumen Laporan Aksi Konvergensi Stunting 4. Dokumen Laporan Pelaksanaan RAD AUSTS 5. Dokumen Laporan Pelaksanaan RAD SDGs semester 1 2023 dan Laporan pelaksanaan RAD SDGs 2022	5 dokumen: 1. Dokumen kabupaten Sehat 2. Dokumen Rencana Aksi Pangan dan Gizi tahun 2024 3. Dokumen Laporan Aksi Konvergensi Stunting 4. Dokumen Laporan Pelaksanaan RAD AUSTS 5. Dokumen Laporan Pelaksanaan RAD SDGs semester 1 2023 dan Laporan pelaksanaan RAD SDGs 2022	1. Belum optimalnya peran fungsi kelembagaan Kabupaten Sehat 2. peran non pemerintah belum optimal dalam penyusunan Rencana Aksi Pangan Gizi dan pelaksanaan aksi Kabupaten Sehat 3. Pelaksanaan RAD AUSTS belum optimal; RAD AUSTS belum sinkron dengan prog kegiatan linsek 4. Indikator SDGs sebagian belum tercapai karena data tidak tersedia di tingkat kabupaten, dan target belum disesuaikan dengan Perpres No. 111 Tahun 2021	1. akan dilaksanakan penguatan kelembagaan di tingkat kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan agar program dan kegiatan terlaksana dan mendukung pencapaian indikator kabupaten sehat 2. optimalisasi peran non pemerintah terkait pelaksanaan dan monev RAD Pangan Gizi dan Kabupaten Sehat. 3. Review RAD AUSTS agar sesuai dengan nomenklatur program dan kegiatan lintas sektoral terkait; penguatan Tim Koordinasi Penanganan AUSTS; penguatan peran pemerintah desa dan masyarakat peduli Pendidikan 4. indikator dan target SDGs akan disesuaikan dengan Perpres No. 111 Tahun 2021 sesuai	Pengalokasian dana aspirasi pokok-pokok pikiran DPRD untuk penanganan stunting

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
								dengan rekomendasi dari Bappeda Provinsi dan Tim KLHS RPJPD.	
				4) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Pembangunaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunaan Manusia	6 Perangkat Daerah: 1. Dinas Kesehatan (Monev pelaksanaan aksi konvergensi stunting; 2. Dinas Pendidikan (monev pelaksanaan RAD AUSTS) 3. Dinsos (monev pelaksanaan bansos untuk PPKS) 4. KBPPP (monev pelaksanaan progam Pengendalian Penduduk, KB, dan Pembangunan Keluarga) 5. KBPPP (monev pelaksanaan PUG dan KLA) 6. Dinpusip (monev pencapaian indikator bidang kearsipan dan perpustakaan)	6 Perangkat Daerah: 1. Dinas Kesehatan (Monev pelaksanaan aksi konvergensi stunting; 2. Dinas Pendidikan (monev pelaksanaan RAD AUSTS) 3. Dinsos (monev pelaksanaan bansos untuk PPKS) 4. KBPPP (monev pelaksanaan progam Pengendalian Penduduk, KB, dan Pembangunan Keluarga) 5. KBPPP (monev pelaksanaan PUG dan KLA) 6. Dinpusip (monev pencapaian indikator bidang kearsipan dan perpustakaan)	1. keterlambatan pengisian aksi 1 dari masing-masing puskesmas karena keterbatasan SDM pemegang program dibandingkan dengan beban kerja yg harus dilaksanakan. 2. peran Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan instansi terkait belum optimal dalam penanganan AUSTS; data sasaran belum update. 3. masih terdapat ketidaktepatan sasaran penerima manfaat bansos PKH, BPNT, dan KUBE. 4. Jumlah Penyuluh KB yang tidak ideal dibanding jumlah wilayah kerjanya sehingga peran fungsi PKB kurang optimal; Kelompok Kegiatan pendukung KB di desa/kelurahan belum optimal melaksanaannya karena kurang pembekalan. 5. Pokja PUG dan Fokal poin PUG belum berperan optimal dalam pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah	1. penguatan koordinasi dan monev dari dinkes kepada semua puskesmas serta optimalisasi peran semua pemegang program di puskesmas untuk input data di master analisis situasi. 2. peningkatan koordinasi Tim Koordinasi Penanganan AUSTS; Refresh RAD AUSTS kepada PD terkait; Review RAD AUSTS untuk disesuaikan dengan dokumen perencanaan lainnya terkait nomenklatur program dan kegiatan serta anggaran. 3. penguatan monev dan verval secara terus-menerus. 4. perekrutan tenaga pendukung untuk membantu PKB dalam melaksanakan tugas administrasi diluar tupoksinya. refresh tugas	Koordinasi dan komunikasi kepada Perangkat Daerah terkait dan stakeholder

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							karena pergantian personil yang sangat dinamis; RAD KLA dan RAD PUG belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai acuan pelaksanaan rencana aksi; budaya baca masih kurang; indeks manajemen arsip belum tercapai optimal.	5. Poktan BKB, BKR, BKL, Genre, PIK R. workshop focal point PUG dan Driver PUG untuk merefresh tupoksi dan penyusunan perencanaan penganggaran responsive gender; mereview RAD PUG dan RAD KLA. layanan perpustakaan keliling ke sekolah-sekolah; penyelenggaraan book fest Kerjasama dengan penerbit, fasilitasi kegiatan anak sekolah di lingkungan perpusda; pembinaan manajemen kearsipan secara terus-menerus.	
				b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	100%			
				1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	4 dokumen: 1.Dokumen Laporan Akhir Kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal 2023, 2.Dokumen Obyek Wisata 3.Dokumen Tingkat Pengangguran Terbuka 4.Dokumen laporan	4 dokumen: 1.Dokumen Laporan Akhir Kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal 2023, 2.Dokumen Obyek Wisata 3.Dokumen Tingkat Pengangguran	1. Kurangnya ketersediaan data urusan bidang perekonomian 2.Kurangnya koordinasi dengan dinas terkait bidang perekonomian	Menggunakan sumber daya manusia (fungsional ahli pertama dan muda) yang ada	DPRD lebih mendorong kegiatan ekonomi kreatif yang ada di masyarakat sekaligus pengembangan ekonomi lokal



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tingkat Konsistensi Kegiatan Rencana Kerja dengan Renstra SUB BID Ekonomi dan SDA 2023	Terbuka 4. Dokumen laporan Tingkat Konsistensi Kegiatan Rencana Kerja dengan Renstra SUB BID Ekonomi dan SDA 2023			
				2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Perangkat Daerah: 1. DPM (Monev bidang perizinan dan penanaman modal) 2. Dinbudpar (Monev bidang kebudayaan dan pariwisata) 3. Dinkopdag (Monev bidang UMKM, Perdagangan, Koperasi) 4. Dinperinaker (Monev bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian)	4 Perangkat Daerah: 1. DPM (Monev bidang perizinan dan penanaman modal) 2. Dinbudpar (Monev bidang kebudayaan dan pariwisata) 3. Dinkopdag (Monev bidang UMKM, Perdagangan, Koperasi) 4. Dinperinaker (Monev bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian)	Kurangnya data dasar yang dimiliki beberapa OPD serta kurangnya waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Mendorong OPD untuk mengumpulkan data dasar yang sesuai untuk menentukan arah kebijakan	Penentuan penerima pokok pikiran lebih ditingkatkan penyalurannya ke UMKM agar naik kelas
				3) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen : 1. Dokumen capaian kinerja urusan sumber daya alam	1 dokumen yaitu 1. Dokumen capaian kinerja urusan sumber daya alam	1. Kurangnya ketersediaan data urusan bidang sumber daya alam 2. Kurangnya koordinasi dengan dinas terkait bidang	Menggunakan sumber daya manusia (fungsional ahli pertama dan muda) yang ada	Lebih memperhatikan kelompok peternak dan perikanan untuk peningkatan ekonomi masyarakat

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Bidang SDA (RPJP D,RPJ MD dan RKPD)					
				c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%			
				1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJP D,RPJ MD dan RKPD)	1 Dokumen: 1.Dokumen RISPAM	1 dokumen yaitu: 1.Dokumen RISPAM	belum tersedia dokumen perencanaan teknis yang terbaru sehingga tidak dapat digunakan dalam pemenuhan <i>readiness criteria</i> untuk keperluan	Menggunakan sumber daya manusia (fungsional ahli pertama dan muda) yang ada	DPRD berkomitmen mendukung dalam penyediaan dokumen perencanaan teknis sebagai salah satu syarat dalam mengajukan usulan infrastruktur melalui anggaran APBN
				2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	3 perangkat daerah yaitu: 1. DPUPR (monev bidang jalan, tata ruang) 2.DPRKPLH (Monev bidang perumahan, lingkungan hidup,	3 perangkat daerah yaitu: 1. DPUPR (monev bidang jalan, tata ruang) 2.DPRKPLH (Monev bidang perumahan,	Kondisi infrastruktur terbangun berfungsi kurang optimal dan membutuhkan anggaran untuk pemeliharaan	Mengusulkan anggaran pemeliharaan infrastruktur terbangun pada OPD teknis terkait	DPRD berkomitmen mendukung dalam pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				sunan Pemba nguna n Peran gkat Daerah h Bidang Infrastr uktur	Kawasan permukiman) 3.Dinhub (bidang transportasi	lingkungan hidup, Kawasan permukiman) 3.Dinhub (bidang transportasi)			infrastruktur baik yang bersumber dari APBD maupun APBN
2	Penelitian dan Pengembangan	Bappeda		3.Program Penelitian dan Pengembangan Daerah					
				Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengkajian	100%	100%			
				Persentase Hasil Krenova yang Dikembangkan	65%	100%			
				a. Penelitian dan Pengemba ngan Bidang Penyeleng garaan Pemerintah an dan Pengkajian Peraturan	100%	100%			
				1) Fasilita si, Pelaks anaan dan evalua si peneliti an dan penge	3 laporan: 1. Laporan Pendahuluan IKUPD 2. Laporan Antara IKUPD 3. Laporan Akhir IKUPD	3 Laporan yaitu 1.Laporan Pendahuluan IKUPD 2.Laporan Antara IKUPD 3.Laporan Akhir IKUPD	Tidak tersedia SDM peneliti	Memaksimalkan kerjasama dengan melibatkan akademisi	Melakukan Kerja sama denan BRIN, UNDIP, Stikes Ngesti Waluyo

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				mbang an bidang pemerintahan umum					
				2) Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	4 laporan: Laporan PDS Laporan IID Jurnal Kelitbangan Laporan monitoring kegiatan kelitbangan	4 laporan yaitu: 1.Laporan PDS 2.Laporan IID 3. Jurnal Kelitbangan 4. Laporan monitoring kegiatan kelitbangan	Terbatasnya dukungan untuk fasilitasi kelitbangan	Memaksimalkan kerjasama dengan OPD lain, Peran serta FTJSLP dan Akademisi	Melakukan kerjasama dengan UNDIP sebagai pembimbing
				b. Penelitian dan pengembangan bidang social dan kependudukan	100%	100%			
				1) Penelitian dan pengembangan partisipasi masyarakat	2 Laporan: laporan Pelaksanaan KKN Laporan TJSLP	2 Laporan, yaitu 1.laporan Pelaksanaan KKN 2. Laporan TJSLP	Kurang optimalnya koordinasi kegiatan fasilitasi KKN dan FTJSLP	Memaksimalkan Koordinasi dengan akademisi dan FTJSLP	Reorganisasi Forum TJSLP Memulai kerjasama dengan UNIMUS
				c. Pengembangan inovasi dan teknologi	100%	100%			
				1) Penelitian pengembangan dan	3 Laporan: 1.Laporan Kabupaten Krenova 2.Laporan Krenova Provinsi	3 Laporan yaitu 1.Laporan Kabupaten Krenova 2.Laporan Krenova Provinsi	Terbatasnya Publikasi dan informasi dalam menjangkau inovasi daerah .	Meningkatkan Sosialisasi, Publikasi baik offline maupun online dan pembuatan aplikasi informasi	Jemput bola inovasi berkerja sama dengan mahasiswa kkn dan desa

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				pereka yasaa n dibida ng teknol ogi dan inovasi	3.Laporan Riset Cacing	3.Laporan Riset Cacing		inovasi Perlu peningkatan kerjasama penjangingan inovasi daerah dengan OPD, Akademisi dan masyarakat. Pembuatan Digitalisi dan Aplikasi Inovasi secara online	
3.	Pengawasan	Inspektorat		<b>1. Program Penyelenggaraa n Pengawasan</b>					
				Persentase tindak lanjut hasil temuan	100	100	1.kurangnya komitmen pimpinan obyek pemeriksaan untuk melakukan Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan 2.Temuan pemeriks an terkait kebijakan lama tidaklanjuti dikarenakan proses perubahan kebijakan yang memerlukan waktu 3. Progres hasil pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan belum didukung aplikasi SDM APIP kurang/terbatas	1.Perlu dilaksanakan LARWASDA yang isinya memaparkan hasil temuan dan tindaklanjt dari obrik kepada Bupati dengan mengundang Obyek yang diperiksa; 2. Dilakukan Desk kepada Obrik yang penyelesaian tindak lanjutnya lama; 3. Diperlukan Aplikasi yang mengcover Progres Tindak Lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan	
				Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan	46	100	1. melaksanakan peningkatan kompetensi terhadap evaluator/Auditor.; 2. Melaksanakan bimtek SAKIP untuk OPD; 3.Reviu LPPD dilaksanakan secara pararael, bersamaan dengan peyusunan	1. melaksanakan peningkatan kompetensi terhadap evaluator/Auditor.; 2. Melaksanakan bimtek SAKIP untuk OPD; 3.Reviu LPPD dilaksanakan secara pararael, bersamaan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				evaluasi			dokumen LPPD untuk mengurangi temuan yang harus di tindaklanjuti; 3.4. pelaksanaan Reviu renja dilaksanakan dengan 1 tim besar dengan penambahan anggota tim dari Tim Irban lain	dengan peyusunan dokumen LPPD untuk mengurangi temuan yang harus di tindaklanjuti; 4. pelaksanaan Reviu renja dilaksanakan dengan 1 tim besar dengan penambahan anggota tim dari Tim Irban lain	
				Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	23	52,15	1. pelaksanaan reviu dengan waktu yang mendesak; 2. banyaknya tugas mandatori yang mengharuskan Inspektorat untuk mereviu dokumen SECARA mendadak dan dalam waktu yang singkat( reviu DAK fisik, non fisik dan reviu Inakes) diluar dokumen PKPT, menjadikan tumpang tindih penugasan Jumlah Personil terbatas	1. Pelaksanaan reviu dilaksanakan secara karantina agar selesai tepat waktu; 2. Personil melaksanakan tugas tambahan dengan double penugasan	
				Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	48	100	1. belum sepenuhnya auditor telah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan Jasa 2. jumlah personil yang terbatas 3. belum semuanya dapat dilakukan pengawasan 4. Adanya penugasan mandatori diluar PKPT yang mengakibatkan pelaksanaan tugas berbenturan	1. auditor diusulkan untuk mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa 2. Personil melaksanakan tugas tambahan 3. pemilihan obrik dilakukan dengan pemetaan risiko 4. Memasukkan tugas mandatori ke dalam Dokumen PKPT selanjutnya	
				a. Penyelenggaraan Pengawasan	5 sub Kegiatan	5 sub Kegiatan			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				<b>Internal</b>					
				1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	<b>4 Laporan :</b> 1. Audit Kinerja pada DPRKPLH 2. Audit Kinerja penanganan Kemiskinan 3. Audit Kinerja Penanganan Stunting 4. Audit Kinerja Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	<b>4 Laporan :</b> 1. Audit Kinerja pada DPRKPLH 2. Audit Kinerja penanganan Kemiskinan 3. Audit Kinerja Penanganan Stunting 2) Audit Kinerja Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1. Merupakan audit atas program yang mendukung visi misi Bupati, sehingga lingkup auditnya luas yang melibatkan <i>crosscutting</i> antar OPD. 2. Merupakan audit berbasis risiko Pemahaman auditor mengenai audit kinerja yang belum memadai Auditan (Perangkat daerah) kadang ada yang menganggap bahwa tugas inspektorat adalah mencari-cari kesalahan	1. Melibatkan Bappeda dalam: a. memperoleh informasi mengenai OPD yang memiliki <i>crosscutting</i> pada program yang dijadikan ruang lingkup audit. b. Memperoleh mengenai risiko berdasarkan Rencana Tindak Pengendalian 2. Mengusulkan diklat Audit Kinerja  Beri penjelasan bahwa tujuan inspektorat adalah untuk meningkatkan tata kelola, jadi apabila menemukan suatu kesalahan akan membantu memperbaiki dan mencari solusi.	
				2) Reviu Laporan Kinerja	<b>55 Laporan :</b> 1. Evaluasi Sakip di 46 OPD 2. Evaluasi LPPD Kab. Temanggung Tahun 2023 3. Reviu RKPD 2024 dan RKPD Perubahan Tahun 2023; Reviu renja di 6 PD;	<b>86 Laporan :</b> 1. Evaluasi Sakip di 46 OPD 2. Evaluasi LPPD Kab. Temanggung Tahun 2023 3. Reviu RKPD 2024 dan RKPD Perubahan Tahun 2023; 4. Reviu renja di 15 PD; 5. Reviu	3. Dokumen yang akan direviu beserta dokumen pendukung belum siap sehingga jadwal reviu mundur	5. erus berkoordinasi dengan OPD untuk segera mempersiapkan dokumen-dokumen yang akan direviu	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Renstra di 10 OPD; 6. Reviu KUA PPAS; 7. Evaluasi PPRG di 10 OPD; dan a. Reviu RPD 2024-2025			
				3) Reviu Laporan Keuangan	<b>79 laporan:</b> 1. Reviu RKA dan RKPA pada 20 PD; 2. Reviu DAK Fisik dan Non Fisik pada 8 OPD; 3. Reviu LKPD Tahun 2022; 4. Reviu dan Audit Dana BOS pada 30 Sekolah; Reviu RKA Perubahan Tahun 2023 pada 26 OPD	<b>96 laporan:</b> 1. Reviu RKA dan RKPA pada 26 PD; 2. Reviu DAK Fisik dan Non Fisik pada 11 OPD; 3. Reviu LKPD Tahun 2022; 4. Reviu dan Audit Dana BOS pada 22 Sekolah 5. Reviu RKA Perubahan Tahun 2023 pada 26 OPD; 6. Reviu Pelayanan Publik Bidang Kesehatan; 7. Audit Pengelolaan APBD pada 6 OPD; 8. Reviu Tata Kelola Pajak Daerah; 9. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa; Reviu SSH, ASB, dan HSPK	4. Target terkait pemeriksaan dana BOSP terlalu banyak sehingga tidak dapat mencakup keseluruhan obrik	6. onev tidak dilakukan secara langsung ke obyek pemeriksaan tetapi melalui googleform dan media elektronik lain.	
				4) Pengawasan Desa	<b>45 Laporan :</b>	<b>45 laporan :</b>	1. Terbatasnya SDM untuk memeriksa	1. Melaksanakan jenis pengawasan	



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					1. Monev Aset Desa pada 14 Desa; 2. Consulting Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa pada 25 Desa; 3. Audit Ketaatan desa pada 2 Desa; 4. Monev Dana Desa pada 4 Desa	1. Monev Aset Desa pada 14 Desa; 2. Consulting Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa pada 25 Desa; 3. Audit Ketaatan desa pada 2 Desa; 4. Monev Dana Desa pada 4 Desa	melaksanakan banyaknya penugasan pengawasan desa. 5. auditan (Perangkat desa) menganggap bahwa tugas inspektorat adalah mencari-cari kesalahan	lainnya yaitu <i>consulting</i> . 2. Beri penjelasan bahwa tujuan inspektorat adalah untuk meningkatkan tata kelola, jadi apabila menemukan suatu kesalahan akan membantu memperbaiki dan mencari solusi. 7.	
				5) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	<b>100%</b>  Jumlah penanganan hasil temuan pemeriksaan dibagi jumlah hasil temuan pemeriksaan kali 100 %.	<b>100%</b>  $\frac{1.983}{1.983} \times 100\% = 100\%$ 4. 1.983	1. kurangnya komitmen pimpinan obyek pemeriksaan untuk melakukan Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan 4. Temuan pemeriks terkait kebijakan lama tidaklanjuti dikarenakan proses perubahan kebijakan yang memerlukan waktu 5. Progres hasil pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan belum didukung aplikasi SDM APIP kurang/terbatas a.	1. Perlu dilaksanakan LARWASDA yang isinya memaparkan hasil temuan dan tindaklanjt dari obrik kepada Bupati dengan mengundang Obyek yang diperiksa; 2. Dilakukan Desk kepada Obrik yang penyelesaian tindak lanjutnya lama; 4 3. Diperlukan Aplikasi yang mengcover Progres Tindak Lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan	
				b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	<b>2 Sub Kegiatan</b>	<b>2 Sub Kegiatan</b>	7.		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	5 Laporan	2 laporan : 1. Mandatoti PKN IPAL RSUD Kab. Temanggung; PKKN atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan/reabilitasi Peningkatan Sumber Air Bersih Des Tlahab	2) ) kompetensi yang tidak memadai; 2) komitmen organisasi; 3) anggaran; 4) lingkungan kerja; 5) kebijakan manajemen dan 6) rangkap jabatan	1) Peningkatan kompetensi dengan pelatihan dan juga perekrutan SDM yang kompetensinya dibutuhkan oleh organisasi 2) komitmen organisasi; dengan cara mengkomunikasikan tujuan dan strategi yang jelas untuk semua anggota dan juga OPD yang terkait dengan penugasan Organisasi, adanya penghargaan setiap prestasi yang dicapai oleh semua anggota Organisasi, berfikir positif terhadap tujuan organisasi, mendukung setiap kreativitas yang dimiliki anggota organisasi. 3) Mengusulkan Dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan organisasi; 4) Membangun lingkungan kerja yang baik dengan menjali komunikasi yang intens terhadap semua anggota Organisasi. ; 5) kebijakan yang kuat dan pasti terhadap regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan organisasi dan tidak adanya rangkap jabatan sehingga memperjelas tugas dan fungsi dari masing-	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
								masing anggota organisasi .	
				2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3 Laporan	<p><b>12 laporan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aduan Masyarakat Kelurahan Temanggung I;</li> <li>2. Pemeriksaan pada Satpol PP &amp; Damkar;</li> <li>3. Audit Investigasi Desa Mergowati;</li> <li>4. Pemeriksaan khusus Pasar Legi Parakan dan Pasar Ngadirejo;</li> <li>5. Aduan Masyarakat Desa Wonotirto;</li> <li>6. Aduan Masyarakat Desa Tempelsari, Tretep;</li> <li>7. Aduan Masyarakat Desa Karangwuni;</li> <li>8. Aduan Masyarakat Desa Tlahab;</li> <li>9. Aduan Masyarakat Desa Nglondong;</li> <li>10. Aduan Klarifikasi Aduan Masyarakat desa Gentan;</li> <li>11. Pemeriksa an Khusus RSUD kabupaten Temanggung; Audit Investigasi Desa Muntung</li> </ol>	1) kompetensi yang tidak memadai; 2) komitmen organisasi; 3) anggaran; 4) lingkungan kerja; 5) kebijakan manajemen dan 6) rangkap jabatan	<p>1) Peningkatan kompetensi dengan pelatihan dan juga perekrutan SDM yang kompetensinya dibutuhkan oleh organisasi</p> <p>2) komitmen organisasi; dengan cara mengkomunikasikan tujuan dan strategi yang jelas untuk semua anggota dan juga OPD yang terkait dengan penugasan Organisasi, adanya penghargaan setiap prestasi yang dicapai oleh semua anggota Organisasi, berfikir positif terhadap tujuan organisasi, mendukung setiap kreativitas yang dimiliki anggota organisasi.</p> <p>3) Mengusulkan Dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan organisasi; 4) Membangun likungan kerja yang baik dengan menjali komunikasi yang intens terhadap semua anggota Organisasi.</p> <p>; 5) kebijakan yang kuat dan pasti terhadap regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan organisasi dan tidak adanya rangkap jabatan sehingga</p>	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
								memperjelas tugas dan fungsi dari masing-masing anggota organisasi .	
				2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi					
				Nilai Maturitas SPIP	Level 3,3	Level 3,000	<p>1. Belum semua OPD dan personil mengerti akan pentingnya SPIP;</p> <p>2. Pergeseran/ mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah (RTP) sehingga diperlukan refresh atas informasi terkait SPIP kepada Perangkat Daerah;</p> <p>3. APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh, terbentur dengan terbatasnya sumber daya manusia</p> <p>4. Terbitnya regulasi baru PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah "SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan</p>	<p>1. Perlu diadakan Bimtek dan pendampingan penyusunan rencana Tindak Pengendalian secara rutin kepada Perangkat daerah, mengingat belum semua perangkat daerah memahami penyusunan Risk Register dan RTP;</p> <p>2. Perlu dilakukan evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian;</p> <p>3. Perlu dilakukan Self Assesment atas pelaksanaan maturitas SPIP di Kabupaten Temanggung secara rutin ( 1x setahun)</p> <p>4. Perlu dilaksanakan sosialisasi, pendampingan dan Bimtek tentang Maturitas Penyelenggaraan SPIP kepada OPD</p>	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dimana SPIP Terintegrasi merupakan gabungan antara Manajemen Risiko, Pencegahan Korupsi dan Kapabilitas APIP sehingga parameter penilaiannya bertambah/berkembang		
				Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	60 %	100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya komitmen OPD untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas;</li> <li>2. Zona Integritas merupakan kegiatan baru, sehingga masih dibutuhkan pendalaman dan pengembangan informasi ;</li> <li>3. Adanya mutasi pegawai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan pendampingan yang lebih intensif kepada OPD yang telah dicanangkan sebagai Zona Integritas</li> <li>2. Berkoordinasi dengan Kemenpan dan TPI dalam rangka Sinkronisasi kegiatan ZI</li> <li>3. Dilaksanakan sosialisasi kepada OPD yang dicanangkan sebagai ZI</li> </ol>	
				Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	100%	100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya informasi sebagai bahan pemeriksaan investigasi dan komitmen atasan pengadu;</li> <li>2. Kurangnya SDM auditor;</li> <li>3. Kurang pahamnya OPD mengenai benturan kepentingan;</li> <li>4. Kurangnya pemahaman penyelenggara negara/swasta tentang gratifikasi;</li> <li>5. Belum memasyarakatnya UPG di Kabupaten Temanggung;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memprioritaskan penugasan pemeriksaan investigasi;</li> <li>2. Sosialisasi benturan kepentingan;</li> <li>3. Perlu dilaksanakan sosialisasi pengendalian gratifikasi;</li> </ol>	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Nilai Survey Penilaian Integritas	81,97	77,37	Integritas Penyelenggara Negara terhadap pelayanan publik yang diberikan belum meningkat secara signifikan. Sehingga masih ditemukan pelayanan publik yang belum maksimal	Dibuat Pakta Integritas dalam pelayanan publik, dilakukan sosialisasi anti korupsi kepada seluruh desa, perangkat daerah, legislatif dan stakeholder	
				Persentase penanganan aduan masyarakat	100 %	100 %	Masyarakat belum semuanya paham tentang tata cara pengaduan, sehingga aduan tidak jelas; Belum semua auditor mengikuti diklat Investigasi dan PPKN; Belum ada tenaga ahli bidang konstruksi bangunan sehingga belum bisa mandiri dalam perhitungan kerugian negara	Sosialisasi tentang tata cara pengaduan masyarakat; Pelaksanaan Diklat Investigasi dan PPKN; Dalam hal kerugian negara terkait konstruksi bangunan gedung bekerjasama dengan Dpu dalam perhitungannya; Dialogasikan SDM bidang konstruksi dan bangunan	
				a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	<b>1 Kegiatan</b>	<b>1 Kegiatan</b>			
				1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1 Rekomendasi BA Hasil rapat sinkronisasi Program Pengawasan Tahun 2024	1 Rekomendasi BA Hasil rapat sinkronisasi Program Pengawasan Tahun 2024	Permendagri tentang Renbinwas sebagai acuan penyusunan PKPT terlambat terbit	Penyusunan PKPT mengacu Permendagri tahun sebelumnya dan dilakukan revisi PKPT setelah Permendagri tahun terkait terbit	
				b. Pendampingan dan Asistensi	<b>2 Kegiatan</b>	<b>2 Kegiatan</b>			
				1) Koordinasi, Monitoring dan	5 Kegiatan	13 Kegiatan : 1. MCP KPK 2 kegiatan;	7. Koordinasi Tim Satgas yang melibatkan instansi vertical belum optimal.	1. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan instansi vertical	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Saber Pungli 2 Kegiatan;</li> <li>3. Sosialisasi Antikorupsi 4 Kegiatan;</li> <li>4. Sosialisasi PAK 2 kegiatan;</li> <li>5. Zona Integritas 2 kegiatan;</li> <li>6. Hakordia 1 kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8. Terbatasnya SDM Penyuluh Antikorupsi</li> <li>Indikator yang digunakan dalam penilaian MCP KPK sangat dinamis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>sehingga Rencana Aksi yang dapat terlaksana dengan baik.</li> <li>2. Memperbanyak SDM Penyuluh Antikorupsi melalui pembelajaran online. Berusaha melaksanakan pemenuhan indikator MCP KPK sehingga dapat terverifikasi dengan baik dan tepat.</li> </ul>	
				2) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 perangkat Daerah	57 Perangkat Daerah : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pendampingan SPIP 11 PD;</li> <li>2. Pendampingan RTP 46 PD;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Belum semua OPD dan personil mengerti akan pentingnya SPIP;</li> <li>2. Pergeseran/ mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah (RTP) sehingga diperlukan refresh atas informasi terkait SPIP kepada Perangkat Daerah;</li> <li>3. APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh, terbentur dengan terbatasnya sumber daya manusia</li> <li>4. 4. Terbitnya regulasi baru PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah "SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu diadakan Bimtek dan pendampingan penyusunan rencana Tindak Pengendalian secara rutin kepada Perangkat daerah, mengingat belum semua perangkat daerah memahami penyusunan Risk Register dan RTP;</li> <li>2. Perlu dilakukan evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian;</li> <li>3. Perlu dilakukan Self Assesment atas pelaksanaan maturitas SPIP di Kabupaten Temanggung secara rutin ( 2x setahun)</li> <li>1. 4. Perlu dilaksanakan sosialisasi, pendampingan dan Bimtek tentang Maturitas Penyelenggaraan</li> </ul>	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dimana SPIP Terintegrasi merupakan gabungan antara Manajemen Risiko, Pencegahan Korupsi dan Kapabilitas APIP sehingga paramater penilaiannya bertambah/berkembang	SPIP kepada OPD	
4.	Kepegawaian	BKPSDM		1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
				Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100%	100%			
				a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan			
				1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang / 12 Bulan	35 Orang / 12 Bulan			
				b. Administrasi Umum	5 Sub Kegiatan	5 Sub Kegiatan			



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Perangkat Daerah					
				1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
				2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket			
				3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket			
				4) Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan			
				5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	27 Laporan			
				c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan			
				1) Penyediaan Jasa Surat	12 Laporan	12 Laporan			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Menyurat					
				2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan			
				3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan			
				d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Sub Kegiatan	5 Sub Kegiatan			
				1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19 Unit	19 Unit			
				2) Pemeliharaan Mebel	5 Unit	5 Unit			
				3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	10 Unit			
				4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit	5 Unit			
				5) Pemeliharaan	5 Unit	5 Unit			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				n/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan					
				2. Program Kepegawaian Daerah	100 %	100 %			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase penyusunan formasi pegawai</li> <li>• Persentase penyelesaian pensiun PNS tepat waktu</li> <li>• Persentase penyelesaian kenaikan pangkat tepat waktu</li> <li>• Persentase penyelesaian pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional</li> <li>• Persentase keterisian jabatan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas</li> <li>• Persentase perempuan pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan</li> </ul>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>80%</p> <p>48%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>89,42%</p> <p>41,91%</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyederhanaan birokrasi</li> <li>2. Kewenangan untuk memilih dan menetapkan pejabat oleh PPK</li> <li>3. Mekanisme pengangkatan pengisian jabatan di masa Pj. Bupati harus melalui persetujuan teknis BKN dan izin Mendagri (melalui</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menominasikan kandidat pengisi jabatan perempuan untuk mengisi kekosongan jabatan, sesuai prinsip Merit System</li> <li>2. Peningkatan pengembangan kompetensi calon pejabat</li> </ol>	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				<p>administrator dan jabatan pengawas</p> <p>• Persentase pelanggaran disiplin ASN</p> <p>• Persentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN</p>	<p>0,2%</p> <p>90%</p> <p>95%</p>	<p>0,18%</p> <p>71,43%</p> <p>100%</p>	<p>proses yang lebih lama dibandingkan dengan masa bupati definitif).</p> <p>4. Kekurangan SDM karena tidak ada penambahan CPNS dari jalur umum, sementara pensiun tidak dapat ditunda</p> <p>Terjadinya kasus pada akhir triwulan IV sehingga pada bulan tersebut masih dilakukan tahapan tahapan penyelesaian kasus.</p>	<p>1. Pembinaan pegawai ASN baik PNS maupun PPPK melalui sosialisasi tentang disiplin pegawai</p> <p>2. Koordinasi dengan pihak terkait yaitu pengadilan agama untuk konfirmasi kasus perceraian yang dimungkinkan menjadi potensi pelanggaran disiplin ketika surat keterangan izin perceraian tidak dilakukan</p>	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Persentase pelaksanaan updating data kepegawaian					
				a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan			
				1) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3 Dokumen	3 Dokumen			
				2) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi	12 Dokumen	12 Dokumen			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pemberhentian					
				3) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen			
				b. Mutasi dan Promosi ASN	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan			
				1) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1000 Dokumen	693 Dokumen			
				2) Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	2 Dokumen			
				c. Pengembangan Kompetensi ASN	3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan			
				1) Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	2 Dokumen			
				2) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	-	-			
				3) Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	300 Orang	1.064 Orang			
				d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Sub Kegiatan	4 Sub Kegiatan			
				1) Penyusunan	1 Dokumen	1 Dokumen			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					
				2) Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	46 Laporan	46 Laporan			
				3) Pembinaan Disiplin ASN	140 Orang	384 Orang			
				4) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin	-	-			
				3. Program Pembangunan Sumber Daya Manusia	100%	100%			
				• Persentase pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memiliki kompetensi diklat kepemimpinan	32%	36,72%			
				Persentase ASN yang memenuhi kompetensi Diklat teknis dan fungsional	13,5%	31,67%			
				a. Pengembangan	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				gan Kompetensi Teknis					
				1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	150 orang	191 orang			
				b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan			
				1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan	50 Laporan	62 Laporan			



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					
5	Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)		1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%			
				Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	100%	100%	Adanya aturan baru setelah RKPD Perubahan ditetapkan (Dana Insentif Fiskal) sehingga nama kegiatan pada RKPD dan nama kegiatan pada APBD mengalami perbedaan	Agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
				Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	89,96%	100%	Tidak ada faktor penghambat, karena sudah tercapai.	Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
				Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100%	100%	Keterlambatan Penetapan RKPD Provinsi Jawa Tengah yang berimbas pada keterlambatan penetapan RKPD dan KUA/PPAS Kabupaten Temanggung	Agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
				Persentase penerbitan	100%	100%	SKPD tidak respon terhadap verifikasi dokumen pengajuan dan	Kordinasi dengan SKPD lebih diintensifkan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				SP2D online yang tepat waktu			lebih bersifat pasif dan tidak konfirmasi dan tidak koordinasi dengan BPKPAD		
				Persentase realisasi keuangan	93%	94,70%	Persentase Realisasi keuangan bergantung pada penyerapan anggaran masing-masing SKPD	Kedepan Pemda mendorong PD untuk mencermati antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	
				Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	90%	100%	Adanya beberapa SKPD yang tidak akuntabel dan tidak tepat waktu dalam menyusun dan menyampaikan laporan	Melakukan pembinaan terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan kepada seluruh SKPD	
				Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	belum semua SKPD mengirim SPJ Anggaran dan Kas Desember ke BPPKAD selaku SKPKD dan pergantian personil penatausahaan keuangan	Melakukan monitoring laporan keuangan dan Melaksanakan asistensi kepada Perangkat Daerah	
				a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	4 Sub Kegiatan	4 Sub Kegiatan			
				1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	4 dokumen yaitu: 1. Dokumen rancangan KUA; 2. Dokumen rancangan PPAS; 3. Dokumen KUA; 4. Dokumen PPAS	4 dokumen yaitu: 1. Dokumen rancangan KUA; 2. Dokumen rancangan PPAS;	ketepatan waktu dalam menyusun dokumen dikarenakan menunggu penetapan dari DPRD	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS sebanyak 4 dokumen telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						3. Dokumen KUA; 4. Dokumen PPAS			
				2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4 dokumen yaitu: 1. Dokumen rancangan perubahan KUA; 2. Dokumen rancangan perubahan PPAS; 3. Dokumen perubahan KUAS;; Dokumen perubahan PPAS	4 dokumen yaitu: 1. Dokumen rancangan perubahan KUA; 2. Dokumen rancangan perubahan PPAS; 3. Dokumen perubahan KUAS; 4. Dokumen perubahan PPAS	ketepatan waktu dalam menyusun dokumen dikarenakan menunggu penetapan dari DPRD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS sebanyak 4 dokumen telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
				3) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.300 dokumen	2.300 DPA Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung	Beberapa OPD rincian DPA tidak sesuai dengan ketentuan (rekeningnya berbeda, melampaui standar harga dll)	menyarankan OPD untuk merevisi anggaran dengan mekanisme bersurat sesuai dengan ketentuan	
				4) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah	2 Dokumen (Perda Perubahan dan Perbup Pejabaran APBD)	2 Dokumen (Perda Perubahan dan Perbup Pejabaran APBD)	Permasalahan dalam menunggu penetapan dari DPRD		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				tentang Penjabaran Perubahan APBD					
				b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan			
				1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	8737 SP2D	8737 SP2D	Tidak semua OPD langsung menindaklanjuti hasil verifikasi sehingga pencairan SP2D terlambat		
				c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan			
				1) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/	dokumen yaitu Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang: 1. Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi; 2. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD	2 dokumen yaitu Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang: 1. Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi; 2. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD	kewajiban pemda untuk menyusun dan menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Kota					
				2) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	103 dokumen Laporan SKPD	103 dokumen laporan SKPD	Adanya beberapa SKPD yang tidak akuntabel dan tidak tepat waktu dalam menyusun dan menyampaikan laporan	Melakukan pembinaan terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan kepada seluruh SKPD.	
				<b>2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	100%	100%			
				Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	88,1%	100%	Sumber Daya Manusia di SKPD	-Evaluasi atas nilai appraisal yang telah berjalan  -Sosialisasi terkait pemanfaatan tanah dan bangunan beserta tarifnya Kepada Masyarakat	
				Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	99,10%	94,33%	Beberapa aset belum termanfaatkan karena tariff berdasarkan nilai appraisal terlalu tinggi, Penyewa sudah tidak mampu lagi membayar harga sewa	Meningkatkan koordinasi dengan SKPD tentang pemanfaatan barang milik daerah	
				a. Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Sub kegiatan	3 Sub kegiatan			
				1) Penyusunan Standar Harga	103 satuan kerja	103 surat usulan dari OPD, hasilnya 2 dokumen yaitu standar harga penetapan dan	Masih terdapat beberapa SKPD yang tidak/terlambat mengusulkan SSH	Membuat surat edaran terkait pengusulan SSH	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						standar harga perubahan			
				2) Penatausahaan Barang Milik Daerah	103 unit kerja	103 unit kerja	Masih terdapat SKPD yang melaporkan SPJ barang kurang tepat waktu	Berkoordinasi dengan SKPD terkait kendala yang dihadapi agar dapat melaporkan SPJ tepat waktu	
				3) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	150 satuan kerja	150 Satuan Kerja	Belum optimalnya pemanfaatan barang milik daerah salah satunya karena harga sewa yang dirasa terlalu tinggi	Meningkatkan koordinasi dengan SKPD tentang pemanfaatan barang milik daerah	
				<b>3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	100%	100%			
				Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	1,27	0,813	Secara keseluruhan, penurunan Indikator peningkatan jumlah objek pajak disebabkan oleh sudah tidak dilaksanakannya pendataan massal PBB-P2 serta kurang maksimalnya sosialisasi mengenai pendaftaran objek baru PBB-P2. Selain itu petugas dan sumber daya bidang pendapatan sangat terbatas untuk melaksanakan pendataan objek pajak. Dan target jumlah pajak akan meningkat seiring dengan aktifitas perekonomian di	peningkatan kapasitas SDM petugas untuk kegiatan pendataan baru	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							masyarakat.		
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 bulan	12 bulan	Masih terdapat data obyek pajak yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan	Melakukan desk NJOP dengan perangkat desa/kelurahan	
				Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	100%	100%	Masih ditemukan perbedaan antara izin dan pajak reklame, sedangkan Satpol PP belum mempunyai data yang terkirim secara cepat dan otomatis terkait pelanggaran izin dan pajak reklame.	Koordinasi dengan DPM dan Satpol PP terkait penyelenggaraan reklame agar tercipta sinkronisasi antara pajak dan izin reklame, dan dapat diketahui reklame yang telah terpasang namun belum berizin dan belum bayar pajak.	
				Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	95%	101,47%	Belum tersedianya alat bantu yang mampu memonitor capaian pendapatan daerah secara real time membuat penyajian informasi capaian pendapatan daerah secara keseluruhan tidak bisa dilakukan secara instan dan cepat	Membuat aplikasi yang bisa digunakan membantu menyajikan laporan pendapatan daerah	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	100%	100%	pelaporan yang dilakukan tidak bisa diawal waktu, seringkali terjadi diatas tanggal 7 tiap awal bulannya. hal ini disebabkan karena sumber daya manusia di perangkat daerah terbatas dan bertumpuknya tugas yang lain membuat pelaporan tidak dapat dilakukan awal waktu	selalu mengingatkan kepada perangkat daerah tentang pentingnya melaporkan pendapatan yang sudah diperoleh tiap awal bulan, baik ketika ada rakor pimpinan maupun ketika dilakukan monitoring dan evaluasi pendapatan daerah	
				a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4 Sub Kegiatan	4 Sub Kegiatan			
				1) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	7.039 OP/WP	7.039 OP/WP	Masih terdapat beberapa Subyek dan Obyek pajak yang seharusnya bisa ditetapkan sebagai subyek dan Obyek pajak namun belum terdata	Melakukan pendataan terus menerus terhadap subyek dan obyek pajak dan ditetapkan sebagai subyek dan obyek pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku	
				2) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 bulan	12 bulan	Masih terdapat data obyek pajak yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan	Melakukan desk NJOP dengan perangkat desa/kelurahan	
				3) Penagihan Pajak Daerah	12 bulan	12 bulan	Terdapat beberapa Wajib Pajak yang menunda/menolak melakukan pembayaran pajak	Petugas pajak melakukan penagihan kepada wajib pajak	



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				4) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	12 bulan	12 bulan	Adanya keterlambatan pengiriman Berita Acara Rekonsiliasi Retribusi yang menghambat penyusunan laporan keuangan SKPD	Membuat <i>Google formulir</i> untuk mendapatkan angka retribusi dengan jumlah yang tepat agar laporan keuangan dapat tersusun secara tepat waktu	
5	Pengadaan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)		1. Program Perekonomian dan Pembangunan					
				Prosentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan	100%	100%	Persiapan Perencanaan dari OPD dan kebijakan dari masing masing kepala OPD dalam pelaksanaan kegiatan	Membuat surat Edaran Nomor: 2396/2022 Tgl. 16 Desember 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023	
				Persentase penggunaan eProcurement terhadap belanja pengadaan	100%	59,11%	Kinerja OPD belum melaksanakan pengadaan EPL diatas 50 juta secara keseluruhan	Membuat surat Edaran Nomor: 2396/2022 Tgl. 16 Desember 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
								Anggaran 2023	
				Persentase kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan NonTender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	100%	96.32%	Kinerja OPD belum melaksanakan pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan PL dibawah 50 juta	Membuat surat Pj. Sekretaris Daerah Nomor: B/218/050/01/X/2023 tentang Pencatatan Non Tender pada SPSE	
				a. Pelaksanaan ULP dan LPSE (Tahun 2022)					
				1) Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	6.270 Paket terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ eTendering 121 paket</li> <li>➤ Pengadaan Langsung 3434 Paket</li> <li>➤ Seleksi 1 Paket</li> <li>➤ ePurchasing 1.337 Paket</li> <li>➤ Penunjukan Langsung 40 paket</li> <li>➤ Dikeculikan 1337paket</li> </ul>	3.626 Paket terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ eTendering 121 paket</li> <li>➤ dengan 1 paket batal</li> <li>➤ Pengadaan Langsung 2090 Paket</li> <li>➤ Seleksi 1 paket</li> <li>➤ ePurchasing 696 Paket</li> <li>➤ Penunjukan Langsung 1 paket</li> <li>➤ Dikeculikan 717 paket</li> </ul>	Permasalahannya banyak PPK yang melakukan belanja tapi tidak melakukan pencatatan atau melalui sistem di LPSE	Membuat surat Edaran Nomor: 2396/2022 Tgl. 16 Desember 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023	
				2) Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	103 Perangkat Daerah yang terdiri dari: Bag. Pemerintahan, Bag. PBJ, Bag. Hukum, Bag. Pembangunan, Bag. Perekonomian, Bag. Kesra, Bag. Ortala, Bag. Umum, Bag. Prokompim, Inspektorat, Sekwan,	103 Perangkat Daerah yang terdiri dari: Bag. Pemerintahan, Bag. PBJ, Bag. Hukum, Bag. Pembangunan, Bag. Perekonomian, Bag. Kesra, Bag.	Pelaku pengadaan belum sepemahaman terkait Aturan tentang pengadaan barang/jasa yang perubahannya cepat	a. Upgrate spse versi 4.4 dan aplikasi AMEL di LPSE Membuat surat Pj. Sekretaris Daerah Nomor: B/218/050/01/X/2023 tentang Pencatatan Non	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					RSUD, Bappeda, BPKPAD, BKPSDM, BPBD, Kesbangpol, Dindikpora, Dinkes, PUPR, Satpol PP Damkar, Dinsos, Dinaker, DPPPAPPKB, DKP3, DPRKPLH, Dindukcapil, Dinpermades, Dinhub, Dinkominfo, Dinkopdag, DPM, Dinbudpar, Dinpusip, Kec. Bansari, Kec. Bejen, Kec. Bulu, Kec. Candiroto, Kec. Gemawang, Kec. Jumo, Kec. Kaloran, Kec. Kandangan, Kec. Kedu, Kec. Kledung, Kec. Kranggan, Kec. Ngadirejo, Kec. Parakan, Kec. Pringsurat, Kec. Selopampang, Kec. Temanggung, Kec. Tembarak, Kec. Tlogomulyo, Kec. Tretap, Kec. Wonoboyo, Kel. Temanggung I, Kec. Temanggung II, Kel. Butuh, Kel. Jampiroso, Kel. Jampirejo, Kel. Kertosari, Kel. Banyuurip, Kel. Kowangan, Kel. Jurang, Kel. Tlogorejo, Kel. Kebonsari, Kel. Manding, Kel. Mungseng, Kel. Purworejo, Kel. Giyanti, Kel. Madureso, Kel. Sidorejo, Kel. Walitelon Selatan, Kel. Walitelon Utara, Kel. Kranggan, Kel. Parakan Wetan, Kel. Parakan Kauman, Kel.	Ortala, Bag. Umum, Bag. Prokompim, Inspektorat, Sekwan, RSUD, Bappeda, BPKPAD, BKPSDM, BPBD, Kesbangpol, Dindikpora, Dinkes, PUPR, Satpol PP Damkar, Dinsos, Dinaker, DPPPAPPKB, DKP3, DPRKPLH, Dindukcapil, Dinpermades, Dinhub, Dinkominfo, Dinkopdag, DPM, Dinbudpar, Dinpusip, Kec. Bansari, Kec. Bejen, Kec. Bulu, Kec. Candiroto, Kec. Gemawang, Kec. Jumo, Kec. Kaloran, Kec. Kandangan, Kec. Kedu, Kec. Kledung, Kec. Kranggan, Kec. Ngadirejo, Kec. Parakan, Kec. Pringsurat, Kec. Selopampang, Kec. Temanggung, Kec. Tembarak, Kec. Tlogomulyo, Kec. Tretap, Kec. Wonoboyo, Kel. Temanggung I, Kec. Temanggung II, Kel. Butuh, Kel. Jampiroso, Kel. Jampirejo, Kel.		Tender pada SPSE	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Manggong, Pusk. Bansari, Pusk. Bulu, Pusk. Candiroto, Pusk. Gemawang, Pusk. Kaloran, Pusk. Kandangan, Pusk. Kedu, Pusk. Kledung, Pusk. Kranggan, Pusk. Ngadirejo, Pusk. Parakan, Pusk. Pringsurat, Pusk. Selopampang, Pusk. Temanggung, Pusk. Tembarak, Pusk. Tepusen, Pusk. Tlogomulyo, Pusk. Traji, Pusk. Tretep, Pusk. Wonoboyo, Pusk. Dharma Rini, Pusk. Rejosari, Pusk. Banjarsari	Kertosari, Kel. Banyuurip, Kel. Kowangan, Kel. Jurang, Kel. Tlogorejo, Kel. Kebonsari, Kel. Manding, Kel. Mungseng, Kel. Purworejo, Kel. Giyanti, Kel. Madureso, Kel. Sidorejo, Kel. Walitelon Selatan, Kel. Walitelon Utara, Kel. Kranggan, Kel. Parakan Wetan, Kel. Parakan Kauman, Kel. Manggong, Pusk. Bansari, Pusk. Bejen, Pusk. Bulu, Pusk. Candiroto, Pusk. Gemawang, Pusk. Jumo, Pusk. Kaloran, Pusk. Kandangan, Pusk. Kedu, Pusk. Kledung, Pusk. Kranggan, Pusk. Ngadirejo, Pusk. Parakan, Pusk. Pare, Pusk. Pringsurat, Pusk. Selopampang, Pusk. Temanggung, Pusk. Tembarak, Pusk. Tepusen, Pusk. Tlogomulyo, Pusk. Traji, Pusk. Tretep, Pusk. Wonoboyo, Pusk. Dharma Rini, Pusk. Rejosari,			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				3) Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	5 Kegiatan Untuk PA/KPA, PPK, PP, Camat, Lurah, Kepala Desa, PKA Desa dan Penyedia	5 Kegiatan a. bimbingan teknis dan pelatihan belanja secara online melalui Katalog Lokal Temanggung 2023 di Omah Kebon b. Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan PBJ di Kabupaten Temanggung c. Desk pencatatan non tender, pencatatan swakelola, P3DN 2023 di Loka Bakti Praja d. Sosialisasi Zoom Meeting Pengembangan SDM melalui Sertifikasi Kompetensi PBJ Sosialisasi Pengadaan barang/Jasa Desa 2023 di Graha Bumi Pala.	a. Prosentase pelaksanaan belanja manual masih banyak dibanding belanja melalui online untuk pagu anggaran <50Juta b. Minimnya informasi ke pelaku usaha dalam menayangkan produk c. belum sepemahaman terkait Aturan tentang pengadaan barang/jasa yang perubahanya cepat	a. Dibuat Intruksi Bupati Temanggung No. 6 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan ePurchasing pada Katalog Lokal Pemkab Temanggung b. Dibuat Surat Pj. Sekda No. B/418/006/01/XII/2023 tentang Zoom Meeting Persiapan PBJ Tahun 2024 c. Dibuat surat No B/383/005/01/XII/2023 tentang undangan Desk pencatatan non tender, pencatatan swakelola, P3DN 2023 d. Dibuat surat Pj. Sekda No. B/348/800/01/XII/2023 tentang undangan Sosialisasi Zoom Meeting Pengembangan SDM melalui Sertifikasi Kompetensi PBJ b. Dibuat Surat Pj. Sekda No. B/445/005/01/Xii/2023 tentang Undangan Sosialisasi Pengadaan barang/Jasa Desa	

### 3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan Strategis daerah tahun 2023 ditetapkan dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan isu strategis daerah sebagaimana dijabarkan dalam table berikut:

Tabel 3.5  
Kebijakan Strategis dalam rangka penyelesaian masalah

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1.	Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 Tentang penyelenggaraan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagai pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana</li> </ul>
2.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022.</li> </ul>
3.	Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disusun sebagai dasar penyusunan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun 2023</li> </ul>
4.	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disusun sebagai dasar penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024</li> </ul>

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
5.	Perencanaan dan Pelaksanaan APBD Tahun 2023	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun 2023 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2023 Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan APBD Tahun 2023</li> </ul>
6.	Pengelolaan Keuangan Desa dan Penyusunan APBDes	Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan APBDes sesuai ketentuan dan terselesaikan pada akhir tahun</li> </ul>
7.	Tambah Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambah Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja ASN;</li> <li>• Meningkatkan kinerja ASN dan Pemerintah Daerah secara keseluruhan; dan</li> <li>• Meningkatkan kesejahteraan ASN.</li> </ul>
8.	Intensifikasi Pendapatan Pajak Daerah	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Insentif Desa dan Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan klasifikasi ulang atas kelas ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan</li> </ul>

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
9.	Pedoman bagi Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2024-2026</li> <li>• Pedoman Pemerintah Daerah dalam Penyusunan RKPD</li> </ul>
10.	Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode Tahun 2024-2026	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan PD</li> <li>• Merumuskan tujuan dan sasaran PD, strategi dan arah kebijakan serta rencana program dan kegiatan PD dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran Pembangunan daerah</li> <li>• Pedoman bagi PD dalam Menyusun Renja PD</li> </ul>
11.	Rencana Aksi Penurunan Stunting	Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempercepat penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Temanggung</li> </ul>
12.	Kesejahteraan ASN	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kesejahteraan, Pemberian Bantuan Hukum, dan Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi bantuan hukum</li> <li>• Meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani ASN</li> <li>• Meningkatkan kinerja ASN melalui pemberian penghargaan ASN</li> </ul>
13.	Menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2024</li> <li>• Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024</li> </ul>



NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan kebijakan Umum Anggaran dan Sementara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.</li> </ul>
14.	Dokumen Perencanaan PD Kabupaten Temanggung untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2024 dan berakhirnya pada 31 Desember 2024	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan</li> </ul>
15.	Perubahan RKPD disusun atas dasar hasil evaluasi RKPD Tahun 2023 Triwulan II	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023</li> <li>• Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023</li> <li>• Penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023</li> </ul>
16.	Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memenuhi PSAP 16 Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi , PSAP 17 Properti Investasi, PSAP, dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
17.	Pedoman Penghapusan Piutang Daerah	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengubah Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dengan mengakomodir terbitnya PMK Nomor 137/PMK.06/2022 Tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara</li> </ul>
18.	Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2024	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh SKPD pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023</li> </ul>
19.	Penjabaran APBD Tahun 2024	Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh SKPD pada Tahun Anggaran 2024</li> </ul>
20.	Menyelesaikan Piutang Daerah	Keputusan Bupati Temanggung Nomor 973/365 Tahun 2023 Tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2009-2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piutang PBB Limpahan dari KPP Pratama tahun 2013 selama ini mengganggu Neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung. dimana dokumen yang digunakan untuk melakukan penagihan tidak ada sehingga realisasi atas piutang yang terjadi tidak bisa maksimal. tahun 2022 kita melakukan penghapusan piutang pbb limpahan dari kpp pratama atas masa pajak tahun 2005-2008.</li> </ul>

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
21.	Penerima Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar Tahap I	Keputusan Bupati Temanggung Nomor 422.5/185 Tahun 2023 Tentang Penerimaan Bantuan Sosial Siswa Miskin Sekolah Dasar Tahap I Kabupaten Temanggung Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengurangi beban masyarakat miskin di bidang Pendidikan dan menanggulangi anak usia sekolah tidak dan atau putus sekolah</li> </ul>
22.	Penerima Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar Tahap II	Keputusan Bupati Temanggung Nomor 422.5/328 Tahun 2023 Tentang Penerimaan Bantuan Sosial Siswa Miskin Sekolah Dasar Tahap II Kabupaten Temanggung Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengurangi beban masyarakat miskin di bidang Pendidikan dan menanggulangi anak usia sekolah tidak dan atau putus sekolah</li> </ul>
23.	Penerima Bantuan Siswa Inklusi Sekolah Dasar Tahap I	Keputusan Bupati Temanggung Nomor 422.5/184 Tahun 2023 Tentang Penerimaan Bantuan Sosial Siswa Inklusi Sekolah Dasar Tahap I Kabupaten Temanggung Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengurangi beban masyarakat dengan anak berkebutuhan khusus di bidang Pendidikan, sehingga dapat memperoleh Pendidikan dasar layak</li> </ul>
24.	Penerima Bantuan Siswa Inklusi Sekolah Dasar Tahap II	Keputusan Bupati Temanggung Nomor 422.5/325 Tahun 2023 Tentang Penerimaan Bantuan Sosial Siswa Inklusi Sekolah Dasar Tahap II Kabupaten Temanggung Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengurangi beban masyarakat dengan anak berkebutuhan khusus di bidang Pendidikan, sehingga dapat memperoleh Pendidikan dasar layak</li> </ul>
25.	Penerima Bantuan Siswa Miskin Sekolah Menengah Pertama Tahap I	Keputusan Bupati Temanggung Nomor 422.5/147 Tahun 2023 Tentang Penerimaan Bantuan Sosial Siswa Miskin Sekolah Dasar Tahap I Kabupaten Temanggung Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengurangi beban masyarakat miskin di bidang Pendidikan dan menanggulangi anak usia sekolah tidak dan atau putus sekolah</li> </ul>
26.	Penerima Bantuan Siswa Miskin Sekolah Menengah Pertama Tahap II	Keputusan Bupati Temanggung Nomor 422.5/308 Tahun 2023 Tentang Penerimaan Bantuan Sosial Siswa Miskin Sekolah Dasar Tahap II Kabupaten Temanggung Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengurangi beban masyarakat miskin di bidang Pendidikan dan menanggulangi anak usia sekolah tidak dan atau putus sekolah</li> </ul>

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
27.	Penerima Bantuan Siswa Miskin Sekolah Menengah Pertama yang akan Melanjutkan ke Jenjang Sekolah Menengah Atas/ sederajat	Keputusan Bupati Temanggung Nomor 422.5/151 Tahun 2023 Tentang Penerimaan Bantuan Sosial Siswa Miskin Sekolah Menengah Pertama yang akan Melanjutkan ke Jenjang Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahap I Kabupaten Temanggung Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengurangi beban masyarakat miskin di bidang Pendidikan dan menanggulangi anak usia sekolah tidak dan atau putus sekolah</li> </ul>
28.	Penerima Bantuan Siswa Miskin Sekolah Menengah Pertama yang akan Melanjutkan ke Jenjang Sekolah Menengah Atas/ sederajat	Keputusan Bupati Temanggung Nomor 422.5/320 Tahun 2023 Tentang Penerimaan Bantuan Sosial Siswa Miskin Sekolah Menengah Pertama yang akan Melanjutkan ke Jenjang Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahap II Kabupaten Temanggung Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengurangi beban masyarakat miskin di bidang Pendidikan dan menanggulangi anak usia sekolah tidak dan atau putus sekolah</li> </ul>
29.	Pelaksanaan <i>e-purchasing</i> pada Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kabupaten Temanggung	Instruksi Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan <i>e-purchasing</i> pada Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kabupaten Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan P3DN</li> <li>• Mengoptimalkan UMKK</li> <li>• Menggerakkan ekonomi lokal</li> <li>• Menekan inflasi daerah</li> </ul>

### 3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN 2022

Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Temanggung terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6

#### TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2022

NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
1.	Capaian IPM sebesar 70,77 nilainya masih dibawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 rerata 72,79 artinya Kabupaten Temanggung termasuk penyumbang IPM rendah di Jawa Tengah.	Agar Pemerintah Daerah melakukan Langkah-langkah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dasar penunjang percepatan peningkatan indikator IPM. 1.Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui arah kebijakan reformasi pelayanan Pendidikan.	Langkah-langkah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dasar penunjang percepatan peningkatan indikator IPM bidang Pendidikan adalah sebagai berikut: 1. Pemanfaatan aplikasi Dapodik untuk peningkatan pemerataan pelayanan Pendidikan 2. Pemenuhan SPM Pendidikan melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik dengan kegiatan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, pemanfaatan platform merdeka belajar</li> <li>• Pemenuhan partisipasi dan pemerataan peserta didik dengan kegiatan pendataan anak usia sekolah tidak sekolah, gerakan kembali ke sekolah,</li> </ul>	Meningkatkan capaian IPM bidang pendidikan

NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<p>memberian beasiswa peserta didik dari keluarga tidak mampu, kajian daerah/area blank spot untuk memetakan daerah yang tidak terjangkau layanan pendidikan, pemetaan dan penataan rombongan belajar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan dengan kegiatan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan dan pemerataan/distribusi guru, pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana Pendidikan serta gerakan anti bullying di satuan pendidikan.</li> <li>4. Pemenuhan SPM menyesuaikan dengan kapasitas keuangan urusan pemerintahan bidang Pendidikan</li> <li>5. Perencanaan dan penganggaran dengan mendasarkan pada sub kegiatan prioritas SPM</li> <li>6. Implementasi Rapor Pendidikan untuk perencanaan dan pemerataan layanan pendidikan</li> <li>7. melaksanakan penyusunan Peraturan Bupati terkait Pedoman pelaksanaan SPM Pendidikan yang relevan dengan kondisi di Kabupaten Temanggung.</li> </ol>	

NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
		2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui kebijakan reformasi pelayanan kesehatan yang menyeluruh	<p>Langkah-langkah dalam peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan antara lain:</p> <p>1. Melaksanakan kegiatan pembangunan gedung kegawatdaruratan kesehatan (PSC 119); Renovasi gedung persalinan Puskesmas; renovasi dan rehabilitasi Puskesmas serta Puskesmas Pembantu. Pengadaan kegiatan penguatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dengan peningkatan kapasitas kader "Jambore Kader" dan "Aksi Bergizi" untuk SBH/BKR.</p> <p>2. Sosialisasi pelaksanaan Rekam Medis Elektronik (RME) di seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Temanggung dengan berdasarkan pada SK Bupati Temanggung Nomor: 440/ 426 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Puskesmas Kabupaten Temanggung.</p> <p>Koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika terkait penyelenggaraan RME di Puskesmas, dan tahun 2023 masih dalam proses pengembangan sistem.</p>	<p>1. Akses dan mutu pelayanan fasilitas kesehatan primer semakin meningkat dan sarana prasarana yang ada sesuai dengan standar Permenkes. Adanya penguatan UKBM yaitu adanya peningkatan Posyandu dari 1.521 menjadi 1.525 dan terdapat peningkatan jumlah kader kesehatan dari 8.642 menjadi 8.897.</p> <p>2. Kebijakan terkait pelaksanaan RME tersosialisasikan dan proses pengembangan sistem RME terus berjalan</p>

NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			3. Penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dengan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan pembayaran iuran dari dana yang bersumber dari DBHCHT dan pajak rokok	4. Peningkatan cakupan <i>Universal Health Coverage</i> (UHC) Kabupaten Temanggung dari 81,01% (2022) menjadi 95,44% (2023).
			4. Pelaksanaan akreditasi 26 Puskesmas di Kabupaten Temanggung dengan sumber dana DBHCHT dan DAK Non Fisik	4. Dari 26 Puskesmas di Kabupaten Temanggung sudah terakreditasi.
			5. Pelaksanaan pelatihan penunjang bagi SDM Kesehatan antara lain pelatihan manajemen Puskesmas; USG; Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Pandu-PTM); Infeksi Laten Tuberkolosis (IL-TB) dan lainnya	5. Ketersediaan 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas telah terpenuhi namun rasio tenaga kesehatan belum sesuai standar.
			Upaya yang dilakukan dalam peningkatan AHH antara lain : 1. Pertemuan AMP; 2. Pertemuan pendampingan bumil risti; 3. workshop skrening layak hamil; 4. Pendampingan tim ahli ke Puskesmas; 5. Kaji tiru telemedicine; 6. Gerakan bersama "Jo Kawin Bocah® untuk pencegahan stunting; 7. pemberian PMT lokal untuk penanganan stunting; 8. advokasi terhadap desa penolak imunisasi.	AHH di Kabupaten Temanggung meningkat dari 75,70 (2022) menjadi 75,77 (2023); AKI menurun 75,32 per 100.000 kelahiran hidup (2022) menjadi 44,96 per 100.000 kelahiran hidup (2023); penurunan AKB dari 13,23 per 1000 kelahiran hidup menjadi 13,04 per 1000 kelahiran hidup; 289 desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung UCI; dan peningkatan kepemilikan jamban keluarga di masyarakat



NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			9. pengadaan jamban sehat yang bersumber dana DAU sebanyak 18 buah dan pembangunan jamban sebanyak 300 buah dari BAZNAS.	
		3.Peningkatan daya beli masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang lebih fokus.	<p>Peningkatan daya beli masyarakat dilakukan dengan melakukan perluasan peluang dan kesempatan kerja bagi penduduk usia kerja. Upaya yang dilakukan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penguatan jejaring dengan HRD perusahaan dengan memfasilitasi rekrutmen sebanyak 22 kali selama tahun 2023, dan 679 orang penduduk usia kerja telah ditempatkan.</li> </ol> <p>Sedangkan Peningkatan ekonomi sektor pertanian dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil pertanian sudah dilaksanakan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian seperti pembangunan /rehabilitasi jaringan irigasi tersier Tahun 2023 sebanyak 53 titik untuk mengairi minimal 1.325 Hektar sebagai upaya untuk mempertahankan produksi pertanian</li> </ol>	Percepatan peningkatan indikator IPM bidang ketenagakerjaan

NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
2.	Capaian Misi Daerah berdasarkan indikator tujuan misi kedua yaitu tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dengan indikator ketimpangan pendapatan tidak mencapai targetnya (dimana dalam RKPD target ketimpangan pendapatan tahun 2022 sebesar 18,5% realisasinya hanya 18,4 %.	Agar Pemerintah Daerah menganalisis penyebab indikator tujuan tidak mencapai target, selanjutnya penyebab tersebut menjadi dasar arah kebijakan pada perencanaan dan anggaran tahun perubahan RKPD 2023 dan RKPD tahun 2024. Dengan demikian hal yang sama tidak terulang pada tahun 2023 sebagai tahun akhir RPJMD. Sesuai RPJMD target ketimpangan pendapatan tahun 2023 (sebagai tahun akhir RPJMD) sebesar 18,70%.	<p>Upaya untuk meningkatkan capaian pada indikator tujuan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan informasi lowongan kerja yang ada di luar daerah</li> <li>2. Menyebarluaskan informasi lowongan kerja secara online dan offline serta memfasilitasi proses rekrutmen (untuk pemberi kerja dan pencari kerja) di Kantor Dinperinaker.</li> <li>3. Membentuk wirausaha baru melalui penyelenggaraan pelatihan bagi pencari kerja</li> </ol> <p>Upaya Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan penilaian individu atas objek tertentu terutama untuk pabrik dan usaha besar seperti SPBU</li> <li>2. Pendataan atas wajib pajak baru baik dari sektor pajak restoran, pajak parkir, pajak hotel, dan pajak hiburan terus diupayakan maksimal di tahun 2023</li> <li>3. Melakukan Rekonsiliasi dengan Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan sehingga targetnya dapat tercapai</li> </ol>	Ketimpangan pengeluaran tahun 2023 sebesar 19,52% melebihi target akhir RPJMD (18,70%).

NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			1. Menetapkan Perbup Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Sewa Los, Kios dan Pertokoan Pasar Daerah	Meningkatkan pendapatan daerah dari sewa los/kios pasar
			2. Sosialisasi Rancangan Peraturan Bupati dilakukan di masing-masing Pasar Daerah sebelum ditanda tangani	Tujuan dilaksanakannya sosialisasi rancangan Peraturan Bupati sebelum tanda tangan adalah memberikan gambaran kepada pedagang terkait mekanisme dan tarif sewa agar tercapai kesepakatan antara pemerintah dan pedagang pasar
			3. Sosialisasi Perbup Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Sewa Los, Kios dan Pertokoan Pasar Daerah - 18 Desember 2023 di Ruang Loka Bakti Praja Sekretariat Daerah, peserta paguyuban pedagang pasar Parakan dan Candioto - 20 Desember 2023 di Pasar Legi Parakan, peserta Paguyuban pedagang pasar legi parakan - 22 Desember 2023 di Pasar Candioto, peserta Paguyuban Pedagang Pasar Candioto - 27 Desember 2023 di Pasar Ngadirejo, peserta Paguyuban Pedagang Pasar Ngadirejo	Memberikan pelayanan yang lebih luas hingga ke tingkat desa/ kelurahan

NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			4. Peraturan Bupati sudah disahkan, dan sudah dilakukan sosialisasi kepada Paguyuban Pedagang. Saat ini sudah dalam tahap pendaftaran calon penyewa	Meningkatkan pendapatan daerah dari sewa los/kios pasar
			5. pelayanan tera/tera ulang baru bisa melayani di tingkat kecamatan belum sampai ke desa/kelurahan	Memberikan pelayanan yang lebih luas hingga ke tingkat desa/ kelurahan
			Langkah-langkah dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di sektor pertanian antara lain: a. peningkatan kuantitas dan kualitas hasil pertanian dan b. menjaga stabilitas harga panen komoditas pertanian.	Peningkatan pemerataan pendapatan penduduk tahun 2023 ditandai dengan peningkatan distribusi pengeluaran berdasarkan Bank Dunia yaitu dari 18,46% menjadi 19.52%, dan penurunan angka gini rasio dari 0,37 menjadi 0,359.

NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
3.	Capaian Misi Daerah berdasarkan Indikator sasaran. Dari 53 indikator, tercapai 37 indikator sasaran dan 16 indikator sasaran tidak tercapai.	- <b>Agar program dan kegiatan yang menunjang tercapainya target kinerja tersebut pada tahun anggaran 2023 dapat dipertahankan dan ditingkatkan, melalui perumusan arah kebijakan yang lebih fokus dan terukur serta di dukung alokasi anggaran yang cukup dan memadai.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1305 256 1809 451">1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan DPA yang ditetapkan mengacu pada Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan APBD</li> <li data-bbox="1305 451 1809 646">2. Evaluasi internal terhadap indikator kinerja per triwulan dan melakukan upaya perbaikan terhadap indikator yang masih rendah/belum tercapai</li> <li data-bbox="1305 646 1809 824">3. Asistensi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan agar sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan</li> <li data-bbox="1305 824 1809 950">4. Menindaklanjuti hasil review RKA oleh inspektorat</li> </ol>	Meningkatkan capaian Indikator Kinerja

NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p>- Atas 16 indikator sasaran tahun 2022 yang tidak tercapai targetnya agar Pemerintah Daerah melakukan analisis penyebab berbagai <b>indikator sasaran yang tidak mencapai targetnya. Selanjutnya penyebab tersebut menjadi dasar arah kebijakan perangkat daerah pada perencanaan dan anggaran tahun perubahan RKPD 2023. Dengan demikian hal yang sama tidak terulang pada tahun 2023</b></p>	<p>Strategi yang dilakukan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat Daerah menentukan strategi, inovasi, sinergitas, harmonisasi dan sinkronisasi antar stakeholder terkait untuk pencapaian target akhir RPJMD sehingga bisa tercapai 100%;</li> <li>2. Perangkat Daerah melakukan percepatan kegiatan dan inovasi agar indikator yang masih berstatus Upaya Keras dapat tercapai 100 % kinerjanya pada akhir Tahun 2023;</li> <li>3. Perangkat daerah melakukan evaluasi untuk dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada baik SDM maupun anggaran untuk dapat lebih memprioritaskan indikator kinerja yang belum tercapai dan tetap mempertahankan capaian indikator yang sudah sesuai dengan target</li> <li>4. OPD melakukan evaluasi indikator kinerja yang menjadi tugas nya dalam bentuk mengkaji metode pengitungan dan sumber data yang ada agar di masa mendatang dapat dilakukan perbaikan dan pembaharuan target indiktor tersebut</li> <li>5. Melaksanakan desk pada Indikator yang masih berstatus Upaya Keras secara rutin dan atau sesuai kebutuhan</li> </ol>	<p>Capaian target kinerja yang statusnya masih belum memenuhi target RPJMD, sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 telah mencapai target yang ditentukan</p>

NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan informasi lowongan kerja yang ada di luar daerah</li> <li>2. Menyebarluaskan informasi lowongan kerja secara online dan offline serta memfasilitasi proses rekrutmen (untuk pemberi kerja dan pencari kerja) di Kantor Dinperinaker.</li> <li>3. Membentuk wirausaha baru</li> </ol>	Penyerapan Tenaga Kerja
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi SDM yang ada yaitu PKB dan kader IIMP selaku pelaksana langsung kegiatan yang nesumner DAK yang ada dilini lapangan</li> </ol>	- Untuk meningkatkan partisipasi dan topoksi IIMP dalam kegiatan Bangga kencana untuk mencapai target dengan upaya keras yaitu peningkatan pelayanan KB MKJP
			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Rancangan Perda tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</li> </ol>	- Pengendalian penduduk bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk dan lingkungan hidup baik yang berupa Daya Dukung Alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi sosial, ekonomi dan budaya
			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Rancangan Perda tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</li> </ol>	Memberikan pembekalan kepada kader tentang program Bangga kencana di lini lapangan dalam rangka pencapaian target kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan KB
			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Jambore IMP yang dihadiri oleh PPKBD dan Sub PPKBD seuruh kabupaten Temanggung</li> </ol>	- Membentuk satgas GSI tingkat Desa dalam rangka capaian target kinerja presentase Desa Sayang ibu dan bayi

NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<p>Koordinasi dengan BPS dan Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM untuk pemenuhan data ekspor impor komoditas pertanian sebagai komponen perhitungan, namun data tersebut belum tersedia karena belum dilakukan pendataan, sehingga dalam perhitungan menggunakan angka estimasi bukan angka riil.</p> <p>1. Evaluasi internal setiap 3 bulan sekali dengan melibatkan semua PPTK</p> <p>2. Pendampingan, serta monitoring evaluasi kepada PPID Pelaksana Badan Publik dilakukan 3 kali dalam setahun dengan prioritas bagi PPID Pelaksana yang ditunjuk mengikuti pemeringkatan keterbukaan badan publik</p> <p>komunikasi dengan BPS melalui surat permohonan pemisahan indikator sektor pariwisata, dimana sebelumnya sektor pariwisata masuk di indikator lain-lain dalam penilaian PDRB .</p>	<p>Optimalisasi program dan kegiatan yang menunjang tercapainya target kinerja pada tahun anggaran 2023 dapat dipertahankan dan ditingkatkan, melalui perumusan arah kebijakan yang lebih fokus dan terukur</p> <p>menganalisis penyebab berbagai indikator sasaran yang targetnya tidak tercapai agar tidak terulang pada tahun berikutnya</p> <p>1. Optimalisasi pencapaian target kegiatan agar tercapai lebih awal dari waktu yang direncanakan</p> <p>2. Meningkatkan peran aktif PPID badan publik dalam pengelolaan dan layanan keterbukaan informasi publik</p> <p>Tujuan dari pemisahan sektor pariwisata dengan sektor lain-lain adalah untuk meningkatkan penilaian sektor pariwisata terhadap PDRB.</p>



NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1290 256 1821 451">1. Telah dilakukan kolaborasi kinerja seluruh OPD di Kabupaten Temanggung untuk menghasilkan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li data-bbox="1290 451 1821 662">2. Telah dilakukan koordinasi dalam menyampaikan /mengunggah data ke sistem. Dalam menyajikan data yang digunakan untuk penilaian indeks tersebut melibatkan beberapa OPD</li> <li data-bbox="1290 662 1821 857">1. Telah dilakukan Rapat-rapat untuk meningkatkan koordinasi dan menganalisa kelemahan-kelemahan yang menjadi penyebab tidak tercapainya indikator tersebut</li> <li data-bbox="1290 857 1821 1084">2. Telah dilakukan penilaian dengan hasil penilaian tergantung dengan nilai yang dicapai daerah lain sehingga patokan nilai setiap tahun selalu berubah, namun demikian berbagai upaya dalam menyajikan data yang lebih tepat waktu telah dilakukan di Tahun 2023.</li> <li data-bbox="1290 1084 1821 1263">3. Telah dilakukan evaluasi untuk tahun-tahun berikutnya tim akan menganalisis target capaian sesuai dengan data yang secara logis dapat memenuhi target IPKD.</li> <li data-bbox="1290 1263 1821 1416">4. Ketepatan waktu menjadi prioritas tim dalam menyajikan data, meskipun ada beberapa data yang masih belum terpenuhi ketepatan waktunya.</li> </ol>	<p data-bbox="1821 256 2327 435">Nilai IPKD Kabupaten Temanggung meningkat dari 62,749 di Tahun 2022 menjadi 68,089 di Tahun 2023, meskipun masih berpredikat perlu perbaikan.</p>

NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<p>Dengan ditetapkannya Keputusan KASN nomor 55/KEP.KASN/C/VII/2023 pada tanggal 12 Juli 2023 Indikator sasaran indeks sistem merit telah melebihi target yaitu sebesar 0,62 Langkah-langkah yang telah dilakukan:</p> <p>1)Telah mengirimkan 8 Peiabat Administrator untuk mengikuti asesmen bekerja sama dengan assesment center Polri pada tanggal 19 Oktober 2023.</p> <p>2)BKPSDM bekerja sama dengan Dinkominfo telah mengembangkan aplikasi Sinta Merit sehingga saat ini pada aplikasi tersebut dapat terlihat profil pegawai pada kotak manajemen talenta.</p> <p>3)BKPSDM bekerja sama dengan Dinkominfo telah mengembangkan aplikasi penilaian kinerja 360°. Selain itu juga telah menggunakan aplikasi e-kinerja BKN dalam penilaian kinerja, sehingga lebih meningkatkan penerapan sistem merit dalam aspek manajemen kinerja.</p>	<p>1) Dengan mengirimkan 8 Pejabat Administrator untuk mengikuti asesmen berdampak pada bertambahnya jumlah pegawai yang terpetakan talenta dan pola karirnya. Hal ini meningkatkan penerapan sistem merit terutama Aspek Pengembangan Karir dan Aspek Promosi dan Mutasi</p> <p>2) Aplikasi Sinta Merit mempermudah dan mempercepat untuk melihat profil pegawai berdasarkan manajemen talenta, profil talenta in sebagai bahan pertimbangan dalam aspek pengembangan karir dan aspek promosi mutasi.</p> <p>3) Penilaian kinerja 360° menjadi parameter pada pemetaan talenta di samping penilaian SKP. Dengan menambah instrumen penilaian kinerja 360° menjadikan nilai kinerja menjadi lebih realistis dan sesuai dengan kinerja pegawai sehingga pemetaan talenta menjadi lebih valid. Hal tersebut meningkatkan penerapan sistem merit, terutama dalam Aspek Manajemen Kinerja, aspek pengembangan karir dan aspek promosi mutasi.</p>

NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<p>4)BKPSDM telah menyusun draft Peraturan Bupati Temanggung tentang Kesejahteraan, Pemberian Bantuan Hukum, dan Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Peraturan Bupati tersebut telah diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2023 nomor 25 tahun 2023</p> <p>Telah dilakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Perangkat Daerah terkait, Bagian Hukum Setda, Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah terkait harmonisasi Perda serta adanya pendampingan dengan tenaga ahli maupun dari Kementerian Hukum dan HAM terkait Raperda yang akan diajukan dari Perangkat Daerah</p>	<p>4) Dengan terbitnya Peraturan Bupati Temanggung tentang Kesejahteraan, Pemberian Bantuan Hukum, dan Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, Pemerintah Kabupaten Temanggung memiliki dasar dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan Kesejahteraan, Pemberian Bantuan Hukum, dan Penghargaan ASN</p> <p>Tercapainya indikator kinerja Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu sesuai target yang telah ditentukan</p>

NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<p>Telah dilakukan koordinasi dengan BAPPEDA terkait capaian indikator sasaran Nilai EPPD pada tahun 2023 berdasarkan penilaian terhadap LPPD tahun 2022. Nilai LPPD Kabupaten Temanggung Pada tahun 2022 mempunyai skor 3,4340 dengan status tinggi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7.6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022 yang dikeluarkan tanggal 21 Desember 2023</p>	<p>Meningkatnya capaian indikator sasaran menjadi 98,00% pada tahun 2023</p>
			<p>1. Cascading kinerja yang telah diperbaiki sudah diakomodir ke dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026</p>	<p>1. Tujuan/sasaran Perangkat Daerah telah berorientasi hasil dengan indikator yang memenuhi aspek SMART (<i>Spesific, Measurabel, Achievabel, Relevance, Time bound</i>)</p>
			<p>2. Telah dilakukan sosialisasi terkait penyusunan PK individu kepada semua pengampu perencanaan PD untuk disampaikan kepada semua pegawai</p>	<p>2. Semua pegawai telah memiliki PK yang selanjutnya sebagai dasar penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)</p>
			<p>3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai pedoman dari Inspektorat dalam melakukan evaluasi internal</p>	<p>3. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah memiliki pedoman evaluasi Internal sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021</p>

NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			4. Telah dilakukan fasilitasi dalam penyusunan LKjIP Perangkat Daerah	4. Penyusunan pelaporan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan sistematika yang ada
4.	<p>Capaian kinerja keuangan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi Pendapatan daerah tahun 2022 tidak mencapai target atau kurang dari target sebesar Rp24,192 Milyar lebih, atau ter-realasai sebesar 98,7% dari target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2022.</li> <li>- Dana Insentif Daerah (DID) secara nominal selama tiga tahun terakhir perolehannya terus menurun bahkan tahun 2023 nihil.</li> </ul>	<p>Agar Pemerintah Daerah melakukan perbaikan manajemen keuangan daerah dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Digitalisasi perpajakan daerah dan retribusi pada tataran pemungutan hingga pelaporan menjadi prioritas demi meningkatkan penerimaan PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).</li> </ol>	<p>Telah dilakukan kerja sama dengan Bank Jateng untuk tidak menerima pembayaran pajak dan retribusi secara manual. sehingga mau tidak mau akhirnya perangkat daerah yang melakukan transaksi penyetoran pendapatan harus menggunakan sts online agar dapat dihasilkan kode bayar. Tahun 2023 seluruh transaksi pajak daerah dan retribusi daerah sudah tidak menggunakan STS Manual.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kode bayar tidak hanya digunakan untuk pajak dan retribusi saja, akan tetapi melebar ke beberapa pos pendapatan lain-lain seperti pos rekening tuntutan ganti rugi, hasil penyediaan infrastruktur. dimana dengan dibuatkan kode bayar maka akan memudahkan tahap selanjutnya yaitu pelaporan pendapatannya.</li> <li>- kode bayar yang telah dibuat akan secara otomatis membentuk laporan dan membentuk alat kendali buat perangkat daerah pengelola pendapatan yang dapat mengetahui secara real time apakah kode bayar yang telah dibuat sudah terbayar atau belum.</li> </ul>	<p>Digitalisasi Pendapatan Daerah dimulai dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mempermudah pemungutan dan pelaporannya, bahkan mulai merambah ke sektor Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan harapan penggunaan kode bayar untuk berbagai macam sektor Pendapatan Asli Daerah akan mempermudah pengawasannya</p>

NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<p>Disamping itu kode bayar telah terintegrasi dengan bidang perbendaharaan dan akuntansi (aplikasi e-keuangan) dimana dari data kode bayar yang telah dibuat ketika sudah berstatus lunas maka akan secara otomatis dilakukan pemindahbukuan ke RKUD dan saat itu terposting data ke aplikasi e-keuangan</p>	
		<p>2. Bekerja lebih keras untuk peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar derajat Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten Temanggung meningkat dengan fokus kebijakan intensifikasi perpajakan dan retribusi serta memperkuat sistem pengawasan dari sisi administrasi untuk menghindari kebocoran potensi pendapatan daerah.</p>	<p>Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak untuk Perumahan yang ada di Kabupaten Temanggung sehingga mendekati angka real harga NJOP Perumahan.</li> <li>- penilaian individu atas obyek tertentu terutama untuk pabrik dan usaha besar seperti SPBU.</li> <li>- Pendataan atas wajib pajak baru baik dari sektor pajak restoran, pajak parkir, pajak hotel dan pajak hiburan terus kita upayakan maksimal di tahun 2023</li> <li>- rekonsiliasi dengan Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan sehingga target mereka bisa tercapai semua hal diatas kita lakukan dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan akan terus kita maksimalkan prosesnya</li> </ul>	<p>Digitalisasi Pendapatan Daerah dimulai dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mempermudah pemungutan dan pelaporannya, bahkan mulai merambah ke sektor Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan harapan penggunaan kode bayar untuk berbagai macam sektor Pendapatan Asli Daerah akan mempermudah pengawasannya</p>

NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<p>untuk meningkatkan DID adalah memenuhi kriteria pemberian DID secara maksimal. BPKPAD berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang prima agar mendapatkan alokasi DID yang maksimal. BPKPAD Kabupaten Temanggung juga melakukan upaya untuk memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah berupa khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Langkah intensifikasi dan ekstensifikasi terus dilakukan. Beberapa langkah strategis yang sudah dilaksanakan untuk memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah sektor pajak daerah dan retribusi daerah adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang merupakan Dasar Pengenaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) agar merepresentasikan Nilai Jual Tanah dan/atau Bangunan yang sebenarnya;</li> <li>2) Penilaian individu dan pemutakhiran terhadap objek pajak yang memiliki potensi tinggi (seperti pabrik dan SPBU);</li> <li>3) Upaya ekstensifikasi berupa pendataan wajib pajak daerah yang potensial seperti wajib pajak restoran, wajib pajak hotel, wajib pajak parkir, wajib pajak air tanah, dan wajib pajak hiburan;</li> </ol>	

NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			4) Rekonsiliasi pendapatan antara BPKPAD dan OPD Pengelola Retribusi agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang prudent.	
		3. Optimalisasi pengelolaan aset dan kekayaan daerah. Hal ini difokuskan pada pemanfaatan aset dan kekayaan daerah untuk diversifikasi usaha.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dilakukan pembaharuan perjanjian sewa</li> <li>2. Sudah dibuat surat pemberitahuan apabila masih akan dimanfaatkan untuk mengajukan permohonan perpanjangan sewa</li> <li>3. Telah dilakukan pendataan kembali terhadap pemanfaatan sewa tanah milik Pemda</li> </ol>	Terlaksananya pemanfaatan aset Pemerintah Daerah dengan cara sewa
		Mengupayakan peningkatan kinerja pemerintah daerah dengan menyusun Langkah-langkah strategis (Rencana Aksi Daerah) dalam upaya meningkatkan peluang mendapatkan reward dari pemerintah pusat dalam bentuk Insentif fiskal.	BPKPAD selaku SKPKD telah berupaya penuh agar Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 akan mendapatkan Opini WTP, Opini dari BPK untuk Periode Laporan Keuangan Tahun 2023 akan dikeluarkan pada Tahun 2024	Tercapainya Opini WTP dari BPK atas LKPD Tahun 2023



NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<p>Telah dilakukan Pendampingan penyusunan APBD kepada OPD dan terus dilakukan untuk menjaga agar Penetapan APBD maupun Perubahan APBD tepat waktu. Pemenuhahi anggaran program dan kegiatan yang masuk dalam penilaian guna memperoleh Dana Insentif Fiskal (DID).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan APBD dan Perubahan APBD tepat waktu</li> <li>- Memperoleh Insentif Fiskal (DID)</li> </ul>
			<p>a. Bagian PBJ Telah melaksanakan sosialisasi dan pendampingan ke seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung</p>	<p>a. Penyamaan Persepsi Pelaku Pengadaan dalam Persiapan Perencanaan dari OPD dan kebijakan dari masing masing kepala OPD dalam pelaksanaan kegiatan.</p>
			<p>b. Bagian PBJ telah melaksanakan Desk pencatatan non tender, pencatatan swakelola dan Pencatatan Realisasi P3DN untuk semua Stakeholder Perangkat Daerah Temanggung</p>	<p>b. Optimalisasi Kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pencatatan non tender, pencatatan swakelola dan Pencatatan Realisasi P3DN</p>
			<p>c. Inventarisasi Pelaku Usaha langganan dari Perangkat Daerah dan Bagian PBJ melakukan Pendampingan terkait tata cara pendaftaran di Katalog</p>	<p>c. Memaksimalkan informasi ke Pelaku Usaha dalam pelaksanaan belanja ePurchasing melalui Katalog Lokal Temanggung</p>

NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<p>Telah digunakan SIPD dalam penyusunan APBD maupun APBD guna memastikan tersusunnya APBD dan Perubahan APBD secara terstruktur, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.</p>	<p>Tersusunnya APBD dan Perubahan APBD sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku</p>
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggaran yang telah digunakan untuk pelaksanaan MPP di Kabupaten Temanggung. Pembangunan :Rp. 2.596.770.000,00 dan Sarana prasarana : Rp. 323.400.000,00</li> <li>2. progres kegiatan telah dilaksanakan tandatangan kontrak Pada tanggal 31 Januari 2024 selesai pada akhir mei 2024</li> </ol>	<p>Optimalisasi kegiatan agar dapat berjalan sesuai dengan perencanaan</p>
			<p>Telah digunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung mulai tahun 2019-2023 menggunakan e-Keuangan berbasis web online, dan terus dilakukan perkembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Tercapainya Sistem Informasi Keuangan Daerah yang mudah diakses serta mewujudkan transparansi dan akuntabel.</p>

NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			Peningkatan pelayanan dasar publik dilakukan dengan peningkatan partisipasi sekolah untuk seluruh jenjang pendidikan, melalui kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerataan sarpras Pendidikan</li> <li>2. Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan</li> <li>3. Peningkatan kualitas pendidik</li> <li>4. Bantuan pendidikan bagi siswa miskin dan inklusi</li> </ol>	Peningkatan APM pada jenjang Pendidikan SD, SLTP, dan SLTA sederajat, yaitu APM SD sebesar 99,94 persen, APM SLTP sebesar 75,81 persen dan APM SLTA sebesar 57,26 persen.
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Peraturan Bupati dan menyusun SOP terkait PPDB</li> <li>2. Melaksanakan desk perbaikan data pada seluruh satuan Pendidikan yang terdaftar dalam dapodik</li> </ol>	Peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan peluang mendapatkan reward dari pemerintah pusat dalam bentuk Insentif fiskal.
			Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan/ mempertahankan capaian imunisasi dan mutu pelayanan imunisasi pada balita (imunisasi bayi dan baduta) antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bimbingan teknis kepada Puskesmas dalam upaya peningkatan cakupan imunisasi; pencatatan pelaporan dengan melibatkan fasilitas kesehatan swasta penyedia pelayanan imunisasi dan pelaksanaan monev fasilitas kesehatan.</li> <li>b. Melaksanakan imunisasi kejar oleh petugas puskesmas pada anak usia balita yang belum lengkap imunisasinya</li> </ol>	Cakupan Desa UCI sudah 100% yang artinya 80% dari jumlah bayi yang ada di 289 Desa/ Kelurahan di Kabupaten Temanggung sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun IDL sudah mencapai target > 95%

NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<p>c. Telah diberangkatkan 16 bidard/perawat programmer imunisasi puskesmas untuk ikut pelatihan program imunisasi dari sumber anegaran DAK NF dan 2 orang programmer imdrisasi DKK darl anggaran</p> <p>d. Penentuan dan pencatatan suhu penyimpanan vaksin baik di DKK dan di Puskesmas sesuai stndar EVM,; dan pengelolaan vaksin yang benar dengan penerapan SOP pelayanan.</p> <p>e. Sosialisasi vaksin antigen baru kepada kader, kepada OPD lain pada rapat koordinasi program imunisasi dan rapat koordinasi bidang P2P.</p>	
			<p>Langkah-langkah yang dilakukan untuk menunjang cakupan kegiatan Persalinan di Fasilitas Kesehatan adalah:</p> <p>a. Pendampingan tim ahli ke Puskesmas;</p> <p>b. Pengadaan alat kegawatdaruratan bayi risiko tinggi dan pendeteksian risiko tinggi ibu hamil dan bayi</p> <p>c. Pelaksanaan supervisi dan fasilitasi ke BPM;</p> <p>d. Sosialisasi Puskesmas mampu tatalaksana persalinan normal;</p> <p>e. Meningkatkan kerjasama dengan kader dan tokoh masyarakat</p> <p>f. Monev tribulanan ke Puskesmas</p>	<p>100% ibu bersalin melaksanakan persalinan di fasilitas kesehatan</p>

NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<p>Langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan akses sanitasi layak adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Readinnes criteria yang dipersyaratkan oleh kementerian PUPR selaku pengusul Loan sudah di penuhi 100%;</li> <li>b. mengusulkan melalui DAK Bidang Sanitasi untuk Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS) bagi keluarga yang belum memiliki jamban keluarga yang masuk dalam keluarga stunting dan MBR</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Masih menunggu kesepakatan Loan pemerintah dengan Lander</li> <li>b. meningkatkan akses kepemilikan jamban bagi keluarga stunting dan warga Masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR)</li> </ol>
			<p>Persentase cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum di Triwulan IV Tahun 2023 telah mencapai target dengan capaian 95,95%</p> <p>Tercapainya target tersebut didukung dengan anggaran program sebesar Rp. 10.384.815.000,00 yang dilaksanakan dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan;</li> <li>b. Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan;</li> <li>c. Fasilitasi Penyiapan Kerjasama SPAM.</li> </ol>	<p>Tercapainya penilaian Indikator kinerja pada penilaian Indikator Dana Insentif Daerah (DID)</p>

NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<p>Telah dilakukan Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Juga Kementerian Dalam Negeri terkait hasil Penilaian EPPD tahun 2021, dan sudah terjadi peningkatan nilai EPPD pada tahun 2022</p>	<p>Mengantisipasi perolehan Nilai EPPD agar tidak terjadi penurunan kualitas/peringkat</p>
			<p>a. Cascading kinerja yang telah diperbaiki sudah diakomodir kedalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026</p>	<p>a. Tujuan/ sasaran Perangkat Daerah telah berorientasi hasil dengan indikator yang memenuhi aspek SMART (<i>Specific, Measurabel, Achievabel, Relevance</i>)</p>
			<p>b. Telah dilakukan sosialisasi terkait penyusunan PK individu kepada semua pengampu perencanaan PD untuk disampaikan kepada semua pegawai</p>	<p>b. Semua pegawai telah memiliki PK yang selanjutnya sebagai dasar penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)</p>
			<p>c. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai pedoman dari Inspektorat dalam melakukan evaluasi internal</p>	<p>c. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah memiliki pedoman evaluasi Internal sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021</p>
			<p>d. Telah dilakukan fasilitasi dalam penyusunan LKjIP Perangkat Daerah</p>	<p>d. Penyusunan pelaporan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan sistematika yang ada (SKP)</p>

NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<p>Telah dilakukan Penyusunan dokumen perencanaan secara komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan. Tingkat keterukuran dokumen perencanaan diketahui melalui capaian kinerja pada indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Aspek inovasi menjadi bagian dalam dokumen RKPD sebagai salah satu upaya menyelesaikan permasalahan pembangunan.</p> <p>Sosialisasi terkait regulasi yang mengatur inovasi disampaikan dalam setiap forum atau kegiatan perencanaan baik dari tingkat musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten, maupun forum perangkat daerah. Hal ini untuk menstimulasi munculnya inovasi baik di Perangkat Daerah maupun masyarakat.</p> <p>1. Terselenggaranya Lomba KRENOVA dengan bagi perangkat daerah dan masyarakat umum serta pelajar di tingkat Kabupaten Temanggung dan mengikuti lomba Krenova di tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan menarik minat masyarakat dalam melakukan inovasi.</p>	<p>Terintegrasinya inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. <b>Kabupaten Temanggung meraih Juara I Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, sehingga mendapatkan bantuan keuangan pusat dan provinsi untuk mendukung perencanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.</b></p> <p>Meningkatkan tingkat berinovasi bagi masyarakat Temanggung. <b>Kabupaten Temanggung juga telah meraih Penghargaan <i>Innovative Government Award (IGA)</i> sebagai Kabupaten Terinovatif di Indonesia.</b></p>

NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<p>2. Susi Award bagi Perangkat Daerah terinovatif. Melaporkan berbagai inovasi yang ada di Kabupaten Temanggung baik dari perangkat daerah dan masyarakat melalui Indeks Inovasi Daerah di Kementerian Dalam Negeri dan Pemetaan</p>	<p>Meningkatkan tingkat berinovasi bagi masyarakat Temanggung.</p>
			<p>Telah dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan kementerian terkait untuk melaksanakan kegiatan penanganan lahan kritis melalui pemulihan</p>	<p>Penurunan kualitas lahan</p>
			<p>Upaya untuk meningkatkan kinerja PTSP antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan Bintek Pelayanan Prima kepada semua karyawan/ karyawan DPMPPTSP pada tanggal 8 November 2023;</li> <li>b. DPMPPTS mengajukan pengusulan SDM pada jabatan fungsional untuk mengisi jabatan-jabatan pelaksana perizinan pada Jabatan Fungsional Penanaman Modal;</li> <li>c. Koordinasi telah dilakukan dengan mengirim surat untuk permohonan Personil untuk pemenuhan pegawai di MPP</li> <li>d. Telah diterbitkannya Perda nomor 5 Tahun 2022 tentang perizinan Berusaha;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam pelayanan telah dilaksanakan Bintek pelayanan Prima;</li> <li>b. Pengusulan pegawai jabatan Fungsional untuk mengisi kekosongan pegawai;</li> <li>c. Koordinasi dengan Sekda telah dilakukan untuk permohonan pegawai di MPP yang akan di tindak lanjuti dengan Surat Perjanjian bersama OPD terkait;</li> <li>d. Koordinasi antar OPD telah dilaksanakan dengan diterbitkannya Perda nomor 5 Tahun 2022 tentang perizinan Berusaha</li> <li>e. Koordinasi dengan Provinsi telah dilaksanakan dengan Melakukan</li> </ul>



NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<p>e. Melakukan koordinasi dan konsultasi Juknis ATR/BPN terkait KKPR Pusdataru Provinsi Jawa Tengah</p> <p>1. Telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemkab Temanggung</p> <p>2. Telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 053 Tahun 2015 tentang Petunjuk pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (JUKLAK SPIP) di Lingkungan Pemkab Temanggung;</p> <p>3. Telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan</p> <p>4. Telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Temanggung</p> <p>5. Telah dilaksanakan pendampingan atas pelaksanaan SPIP oleh APIP dan BPKP Perwakilan Provinsi Jateng</p> <p>6. Telah dilaksanakan sosialisasi/workshop tentang penyusunan risiko strategis dan operasional Perangkat Daerah, risiko strategis Pemda</p>	<p>koordinasi dan konsultasi Juknis ATR/BPN terkait KKPR Pusdataru Provinsi Jawa Tengah' Untuk Peningkatan Kompetensi</p> <p>Peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan peluang mendapatkan reward dari pemerintah pusat dalam bentuk Insentif fiskal.</p>

NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<p>7. Melaksanakan pendampingan penyusunan RTP kepada 20 Kecamatan</p> <p>8. Telah melaksanakan sosialisasi kepada legislatif, eksekutif (seluruh kepala Perangkat Daerah dan Eselon III), kepada masyarakat (perwakilan ormas, organisasi wanita, perwakilan UMKM, perwakilan pengusaha, perwakilan media massa, dll)</p>	
			<p>a. Terjadi penurunan potensi kematian bayi yang diindikasikan dengan persentase persalinan di fasilitas kesehatan dan dengan tenaga kesehatan mencapai 100 persen</p> <p>b. peningkatan HLS dan RLS terwujud melalui peningkatan partisipasi sekolah pada seluruh jenjang pendidikan yaitu mencapai 99.34 persen untuk usia 7 - 12 tahun, 97.74 untuk jenjang 13 - 15 tahun, dan 74.73 untuk jenjang 16 - 18 tahun</p> <p>c. Peningkatan daya beli penduduk Kabupaten Temanggung ditandai dengan peningkatan pengeluaran konsumsi yaitu mencapai Rp 1.101.156,00, dan cenderung meningkat di seluruh kelompok masyarakat baik kelompok bawah, menengah maupun kelompok atas</p>	<p>a. Usia harapan hidup mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 0,06 poin</p> <p>b. Angka harapan lama sekolah dan Rata rata lama sekolah meningkat pada tahun 2023 yaitu mencapai HLS mencapai 12.61 tahun dan RLS mencapai 7.5 tahun</p> <p>c. Pengeluaran per Kapita per mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi Rp 10,108.000 per kapita per tahun</p>

NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			Langkah yang dilakukan dalam pengendalian inflasi antara lain: a. pemantauan harga per hari kerja di 6 pasar daerah;	a. Mengetahui komoditas yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi Daerah, sehingga bisa dilakukan upaya intervensinya
			b. Telah dilakukan Pemantauan distribusi bahan pokok dan penting melalui sistem Informasi Perdagangan (SISP) dan koordinasi dengan stake holder	b. Mengetahui proses distribusi perdagangan bahan pokok dari distributor besar sampai ke pedagang. Mengurangi resiko penimbunan bahan pokok dan penting
			c. Telah dilakukan Bantuan Pekarangan Pangan Lestari kepada Gapoktan/kelompok tani/ kelompok wanita tani yang mendapatkan bantuan masing-masing 50 juta, untuk kegiatan pembangunan screen house menanam sayuran; cabai, tomat, sawi, seledri, kangkung dan lain-lain. Hasil dari kegiatan ini selain untuk mencukupi kebutuhan keluarga juga untuk dijual pada para pedagang. Sayuran ditanam di polybag ditempatkan di pekarangan, dan juga di screen house sederhana yang dibangun	c. Pemanfaatan pekarangan yang sehat dan produktif dalam penyediaan ketersediaan pangan, meningkatkan kesadaran peran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<p>d. Telah dilakukan operasi pasar melalui Gerakan Pangan Murah (GPM):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerakan Pangan Murah di Kecamatan Ngadirejo tanggal 6 April 2023 Total komoditas: Beras : 2000 kg; Minyak Goreng : 360 liter; Gula Pasir : 120 kg</li> <li>• Gerakan Pangan Murah di Pendopo Pengayoman Tanggal 13 April 2023 Total komoditas: Beras : 2500 kg; Minyak Goreng : 360 liter; Gula Pasir : 240 kg</li> <li>• Gerakan Pangan Murah dilaksanakan oleh DKPPP Temanggung tanggal 26 Juni 2023 Total komoditas: Beras : 2000 kg; Minyak Goreng : 360 liter; Gula Pasir : 120 kg</li> <li>• Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan oleh DKPPP Temanggung Tanggal 16-17 Oktober 2023 Total komoditas: Beras : 4500 kg; Minyak Goreng : 600 liter; Gula Pasir : 360 kg</li> <li>• Gerakan Pangan Murah Kawasan Pabrik yakni di 24 Pabrik di Kabupaten Temanggung Total Komoditas: Beras : 43.550 kg; Minyak Goreng : 3.518 liter; Gula Pasir Pasir : 3.466 kg</li> </ul>	<p>d. Merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan, dengan harga terjangkau dengan tujuan stabilitas pasokan dan harga</p>

NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerakan Pangan Murah Kecamatan dilaksanakan di 20 Kecamatan Kab. Temanggung 40 Lokasi Pelaksanaan Total Komoditas : Beras : 79.901 kg; Minyak Goreng : 16.702 liter; Gula Pasir Pasir : 15.257 kg</li> </ul>	
			<p>e. Telah dilakukan Operasi Mendadak di Pasar Daerah oleh PD dan Forkompinda yang dilaksanakan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4 Juni 2023</li> <li>17 Oktober 2023</li> </ul>	<p>e. Mengetahui harga bapokting dan stok nya di Pasar Daerah. Untuk mengetahui perkembangan harga dan penyebabnya serta tidak terjadi penimbunan barang pokok dan penting</p>
			<p>f. Mengikuti Rapat Koordinasi TPID yg diselenggarakan Kemendagri, Pemerintah Provinsi Jateng maupun TPID kabupaten</p>	<p>f. Untuk mengetahui isu-isu strategis dan arahan dari TPID pusat kepada Daerah dalam rangka pengendalian inflasi di Daerah</p>
			<p>telah digunakan DKD sebagai databse program penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten dan desa /kelurahan antara lain SANKA, bansos UEP KUBE,</p>	<p>Data Kemiskinan Daerah (DKD) digunakan sebagai data base dalam penentuan sasaran Program dan Kegiatan Penanganan Kemiskinan Daerah</p>

NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<p>Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Daerah (DKD) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditetapkan 2 (dua) kali dengan Keputusan Kepala Daerah.</p> <p>DKD telah digunakan sebagai database program penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten dan desa /kelurahan antara lain SANKA, bansos UEP KUBE,</p> <p>Langkah konkrit yang sudah dilakukan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Jemangaung dalam penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu dengan melaksanakan berbagai jenis pelatihan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan berbasis kompetensi dengan 18 jurusan pelatihan dan total peserta 288 Siswa;</li> <li>2. Pelatihan kewirausahaan dengan 5 jurusan Relatihan dan total peserta 140 orang;</li> <li>3. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM bagi IKM tembakau dengan 6 macam jurusan pelatihan dan total IKM yang dilatih 440 IKM.</li> </ol>	<p>Tersedianya data yang valid sebagai data base penerima program bansos pemerintah daerah/desa</p> <p>Data Kemiskinan Daerah (DKD) digunakan sebagai data base dalam penentuan sasaran Program dan Kegiatan Penanganan Kemiskinan Daerah</p> <p>Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan dari 2.54 persen pada tahun 2022 menjadi 2.32 persen pada tahun 2023</p>

NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
5.	<p>Hasil Pembangunan Infrastruktur Tahun 2022 masih kurang baik hal ini disebabkan karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjadinya pengalihan pelaksanaan kegiatan oleh pemenang tender kepada pihak lain atau praktek sub kontrak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>2. Konsultan Pengawas tidak memenuhi standar kualifikasi sesuai kontrak.</li> <li>3. Konsultan Pengawas mengerjakan terlalu banyak pekerjaan sehingga menyebabkan SDM yang ditugaskan tidak memenuhi standar.</li> </ol>	<p>Pemerintah Daerah harus berupaya meningkatkan kualitas hasil pembangunan infrastruktur daerah dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperketat sistem yang memungkinkan bisa meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam proses penyediaan barang dan jasa</li> </ol>	<p>Upaya untuk meningkatkan kualitas hasil pembangunan infrastruktur daerah antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala DPUPR telah memberikan arahan terkait dengan ketentuan dokumen-dokumen yang harus dipedomani oleh PPK;</li> <li>b. Kepala DPUPR melalui PPK telah rutin melaksanakan rapat mingguan guna evaluasi progres kegiatan setiap paket pekerjaan</li> </ol> <p><b>1. Bagian Pembangunan</b> sudah melaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rapat koordinasi evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi di Kabupaten pada tanggal 15 November 2023 dan dipimpin oleh Bapak Pj. Sekda Temanggung dengan narasumber Kepala DPUPR Kabupaten Temanggung</li> </ol>	<p>Meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa</p> <p>Adapun Pemerintah Daerah mempunyai tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan Kualitas Hasil Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Temanggung;</li> </ol>

NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<p>b. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kapasitas Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 3 Agustus 2023 dan dipimpin oleh Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Temanggung dengan narasumber Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang / Jasa (APBJ) Setda Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Melaksanakan pendampingan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor: 180/109 Tahun 2023 tanggal 17 April 2023 tentang Kegiatan Pembangunan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Yang Perlu Secara Khusus Dilakukan Pendampingan Hukum</p> <p><b>2. Bagian PBJ</b> telah melakukan:</p> <p>d. Desk dilaksanakan kepada Seluruh Perangkat daerah terhadap Dokumen Perencanaan dan Identifikasi Kebutuhan sebagai pendampingan awal;</p> <p>e. Reviu terhadap Dokumen Persiapan Pengadaan yang disampaikan PPK sebelum dilaksanakannya proses pemilihan penyedia Barang/Jasa,</p>	<p>b. Memperketat Sistem yang digunakan dalam Proses Penyediaan Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>c. Meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam proses penyediaan barang dan jasa.</p> <p>Memitigasi Resiko untuk proses dan pelaksanaan Pemilihan</p>



NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<p>selain itu dalam proses pemilihan;</p> <p>f. <b>Bagian PBJ</b> (Pokia Pemilihan) senantiasa berpegang teguh pada peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku.</p> <p>Untuk Monev Pelaksanaan Pekerjaan oleh <b>Bagian Pembangunan</b> telah dilakukan:</p> <p>a. Monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan terhadap paket pekerjaan konstruksi di DPUPR, Dinas Kesehatan dan Dindikpora;</p> <p>b. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan (RKPK) secara berkala dan rutin (triwulan)</p> <p>3. Telah dilaksanakan pendampingan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor: 180/109 Tahun 2023 tanggal 17 April 2023 tentang Kegiatan Pembangunan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Yang Perlu Secara Khusus Dilakukan Pendampingan Hukum</p>	<p>Meminimalisir penyimpangan atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa</p>
		2. Lebih selektif dalam menentukan	Kepala DPUPR melalui PPK telah berkoordinasi dengan bagian	Pemilihan konsultan pengawas sesuai dengan kompetensinya

NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Konsultan Pengawas dan membatasi jumlah pekerjaan agar lebih fokus dan baik	<p>Pengadaan Barang/Jasa Setda Temanggung untuk memilih konsultan pengawas sesuai dengan kompetensinya</p> <p>a. Pembahasan di Tim Banggar Kabupaten Temanggung terkait Anggaran Konsultan (Pengawas);</p> <p>b. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi kepada PPK yang mengampu infrastruktur pada Bulan September 2023 di Loka Bakti Praja</p>	<p>a. Lebih selektif dalam menentukan Konsultan Pengawas dan membatasi jumlah pekerjaan agar lebih fokus dan baik;</p> <p>b. Pemenuhan Standar SDM bagi Konsultan Pengawas agar Efektif dan Efisien untuk pekerjaan yang dilaksanakan</p>
		3. Memberikan pelatihan dan pembekalan bagi PPK dan PPTK terlebih bagi Perangkat Daerah yang tidak mengampu bidang infrastruktur.	<p>1. Sudah dilaksanakan koordinasi dan pembinaan kapasitas Peiabat Pembuat Komitmen pada tanggal 3 Agustus 2023 dan dipimpin oleh Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Temanggung dengan narasumber Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang / Jasa (APBJ) Setda Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>2. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan (RKPK) secara berkala dan rutin (triwulan);</p> <p>3. Melaksanakan Desk kepada Admin Simpelbangda terkait penginputan anggaran sesuai dengan sumber anggaran.</p>	<p>Menyiapkan SDM yang secara kompetensi sesuai dengan aturan yang berlaku dan berkualitas pekerjaannya baik secara basik ilmu yang sesuai</p> <p>Pelaksanaan Kegiatan dibidang infrastruktur dapat berjalan dengan efektif dan efisien</p> <p>Percepatan pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan perencanaan</p>

NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
		4. Kurang tegasnya PPK terhadap penyimpangan pelaksanaan pekerjaan.	Melaksanakan pembinaan dengan mengundang PPK pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan Biro Administrasi Pengadaan Barang / Jasa (APBJ) Setda Provinsi Jawa Tengah	Sumber daya manusia pengadaan yang memiliki cukup kompetensi untuk melaksanakan kegiatan di bidang infrastruktur
6.	Penurunan angka kemiskinan sebesar 0,84% masih rendah karena banyak dukungan program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat.	<b>Hendaknya tetap menjaga agar program dan kegiatan tetap inovatif dengan dukungan pendanaan yang juga cukup memadai. Sehingga diharapkan pada tahun berikutnya penurunan angka kemiskinan lebih progresif capaiannya <math>\geq</math> 1%, mampu mengejar target SDGs. Agar Pemerintah Daerah mensinergikan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka program penanganan kemiskinan.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dilakukan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;</li> <li>2. Sudah dilakukan optimalisasi DD dalam mendukung penanggulangan Kemiskinan baik untuk BLT DD maupun pemberdayaan manusia; BLT Dana Desa dialokasikan maksimal 25% dan minimal 10% dari Total Pagu Dana Desa setiap Desa dan Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000 untuk setiap KPM dan diberikan selama 12 Bulan</li> <li>3. Maksimalisasi peran multihelix, dengan lembaga non pemerintah seperti Forum TJSLP, BAZNAS, Forum BUMD, dll untuk turut serta dalam penanggulangan kemiskinan;</li> </ol>	<p>Penurunan angka kemiskinan.</p> <p>Penurunan angka kemiskinan.</p> <p>Penurunan angka kemiskinan.</p>

NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<p>4. Telah dialokasikan anggaran untuk mendukung strategi dan arah kebijakan;</p> <p>5. Telah dilakukan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui Bansos Usaha Ekonomi Produktif dan telah dilakukan penguatan Kelompok Usaha Bersama untuk mendorong kemandirian ekonomi</p> <p>6. Telah dilakukan pemutakhiran data untuk mengetahui kebutuhan masyarakat miskin.</p>	
			<p>Telah dilaksanakan Beberapa program/ kegiatan yang menggunakan DKD antara lain:</p> <p>a. UEP/KUBE</p> <p>b. Afirmasi penerimaan peserta didik baru</p> <p>c. Gratis biaya perkara (perceraian) jika masuk DKD Penanganan kemiskinan yang tepat sasaran dan kebutuhan</p>	<p>Penanganan kemiskinan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan</p>
			<p>Selalu berkolaborasi dari berbagai sumber pendanaan untuk peningkatan kualitas RTLH menjadi rumah layak huni dan peningkatan akses kepemilikan jamban keluarga.</p> <p>a. Peningkatan Kualitas RTLH melalui:</p>	<p>Pengurangan jumlah RTLH menjadi rumah layak huni</p> <p>Penyediaan rumah bagi Masyarakat yang belum memiliki rumah (Pembangunan baru rumah-RUSPIN)</p> <p>Pengurangan warga yang tinggal di Rusunawa dengan program</p>

NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBN dengan BPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)</li> <li>• APBD Provinsi (Bankeupemdes RTLH, RUSPIN)</li> <li>• APBD Kabupaten (musrenbang, POKIR dll)</li> <li>• Dana Desa</li> <li>• Baznas</li> </ul>	Pembangunan baru rumah RUSPIN (program APBD Provinsi).
			b. Pembangunan jamban keluarga APBN (Infrastruktur Berbasis Masyarakat/IBM)	Peningkatan akses kepemilikan jamban keluarga sehingga keluarga semakin sehat dan pencemaran lingkungan dapat dihilangkan karena limbah rumah tangga (air limbah domestik)
			Telah dilakukan intervensi kerawanan pangan melalui kegiatan bantuan pangan pokok dan pangan lainnya ke 25 desa (6.153 penerima), yaitu Kecamatan Bulu 181 penerima, Kec Candiroto 462 penerima, Kec Gemawang 237 penerima, Kec Kaloran 230 penerima, Kec Kandangan 1.044 Kec. Kedu 605 penerima, Kledung 237 penerima, Kec. Kranggan 214 penerima, Kec. Ngadirejo 564 penerima, Kec. Parakan 209 penerima, Kec. Temanggung 223 penerima, Kec. Tembarak 594 penerima, Kec. Tretop 1.007 penerima, Kec. Wonobojo 376 penerima	Intervensi kerawanan pangan

NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<p>Telah dilakukan Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Keluarga miskin Ekstrem di Desa dengan Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). BLT Dana Desa dialokasikan maksimal 25% dan minimal 10% dari Total Pagu Dana Desa setiap Desa dan Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000 untuk setiap KPM dan diberikan selama 12 Bulan. Sasaran KPM diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa dengan Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kehilangan mata Pencaharian;</li> <li>2. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;</li> <li>3. Tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan(PKH).</li> <li>4. Rumah Tangga dengan anggota Rumah Tanggal Tunggal lanjut usia</li> </ol>	<p>Meningkatkan Pendapatan Keluarga miskin Ekstrem di Desa dengan Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).</p>
			<p>Mengarahkan pemakaian pupuk sesuai jumlah/dosis dan jenis, agar biaya/cost produksi dpt ditekan shg petani lbh bisa untung dr selisih ongkos produksi dg nilai jual produk.</p>	<p>Peningkatan kesejahteraan petani melalui kemudahan memperoleh pupuk hingga kestabilan harga komoditas pangan</p>

NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<p>- Telah dilakukan peningkatan pendidikan pada penduduk kelompok miskin</p> <p>- Penurunan angka pengangguran dari 2,54 persen menjadi 2,33 persen di mendorong penurunan angka kemiskinan</p> <p>Telah dilakukan upaya dalam mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Temanggung meskipun dalam kriteria <i>low inequality</i> dan cenderung membaik</p> <p>Intervensi yang dilakukan tahun 2023 melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan kawasan cabai, bawang merah, bawang putih</li> <li>2. mengandeng petani Champion sebagai mitra dalam mendukung pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga. luas kegiatan champion tahun 2023 bawang merah 268 Ha, Bawang Putih 220 Ha dan Cabai 201 Ha</li> </ol>	<p>Angka kemiskinan pada tahun 2023 turun menjadi 9,26 persen dibanding tahun 2022 yang mencapai 9.33 persen</p> <p>Mengurangi ketimpangan pendapatan</p>
7.	Meskipun capaian indicator sasaran indek rasa aman tercapai namun Perangkat Daerah terkait khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merasa belum bisa Maksimal bahkan kinerjanya masuk dalam	<b>Pemerintah Daerah agar lebih memperhatikan sarana dan prasarana termasuk kebijakan penganggarnya.</b>	Telah diusulkan Perencanaan dan Anggaran Perangkat baik saat APBD Penetapan maupun APBD Perubahan namun msh ada yang belum mendapatkan anggaran, yang sudah mendapatkan anggaran yaitu BBM Operasional dan APD	Kendala sarpras Sebagian sdh terpenuhi yaitu BBM dan APD, namun untuk pos pemadam beserta sarprasnya belum terealisasi

NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
	<p>golongan upaya keras hal ini disebabkan kerana minimnya sarana dan prasarana pendukung diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BBM opsional kendaraan pemadam</li> <li>- Alat Pelindung Diri (APD)</li> <li>- Pos pemadam belum memenuhi standar pelayanan</li> </ul>			
8.	<p>Data Pokok Kependudukan tidak <i>up date</i> sehingga berpengaruh terhadap angka capaian indikator kinerja seperti pada angka rata-rata lama sekolah yang tidak tercapai karena basis datanya diambil dari data kependudukan yang tidak <i>up date</i>.</p>	<p><b>Pemerintah Daerah agar membuat Sistem Informasi Kependudukan yang terintegrasi antar Perangkat Daerah sehingga tidak akan terjadi lagi perbedaan antara data induk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan data parsial di Perangkat Daerah lain.</b></p>	<p>Langkah yang dilakukan dalam mengintegrasikan data kependudukan dan data pendidikan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi dengan Dinas pendidikan untuk menyediakan data BNBA peserta didik yang lulus SD, SMP dan SMA</li> <li>2. Melakukan perbaikan database pendidikan melalui Dapodik dengan mengacu data Kependudukan</li> <li>3. Updating data di Dapodik cut off Agustus setiap tahunnya</li> </ol>	<p>Update data pendidikan sebagai bahan kebijakan Meningkatkan angka rata-rata lama sekolah</p>
9.	<p>Pelanggaran Tata Ruang masih terus terjadi hal ini disebabkan karena lemahnya penegakkan Peraturan Daerah.</p>	<p><b>Pemerintah Daerah agar bertindak tegas terhadap pelanggaran ketentuan Tata Ruang dan segera menyelesaikan penyusunan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah yang baru</b></p>	<p>Upaya yang dilakukan untuk mengendalikan pelanggaran tata ruang antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengesahan Revisi Perda RTRW dan Penyusunan Perbup RDTR masih terus berproses hingga awal tahun 2024. Posisi Revisi Perda RTRW saat ini tengah menunggu</li> </ol>	<p>Masalah yang diselesaikan dalam temuan/permasalahan ini adalah sudah tidak relevannya Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 dengan kondisi daya dukung, daya tampung, kondisi aktual, dan peraturan perundang-undangan yang</p>



NO.	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p><b>Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</b></p>	<p>Persetujuan Substansi dari Kementerian ATR/BPN, sedangkan Perbup RDTR masih berada dalam tahap Asistensi dengan tim Kementerian ATR/BPN;</p> <p>b. Rapat Forum Penataan Ruang juga telah terlaksana untuk kegiatan pemanfaatan ruang dalam hal menentukan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dan non berusaha. Rapat terkait pembahasan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dan non berusaha dilaksanakan 1x setiap minggu.</p>	<p>baru yang menyebabkan banyaknya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai.</p>

## **BAB IV**

### **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

#### **4.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah**

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Temanggung melaksanakan program dan/atau kegiatan berupa tugas pembantuan pusat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Tugas pembantuan yang dilaksanakan dari pemerintah pusat adalah bidang pertanian. Adapun penjabaran tugas pembantuan tersebut sebagai berikut:

##### **4.1.1 Dasar Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
- 8) DIPA Nomor 018.08.4.039158/2023 revisi ke 1 tanggal 28 Desember 2022
- 9) DIPA Nomor 018.08.4.039158/2023 revisi ke 8 tanggal 2 November 2023.

#### **4.1.2 Gambaran Umum**

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 pada bidang pertanian yaitu :

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, meliputi Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian, Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida serta Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian
2. Program Dukungan Manajemen meliputi Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

#### **4.1.3 Target Kinerja**

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, terdiri dari:
  - a. Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian, untuk operasional bantuan alat mesin pertanian.
  - b. Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida, untuk :
    - 1) Kegiatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida ( KP3 )
    - 2) Kegiatan Fasilitasi e-RDKK untuk pendataan penerima pupuk, honor untuk petugas entry e-RDKK di tingkat kecamatan dan kabupaten.
    - 3) Kegiatan Fasilitasi Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima pupuk bersubsidi meliputi honor untuk petugas verifikasi dan verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat kecamatan dan kabupaten
  - c. Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian untuk fasilitasi kegiatan asuransi pertanian meliputi rapat koordinasi, perjalanan dalam rangka koordinasi/ pengumpulan data di tingkat kecamatan/ kabupaten dan perjalanan dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke propinsi
2. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian ditargetkan berupa dukungan manajemen satuan kerja yang meliputi operasional, honor petugas dan administrasi.

#### 4.1.4 Realisasi

Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen dengan total pagu anggaran sebesar Rp 152.593.000,- (*Seratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*) terealisasi sebesar Rp 151.250.000,- (*Seratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) atau sebesar 99.11% dan realisasi capaian program tercapai 100%. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian ( pagu anggaran Rp 15.000.000,- realisasi anggaran Rp 14.810.000,- atau 98,73% dan realisasi fisik 100%) meliputi Kegiatan monitoring pemanfaatan alsintan ke kelompok penerima dan fasilitasi untuk petugas Input BAST dan petugas pemeriksa alsintan.
2. Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida (Pagu anggaran Rp 65.370.000,- realisasi keuangan Rp 65.370.000 realisasi fisik 100%) meliputi kegiatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) berupa rapat koordinasi komisi pengawasan pupuk dan pestisida serta monitoring/pembinaan kinerja Kios Pupuk Lengkap (KPL), Fasilitasi e-RDKK untuk pendataan penerima pupuk bersubsidi dan fasilitasi layanan verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi di 20 kecamatan. Kegiatan input/entry data di aplikasi e-alokasi 2023 dilaksanakan oleh petugas entry. Verifikasi dan validasi pupuk bersubsidi dilaksanakan oleh petugas verifikasi dan validasi tingkat kecamatan, kemudian laporan hasil verifikasi dan validasi disampaikan ke dinas kabupaten setiap bulan.
3. Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian (Pagu anggaran Rp 16.048.000 realisasi keuangan Rp 15.758.000 atau 98,19% realisasi fisik 100%) untuk memfasilitasi pendampingan kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Sosialisasi kegiatan AUTP dilaksanakan di tingkat kabupaten dengan peserta petugas penyuluh pertanian lapangan dan perwakilan petani/gapoktan. Dengan sosialisasi ini diharapkan petugas dapat menyampaikan

informasi terkait AOTP kepada petani/kelompok tani/gapoktan sehingga petani/kelompok tani/gapoktan bisa ikut dalam program AOTP ini.

4. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Parasarana dan Sarana Pertanian (Pagu anggaran Rp 56.175.000,- realisasi keuangan Rp 55.312.000,- atau 98,46% realisasi fisik 100%). Kegiatan ini untuk pendampingan pelaksanaan kegiatan banpem pusat.

LAMPIRAN : MATRIKS CAPAIAN KINERJA PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN DAERAH

Tabel 4.1

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	Kementerian Pertanian / Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	96.418.000	95.938.000	99,11		100	APBN
1.1	Kementerian Pertanian / Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian	DIPA Nomor 018.08.4.039158/20 23 revisi ke 8 tanggal 2 November 2023	Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian  <b>Rincian Kegiatan :</b> 1. Belanja Bahan 2. Belanja Honor petugas 3. Belanja perjalanan dinas biasa 4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		15.000.000  1.500.000 3.600.000 1.500.000 8.400.000	14.810.000  1.310.000 3.600.000 1.500.000 8.400.000	98,73	Terlaksananya pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian di Kabupaten Temanggung	100	APBN
1.2	Kementerian Pertanian / Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian	DIPA Nomor 018.08.4.039158/20 23 revisi ke 8 tanggal 2 November 2023	Kegiatan Fasilitas Pupuk dan Pestisida <b>Output:</b> Terlaksananya Kegiatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida ( KP3 ), Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran pupuk bersubsidi dan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		65.370.000	65.370.000	100	Terlaksananya Kegiatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran pupuk bersubsidi dan Tersusunya RDKK pupuk bersubsidi	100	APBN

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
			<p>Tersusunnya RDKK pupuk bersubsidi tahun 2023</p> <p><b>Rincian Kegiatan:</b></p> <p>A. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida ( KP3 )</p> <p>1. Belanja bahan</p> <p>2. Belanja Jasa Profesi</p> <p>3. Belanja Perjalanan Dinas Biasa</p> <p>B. Penyusunan e RDKK untuk pendataan penerima pupuk subsidi</p> <p>1. Belanja Honor petugas</p> <p>C. Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi penerima pupuk bersubsidi</p> <p>1. Belanja Honor petugas</p>			<p>6.200.000</p> <p>1.000.000</p> <p>10.500.000</p> <p>4.000.000</p> <p>43.670.000</p>	<p>6.200.000</p> <p>1.000.000</p> <p>10.500.000</p> <p>4.000.000</p> <p>43.670.000</p>		tahun 2023 di 20 kecamatan		
1.3	Kementan / Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian	DIPA Nomor 018.08.4.039158/2023 revisi ke 8 tanggal 2 November 2023	<p>Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian</p> <p><b>Output:</b></p> <p>Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Asuransi Usaha Tani Padi ( AUTP )</p> <p><b>Rincian Kegiatan:</b></p> <p>1. Belanja Bahan</p> <p>2. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</p> <p>3. Belanja Perjalanan Dinas Biasa</p> <p>4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</p>	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		<p>16.048.000</p> <p>5.500.000</p> <p>498.000</p> <p>3.000.000</p> <p>7.050.000</p>	<p>15.758.000</p> <p>5.500.000</p> <p>498.000</p> <p>2.710.000</p> <p>7.050.000</p>	98,19	Terlaksananya kegiatan pendampingan Asuransi Usaha Tani Padi ( AUTP ) di 20 Kecamatan di Kabupaten Temanggung	100	APBN

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
2	Kementan / Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian	DIPA Nomor 018.08.4.039158/20 23 revisi ke 8 tanggal 2 November 2023	Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Parasarana dan Sarana Pertanian <i>Output:</i> Terlaksananya Kegiatan Dukungan Manajemen Kegiatan <i>Rincian Kegiatan:</i> 1. Belanja Bahan 2. Belanja Honor Output Kegiatan 3. Belanja Barang Persediaan Barang konsumsi 4. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		56.175.000	55.312.000	98,46	Terlaksananya dukungan manajemen dan teknis kegiatan prasarana dan sarana pertanian	100	APBN

Keterangan :

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan penugasan (TP)

Kolom (3) diisi Peraturan Menteri/lembaga pemerintah nonkementerian tentang Penugasan Urusan Pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan

Kolom (4) diisi nama program, kegiatan, output, dan rincian kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dan Juklak/Juknis

Kolom (5) diisi tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan

Kolom (6) diisi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan keputusan gubernur tentang penetapan perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan

Kolom (7) diisi alokasi anggaran tugas pembantuan sesuai DIPA

Kolom (8) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam rupiah

Kolom (9) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam persentase

Kolom (10) diisi realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk narasi berdasarkan output yang telah ditetapkan

Kolom (11) diisi realisasi capaian kegiatan dalam bentuk persentase berdasarkan output yang telah ditetapkan



## **4.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah**

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Temanggung melaksanakan program dan/atau kegiatan berupa tugas pembantuan provinsi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Tugas pembantuan yang dilaksanakan dari Pemerintah provinsi adalah Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana. Adapun penjabaran pelaksanaan tugas pembantuan tersebut sebagai berikut:

### **4.2.1 Dasar Hukum**

Berdasarkan perjanjian kerjasama antara Perwakilan BKKBN Propinsi Jawa Tengah dengan DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, Nomor 2/HK.03.01/J1/2023, dan Nomor : 059 /0165/2023, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana melalui swakelola tipe II di Kabupaten Temanggung

### **4.2.2 Gambaran Umum**

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 pada Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dalam rangka mendukung capaian Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana berupa kegiatan pembentukan sekolah lansia, kegiatan orientasi untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader pendamping dalam proses pendampingan keluarga berisiko stunting

### **4.2.3 Target Kinerja**

1. Program Pelaksanaan Sekolah Lansia Tingkat Kabupaten, meliputi kegiatan pembentukan sekolah lansia di kelompok BKL yang ditunjuk di 2 lokasi.
2. Program Pelatihan Tim Pendamping Keluarga Tingkat Kabupaten meliputi kegiatan orientasi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader pendamping dalam proses pendampingan keluarga berisiko stunting di lapangan.

#### 4.2.4 Realisasi

Program Pelaksanaan Sekolah Lansia Tingkat Kabupaten dengan kegiatan pembentukan sekolah lansia di kelompok BKL dan Program Pelatihan Tim Pendamping Keluarga Tingkat Kabupaten dengan kegiatan orientasi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader pendamping dalam proses pendampingan keluarga berisiko stunting di lapangan, dengan total pagu Rp 435.578.000,- (*empat ratus tigapuluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*) dan realisasi sebesar Rp.435.578.000,- (*empat ratus tigapuluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*) atau 100 % dengan capaian program 100%, rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pelaksanaan Sekolah Lansia Tingkat Kabupaten, pagu anggaran Rp 17.760.000 realisasi keuangan Rp 17.760.000 dengan realisasi fisik 100%, meliputi kegiatan pembentukan sekolah lansia di kelompok BKL lokasi di Kelurahan Butuh Kecamatan Temanggung dan Desa Traji Kecamatan Parakan. Sekolah lansia dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan di tiap lokasi dengan peserta 40 orang. Dipandu oleh fasilitator sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan
2. Program Pelatihan Tim Pendamping Keluarga Tingkat Kabupaten pagu anggaran Rp 417.818.000,- realisasi keuangan Rp\_417.818.000,- dengan realisasi fisik 100%, meliputi kegiatan orientasi untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader pendamping dalam proses pendampingan keluarga berisiko stunting di lapangan yang melibatkan 1.827 peserta (Calon Pengantin, Ibu Hamil, ibu Pasca Hamil, Anak usia 0-5 Tahun, Bidan, Kader PKK, Kader Poktan, Penyuluh KB Non PNS) dengan 37 pertemuan di 20 kecamatan.

LAMPIRAN : MATRIKS CAPAIAN KINERJA PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN DAERAH

Tabel 4.2  
 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan  
 Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/ KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1.	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah	Kontrak Swakelola Nomor 1029.23/SP.03/J4/2 023 Tanggal : 23 Februari 2023 Tentang Kegiatan Pelaksanaan Sekolah Lansia Tingkat Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023	Program: Pelaksanaan Sekolah Lansia Tingkat Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023  Kegiatan ; Pembentukan Sekolah Lansia di kelompok BKL yang ditunjuk.  Keluaran / Output : Peserta Kegiatan Pelaksanaan Sekolah Lansia sebanyak 40 orang Lansia anggota BKL sebagai siswa sekolah Lansia dan 3 orang yang bertindak sebagai Fasilitator. Rincian Kegiatan :	Kabupaten Temanggung	DPPPAPPKB Bidang Dalduk KS	Rp 17.760.000,-	Rp 17.760.000,-	100	Terlaksannya sekolah lansia di 2 kelurahan , yaitu kelurahan butuh dan Traji , 16 pertemuan tiap lokasi diikuti sebanyak 40 orang lansia anggota BKL, sebagai siswa dan 3 orang bertindak sebagai fasilitator	100 %	

No.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/ KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
			a. Sekolah lansia sebanyak 32 kali yang terbagi di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Temanggung dan Kecamatan Parakan. Kegiatan ini dihadiri 40 orang lansia sebagai siswa di sekolah lansia tersebut dan didampingi 3 orang sebagai fasilitator.								
2.	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah	Kontrak Swakelola Nomor Tanggal : Tentang Kegiatan Pelatihan Tim Pendamping Keluarga Tingkat Kabupaten Temanggung Tahun 2023	Program : Pelatihan Tim Pendamping Keluarga Tingkat Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Kegiatan : Orientasi yang dapat dimanfaatkan untuk	Kabupaten Temanggung	DPPPAPPKB Bidang Dalduk KS	Rp 417.818.000,-	Rp 417.818.000,-	100	Terlaksananya kegiatan orientasi dalam memenuhi kebutuhan peningkatan pengetahuan dan Ketrampilan		

No.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/ KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
			<p>memenuhi kebutuhan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Kader Pendamping dalam proses pendampingan keluarga berisiko Stunting di lapangan.</p> <p>Rincian Kegiatan : Pembentukan 200.000 Tim Kader Pendamping meliputi Bidan Desa, Kader IMP dan Kader PKK.</p>						dalam pendampingan keluarga berisiko stunting sebanyak 37 pertemuan dengan 1.827 peserta		
<b>Jumlah</b>						<b>435.578.000</b>	<b>435.578.000</b>	<b>100 %</b>			

### **4.3 Permasalahan dan Kendala**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah:

a. Bidang Pertanian

- Pemberitahuan penerimaan tugas pembantuan di bulan Juni 2023, sementara DIPA sudah ditetapkan diakhir tahun n-1. sehingga diperlukan sinkronisasi dengan kegiatan di lapangan.

b. Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

- Batas waktu pelaksanaan kegiatan terlalu singkat (< 1 bulan, dengan alokasi waktu kegiatan akhir triwulan II) dari pemberitahuan alokasi anggaran, dimana pelaksanaan kegiatan lapangan bersamaan dengan kegiatan lain seperti kegiatan DAK Non Fisik Tahun 2023, sehingga diperlukan sinkronisasi dengan kegiatan di lapangan.

### **4.4 Saran dan Tindak Lanjut**

a. Bidang Pertanian

- Pemberitahuan DIPA diawal tahun.

b. Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

- Kegiatan agar dialokasikan pada awal tahun, sehingga kegiatan dapat bersinergi dengan kegiatan sumber anggaran lain (seperti DAU dan DAK Non Fisik).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pj. Bupati Temanggung Tahun 2023 merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023.

Hasil-hasil pencapaian kinerja program merupakan realisasi dari seluruh pelaksanaan program pembangunan daerah pada tahun 2023 berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 dan APBD Tahun Anggaran 2023. Keberhasilan ini merupakan sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan dari seluruh komponen pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan di Temanggung. Di sisi lain, masih terdapat beberapa target kinerja program dan kegiatan yang belum berhasil dicapai, tentunya menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk bekerja lebih keras lagi. Keberhasilan maupun kekurangan yang ada merupakan bentuk evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Temanggung yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada Tahun 2023 diraih berkat kerja sama dan partisipasi semua komponen, yaitu Pemerintah Daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat dengan didukung oleh APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah. Pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Temanggung yang telah mendukung agenda pembangunan daerah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tertib dan lancar.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pj. Bupati Temanggung Tahun 2023, dengan harapan semoga capaian kinerja pembangunan daerah tahun 2023 ini memberikan manfaat yang luas bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Kabupaten Temanggung.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-Nya kepada kita semua untuk mewujudkan Temanggung yang sejahtera.